



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

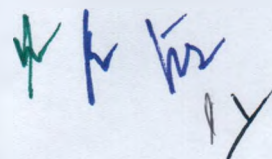
BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan dimasa transisi menuju pemilihan umum Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan daerah menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, perlu pengaturan tentang rencana pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026;

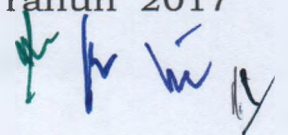
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Handwritten initials and signature in blue ink.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

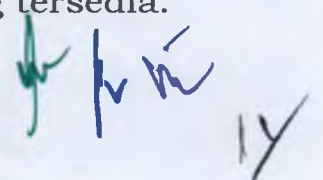
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.



6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
9. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 - 2026, yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
15. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka waktu panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan Masyarakat Kabupaten Katingan.
16. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

↓ k 1/

17. Sasaran adalah terget atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
21. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

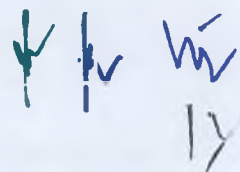
Pasal 2

- (1) RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
- (2) RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam RKPD;
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 3

RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- b. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2040;
- c. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005 - 2025;
- d. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 -2023;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
- f. Isu strategis dan kebijakan nasional; dan
- g. Peraturan perundang-undangan.



Pasal 4

- (1) Maksud RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah otonom Baru;
- (2) RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama empat tahun agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, Renstra PD dan Renja PD

Pasal 5

RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Pemerintah Daerah pada masa RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 berakhir.

Pasal 6

- (1) RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
 - e. BAB V Tujuan dan Sasaran
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - i. BAB IX Penutup
- (2) RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

[Handwritten signature and initials]

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappedalitbang melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perubahan RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Katingan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD tahun selanjutnya.

Pasal 10

Perubahan RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

[Handwritten signature]

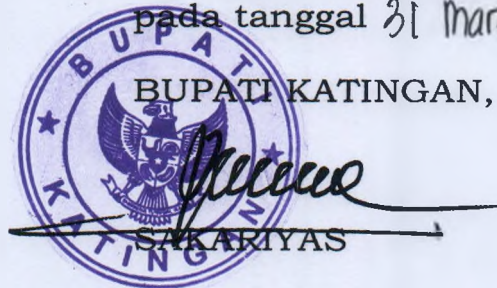
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023
NOMOR 73A



RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH

RPD

KABUPATEN KATINGAN

TAHUN 2024 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2023

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024-2026**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 LATAR BELAKANG	I.1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	I.3
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	I.6
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I.8
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	I.8
BAB II GAMBARAN UMUM	II.1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II.1
2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH.....	II.1
2.1.2 WILAYAH RAWAN BENCANA	II.9
2.1.3 DEMOGRAFI	II.15
2.1.4 POTENSI SUMBER DAYA	II.18
2.1.5 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG.....	II.18
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II.21
2.2.1 PERTUMBUHAN PDRB	II.21
2.2.2 LAJU INFLASI.....	II.25
2.2.3 PDRB PER KAPITA	II.26
2.2.4 INDEKS GINI	II.29
2.2.5 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	II.29
2.2.6 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	II.29
2.2.7 ANGKA MELEK HURUF (AMH)	II.30
2.2.8 ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS).....	II.31
2.2.9 ANGKA USIA HARAPAN HIDUP	II.31
2.2.10 PERSENTASE BALITA GIZI BURUK.....	II.32
2.2.11 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	II.32
2.2.12 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA.....	II.33
2.2.13 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA.....	II.34
2.2.14 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	II.35
2.2.15 PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN.....	II.37
2.2.16 PENCAPAIAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) ...	II.37
2.2.17 OPINI BPK	II.38
2.2.18 KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN TERHADAP PDRB.....	II.38
2.2.19 PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN .	II.40
2.2.20 KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN TERHADAP PDRB	II.41



2.2.21	KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR TERHADAP PDRB.....	II.41
2.2.22	KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PDRB.....	II.42
2.2.23	KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDRB	II.43
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM	II.44
2.3.1	LAYANAN URUSAN WAJIB	II.44
2.3.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN	II.89
2.3.3	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	II.95
2.3.4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	II.96
2.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH	II.101
2.4.1	PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA	II.102
2.4.2	PERSENTASE PENGELUARAN KONSUMSI PANGAN DAN NON PANGAN PER KAPITA.....	II.103
2.4.3	ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI.....	II.105
2.4.4	RASIO KETERGANTUNGAN.....	II.105
2.4.5	JUMLAH DESA TERTINGGAL.....	II.106
2.5	PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	II.123
2.5.1	CAPAIAN PENERAPAN SPM TAHUN 2019	II.123
2.5.2	CAPAIAN PENERAPAN SPM TAHUN 2020	II.133
2.5.3	CAPAIAN PENERAPAN SPM TAHUN 2021	II.143
2.5.4	CAPAIAN PENERAPAN SPM TAHUN 2022	II.154
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....		III.1
3.1	KINERJA KEUANGAN MASA LALU.....	III.2
3.1.1	KINERJA PELAKSANAAN APBD.....	III.2
3.1.2	NERACA DAERAH	III.8
3.2	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III.12
3.2.1	PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN	III.18
3.2.2	ANALISIS PEMBIAYAAN DAERAH	III.22
3.3	KERANGKA PENDANAAN.....	III.25
3.3.1	PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III.26
3.3.2	PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN.....	III.35
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH		IV.1
4.1	PERMASALAHAN	IV.1
4.1.1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	IV.2
4.1.2	ASPEK PELAYANAN UMUM.....	IV.3
4.1.3	ASPEK DAYA SAING DAERAH	IV.10
4.2	ISU STRATEGIS	IV.32
4.2.1	ISU INTERNASIONAL	IV.32
4.2.2	ISU ATAU KEBIJAKAN NASIONAL.....	IV.37
4.2.3	ISU ATAU KEBIJAKAN PROVINSI.....	IV.47



4.2.4	ISU ATAU KEBIJAKAN KABUPATEN KATINGAN.....	IV.50	
4.2.5	ISU STRATEGIS KABUPATEN KATINGAN	IV.55	
BAB V TUJUAN DAN SASARAN			V.1
5.1	VISI RPJPD	V.1	
5.2	MISI RPJPD	V.3	
5.3	TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJPD (RPJMD KE 4)	V.4	
5.4	TUJUAN DAN SASARAN RPD	V.6	
5.5	PENJABARAN (CASCADING) TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME	V.11	
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS			VI.1
6.1	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI.1	
6.2	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	VI.13	
6.3	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.....	VI.26	
6.3.1	PEMBANGUNAN WILAYAH PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN KOMODITI UNGGULAN	VI.30	
6.3.2	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PELABUHAN UNTUK Mendukung KEGIATAN PERTANIAN, INDUSTRI DAN PARIWISATA	VI.36	
6.3.3	PENGEMBANGAN EKOWISATA PADA KAWASAN PUNGQUALAS TAMAN NASIONAL SEBANGAU UNTUK KEGIATAN PARIWISATA BERBASIS ALAM.....	VI.39	
6.3.4	PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PUSAT PERFILMAN ASIA TENGGARA	VI.39	
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....			VII.1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			VIII.1
BAB IX PENUTUP			IX.1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan.....	II.2
Tabel 2.2	Ketinggian Wilayah Katingan per Kecamatan	II.4
Tabel 2.3	Nama-Nama Sungai dan Anak Sungai/Cabang di Kabupaten Katingan.....	II.5
Tabel 2.4	Potensi Banjir Setiap Kecamatan.....	II.10
Tabel 2.5	Kecamatan yang Terdampak Banjir	II.12
Tabel 2.6	Potensi Kebakaran Setiap Kecamatan.....	II.14
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.15
Tabel 2.8	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2022	II.16
Tabel 2.9	Perkembangan Jumlah Penduduk Katingan Menurut Kelompok Umur Tahun 2022	II.16
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Katingan Tahun 2021.....	II.17
Tabel 2.11	PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022.....	II.21
Tabel 2.12	PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022.....	II.22
Tabel 2.13	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022.....	II.23
Tabel 2.14	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022.....	II.24
Tabel 2.15	PDRB Per Kapita Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.26
Tabel 2.16	Indikator Kemiskinan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.28
Tabel 2.17	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.29
Tabel 2.18	Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2019-2022	II.30
Tabel 2.19	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.31
Tabel 2.20	Angka Harapan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.32
Tabel 2.21	Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.32



Tabel 2.22	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.33
Tabel 2.23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.33
Tabel 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.34
Tabel 2.25	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat pada Unit Pelayanan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.36
Tabel 2.26	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022	II.38
Tabel 2.27	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.39
Tabel 2.28	Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.40
Tabel 2.29	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.44
Tabel 2.30	Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.44
Tabel 2.31	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.45
Tabel 2.32	Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.45
Tabel 2.33	Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.46
Tabel 2.34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.47
Tabel 2.35	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.47
Tabel 2.36	Angka Kematian Balita di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.48
Tabel 2.37	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.48
Tabel 2.38	Rasio Posyandu per satuan Balita di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.49
Tabel 2.39	Rasio Puskesmas di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.49
Tabel 2.40	Rasio Rumah Sakit di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.50
Tabel 2.41	Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.50
Tabel 2.42	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2019-2022.....	II.51



Tabel 2.43	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.51
Tabel 2.44	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.52
Tabel 2.45	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.52
Tabel 2.46	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.53
Tabel 2.47	Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.54
Tabel 2.48	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.54
Tabel 2.49	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.55
Tabel 2.50	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.55
Tabel 2.51	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap dan Baik di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.56
Tabel 2.52	Panjang Jalan Yang Dapat Dilalui Roda Empat di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.56
Tabel 2.53	Persentase Irigasi di Kabupaten Katingan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2022	II.57
Tabel 2.54	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.57
Tabel 2.55	Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.58
Tabel 2.56	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.58
Tabel 2.57	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.59
Tabel 2.58	Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Katingan Menurut Penerangan Utama Tahun 2019-2022	II.59
Tabel 2.59	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.60
Tabel 2.60	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.60
Tabel 2.61	Jumlah PPKS Yang Memperoleh Bantuan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.61



Tabel 2.62	Persentase PPKS Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022	II.62
Tabel 2.63	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	II.63
Tabel 2.64	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial yang Ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.64
Tabel 2.65	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.65
Tabel 2.66	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.65
Tabel 2.67	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.65
Tabel 2.68	Rasio KDRT Di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.66
Tabel 2.69	Capaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.66
Tabel 2.70	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2019-2022.....	II.67
Tabel 2.71	Ketersediaan Pangan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.67
Tabel 2.72	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.68
Tabel 2.73	Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.69
Tabel 2.74	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.69
Tabel 2.75	Analisis Tutupan Lahan di Kabupaten Katingan	II.70
Tabel 2.76	Kondisi Tutupan Lahan di Kawasan Lindung Setiap Kecamatan di Kabupaten Katingan	II.71
Tabel 2.77	Hasil Analisis Overlay Tutupan Lahan dan Pola Ruang.....	II.72
Tabel 2.78	Rasio Penduduk ber KTP Satuan Penduduk di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.73
Tabel 2.79	Persentase Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.73
Tabel 2.80	Persentase Ketersediaan Database Kependudukan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.74
Tabel 2.81	Jumlah Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.74
Tabel 2.82	Persentase PKK Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.74



Tabel 2.83	Angka Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.75
Tabel 2.84	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.75
Tabel 2.85	Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.76
Tabel 2.86	Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.76
Tabel 2.87	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need) di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.76
Tabel 2.88	Rasio Jumlah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.77
Tabel 2.89	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.77
Tabel 2.90	Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.78
Tabel 2.91	Jenis dan Jumlah Terminal di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.78
Tabel 2.92	Pengujian Kelayakan Angkutan Jalan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.78
Tabel 2.93	Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.79
Tabel 2.94	Izin Trayek di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.79
Tabel 2.95	Dermaga sungai yang tersedia di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.80
Tabel 2.96	Cakupan Layanan Komunikasi di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.80
Tabel 2.97	Persentase Penduduk Mengakses Layanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.81
Tabel 2.98	Data Desa Blank Spot di Kabupaten Katingan Per 30 Maret 2023.....	II.81
Tabel 2.99	Data Desa Yang Belum Terjangkau dan Lemah Sinyal Internet di Kabupaten Katingan Per 30 Maret 2023.....	II.81
Tabel 2.100	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.83
Tabel 2.101	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.84



Tabel 2.102	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.84
Tabel 2.103	Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.85
Tabel 2.104	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.85
Tabel 2.105	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.87
Tabel 2.106	Buku Kabupaten Dalam Angka di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.87
Tabel 2.107	Buku PDRB Kabupaten di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.87
Tabel 2.108	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.88
Tabel 2.109	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.88
Tabel 2.110	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.88
Tabel 2.111	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.89
Tabel 2.112	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.89
Tabel 2.113	Produksi Perikanan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.90
Tabel 2.114	Konsumsi Ikan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.90
Tabel 2.115	Jumlah Wisatawan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.91
Tabel 2.116	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.92
Tabel 2.117	Pasar Tradisonal di Kabupaten Katingan.....	II.93
Tabel 2.118	Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.94
Tabel 2.119	Jumlah Transmigran di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.95
Tabel 2.120	Nilai SAKIP Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022 ...	II.95
Tabel 2.121	Nilai LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022 ...	II.96
Tabel 2.122	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.97



Tabel 2.123	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.97
Tabel 2.124	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.98
Tabel 2.125	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.99
Tabel 2.126	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.99
Tabel 2.127	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.100
Tabel 2.128	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.100
Tabel 2.129	Status Pemantauan Tindak Lanjut Per Tanggal 31 Desember 2022 Atas Total LHP Tahun 2006-2022	II.101
Tabel 2.130	Persentase Tindak Lanjut BPK Kabupaten Katingan dalam 4 Tahun terakhir dari 2019-2022	II.101
Tabel 2.131	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Katingan, 2019-2022.....	II.103
Tabel 2.133	Banyaknya Desa Tertinggal di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.107
Tabel 2.134	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.....	II.108
Tabel 2.135	Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019.....	II.123
Tabel 2.136	Tenaga Penunjang Pendidikan Tahun 2019.....	II.124
Tabel 2.137	Indikator dan Persentase	II.124
Tabel 2.138	Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2019.....	II.126
Tabel 2.139	Tabel Tenaga Kesehatan Tahun 2019	II.127
Tabel 2.140	Permasalahan dan solusi.....	II.128
Tabel 2.141	Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2019	II.129
Tabel 2.142	Target Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum	II.130
Tabel 2.143	Target Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.....	II.131
Tabel 2.144	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2019.....	II.132
Tabel 2.145	Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020.....	II.133



Tabel 2.146	Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2020.....	II.135
Tabel 2.147	Permasalahan dan solusi.....	II.136
Tabel 2.148	Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2020	II.137
Tabel 2.149	Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Katingan Tahun 2020	II.138
Tabel 2.150	Realisasi Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.....	II.139
Tabel 2.151	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2020.....	II.141
Tabel 2.152	Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021.....	II.143
Tabel 2.153	Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2021.....	II.145
Tabel 2.154	Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Kesehatan	II.146
Tabel 2.155	Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2021	II.147
Tabel 2.156	Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Katingan Tahun 2021	II.148
Tabel 2.157	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan.....	II.149
Tabel 2.158	Realisasi Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.....	II.151
Tabel 2.159	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2021.....	II.153
Tabel 2.160	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2022.....	II.154
Tabel 2.161	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2022	II.156
Tabel 2.162	Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022.....	II.158
Tabel 2.163	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022	II.162
Tabel 2.164	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022	II.163
Tabel 2.165	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2022.....	II.164
Tabel 2.166	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana Tahun 2022	II.165



Tabel 2.167	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2022.....	II.170
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Katingan Tahun 2017-2022.....	III.3
Tabel 3.2	Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020-2021.....	III.7
Tabel 3.3	Neraca Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020-2021.....	III.8
Tabel 3.4	Kewajiban Kabupaten Katingan Tahun 2020-2021.....	III.8
Tabel 3.5	Neraca Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021.....	III.9
Tabel 3.6	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021.....	III.11
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021.....	III.19
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2018-2021.....	III.20
Tabel 3.9	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021	III.21
Tabel 3.10	Defisit Riil Anggaran Periode Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021.....	III.23
Tabel 3.11	SiLPA Riil Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021.....	III.24
Tabel 3.12	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021.....	III.24
Tabel 3.13	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021	III.25
Tabel 3.14	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021-2022.....	III.27
Tabel 3.15	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.....	III.30
Tabel 3.16	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.....	III.34
Tabel 3.17	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.....	III.35
Tabel 3.18	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.....	III.36
Tabel 3.19	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.....	III.38
Tabel 3.20	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.....	III.40
Tabel 4.1	Identifikasi Permasalahan dalam Pencapaian Tujuan RPJPD Kabupaten Katingan Periode RPJMD ke-4	IV.11
Tabel 4.2	Pemetaan Permasalahan Sumber Daya Manusia.....	IV.17
Tabel 4.3	Pemetaan Permasalahan Kemiskinan	IV.19



Tabel 4.4	Pemetaan Permasalahan Pengelolaan Sektor Potensial untuk Mendorong Perekonomian Daerah	IV.24
Tabel 4.5	Pemetaan Permasalahan Infrastruktur	IV.28
Tabel 4.6	Pemetaan Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan ...	IV.32
Tabel 4.7	Proyek Prioritas Nasional Berlokasi di Katingan, Kalimantan Tengah	IV.39
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.....	V.6
Tabel 5.2	Rangkuman Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target RPD Kabupaten Katingan 2024-2026	V.8
Tabel 5.3	Hubungan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.....	V.10
Tabel 5.4	Penjabaran Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.....	V.12
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Katingan 2024-2026.....	VI.9
Tabel 6.2	Program Prioritas Daerah yang Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan 2020	VI.13
Tabel 6.3	Program Prioritas Daerah yang Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Katingan Tahun 2021-2022.....	VI.18
Tabel 6.4	Program Prioritas Daerah Kabupaten Katingan 2024-2026.....	VI.25
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 dan 2026	VII.1
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2024-2026.....	VII.3
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.....	VIII.2
Tabel 8.2	Realisasi Kinerja Makro Tahun 2021-2022 dan Target Kinerja Makro Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.....	VIII.5
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026	VIII.6



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kabupaten Katingan.....	II.4
Gambar 2.2	Persentase Perkiraan Dampak dan Resiko Banjir....	II.11
Gambar 2.3	Peta Potensi Banjir.....	II.11
Gambar 2.4	Peta Perkiraan Dampak dan Resiko Lahan Kebakaran	II.13
Gambar 2.5	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan dan Tekanannya (Ha).....	II.20
Gambar 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022	II.25
Gambar 2.7	Inflasi di Kota Palangkaraya, Kota Sampit dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2022	II.26
Gambar 2.8	Indeks Gini Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022	II.27
Gambar 2.9	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022	II.29
Gambar 2.10	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022.....	II.30
Gambar 2.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022.....	II.35
Gambar 2.12	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022	II.37
Gambar 2.13	Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022	II.38
Gambar 2.14	Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022	II.41
Gambar 2.15	Peranan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022	II.42
Gambar 2.16	Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022	II.43
Gambar 2.17	Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Katingan Tahun 2022	II.64
Gambar 2.18	Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Sebulan Menurut Jenis Konsumsi di Kabupaten Katingan, 2019-2022	II.102



Gambar 2.19	Persentase Rata-rata Pengeluaran Untuk Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Makanan di Kab. Katingan Tahun 2022	II.104
Gambar 2.20	Persentase Rata-rata Pengeluaran Untuk Bukan Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Non Makanan di Kabupaten Katingan Tahun 2022	II.104
Gambar 2.21	Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022	II.105
Gambar 2.22	Rasio Ketergantungan Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022	II.106
Gambar 5.1	Dukungan Tujuan dan Sasaran RPD terhadap Visi RPJPD Kabupaten Katingan	V.11
Gambar 6.1	Fokus/Tema Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Katingan	VI.13
Gambar 6.2	Peta Kelas Kesesuaian Lahan Padi Ladang Kabupaten Katingan	VI.31
Gambar 6.3	Peta Kelas Kesesuaian Lahan Sawah Irigasi Kabupaten Katingan	VI.32
Gambar 6.4	Peta Kelas Kesesuaian Lahan Durian Kabupaten Katingan	VI.33
Gambar 6.5	Peta Kelas Kesesuaian Lahan Pisang Kabupaten Katingan	VI.34
Gambar 6.6	Peta Kelas Kesesuaian Lahan Cabai Kabupaten Katingan	VI.35
Gambar 6.7	Rencana Pencadangan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Laut.....	VI.37
Gambar 6.8	Peta Lokasi Rencana Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah	VI.40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada Diktum Kesatu Huruf c dan Diktum Kedua Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menyatakan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Lebih lanjut pada Diktum Delapan dinyatakan bahwa bagi kabupaten/kota yang masa jabatan bupati/walikota berakhir pada Tahun 2023, penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Renja PD Kabupaten/Kota Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

Terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan dalam perumusan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu isu internasional, isu atau kebijakan nasional, isu atau kebijakan provinsi dan isu atau kebijakan Kabupaten Katingan.

Isu internasional merupakan isu yang perlu diperhatikan dalam perumusan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, salah satunya adanya Pandemi COVID-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia dan dari sisi sosial diperkirakan angka kemiskinan di setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran.

Selanjut yang diperhatikan dalam perumusan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah isu atau kebijakan nasional. Pada isu atau kebijakan nasional dilakukan telaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Undang-Undang mengenai Desa dan Pemerintahan Daerah, Penerapan



Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kemudian isu atau kebijakan provinsi merupakan salah satu isu yang diperhatikan dalam perumusan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sinergi pembangunan anatar provinsi dan kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Pada kesempatan ini dilakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan kebijakan mengenai *Heart of Borneo* yang merupan inisiatif tiga negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi di Borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Yang terakhir isu yang diperhatikan dalam perumusan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah isu atau kebijakan Kabupaten Katingan yang memperhatikan telaahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) harus dilakukan dalam tahap penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 dilakukan dengan memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Katingan sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023;
4. RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 didasarkan



pada visi misi RPJPD Kabupaten Katingan, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Katingan Tahap Keempat dan isu strategis aktual.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);



24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76).
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJM Nasional, RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025, serta RTRW Kabupaten Katingan 2019-2035. Selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD tahunan. Hubungan antar dokumen dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

A. RPJM Nasional

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Hal ini



dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Katingan.

B. RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 merupakan bagian tahap kelima dari perencanaan pembangunan Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada arah pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD.

C. RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 berpedoman pada RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 melalui penyelarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan indikasi program.

D. RKPD

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026. Target dan pagu indikatif program yang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

E. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026



Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Menjaga kesinambungan pembangunan menjelang Pilkada Serentak tahun 2024;
2. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan pada periode tahun 2024-2026;
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Katingan selama periode tahun 2024-2026;

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Katingan sebagai dokumen perencanaan periode tahun 2023-2026 lingkup Perangkat Daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
3. Mewujudkan implementasi kebijakan daerah dan nasional di berbagai bidang pembangunan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 disusun dalam 9 (sembilan) bab, sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN



Bagian ini menguraikan posisi dan peran Kabupaten Katingan serta gambaran umum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II - GAMBARAN UMUM

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III - GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Neraca Daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2024-2026.

BAB IV - PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2024-2026.

BAB V - TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan tujuan dan sasaran yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025.

BAB VI - STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan, sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Selain itu,



rumusan arah kebijakan dibuat pertahun sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tiap tahunnya.

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Kerangka pendanaan sendiri menjelaskan tentang indikasi pendanaan pembangunan yang digunakan dalam penyediaan pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur publik. Selanjutnya program perangkat daerah berisi muatan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan selama periode 2024-2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, baik yang bersifat program prioritas, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

BAB VIII - KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

BAB IX - PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Katingan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki ibu kota di Kasongan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan menyatakan luas wilayah Kabupaten Katingan adalah 17.500 km². Dalam perkembangan setelah dilakukan kesepakatan tata batas dengan daerah sekitarnya, luas administrasi Kabupaten Katingan mengalami perubahan menjadi 20.410,90 km².

Adapun dasar hukum penetapan batas wilayah administrasi Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan penataan administrasi wilayah tersebut, Kabupaten Katingan berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat



- b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur serta Kabupaten Seruyan
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa

Adapun rincian luas per kecamatan dan jumlah desa sebagai berikut:

Tabel 2.1 Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)	Kelurahan	Desa
1	Katingan Kuala	1.484,81	7,27	2	14
2	Mendawai	2.391,58	11,72	0	7
3	Kamipang	2.854,27	13,98	0	9
4	Tasik Payawan	808,12	3,96	0	8
5	Katingan Hilir	665,22	3,26	2	6
6	Tewang Sangalang Garing	903,39	4,43	1	9
7	Pulau Malan	647,48	3,17	0	14
8	Katingan Tengah	1.635,65	8,01	1	15
9	Sanaman Mantikei	2.772,38	13,58	0	14
10	Petak Malai	1.661,65	8,14	0	7
11	Marikit	2.117,36	10,37	0	18
12	Katingan Hulu	1.461,27	7,16	1	22
13	Bukit Raya	1.007,72	4,94	0	11
Katingan		20.410,90	100	7	154

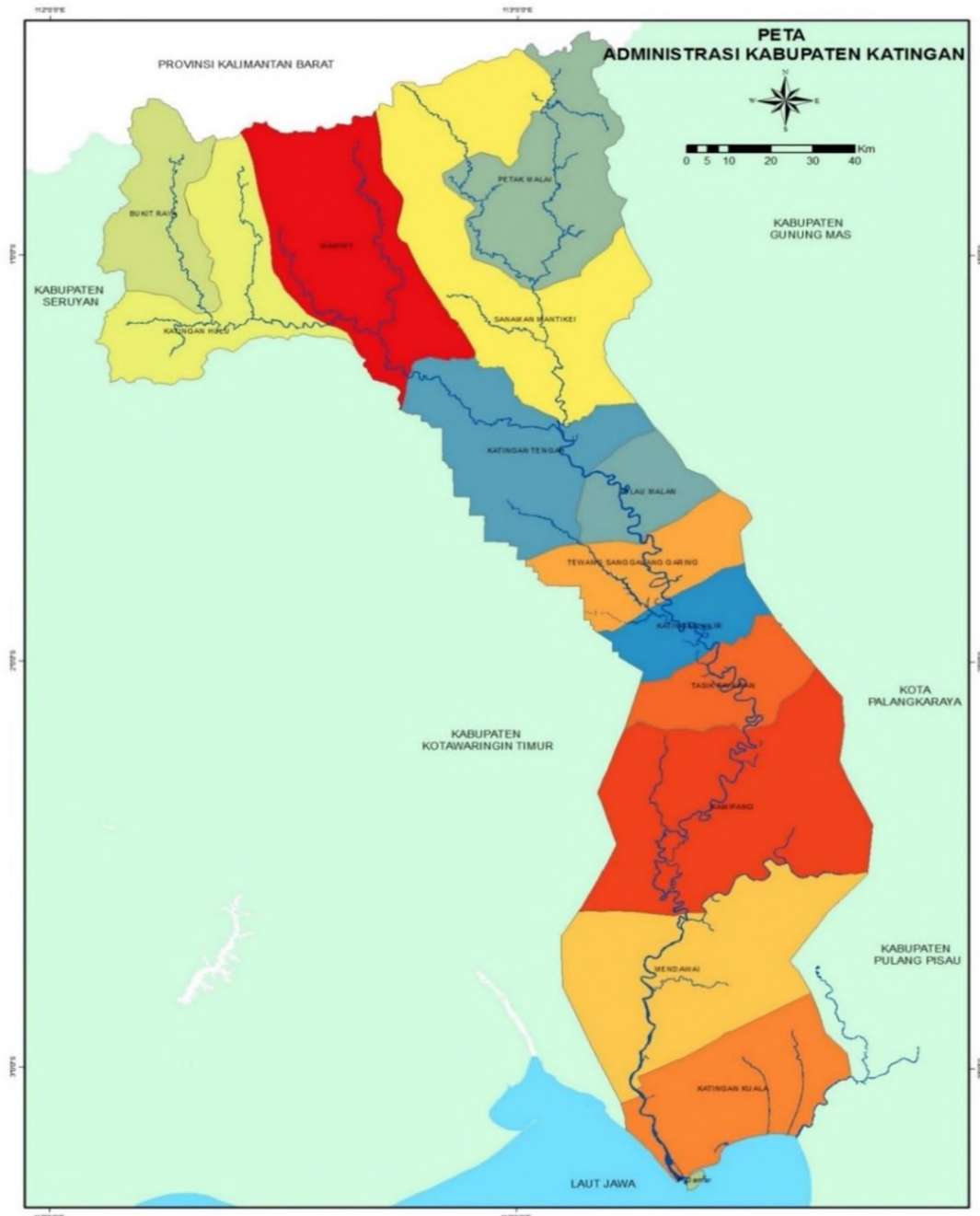
Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka, 2022

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara Geografis Kabupaten Katingan terletak antara 0°20" - 3°38" Lintang Selatan dan 112°00" - 113°45" Bujur Timur. Gambar Peta Kabupaten Katingan disajikan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Peta Kabupaten Katingan



Sumber : Peta Administrasi Kabupaten Katingan, 2018

Wilayah Kabupaten Katingan memiliki potensi strategis dalam konstelasi wilayah yang lebih luas, yaitu:

1. Terletak di jalan trans Kalimantan, sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Katingan pada masa yang akan datang.
2. Kabupaten Katingan yang secara geografis berdekatan dengan Kota Palangkaraya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan daerah penyangga atau *hinterland* bagi pengembangan wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Implikasi tidak langsung mengakibatkan Kasongan sebagai ibukota Kabupaten Katingan, menjadi wilayah yang berfungsi sebagai pintu



masuk bagi pola dan jalur pergerakan kegiatan penduduk menuju ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.1.3. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Katingan merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian antara 10-50 meter di atas permukaan air laut. Ketinggian wilayah berdasarkan kecamatan yang berada di Kabupaten Katingan diperoleh kecamatan Bukit Raya merupakan kecamatan dengan posisi ketinggian 50 meter diatas permukaan laut, sedangkan kecamatan Katingan Kuala berada di dataran yang paling rendah, yaitu 13 meter diatas permukaan air laut.

Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Katingan per Kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi DPL (m)
Katingan Kuala	Pegatan	13,00
Mendawai	Mendawai	15,00
Kamipang	Baun Bango	17,00
Tasik Payawan	Petak Bahandang	19,00
Katingan Hilir	Kasongan	22,00
Tewang Sangalang Garing	Pendahara	32,00
Pulau Malan	Buntut Bali	27,00
Katingan Tengah	Tumbang Samba	30,00
Sanaman Mantikei	Tumbang Kaman	32,00
Petak Malai	Tumbang Baraoi	40,00
Marikit	Tumbang Hiran	40,00
Katingan Hulu	Tumbang Sanamang	40,00
Bukit Raya	Tumbang Kajamei	50,00

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2022

2.1.1.4. Hidrologi

Kabupaten Katingan dilintasi oleh sungai Katingan yang memiliki panjang 650 Km. Sungai yang bermuara di laut Jawa ini melewati hampir seluruh kecamatan di kabupaten pemekaran ini, seperti Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Marikit, Katingan Tengah, Pulau Malan, Tewang Sangalang Garing, Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala.

Selain sungai besar tersebut, wilayah Kabupaten Katingan dialiri pula oleh puluhan anak sungai dan danau. Sungai dan danau-danau itu biasanya merupakan jalur penghubung antar satu perkampungan/pedukuhan dengan lainnya. Di antara anak sungai tersebut adalah Sungai Kalanaman, Sungai Samba, Sungai Hiran, Sungai Mahop, Sungai Bemban dan Sungai Sanamang.



Tabel 2.3 Nama-Nama Sungai dan Anak Sungai/Cabang di Kabupaten Katingan

No.	Nama Kecamatan / Desa	Nama Sungai / Anak Sungai	Panjang	
			Keseluruhan (meter)	Dapat Dilayari (meter)
I.	KATINGAN KUALA			
	Desa Selat Baning	Sungai Sebangau Kecil	8.000	3.000
		Sungai Sebangau Besar	8.588,54	
		Anak Sungai Sebangau Besar	4.876	
		Sungai Selat Labaning	4.500	2.000
	Pegatan Hilir	Sungai Kaki	5.000	2.500
	Desa Kampung Tengah	Sungai Selat Saluang	6.750	5.000
II.	MENDAWAI			
	Desa Tewang Kampung	Sungai Tarusan Hantipan	14.630	14.630
	Desa Mendawai	Sungai Bakung	24.300	15.000
	Desa Perigi	Sungai Perigi	6.669	
	Desa Tumbang Bulan	Sungai Bulan	2.747	
III.	KEC. KAMIPANG			
	Desa Gelinggang	Sungai Runen	6.240	3.000
		Sungai Puri	2.500	1.000
	Desa Tampelas	Sungai Tampelas	3.400	2.000
	Desa Telaga	Sungai Telaga	4.100	2.500
	Desa Jahanjang	Sungai Jahanjang	7.520	3.500
	Desa Baun Bango	Sungai Kamipang	6.300	4.000
		Sungai Baun Bango	6.996	
	Desa Parupuk	Sungai Parupuk	4.600	2.000
		Sungai Kalaru	9.200	6.000
	Asam Kumbang	Sungai Asem Kumbang	7.340	3.500
IV.	KEC. TASIK PAYAWAN			
	Desa Telingke	Sungai Telingke	3.350	2.000
	Desa Handiwung	Sungai Pasur Mereng	5.000	2.000
	Desa Tumbang Panggu	Sungai Panggo	9.324	
	Desa Luwuk Kanan	Sungai Hampangen	19.000	17.000
V.	KEC. KATINGAN HILIR			
	Desa Tumbang Liting	Sungai Liting	4.250	1.000



No.	Nama Kecamatan / Desa	Nama Sungai / Anak Sungai	Panjang	
			Keseluruhan (meter)	Dapat Dilayari (meter)
	Kelurahan Kasongan Lama	Sungai Sala Ngawa	17.100	8.200
		Sungai Sala Ngaju	13.450	6.000
	Desa Banut Kalanaman	Sungai Kalanaman	75.000	45.000
	Desa Telangkah	Sungai Telangkah	4.310	1.500
	Desa Talian Kereng	Sungai Tambawu	8.200	4.000
		Sungai Tehang	36.250	7.000
		Sungai Simpur	4.500	2.500
VI.	KEC. TEWANG SANGALANG GARING			
	Desa Tewang Beringin	Sungai Mandahi	3.200	3.200
	Desa Hampalam	Sungai Tarusan	450	
	Desa Tarusan Danum	Sungai Sepang Kanan	14.100	14.100
		Sungai Sepang Kiri	23.000	16.000
		Sungai Batarung	2.400	1.000
	Desa Pendahara	Sungai Danum Matei	11.500	10.000
		Sungai Tuyun	7.300	5.000
		Sungai Parit	5.600	1.000
	Desa Tewang Rangkang	Sungai Pajunjung	17.500	8.000
		Sungai Bua	4.300	4.300
	Desa Tewang Manyangen	Sungai Manten	24.900	20.000
		Sungai Barira	1.400	
VII.	KEC. PULAU MALAN			
	Desa Dahian Tunggal	Sungai Jahawei	12.350	10.000
	Desa Buntut Bali	Sungai Tatas	987	
		Sungai Babahe	2500	
	Desa Manduing Lama/Taheta	Sungai Lipa	5.500	4.000
		Sungai Tarusan Pinang	2.300	
		Sungai Tarusan	2.600	
		Sungai Pangalawan	6.840	5.000
	Desa Tumbang Banjang	Sungai Banjang	1.250	1.250
		Sungai Rait	5.200	4.000
	Desa Tumbang Lawang	Sungai Panya	2.350	2.500
	Desa Tewang Karangan	Sungai Kamapit	4.200	2.000
		Sungai Bawin	11.720	7.500



No.	Nama Kecamatan / Desa	Nama Sungai / Anak Sungai	Panjang	
			Keseluruhan (meter)	Dapat Dilayari (meter)
	Desa Garagu	Sungai Geragu	5.441	6.500
		Sungai Mantian 1	3.100	2.000
		Sungai Mantian 2	4.200	1.500
	Desa Tumbang Tungku	Sungai Tungku	10.040	
	Desa Tumbang Tanjung	Sungai Tanjung	10.050	1.000
		Sungai Kadarai	2.310	1.500
VIII.	KEC. KATINGAN TENGAH			
	Desa Tumbang Lahang	Sungai Lahang	8.100	2.500
		Sungai Biduh	2.400	
	Desa Tewang Panjang	Sungai Pahawei	6.500	5.000
	Desa Telok	Sungai Singa	4.500	3.227
	Desa Samba Bakumpai	Sungai Mare	1.650	1.650
		Sungai Labaning	2.200	1.560
		Sungai Undeng	2.000	1.680
	Desa Samba Danum	Sungau Su'un	5.350	3.125
IX.	KEC. SANAMAN MANTIKEI			
	Desa Tumbang Kaman	Sungai Kaman	10.000	
		Sungai Pesei	4.000	2.500
		Sungai Saki	8.5000	
	Desa Tumbang Labehu	Sungai Labehu	2.000	1.000
		Sungai Pana'an	10.000	3.000
	Desa Tumbang Manggu	Sei Kabirok	3.000	1.000
		Sungai Kambeo	1.245	
		Sungai Manggo	2.000	
		Sei Bahungai	3.000	
		Sungai Doho	780	
		Sei Panga	2.000	
		Sei Manyangan	3.000	
	Desa Kamanto	Sungai Patenei Hae	15.000	10.500
		Sungai Patenei Kurik	8.000	4.250
		Sei Kambe	2.000	
		Sei Keruh	2.000	
		Sei Kamanto	1.000	
		Sei Engan	3.000	
	Desa Habuhus	Sungai Talunei	25.000	20.000



No.	Nama Kecamatan / Desa	Nama Sungai / Anak Sungai	Panjang	
			Keseluruhan (meter)	Dapat Dilayari (meter)
	Desa Tumbang Kanei	Sei Balawei	10.000	7.000
	Desa Tumbang Pangka	Sungai Pangka	6.540	2.000
	Desa Tumbang Atei	Sei Mantikei	25.000	20.000
		Sungai Atei	17.250	2.500
		Sei Kucu	20.000	3.000
		Sei Gagu	2.000	1.000
		Sei Emban	8.000	2.000
		Sei Masilei	10.000	2.000
	Desa Tumbang Papi	Sungai Papi	1.200	
		Sei Rawu	15.000	2.000
	Desa Taranei	Sei Taranei	5.000	2.000
	Desa Tumbang Manggara	Sei Manggara	2.000	1.500
		Sei Kabirum	2.000	750
X.	KEC. PETAK MALAI			
	Desa Tumbang Baraoi	Sungai Baraoi	27.823	25.000
		Sungai Samukah	6.310	
	Desa Tumbang Tangoi	Sei Tangoi	10.000	5.500
	Desa Tumbang Jala	Sungai Jala	5.000	3.000
	Desa Tumbang Habangoi	Sungai Habangoi	6.320	2.000
XI.	KEC. MARIKIT			
	Desa Tumbang Hiran	Sungai Hiran	12.500	12.000
	Desa Tumbang Bemban	Sungai Bemban	18.470	16.000
	Desa Tumbang Dakei	Sungai Dakei	2.470	
	Desa Tumbang Paku	Sungai Paku	9.720	
	Desa Tumbang Mandurei	Sungai Mandurei	5.360	
	Desa Tumbang Pahanei	Sungai Pahanei	1.390	
	Desa Pariyei	Sungai Parie	3.700	
XII.	KEC. KATINGAN HULU			
	Desa Tumbang Sanamang.	Sungai Sanamang	23.400	21.000
	Desa Tumbang Hangei II	Sungai Hangei II	13.200	5.000
	Desa Tumbang Mangketai	Sungai Mangketai	4.100	



No.	Nama Kecamatan / Desa	Nama Sungai / Anak Sungai	Panjang	
			Keseluruhan (meter)	Dapat Dilayari (meter)
	Desa Tumbang Manangei	Sungai Manangei	5.400	
	Desa Tumbang Mahop	Sungai Mahop	12.345	10.000
	Desa Tumbang Sabetung	Sungai Sabetung	3.800	1.500
XIII.	KEC. BUKIT RAYA			
	Desa Tumbang Kajamei	Sungai Kajamei	25.700	5.000
	Desa Tumbang Kaburai	Sungai Kaburai	4.520	
	Desa Tumbang Karuei	Sungai Karuei	32.000	7.500
	Desa Tumbang Gaei	Sungai Gaei	24.700	12.000
	Desa Tumbang Dahuei	Sungai Dahuei	13.500	
	Desa Tumbang Kataei	Sungai Kataei	3.100	

Sumber: Dinas Perhubungan dan Kelautan Kabupaten Katingan, 2023

Selain sungai/anak sungai dalam tabel di atas, terdapat pula beberapa sungai/anak sungai lainnya yang masuk dalam wilayah daerah Kabupaten Katingan tapi belum dilakukan pendataan.

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi Hidrologi Kabupaten Katingan memiliki banyak sungai, secara umum pola sungainya adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai (DAS) maka puncak banjirnya akan demikian tinggi sehingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah-daerah yang ada disekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai.

Kawasan rawan bencana alam yang dimaksud dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 adalah kawasan rawan banjir dan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan.

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup di Kabupaten Katingan ditinjau dari aspek banjir, kebakaran lahan dan lahan kritis. Potensi banjir di wilayah Kabupaten Katingan ditentukan oleh tiga hal, yaitu dikarenakan kondisi topografi, daya tampung debit air sungai oleh badan sungai dan curah hujan.

Berdasarkan kondisi topografis, wilayah Kabupaten Katingan memiliki potensi rendah yakni sebesar 74,77% dan kategori tinggi sebesar 25,23%. Wilayah Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Marikit, Petak Malai dan Sanaman Mantikei merupakan daerah dengan potensi banjir rendah karena wilayah ini merupakan daerah hulu dan memiliki topografi yang



lebih tinggi, sedangkan daerah dengan potensi banjir tinggi adalah Kecamatan Mendawai (78%), Katingan Kuala (70,1%) dan Kecamatan Kamipang (51,9%) yang merupakan daerah rawa dengan topografi rendah. Untuk potensi banjir lainnya disebabkan karena berkurangnya kemampuan badan sungai menampung debit air yang besar dikarenakan pendangkalan pada badan sungai akibat aktifitas PETI yang salah satunya banyak ditemukan pada segmen Sanamang-Marikit. Pendangkalan badan sungai ini ditandai dengan terbentuknya delta di tengah sungai yang merupakan tumpukan material akibat aktifitas PETI pada bagian *upstream* delta sehingga terjadi erosi pada bagian kiri dan kanan delta. Curah hujan yang tinggi (> 300 mm per bulan) juga berpotensi mengakibatkan banjir di DAS (Daerah Aliran Sungai), kondisi ini diperparah karena minimnya daerah tangkapan air yang antara lain disebabkan karena pembukaan lahan di sekitar areal DAS.

Tabel 2.4 Potensi Banjir Setiap Kecamatan

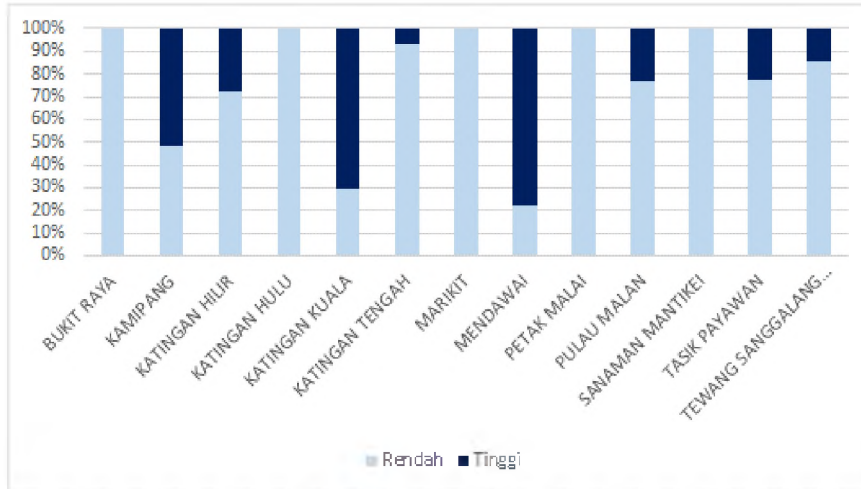
Kecamatan	Potensi Banjir		
	Rendah	Tinggi	Total
Bukit Raya	100.419		100.419
Kamipang	137.199	147.909	285.109
Katingan Hilir	45.397	17.734	63.131
Katingan Hulu	145.876		145.876
Katingan Kuala	44.339	104.033	148.372
Katingan Tengah	151.746	11.614	163.360
Marikit	211.370		211.370
Mendawai	52.500	186.471	238.971
Petak Malai	165.938		165.938
Pulau Malan	49.610	15.129	64.739
Sanaman Mantikei	277.165		277.165
Tasik Payawan	62.808	17.906	80.714
Tewang Sanggalang Garing	79983	13.581	93.563
Total	1.524.351	514.377	2.038.727
Persentase	74,77	25,23	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Pada umumnya, kecamatan di Katingan memiliki potensi banjir yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah.

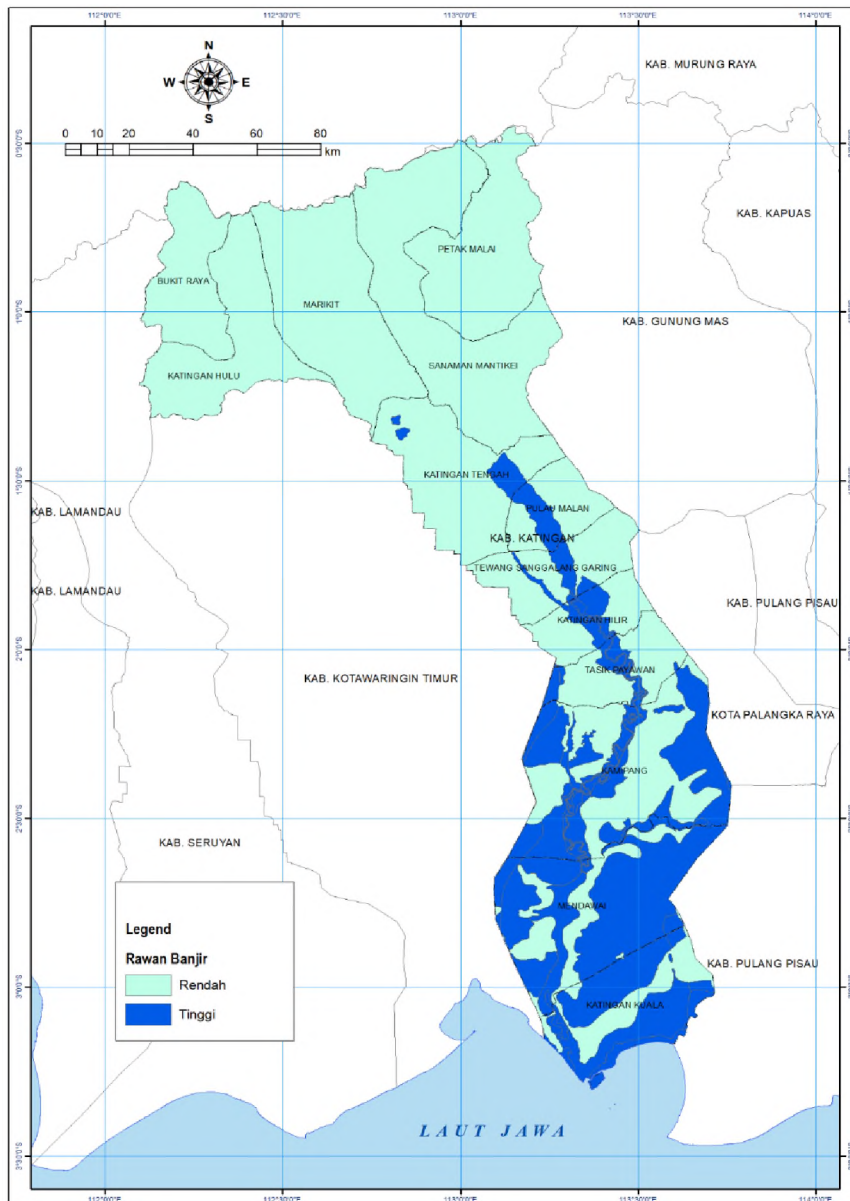


Gambar 2.2
Persentase Perkiraan Dampak dan Resiko Banjir



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.3
Peta Potensi Banjir



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023



Seluruh warga masyarakat terdampak bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Katingan. Dari sebaran peta bencana banjir, pada tahun 2020, 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Katingan, ada 10 kecamatan yang terdampak banjir, 1 kecamatan termasuk dataran tinggi, sedangkan 2 kecamatan terdampak pasang surut air laut.

Dari 10 kecamatan yang terdampak, antara lain Kecamatan Petak Malai, Katingan Hulu, Marikit, Sanaman Mantikei, Katingan Tengah, Pulau Malan, Tewang Sangalang Garing, Katingan Hilir, Tasik Payawan dan Kamipang. Untuk Kecamatan Bukit Raya, relatif lebih aman dikarenakan kategori dataran tinggi, sedangkan Kecamatan Mendawai dan Katingan Kuala terdampak pasang surut air laut.

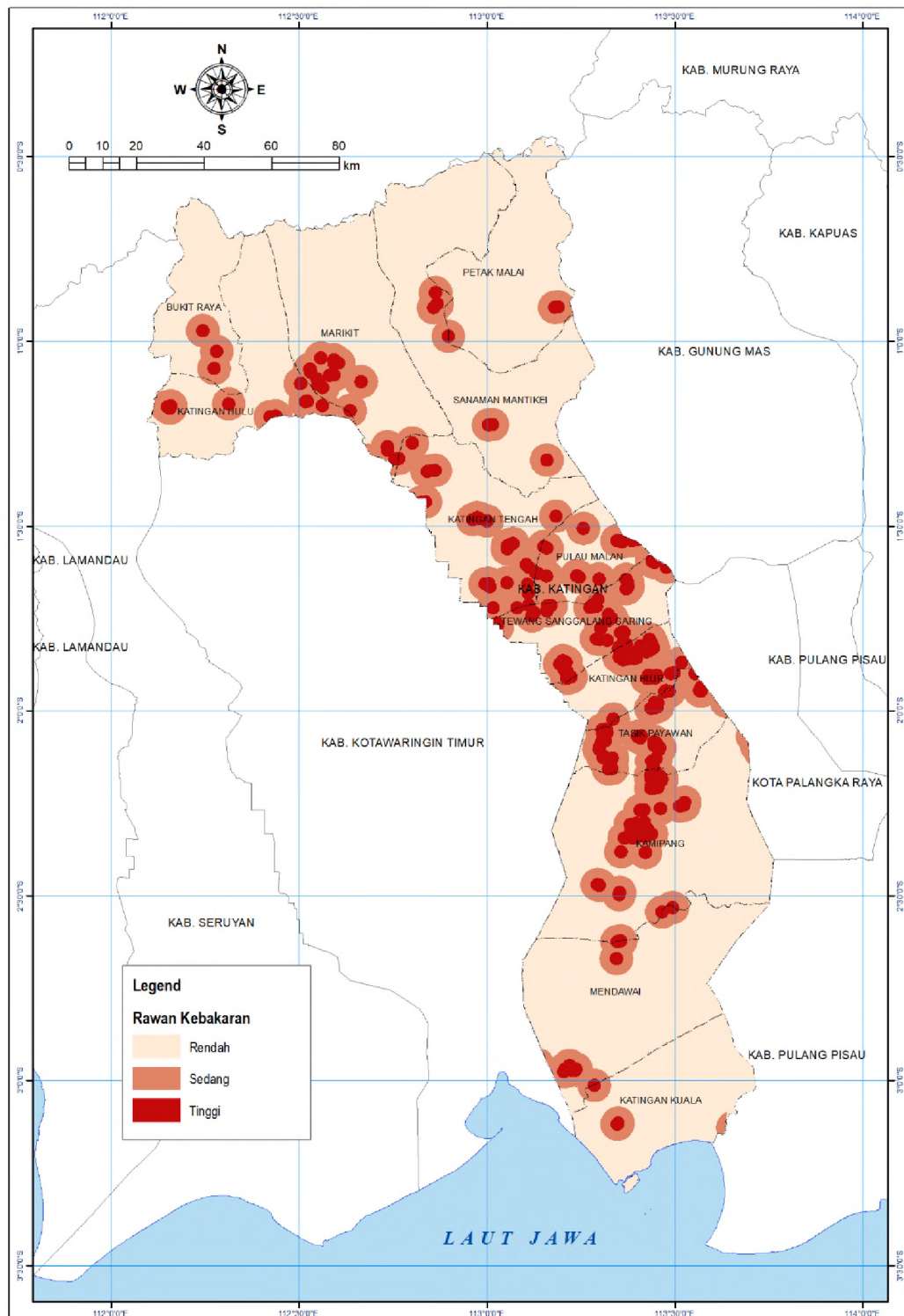
Tabel 2.5 Kecamatan yang Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Korban		
		Rumah	KK	Jiwa
1	Kecamatan Petak Malai	111	-	-
2	Kecamatan Katingan Hulu	221	221	663
3	Kecamatan Marikit	421	421	1.263
4	Kecamatan Sanaman Mantikei	516	588	1.764
5	Kecamatan Katingan Tengah	443	492	1.755
6	Kecamatan Pulau Malan	72	72	216
7	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	3	3	9
8	Kecamatan Katingan Hilir	49	49	147
9	Kecamatan Tasik Payawan	51	51	153
10	Kecamatan Kamipang	13	13	39

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021



Gambar 2.4
Peta Perkiraan Dampak dan Resiko Lahan Kebakaran



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Sebaran daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan yakni dari 13 kecamatan di wilayah di Kabupaten Katingan ada 6 kecamatan dengan kondisi lahan yang mayoritas gambut dan rawa, sedangkan 7 kecamatan lainnya mayoritas kondisi lahan mineral. Untuk daerah dengan kondisi mayoritas lahan gambut dan rawa antara lain Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala, sangat berpotensi terjadi kebakaran lahan dan hutan



di hampir seluruh wilayah desa dan kelurahan. Sedangkan di 7 kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Pulau Malan, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, Marikit, Katingan Hulu, dan Bukit Raya, relatif lebih aman. Meskipun begitu, secara umum, hampir di seluruh wilayah Kabupaten Katingan masih berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Potensi kebakaran di Kabupaten Katingan dengan kategori rendah yakni sebesar 72,45%, sedang 19,5% dan kategori tinggi hanya sebesar 8%. Wilayah Kecamatan dengan kategori tinggi terdapat di Kecamatan Katingan Hilir (26,48%), Tewang Sanggalang Garing (26,37%) dan Tasik Payawan (25,09%) yang memiliki lahan semak belukar yang mudah terbakar. Tingkat kesulitan pengendalian terhadap kebakaran hutan dan lahan berdasarkan jenis lahan, tertinggi berada di wilayah lahan gambut di kecamatan Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala, sedangkan terendah berada di lahan non gambut, yaitu pada Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, Pulau Malan dan Tewang Sanggalang Garing.

Tabel 2.6 Potensi Kebakaran Setiap Kecamatan

Kecamatan	Potensi Kebakaran			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Bukit Raya	80.622	16.031	3.766	100.419
Kamipang	202.109	58.060	24.940	285.109
Katingan Hilir	21.740	24.673	16.717	63.131
Katingan Hulu	110.071	27.209	8.596	145.876
Katingan Kuala	134.901	11.305	2.167	148.372
Katingan Tengah	82.879	58.764	21.717	163.360
Marikit	168.149	29.474	13.747	211.370
Mendawai	210.034	21.727	7.210	238.970
Petak Malai	151.556	12.169	2.213	165.938
Pulau Malan	16.251	37.968	10.519	64.739
Sanaman Mantikei	245.927	24.556	6.682	277.165
Tasik Payawan	24.347	36.113	20.254	80.714
Tewang Sanggalang Garing	28.411	40.483	24.669	93.563
Total	1.476.997	398.532	163.199	20.38.727
Persentase	72,45	19,55	8,00	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023



2.1.3. Demografi

Pada Tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Katingan mencapai 163.989 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2021-2022 adalah 0,55 persen. Jumlah penduduk tahun 2021 yang berjumlah 163.989 jiwa terdiri dari 85.089 penduduk laki-laki dan 78.900 penduduk perempuan. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 berjumlah 163.099 jiwa (84.681 laki-laki dan 78.418 perempuan).

Sementara itu, ratio jenis kelamin pada Tahun 2022 sebesar 108, dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Katingan, setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 108 penduduk laki-laki.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

KECAMATAN	PENDUDUK (jiwa)			
	2019	2020	2021	2022
Katingan Kuala	18.465	19.136	18.654	18.729
Mendawai	4.180	4.272	4.165	4.170
Kamipang	7.189	7.200	7.192	7.214
Tasik Payawan	7.928	8.096	7.966	8.007
Katingan Hilir	38.279	39.530	39.349	39.852
Tewang Sangalang Garing	13.263	13.557	13.098	13.136
Pulau Malan	10.252	10.462	10.542	10.597
Katingan Tengah	27.084	27.785	29.276	29.367
Sanaman Mantikei	10.280	10.598	10.936	10.967
Petak Malai	3.442	3.448	3.630	3.634
Marikit	6.673	7.015	6.818	6.828
Katingan Hulu	7.828	7.931	8.247	8.259
Bukit Raya	2.954	3.209	3.226	3.229
Total	157.817	162.239	163.099	163.989

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2020–2023

Penduduk terbanyak pada 2022 berada di Kecamatan Katingan Hilir sebanyak 39.852 jiwa, diikuti dengan Kecamatan Katingan Tengah dan Katingan Kuala masing-masing sebesar 29.367 jiwa dan 18.729 jiwa. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bukit Raya yaitu 3.229 jiwa.

Kepadatan penduduk Kabupaten Katingan pada Tahun 2022 berkisar 8,03 Jiwa/Km². Tingkat kepadatan terbesar terdapat di Kecamatan Katingan Hilir, yaitu sebesar 60 Jiwa/Km², diikuti oleh Kecamatan Katingan Tengah sebesar 18 jiwa/Km². Sedangkan yang rendah tingkat kepadatan penduduknya yaitu Kecamatan Mendawai, dan Kecamatan Petak Malai yaitu 2 jiwa/Km².



Tabel 2.8 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2022

Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk
	Km	%	Jumlah	%	
Katingan Kuala	1.484,81	7,27	18.729	11,42	13
Mendawai	2.391,58	11,72	4.170	2,54	2
Kamipang	2.854,27	13,98	7.214	4,40	3
Tasik Payawan	808,12	3,96	8.007	4,88	10
Katingan Hilir	665,22	3,26	39.852	24,30	60
Tewang Sangalang Garing	903,39	4,43	13.136	8,01	15
Pulau Malan	647,48	3,17	10.597	6,46	16
Katingan Tengah	1.635,65	8,01	29.367	17,91	18
Sanaman Mantikei	2.772,38	13,58	10.967	6,69	4
Petak Malai	1.661,65	8,14	3.634	2,22	2
Marikit	2.117,36	10,37	6.828	4,16	3
Katingan Hulu	1.461,27	7,16	8.259	5,04	6
Bukit Raya	1.007,72	4,94	3.229	1,97	3
Kabupaten Katingan	20.410,90	100,00	163.989	100,00	8

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2023

Ditinjau berdasarkan kelompok umur, dalam lima tahun terakhir ini kelompok usia antara 0 tahun sampai 34 tahun memiliki jumlah terbanyak. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Katingan akan mendapatkan bonus demografi akibat dari prospek penambahan jumlah penduduk usia produktif. Berikut rincian perkembangan jumlah penduduk Katingan menurut kelompok Usia.

Tabel 2.9 Perkembangan Jumlah Penduduk Katingan Menurut Kelompok Umur Tahun 2022

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	7.416	7.036	14.452
2	5-9	7.507	7.144	14.651
3	10-14	7.751	7.468	15.219
4	15-19	7.508	7.110	14.618
5	20-24	6.758	6.564	13.322
6	25-29	7.416	6.802	13.728
7	30-34	7.507	6.526	13.673
8	35-39	7.751	6.333	13.061
9	40-44	6.423	5.769	12.192
10	45-49	5.823	5.045	10.868
11	50-54	4.871	4.037	8.908
12	55-59	3.788	3.195	6.983



No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
13	60-64	2.525	2.256	4.781
14	65-69	1.715	1.628	3.343
15	70-74	1.142	1.045	2.187
16	75+	1.061	942	2.003

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2023

Informasi mengenai kependudukan lainnya yang dapat disajikan yaitu jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Katingan pada Tahun 2021. Data ini memberikan informasi mengenai pekerjaan utama penduduk Katingan. Selain itu dapat diketahui juga jenis kelamin penduduk yang bekerja untuk masing-masing lapangan pekerjaan. Berdasarkan data BPS, pada Tahun 2023 penduduk Katingan pada umumnya bekerja di lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. Sebanyak 25.617 jiwa atau 31,10 persen penduduk Katingan yang bekerja di lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. Penduduk yang bekerja di lapangan kerja tersebut didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 17.092 jiwa.

Setelah lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, maka lapangan kerja lain yang diminati oleh penduduk Katingan adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 23,55 persen.

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Katingan Tahun 2021

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	17.092	8.525	25.617	31,10
Pertambangan dan Penggalian	19.023	377	19.400	23,55
Industri Pengolahan	2.129	820	2.949	3,58
Listrik, Air, dan Gas	299	422	721	0,88
Konstruksi	3.375	-	3.375	4,10
Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	5.459	8.463	13.922	16,90
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	1.970	246	2.216	2,69
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.154	143	1.297	1,57
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	6.958	5.925	12.883	15,64
Jumlah	57.459	24.921	82.380	100

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2023



2.1.4. Potensi Sumber Daya

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039.

2.1.5. Daya Dukung dan Daya Tampung

Berdasarkan hasil analisis data numerik dan data spasial dalam Pemetaan DDDT-LH di Kabupaten Katingan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Terdapat 24 tipe ekoregion dan 22 kelas tutupan lahan, dimana ekoregion Pegunungan Denudasional (D1) dan Dataran Gambut merupakan ekoregion terluas, dengan masing-masing luasan 740.051,82 Ha dan 510.711,59 Ha. Sedangkan ekoregion terkecilnya adalah Tanggul Alam dan Teras Sungai (F5) dan Dataran Aluvial Rawa/Dataran Rawa Payau (F2) dengan masing-masing luasan 6,25 Ha dan 8,43 Ha, Kemudian untuk penutupan lahan, didominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran (VBP12B) dan Hutan Lahan Basah Primer Gambut, dengan luasan masing-masing adalah 524.621,96 Ha dan 500.152,49 Ha. Sedangkan petutupan lahan terkecilnya adalah Bangun Industri (VTB28) dan Lahan Terbangun Non Permukiman (VTB31) dengan luas masing-masing adalah 31,80 Ha dan 37,89 Ha.
2. Hasil analisis perbandingan berpasangan dari penilaian pakar terhadap jasa ekosistem yang sudah dinormalisasi, menunjukkan bahwa pada ekoregion: Dataran Gambut (O1), Dataran Tinggi (F11), dan Dataran Aluvial (F1) memiliki nilai tertinggi dengan masing-masing nilai adalah 1,000 dan 0,700, serta 0,436. Sedangkan untuk penutupan lahan ditemukan pada: Perkebunan Karet (VP7c), Perkebunan Campuran (VP8), dan Permukiman (VTB27) dengan masing-masing nilai adalah 1,000, dan 0,609, serta 0,554. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ekoregion dan penutupan lahan tersebut merupakan daerah-daerah penting untuk menyediakan jasa ekosistem bagi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat.
3. Indeks Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan tidak mengindikasikan adanya kisaran Sangat Rendah. Kisarannya adalah Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi, dimana kisaran Rendah, Sedang, dan Tinggi berada di tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Kamipang, Mendawai, dan Petak Malai. Kisaran Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi, berada di empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Katingan Hilir, Katingan Kuala, Sanaman Mantikei, dan Tewang Sangalang Garing. Kisaran Sedang dan Tinggi, berada di Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Katingan Tengah, Marikit, Pulau Malan, dan Tasik Payawan.
4. Isu lingkungan strategis yang dihadapi Kabupaten Katingan dan menjadi tekanan utama terhadap jasa ekosistem adalah: Perijinan

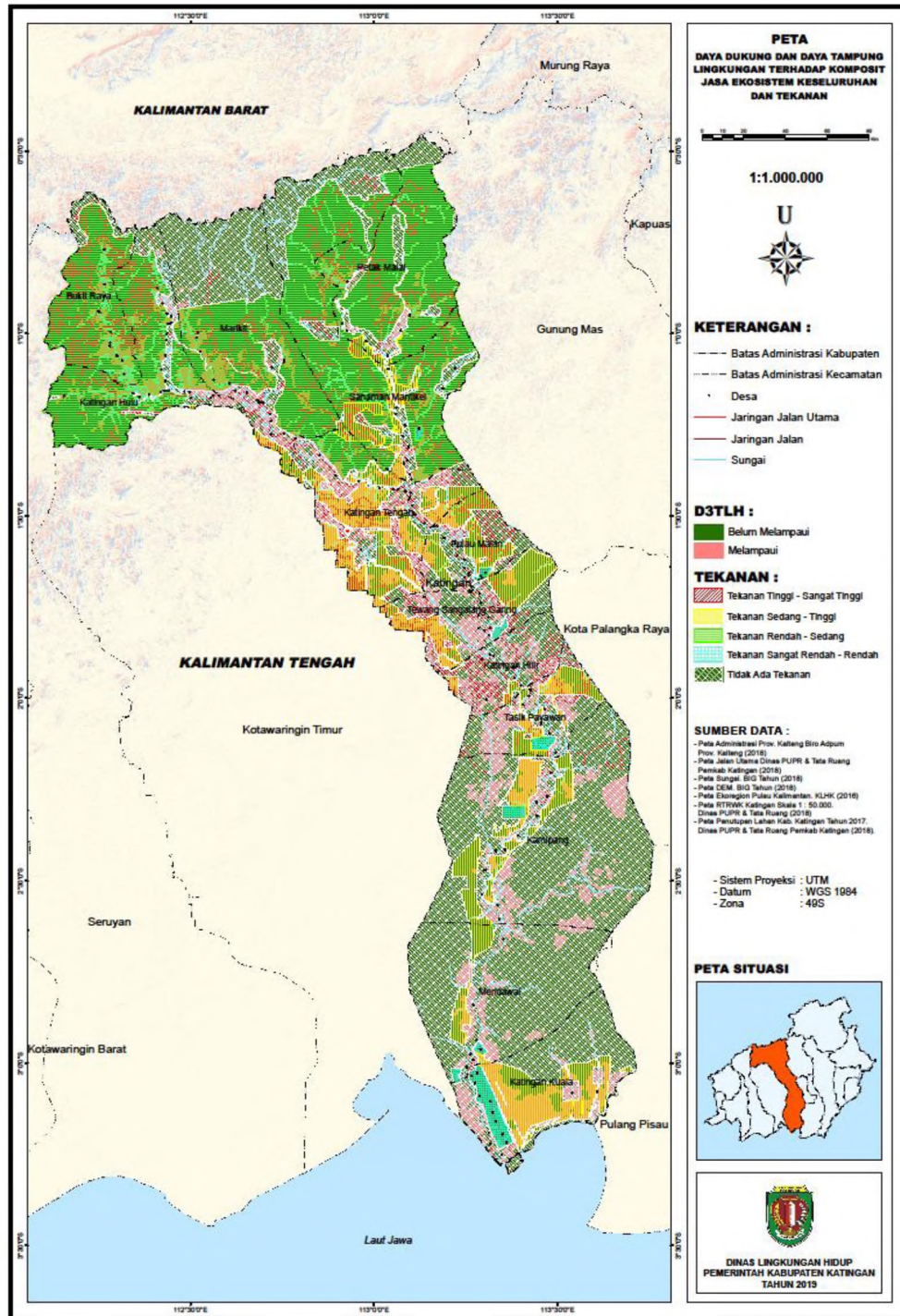


kebun, tambang, dan IUPHHK (HA maupun HT), Pencemaran air dan udara, baik akibat limbah cair maupun limbah padat serta berupa pembakaran hutan dan lahan, Pembukaan lahan oleh masyarakat, Perkembangan pemukiman, Pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan darat.

5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual untuk Jasa Ekosistem Komposit Penyediaan (P), Pengaturan (R), dan Pendukung (S), dan Keseluruhannya yang sudah melampaui adalah seluas 385.860,40 Ha (18,90 %) dan yang Belum Melampaui seluas 1.655.451,23 Ha (81,10 %). Sedangkan untuk Jasa Ekosistem Budaya (C) seluruhnya masih Belum Melampaui. Selanjutnya, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan dan Tekanannya untuk Kecamatan Bukit Raya yang Belum Melampaui yaitu seluas 87.903,98 Ha dan Melampaui seluas 12.883,79 Ha, untuk Kecamatan Kamipang yang Belum Melampaui seluas 279.682,90 Ha dan yang Melampaui seluas 49.127,33 Ha, untuk Kecamatan Katingan Hilir yang Belum Melampaui yaitu seluas 40.031,10 Ha dan Melampaui seluas 19.991,44 Ha, untuk Kecamatan Katingan Hulu yang Belum Melampaui yaitu seluas 121.347,52 Ha dan Melampaui seluas 24.073,10 Ha, untuk Kecamatan Katingan Kuala yang Belum Melampaui yaitu seluas 101.968,74 Ha dan Melampaui seluas 46.874,89 Ha, untuk Katingan Tengah yang Belum Melampaui yaitu seluas 83.746,96 Ha dan Melampaui seluas 72.768,47 Ha, untuk Kecamatan Marikit yang Belum Melampaui yaitu seluas 189.372,94 Ha dan Melampaui seluas 30.340,74 Ha, untuk Kecamatan Mendawai yang Belum Melampaui yaitu seluas 181.655,15 Ha dan Melampaui seluas 21.666,04 Ha, untuk Kecamatan Petak Malai yang Belum Melampaui yaitu seluas 153.088,75 Ha dan Melampaui seluas 10.654,93 Ha, untuk Kecamatan Pulau Malan yang Belum Melampaui yaitu seluas 46.241,79 Ha dan Melampaui seluas 18.300,16 Ha, untuk Kecamatan Sanaman Mantikei yang Belum Melampaui yaitu seluas 265.923,41 Ha dan Melampaui seluas 13.829,42 Ha, untuk Kecamatan Tasik Payawan yang Belum Melampaui yaitu seluas 49.919,49 Ha dan Melampaui seluas 24.284,20 Ha, , untuk Kecamatan Tewang Sangalang Garing yang Belum Melampaui yaitu seluas 54.568,49 Ha dan Melampaui seluas 23.106,86 Ha.



Gambar 2.5
Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan dan Tekanannya (Ha).



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023



2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Indikator yang umum dipakai untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi makro suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan dapat dilihat dari nilai PDRB yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Naik turunnya PDRB biasa juga disebut pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan PDRB, maka makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.11 PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.428,58	1.396,09	1.423,10	1.444,04
B	Pertambangan dan Penggalian	352,93	240,29	185,09	187,26
C	Industri Pengolahan	770,77	771,88	795,08	858,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,68	1,84	1,92	2,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,07	2,29	2,60	2,58
F	Konstruksi	613,62	560,44	608,75	668,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	371,51	368,72	372,99	398,55
H	Transportasi dan Pergudangan	347,75	346,02	384,14	421,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106,62	104,59	110,41	117,64
J	Informasi dan Komunikasi	50,56	60,54	69,81	77,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	62,30	71,76	80,11	84,54
L	Real Estate	138,66	135,13	121,41	132,39
M,N	Jasa Perusahaan	0,77	0,69	0,69	0,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	330,63	325,89	345,83	372,49
P	Jasa Pendidikan	289,52	305,22	320,50	329,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128,98	144,48	156,39	164,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	113,27	111,64	112,29	112,84
	PDRB	5.110,22	4.947,51	5.091,12	5.374,98

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2023, diolah

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Perekonomian Kabupaten Katingan pada Tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga



konstan menurut lapangan usaha Tahun 2022 mencapai Rp 5.374,98 miliar dan atas dasar harga berlaku mencapai Rp 9.968,59 miliar. Bila ditelaah lebih jauh ke tahun sebelumnya, PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 menunjukkan kecenderungan penurunan. Namun di Tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan. Sedangkan atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan peningkatan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2022.

Tabel 2.12 PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.103,9 2	2.216,1 4	2.489,55	2.642,51
B	Pertambangan dan Penggalian	536,46	432,08	361,16	399,23
C	Industri Pengolahan	1.225,7 4	1.292,9 1	1.506,96	1.696,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,35	2,61	2,74	3,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,59	3,99	4,70	4,89
F	Konstruksi	1.044,3 4	955,85	1.089,89	1.251,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	650,96	655,09	663,11	759,79
H	Transportasi dan Pergudangan	644,46	653,08	737,46	827,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	192,21	191,67	204,52	220,65
J	Informasi dan Komunikasi	60,44	71,14	82,85	95,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	91,15	104,85	120,03	130,22
L	Real Estate	243,10	242,50	221,87	259,67
M,N	Jasa Perusahaan	1,23	1,12	1,15	1,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	567,33	560,42	562,74	609,07
P	Jasa Pendidikan	448,00	474,23	513,78	557,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	221,97	253,43	290,59	312,75
R,S,T, U	Jasa lainnya	186,48	186,15	187,77	196,23
	PDRB	8.223,7 3	8.297, 24	9.040,8 6	9.968,5 9

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2023, diolah

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Distribusi PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 sampai dengan 2021 didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi primadona dalam perekonomian Kabupaten Katingan, walaupun selama periode 2019 sampai dengan 2022 tidak jarang mengalami fluktuasi. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB



Katingan pada tahun 2022 mencapai 26,51 persen. Sektor berikutnya yang mempunyai peranan cukup berarti dalam pembentukan PDRB Katingan adalah sektor Industri Pengolahan, selama beberapa tahun fluktuatif dan tahun 2022 mencapai 17,02 persen. Pada posisi ketiga penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah lapangan usaha Konstruksi sebesar 12,55 persen di tahun 2022.

Tabel 2.13 **Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022 (persen)**

Lapangan Usaha		2019	2020	2021**	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,58	26,71	27,54	26,51
B	Pertambangan dan Penggalian	6,52	5,21	3,99	4,00
C	Industri Pengolahan	14,90	15,58	16,67	17,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	12,70	11,52	12,06	12,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,92	7,90	7,33	7,62
H	Transportasi dan Pergudangan	7,84	7,87	8,16	8,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,34	2,31	2,26	2,21
J	Informasi dan Komunikasi	0,73	0,86	0,92	0,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,11	1,26	1,33	1,31
L	Real Estate	2,96	2,92	2,45	2,60
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,90	6,75	6,22	6,11
P	Jasa Pendidikan	5,45	5,72	5,68	5,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,70	3,05	3,21	3,14
R,S,T, U	Jasa lainnya	2,27	2,24	2,08	1,97
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2023, diolah

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi Katingan Tahun 2022 terus mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Katingan 5,81 persen di Tahun 2019 dan di Tahun 2020 menurun tajam menjadi -3,25 persen, kemudian meningkat kembali di Tahun 2021 sebesar 2,90 persen dan terus meningkat di Tahun 2022 menjadi 5,58 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 11,35 persen, disusul kategori Kategori Transportasi



dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 9,78 persen dan kategori Konstruksi yang tumbuh sebesar 9,77 persen. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar -0,66 persen.

Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022 (Persen)

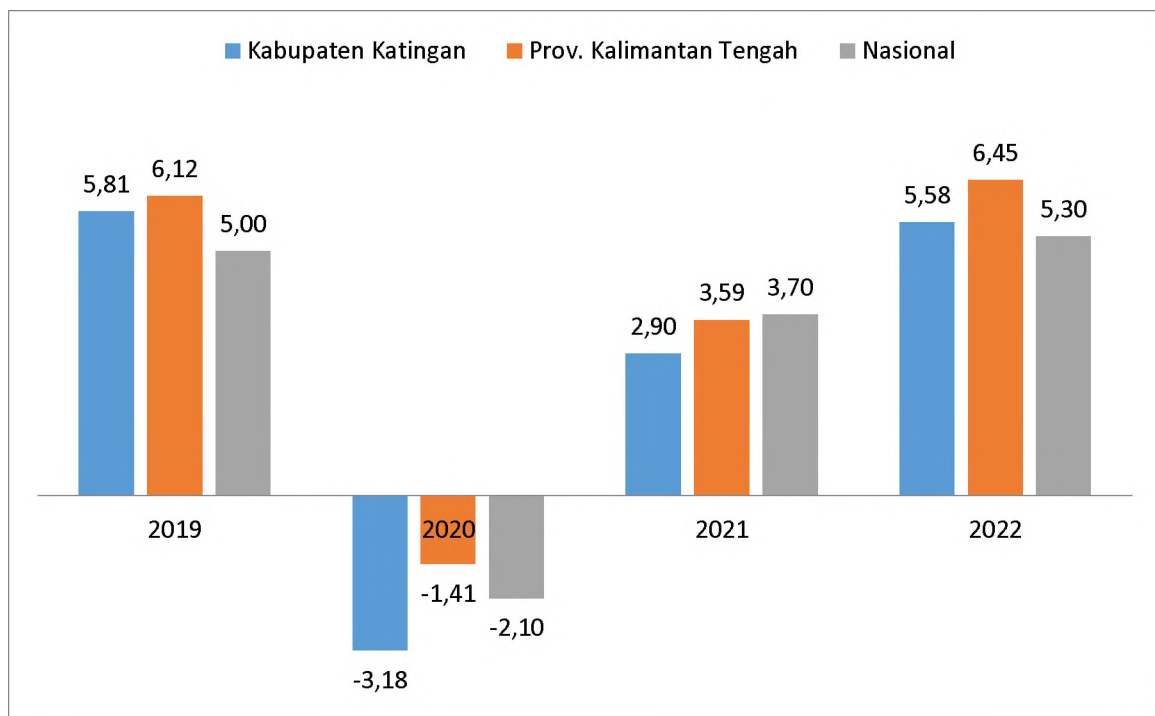
Lapangan Usaha		2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,57	-2,27	1,93	1,47
B	Pertambangan dan Penggalian	-11,05	-31,91	-22,97	1,17
C	Industri Pengolahan	9,57	0,14	3,00	7,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,09	9,16	4,49	6,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,21	10,59	13,72	-0,66
F	Konstruksi	5,03	-8,67	8,62	9,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,35	-0,75	1,16	6,85
H	Transportasi dan Pergudangan	7,70	-0,50	11,02	9,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,71	-1,90	5,56	6,55
J	Informasi dan Komunikasi	11,54	19,74	15,31	11,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,41	15,18	11,65	5,53
L	Real Estate	8,01	-2,55	-10,15	9,04
M,N	Jasa Perusahaan	7,24	-10,92	0,73	6,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,57	-1,43	6,12	7,71
P	Jasa Pendidikan	8,62	5,42	5,01	2,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,97	12,01	8,25	4,98
R,S,T, U	Jasa lainnya	9,18	-1,45	0,58	0,49
	PDRB	5,81	-3,18	2,90	5,58

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2023, diolah

* angka sementara ** angka sangat sementara



Gambar 2.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: - BPS Kabupaten Katingan, 2023, diolah
- BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2023, diolah
- BPS RI, 2023, diolah

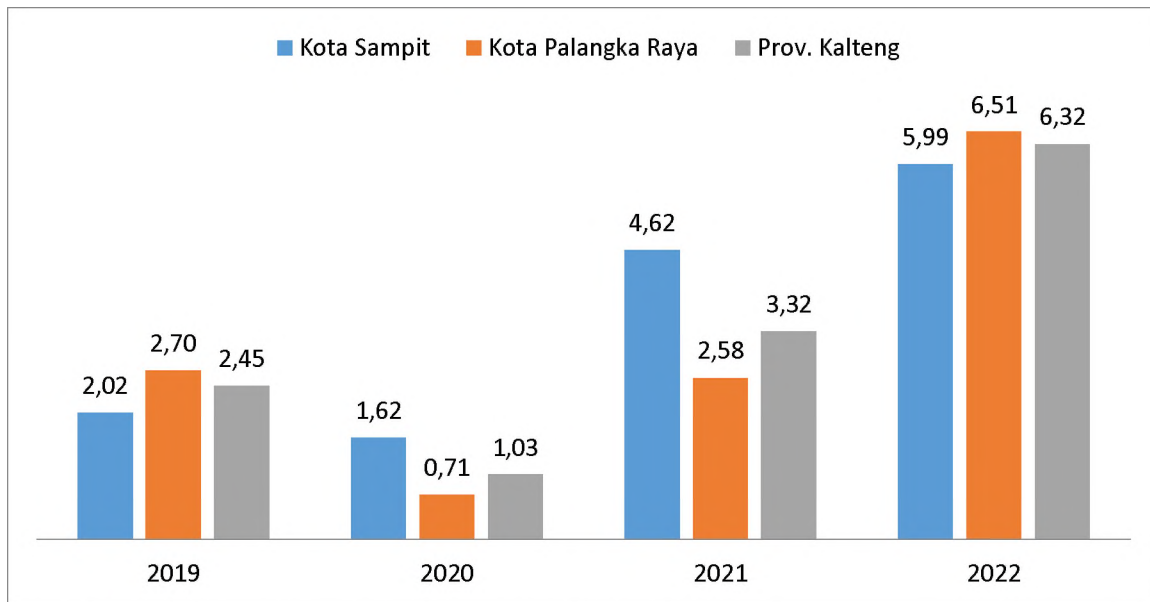
Data LPE Kabupaten Katingan pada tahun 2019 umumnya paling tinggi atau kedua lebih tinggi bila dibandingkan dengan LPE Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Katingan mengalami kontraksi hingga -3,18 persen, yang berarti jauh lebih dalam dibanding provinsi maupun nasional. Kontraksi perekonomian nasional, provinsi dan Kabupaten Katingan merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan sampai 2,90 persen dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 5,58 persen.

2.2.2. Laju Inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply). Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kalimantan Tengah dipantau oleh BPS di 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit. Inflasi yang terjadi di Kabupaten Katingan, khususnya di Kota Kasongan dipengaruhi oleh harga produk konsumsi dan komoditas di Kota Palangka Raya dan Sampit. Adapun inflasi yang terjadi di Kota Palangka Raya dan Sampit dalam kurun waktu 2019-2022 mengalami fluktuasi.



Gambar 2.7
Inflasi di Kota Palangkaraya, Kota Sampit dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2023, diolah

2.2.3. PDRB Per kapita

PDRB Perkapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dalam kurun waktu 2019-2022 PDRB perkapita Kabupaten Katingan dalam ADHB mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sebesar 48,4 juta terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 60,7 juta. Sedangkan Dalam kurun waktu 2019-2022 PDRB perkapita Kabupaten Katingan dalam ADHK juga mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sebesar 30,1 terus meningkat sampai tahun 2022 menjadi 31,2 juta. Jika diamati lebih jauh, pertumbuhan PDRB perkapita Katingan selalu positif setiap tahun sampai tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat terus bertambah setiap tahunnya dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Tabel 2.15 **PDRB Per Kapita Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022**

No	PDRB Perkapita	2019	2020	2021*	2022**
1	ADHB (juta Rp.)	48,4	51,2	55,7	60,7
2	ADHK (juta Rp.)	30,1	30,5	31,2	32,7

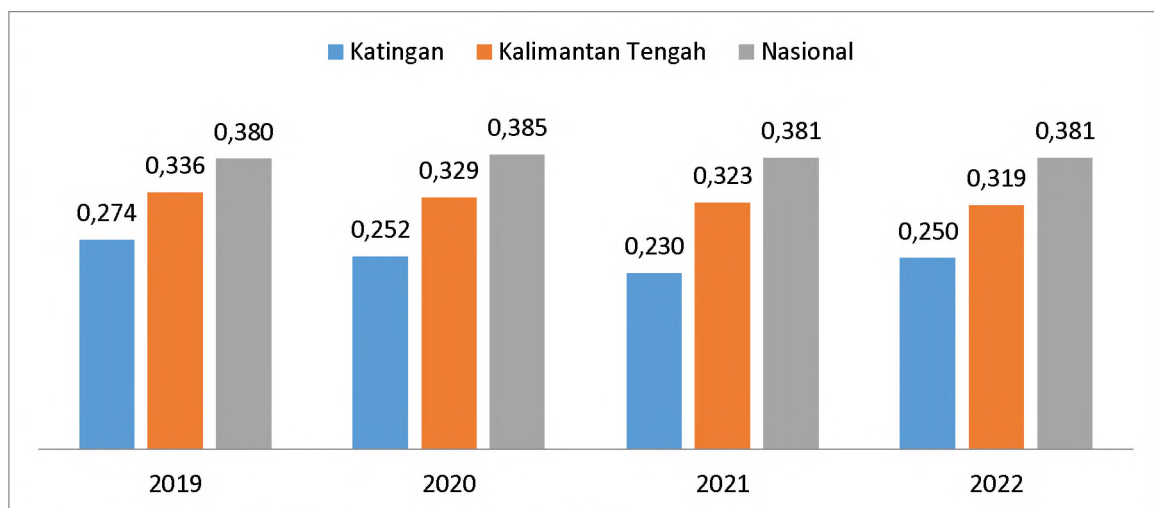
Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2023



2.2.4. Indeks Gini

Indeks gini atau Koefisien Gini merupakan salah satu indikator yang dapat melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk. Indeks Gini Kabupaten Katingan mulai tahun 2019-2022 masuk kategori ketimpangan rendah karena berada di bawah 0,4. Perkembangan Indeks Gini Katingan pada periode 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan kecenderungan yang lebih baik bila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Posisi indeks gini Kabupaten Katingan selalu berada di bawah provinsi dan nasional, pada tahun 2022 angka gini ratio Katingan sebesar 0,250 adalah angka gini ratio terendah se-Kalimantan Tengah. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Katingan semakin merata (ketimpangan rendah) karena setiap golongan penduduknya menerima bagian pendapatan yang hampir sama.

Gambar 2.8
Indeks Gini Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: - BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2023, diolah
- BPS RI, 2023, diolah

2.2.5. Persentase Penduduk Miskin

Indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Katingan selama periode tahun 2019-2022 mengalami mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 8,51 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,02% mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 8,23 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,79%. Namun pada tahun 2021 dan 2022 jumlah penduduk miskin terus mengalami kenaikan menjadi 9,71 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,50%.



Selain jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin, indikator kemiskinan lain yang penting tetap dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah daerah yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2.16 **Indikator Kemiskinan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022**

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	8,51	8,23	9,15	9,71
2	Garis Kemiskinan (Rp)	434.609	474.056	498.487	553.082
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,02	4,79	5,25	5,50
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,94	0,51	0,47	0,62
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,30	0,09	0,07	0,11

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2022, diolah

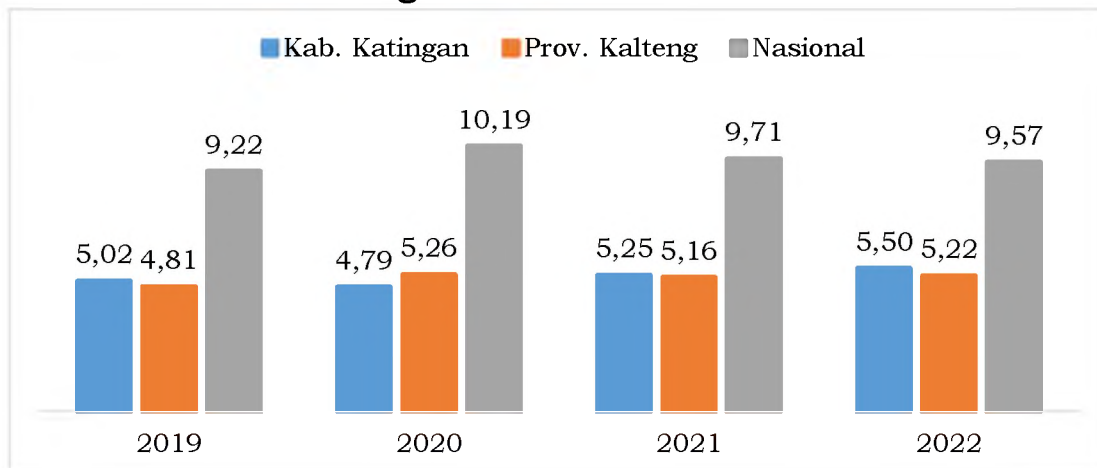
Data menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Katingan selama periode 2019 sampai 2022 mengalami fluktuasi namun lebih cenderung menurun. Pada tahun 2019 menunjukkan angka 0,94, pada tahun 2020 menunjukkan angka 0,51, pada tahun 2021 menunjukkan angka 0,47 dan pada tahun 2022 menunjukkan pada angka 0,62. Peningkatan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar. Seperti halnya indeks kedalaman kemiskinan, selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2022 indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan. Data tahun 2019 menunjukkan angka 0,30, sedangkan di tahun 2020 turun menjadi 0,09, selanjutnya di tahun 2021 turun lagi berada di angka 0,07 dan kemudian ditahun 2022 meningkat kembali di angka 0,11. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat mengalami penurunan, sebab semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Katingan selama periode 2019 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi. Kecenderungan mengalami kenaikan ini juga terjadi pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah, posisi Katingan fluktuasi. Namun bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional yang berada di angka 9,57% pada



tahun 2022, maka persentase penduduk miskin Katingan jauh lebih rendah 5,50%.

Gambar 2.9
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: - Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2022, diolah
- Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2023, diolah
- BPS RI Tahun 2023, diolah

2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Katingan dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 2.17 **Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022**

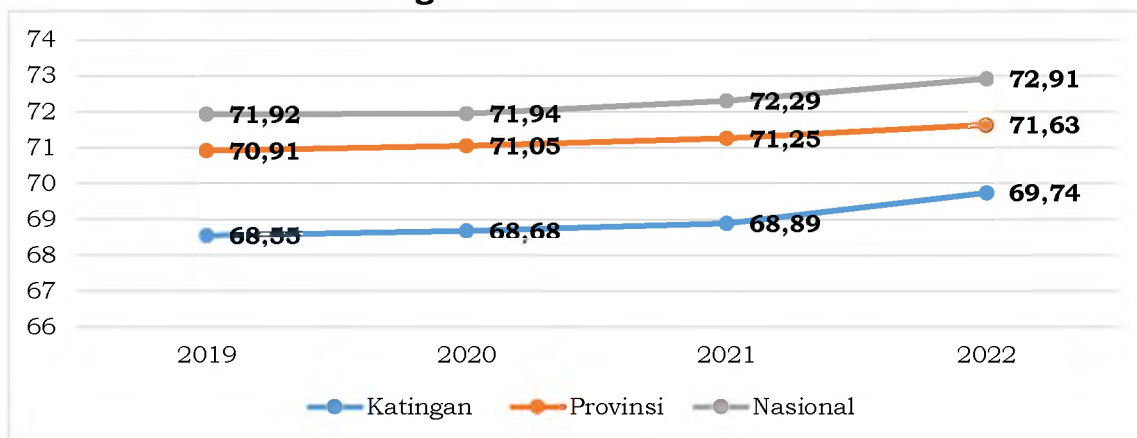
Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
IPM Kabupaten (%)	68,55	68,68	68,89	69,74
IPM Provinsi (%)	70,91	71,05	71,25	71,63
IPM Nasional (%)	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2022, diolah



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Katingan selama periode 2019-2021 masih berada dalam kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} \leq 70$) dan belum mampu meningkat masuk dalam kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$) atau sangat tinggi ($\text{IPM} > 80$). Di tingkat Provinsi pada periode 2019-2022, IPM Kabupaten Katingan masih berada pada urutan ke 10. Kondisi menggambarkan bahwa persoalan pembangunan manusia di Kabupaten Katingan masih harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Meski trend IPM Kabupaten Katingan meningkat, namun posisinya masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Pada Tahun 2022 IPM Provinsi Kalimantan Tengah berada pada angka 71,63 dan IPM Nasional sebesar 72,91. Walau demikian, berdasarkan gambar dibawah terlihat bahwa Kabupaten Katingan mengikuti trend peningkatan IPM dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.

Gambar 2.10
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2022, diolah

2.2.7. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan.

Pada tahun 2019 Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Katingan adalah 99,68 persen dan di tahun 2020 menurun menjadi 99,20 persen namun di tahun 2021 kembali meningkat menjadi 99,78 persen dan turun kembali pada tahun 2022 menjadi 99,70 persen.

Tabel 2.18 **Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2019-2022**

Tahun	Angka Melek Huruf
2019	99,68
2020	99,20
2021	99,78
2022	99,70



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2022, diolah

2.2.8. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Secara umum Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Katingan selalu meningkat selama periode tahun 2019-2022. Angka Harapan Lama Sekolah di tahun 2019 sebesar 12,51 tahun dan di tahun 2022 menjadi 12,97 tahun. Sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah di tahun 2019 sebesar 8,66 tahun dan meningkat terus menjadi 8,78 tahun di tahun 2022. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Katingan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP. Berikut data harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tahun 2019-2021.

Tabel 2.19 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	12,51	12,67	12,81	12,97
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	8,66	8,67	8,68	8,78

Sumber: - Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2022, diolah
- Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2023, diolah

2.2.9. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan disuatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Angka Harapan Hidup Kabupaten Katingan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 semakin lama semakin meningkat, pada tahun 2019 Angka Usia Harapan Hidup mencapai 65,70 terus meningkat sampai tahun 2022 yaitu 66,16. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk hidup, mencapai usia 65-66 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Katingan ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baik teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.20 Angka Harapan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	65,70	65,78	65,87	66,16

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2022, diolah

2.2.10. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan status gizi dilihat berdasarkan indeks berat badan menurut umur. Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan posisi fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada Tahun 2019 prevalensi balita gizi buruk mencapai angka 2, selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 0,14, meningkat kembali pada tahun 2021 pada angka 0,74 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,7. Keseluruhan temuan Balita dalam kondisi gizi buruk telah ditangani dan mendapat perawatan sedini mungkin di Puskesmas maupun RSUD Mas Amsyar Kasongan. Adapun perkembangan Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Katingan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.21 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	2	0,14	0,74	0,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2023, diolah

2.2.11. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Secara penghitungan, IPG merupakan rasio dari IPM laki-laki terhadap IPM perempuan. Dengan menggunakan angka IPG, dapat diketahui perbedaan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.



Tabel 2.22 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,57	85,41	85,38	85,38
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,57	66,36	67,66	67,66

Sumber: BPS RI Tahun 2022, diolah

Berdasarkan data sepanjang Tahun 2019 sampai dengan 2022, diketahui bahwa IPG di Kabupaten Katingan mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender semakin lama semakin besar. Pada tahun 2019 angka IPG sebesar 85,57 menurun sampai tahun 2022 menjadi 85,38. Sementara IDG pada periode yang sama menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dimana pada Tahun 2019 sebesar 66,57 menurun di tahun 2020 menjadi 66,36, namun sampai di tahun 2022 kembali meningkat menjadi 67,66. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kecenderungan meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

2.2.12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf "U" terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	70,79	64,55	64,38	65,90

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2022, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi lebih cenderung menurun. Pada tahun 2019



sebesar 70,79 persen, menurun sampai dengan tahun 2021 menjadi 64,38 persen dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 65,90 persen.

2.2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah angka yang menunjukkan persentase rasio jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja (15-64) tahun. Penganggur terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selengkapnya angka pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupten Katingan sebagai berikut:

Tabel 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,45	5,69	5,50	5,33

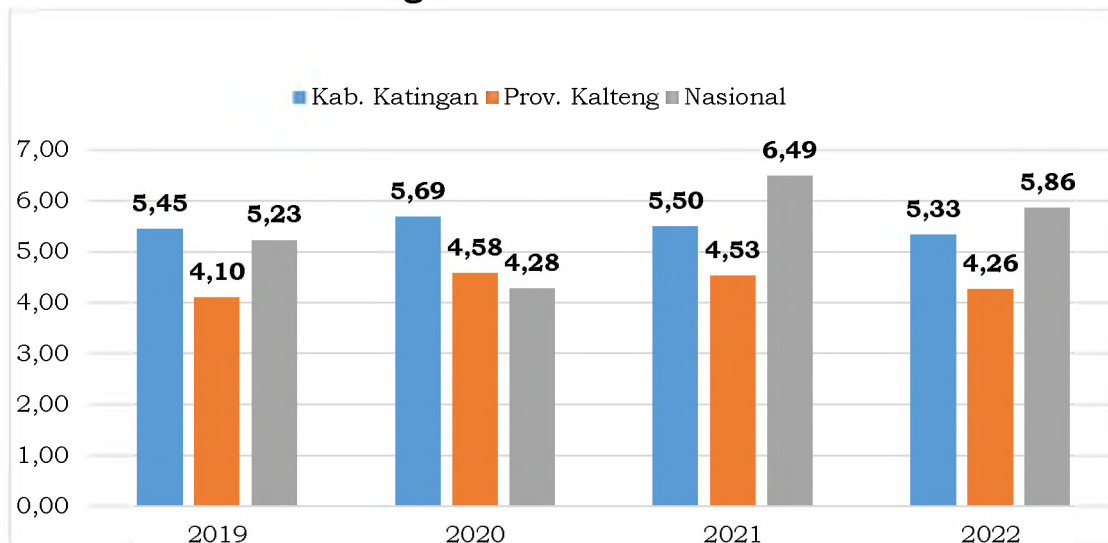
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2022, diolah

Perkembangan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan posisi fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Dilihat dari tahun 2019 penduduk Kabupaten Katingan yang tercatat sebagai pengangguran terbuka berjumlah 5,45 persen dari jumlah angkatan kerja yang ada di wilayah Kabupaten Katingan, angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 yang berjumlah 5,69 persen dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 yang berjumlah 5,50 persen dari total jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Katingan dan turun kembali pada tahun 2022 menjadi 5,33 persen

Perkembangan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan posisi masih diatas Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, selanjutnya di tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan masih diatas Provinsi Kalimantan Tengah namun di bawah Nasional yang mengalami peningkatan. Selengkapnya angka pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: - Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2022, diolah
- Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2023, diolah
- BPS RI Tahun 2023, diolah

2.2.14. Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Propenas), perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Selama ini Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Keputusan ini belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang merupakan peraturan pengganti dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.



Dalam peraturan ini, terdapat 9 unsur IKM yang dijadikan pengukur tingkat kepuasan masyarakat, yakni (1) persyaratan; (2) prosedur; (3) waktu pelayanan; (4) biaya/taruf; (5) produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) maklumat pelaksana; dan (9) penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Selama ini pelaksanaan survey IKM di Kabupaten Katingan hanya pada dua instansi saja, yaitu RSUD Mas Amsyar Kasongan dan Dinas Dukcapil sedang di perangkat daerah lain yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat belum terlaksana seperti pada Dinas Penanaman Modal PTSP, Puskesmas dan Kecamatan/Kelurahan. Salah satu kendalanya adalah jumlah responden yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 sebanyak minimal 150 orang dari jumlah populasi penerima layanan tidak terpenuhi.

Tabel 2.25 Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat pada Unit Pelayanan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	77,09	78,03	82,64	84,30

Sumber: Lakip dan Lkip Kabupaten Katingan, diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik merupakan gabungan penilaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan yang telah dikumpulkan secara mandiri oleh beberapa perangkat daerah seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, RSUD Mas Amsyar Kasongan.

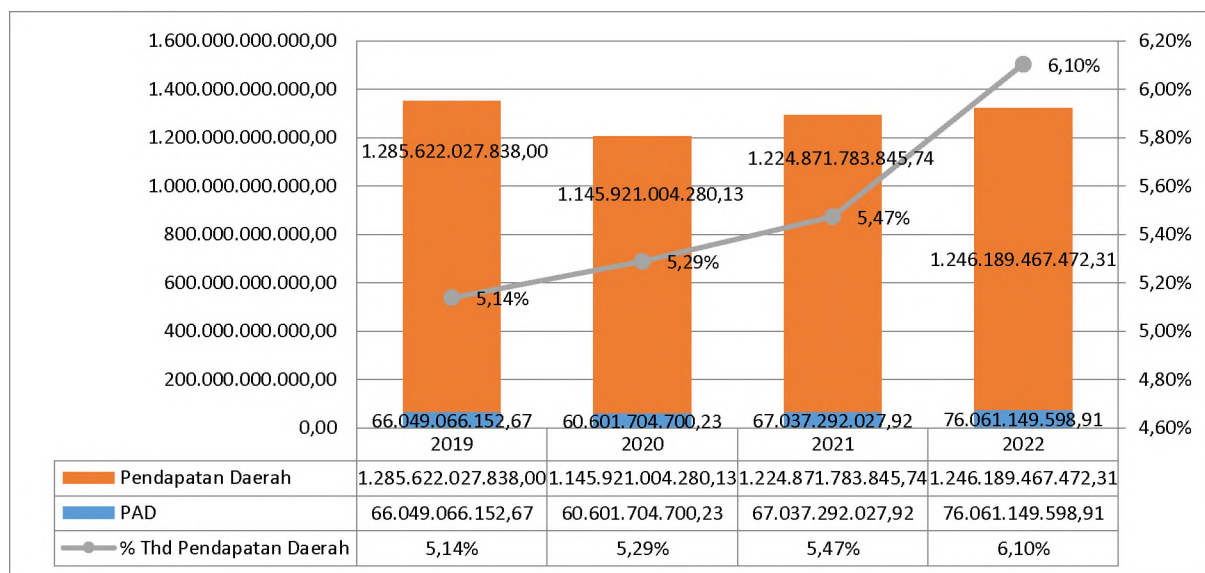
Jika dibandingkan dengan target dan capaian di tahun 2019 dan tahun 2022 maka Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat terus meningkat setiap tahun. Terpenuhinya target Indikator ini karena di beberapa Perangkat Daerah antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, RSUD Mas Amsyar Kasongan telah melakukan terobosan serta inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Proses pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga dapat membuat penilaian kepuasan masyarakat meningkat. Inovasi layanan pada tahun-tahun selanjutnya akan terus ditingkatkan sehingga target SPM dan target Indikator Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik akan tercapai bahkan dapat melampaui dari target.



2.2.15. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dan kontribusi PAD periode tahun 2019-2022.

Gambar 2.12
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2019-2022



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan 2023, diolah

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan masih sangat kecil. Presentase PAD tertinggi ada di tahun anggaran 2022 yang mencapai 6,10 persen.

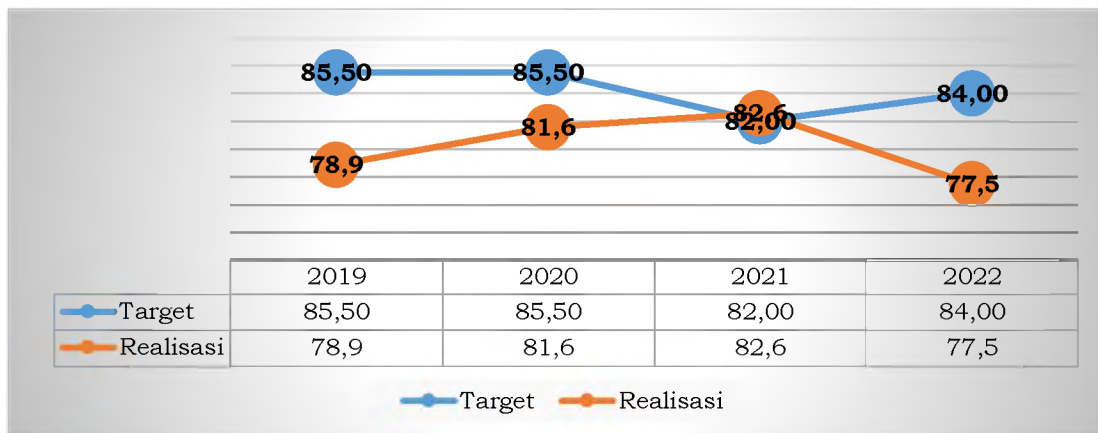
2.2.16. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan atau *Desirable Dietary Pattern* adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. Kesimbangan jumlah antar kelompok pangan merupakan syarat terwujudnya keseimbangan gizi, dengan demikian PPH dapat digunakan sebagai ukuran keseimbangan dan keanekaragaman pangan. Dengan terpenuhi kebutuhan energi dari berbagai kelompok pangan sesuai PPH secara implisit kebutuhan zat gizi juga terpenuhi. Oleh karena itu, skor pola konsumsi pangan mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan dan seimbang. Adapun yang dimaksud dengan nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi



lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang.

Gambar 2.13
Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Katingan
Tahun 2019-2022



Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, 2023, diolah

2.2.17. Opini BPK

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Katingan pada kurun waktu 2019-2022 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.26 **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022**

Uraian	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	NA

Sumber: BKAD Kabupaten Katingan, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Katingan pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan prestasi yang baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.2.18. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB

Sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB adalah sektor yang paling besar kontribusinya terhadap struktur ekonomi di Kabupaten Katingan. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kelima sub sektor ini membuka lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Katingan.

Data beberapa tahun terakhir menunjukkan terjadi kecenderungan penurunan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2019 sebesar 25,58 persen terus mengalami



peningkatan sampai tahun 2021 sebesar 27,5, namun pada tahun 2022 mengalami menurun sampai 26,51.

Tabel 2.27 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	25,58	26,71	27,54	26,51
Laju Pertumbuhan (%)	6,57	-2,27	1,93	1,47

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2023, diolah

Hingga tahun 2021, Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih tetap menjadi kontributor terbesar dalam PDRB Katingan. Kontribusinya terhadap PDRB Katingan tahun 2022 atas dasar harga berlaku sebesar 26,51 persen. Nilai tambah yang dihasilkan oleh Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berkontribusi besar terhadap kategori ini.

Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sangat berfluktuasi selama 4 (empat) tahun terakhir. Pada tahun 2022, Kategori ini mengalami pertumbuhan positif 1,47 persen, lebih lambat dibanding tahun sebelumnya.

2.2.19. Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian dalam struktur PDRB menurut lapangan usaha terdiri atas 5 (lima) subsektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian. Hingga kini, sebagian besar masyarakat Katingan masih berusaha di sektor pertanian dalam arti luas, selebihnya terdistribusi pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Selain didukung oleh ketersediaan lahan yang luas, potensi pada sektor pertanian di Kabupaten Katingan masih memiliki peluang besar untuk lebih dikembangkan guna menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Peningkatan pengelolaan potensi di sektor pertanian tentunya sangat penting untuk diupayakan guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan data pada tabel di bawah, diperoleh informasi bahwa produktivitas tanaman pangan utama berupa padi di Kabupaten Katingan dalam beberapa tahun terakhir (2019-2021) rata-rata menghasilkan produksi 3,1 ton per hektarnya. Upaya untuk meningkatkan produksi di sektor pertanian hendaknya menjadi perhatian bagi berbagai pihak mengingat potensi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan berupa ketersediaan lahan dan tenaga kerja sangatlah besar. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pengayaan bibit unggul dan penggunaan teknologi pertanian baik untuk pengolahan lahan maupun pemupukan.



Tabel 2.28 Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian / Jenis Komoditi	Tahun Produksi			
	2019	2020	2021	2022
A. Produksi Sektor Pertanian				
1. Produksi Tanaman Pangan				
a. Padi (ton)	44.597	48.573	64.216	-
1) Padi Sawah (Ton)	38.845	42.915	52.011	-
2) Padi Ladang (Ton)	7.752	5.658	12.205	-
b. Jagung (ton)	93	82	133	-
c. Kedelai (ton)	4	-	2	-
d. Kacang Tanah (Ton)	21	21	2	-
e. Kacang Hijau (Ton)	-	4	1	-
f. Ubi kayu (ton)	2.653	2.518	1.774	-
g. Ubi jalar (ton)	196	191	143	-
2. Produksi Tanaman Holtikultura				
a. Bawang merah (kw)	-	6	14	-
b. Cabe Besar (kw)	5,50	-	77	-
c. Cabe Rawit (kw)	78,50	1.079	914	-
d. Durian(kw)	18.437	5.303	1.088	-
e. Mangga (kw)	1.958	651	506	-
f. Pisang (ton)	5.514	10.310	10.514	-
g. Sayur-sayuran (kw)	4.375	6.261	5.331,0	-
h. Buah-buah lainnya (kw)	37.087	31.514	21.396	-
Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	16.318,0	17.742	20.551	-
Produktivitas tanaman padi (ton/ha)	31,87	31,85	31,30	-
B. Produksi Sektor Perkebunan				
1. Sawit (ton)	15.646,98	15.742,87	11.307,8	-
2. Karet (ton)	2.677,37	2.776,90	2.647,3	-
3. Kelapa (ton)	166,64	167,32	166,3	-
4. Kopi (ton)	0,31	0,31	0,30	-
Luas Areal Tanaman Perkebunan (ha)				
1. Sawit (ha)	16,861,13	16,893,16	16.903,00	-
2. Karet (ha)	9.229,27	19.285,00	19.193,10	-
3. Kelapa (ha)	488,43	457,88	491,12	-
4. Kopi (ha)	60,91	57	15,94	-
Produktivitas sawit (ton/ha)	9,28	9,32	6,69	-
Produktivitas karet (ton/ha)	1,39	1,44	1,38	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Katingan, 2023

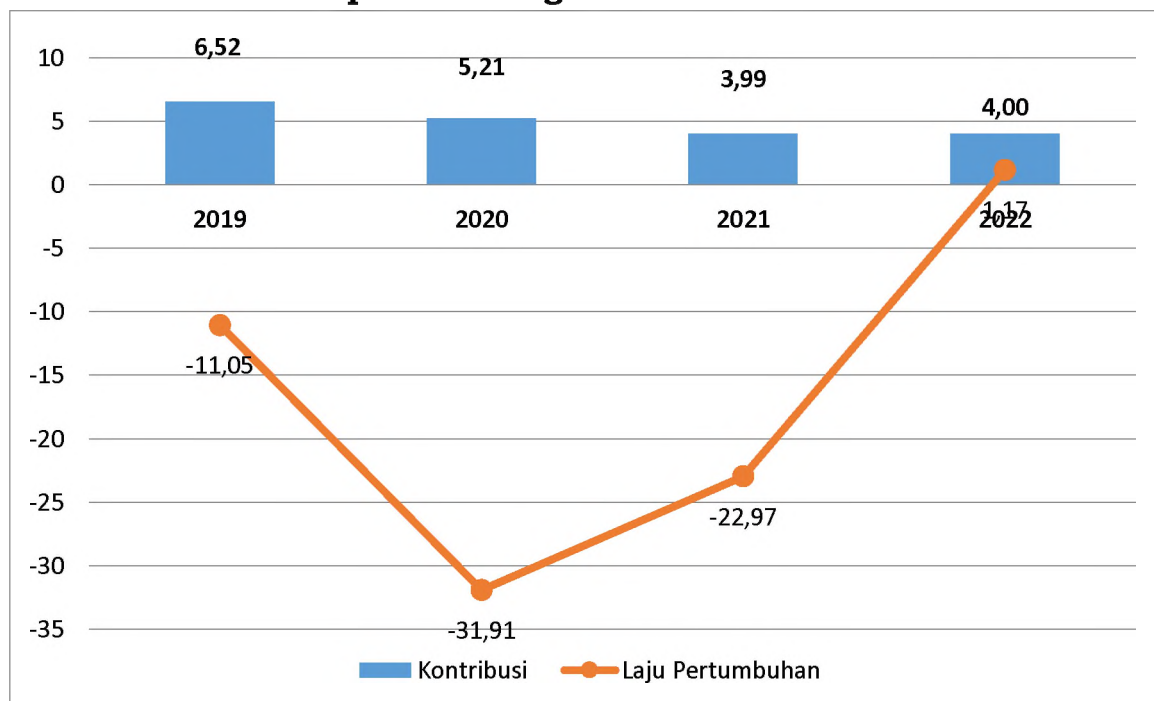


2.2.20. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Dari tahun ke tahun, Kategori Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi yang cenderung menurun terhadap pembentukan PDRB Katingan. Kontribusinya pada tahun 2022 menjadi sekitar 4,00 persen atau 399,23 miliar rupiah.

Laju Pertumbuhan kategori Pertambangan dan Penggalian fluktuatif selama 4 (empat) tahun terakhir. Tahun 2022, laju pertumbuhan kategori ini adalah sebesar 1,17 persen. Hal ini berarti bahwa produksi pertambangan dan penggalian pada tahun 2022 meningkat bila dibandingkan dengan produksi di tahun 2021. Hal ini dapat disebabkan oleh tutupnya salah satu Perusahaan pertambangan bijih logam terbesar di Katingan dan juga penurunan produksi pada usaha penggalian.

Gambar 2.14
Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB
Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022



Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2023, diolah

2.2.21. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB

Dalam siklus ekonomi, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen.

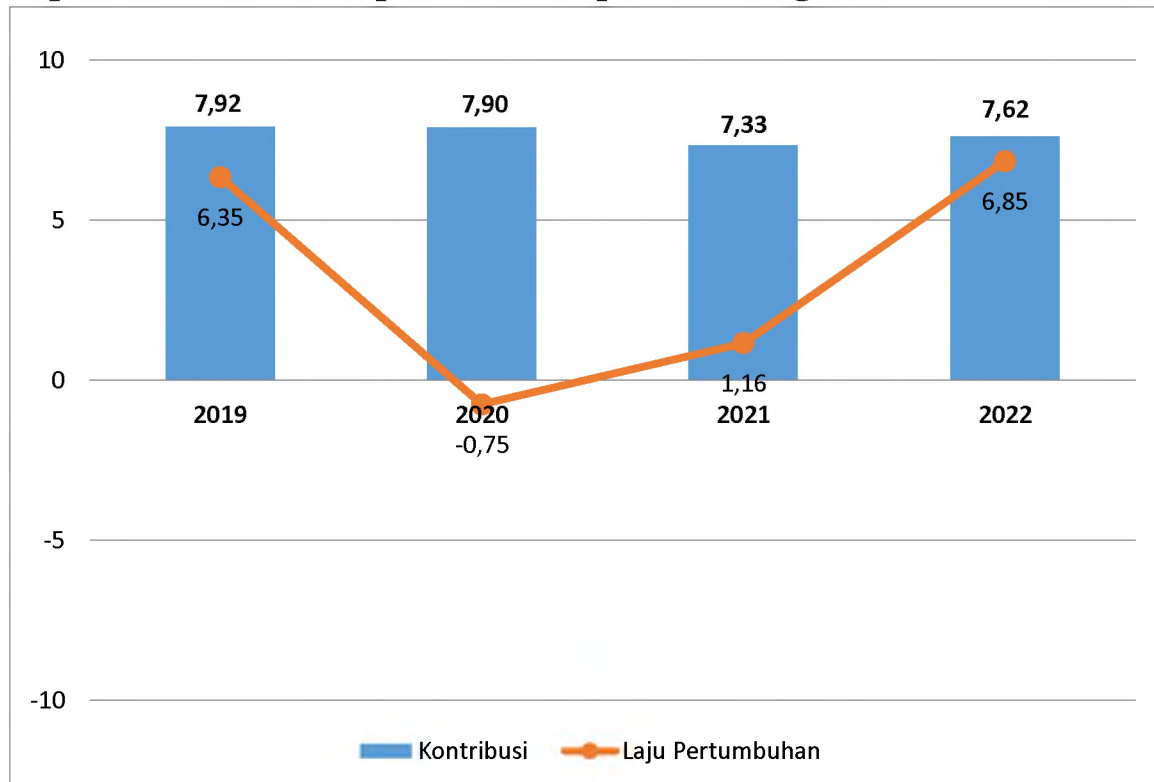
Dari tahun ke tahun, lebih dari 7 persen dari total PDRB Katingan atas dasar harga berlaku merupakan sumbangan dari kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selama empat tahun terakhir kontribusi kategori ini fluktuatif, bahkan pada tahun 2022 kontribusi kategori ini mencapai 759,79 miliar rupiah atau sekitar 7,62 persen.



Secara umum, pertumbuhan Kategori ini fluktuatif selama periode 2019-2022. Namun pada tahun 2022, mengalami percepatan menjadi 6,85 persen. Pertumbuhan kategori ini sejalan dengan pergerakan pertumbuhan produksi di sektor barang. Karena sesuai dengan wilayahnya, kegiatan ekonomi di Katingan khususnya perdagangan masih digerakkan oleh kegiatan sektor barang.

Gambar 2.15

Peranan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019–2022



Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2023, diolah

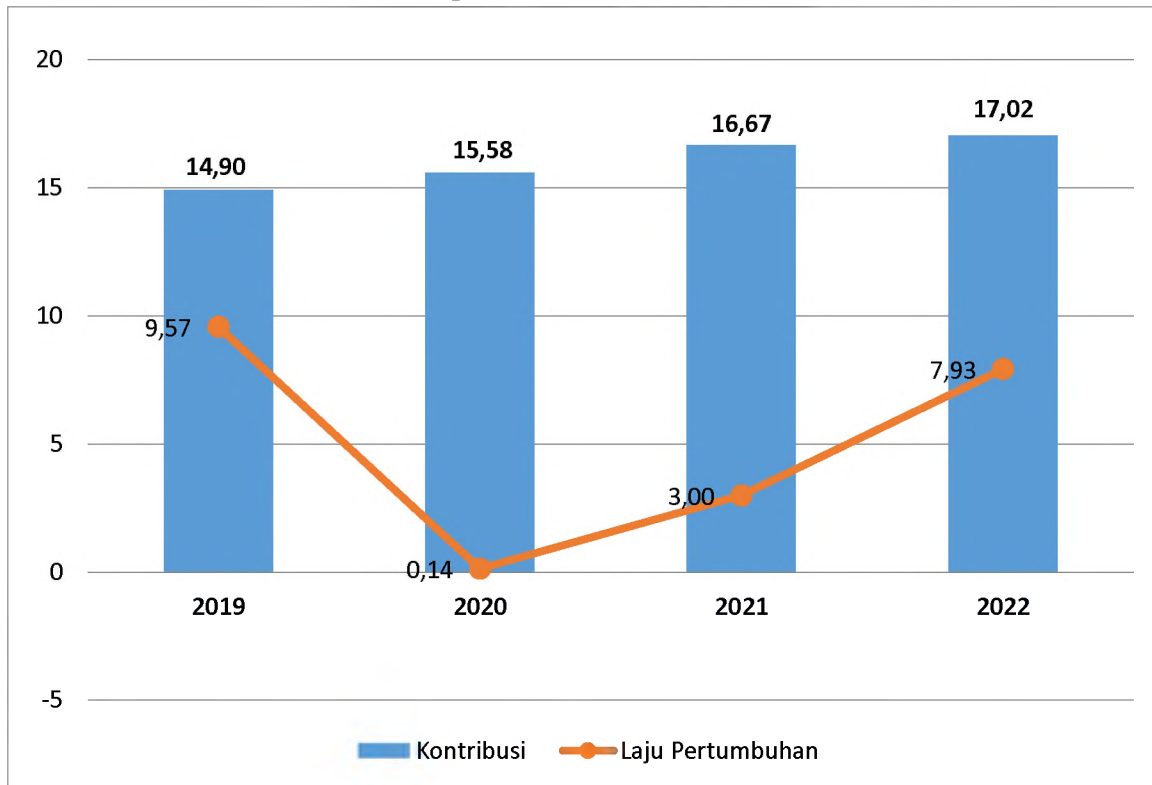
2.2.22. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Katingan tahun 2022 mencapai 17,02 persen. Industri ini merupakan kontributor terbesar kedua setelah Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Industri CPO (Crude Palm Oil) yang ada di Katingan memiliki peranan yang besar terhadap nilai tambah kategori ini.

Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari tahun 2019 sampai dengan 2022, pada tahun 2022 pada posisi nominal 1,69 triliun rupiah, dengan laju pertumbuhan yang berfluktuasi. Laju pertumbuhan kategori ini tahun 2022 sebesar 7,93 persen. Lebih cepat dari tahun sebelumnya, yaitu 3,00 persen pada 2021.



Gambar 2.16
Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022



Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2023, diolah

2.2.23. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB

Peranan sektor pariwisata berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pajak dan retribusi daerah, serta menciptakan lapangan kerja apabila dikelola dengan baik. Di Kabupaten Katingan, potensi dari sektor pariwisata belum dikelola secara baik dan optimal, sehingga kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah masih kecil. BPS Kabupaten Katingan hingga tahun 2022 belum pernah merilis data penerimaan PDRB dari sektor ini. Namun kedepannya, melihat peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun lokal, Pemerintah Kabupaten Katingan berharap sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ukuran berkembangnya sektor pariwisata di suatu daerah dilihat melalui peningkatan jumlah pengunjung, pajak maupun retribusi daerah, maupun penggunaan jasa transportasi.

Pendekatan dalam menentukan kontribusi pariwisata terhadap PDRB, untuk sementara digantikan/dilihat melalui jumlah realisasi PAD dari kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Katingan yang tercatat hanya pada obyek tertentu, seperti obyek wisata Bukit Batu-Kasongan yang dihitung dari jumlah tiket masuk yang terjual. Untuk wisatawan mancanegara sampai saat ini belum ada data terkait jumlah pengeluaran wisatawan, lama tinggal, dan sumbangan bagi PAD. Berikut ini



Tabel 2.29 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PADdi Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	235.758.606	43.380.000	65.853.500	351.301.000

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan, 2023

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Katingan, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

2.3.1.1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Katingan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.30 Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
APK SD/MI	115,44	114,12	112,73	113,37
APK SMP/MTS	77,73	78,27	80,13	81,19
APK SMA/MA/SMK	111,76	109,25	107,81	108,93

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2020-2023, diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa di Kabupaten Katingan angka partisipasi kasar yang paling tinggi yaitu pada usia SD/MI, yaitu 7-



12 tahun dengan APK di atas 113,37 persen pada tahun 2022 dan diikuti APK SMA/MA/SMK di atas 108,93 persen.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Katingan untuk jenjang pendidikan dasar maupun menengah cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun-tahun tertentu terjadi peningkatan dan penurunan.

Tabel 2.31 **Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022**

Uraian	2019	2020	2021	2022
APM SD/MI	99,87	99,85	100,00	99,11
APM SMP/MTS	76,05	75,98	67,83	78,75
APM SMA/MA/SMK	67,03	67,62	75,84	55,69

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2023 dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2022, diolah

Berdasarkan data sebagaimana disajikan pada tabel diatas, diketahui bahwa APM SD/MI pada periode 2019 sampai dengan 2022 pada umumnya mengalami fluktuasi berkisar pada angka 99-100 persen. Selanjutnya untuk APM SMP/MTs pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 juga mengalami fluktuasi, dimana APM SMP/MTS masih dibawah angka 75-79 persen. Begitu pula perkembangan APM SMA dan sederajat yang masih mengalami fluktuasi menunjukkan angka kisaran masih dibawah antara 55-68 persen.

c. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi sekolah memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32 **Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022**

No	Uraian APS	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	99,88	99,85	99,78	99,18
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	95,67	96,76	97,69	94,61
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	69,91	69,63	69,81	66,32
4	Perguruan Tinggi	22,19	23,65	-	-



Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2020-2023, diolah, dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2022, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perjenjang usia sekolah yaitu usia SD, usia SLTP, usia SLTA, dan usia Perguruan Tinggi. Di Kabupaten Katingan angka partisipasi sekolah yang paling tinggi pada tahun 2019 yaitu pada usia SD 7-12 tahun, dengan APS diatas 99,88%, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Sedangkan angka partisipasi sekolah yang paling rendah di Kabupaten Katingan yaitu usia 19-24 tahun atau perguruan tinggi yaitu sebesar 22,19% pada tahun 2019.

d. Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, selain untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Angka Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33 Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

NO	Tahun Ajaran	Jenjang Pendidikan			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2018/2019	15 : 1	12 : 1	12 : 1	15 : 1
2	2019/2020	12 : 1	11 : 1	12 : 1	15 : 1
3	2020/2021	14 : 1	12 : 1	13 : 1	15 : 1
4	2021/2022	12 : 1	11 : 1	12 : 1	13 : 1

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2022

Dengan membandingkan data pada tabel di atas terhadap standar nasional rasio murid guru menurut Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 sebesar 20:1, ketersediaan guru di Kabupaten Katingan sudah sangat mencukupi secara umum. Pada tahun ajaran 2020/2021, rata-rata setiap guru SD/ sederajat bertanggung jawab untuk mengajar sekitar 14 siswa, pada jenjang SMP/ sederajat rata-rata setiap guru bertanggung jawab mengajar sekitar 12 orang siswa, pada SMA/MA rata-rata setiap guru bertanggung jawab mengajar sekitar 13 orang siswa dan SMK rata-rata setiap guru bertanggung jawab mengajar sekitar 15 orang siswa. Informasi tersebut menunjukkan bahwa beban pengajar pendidik begitu ringan sehingga menimbulkan espektasi akan capaian output kualitas pendidikan yang tinggi padahal beberapa aspek seperti kualifikasi tenaga pendidik, variasi kondisi kelas, dan pengalaman tenaga pendidik belum tercakup pada indikator tersebut.

e. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah jumlah guru berijazah kualifikasi D1/D-IV dibagi dengan jumlah guru SD/MI, SMP/MTs



dan SMA/SMK/MA dikalikan 100. Angka Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang ada di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

No	Uraian Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	84,85	77,94	86,41	72,17

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2022 sebesar 72,17 persen dan meskipun perkembangannya dari tahun 2019 sampai dengan 2021 fluktuatif.

2.3.1.2. Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Di Kabupaten Katingan, fasilitas kesehatan yang tersedia beragam, antara lain rumah sakit, puskesmas, poskesdes, posyandu, maupun klinik/praktek dokter.

a. Angka Kematian bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi yang berusia kurang dari satu tahun di suatu wilayah tertentu selama satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKB merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pelayan perinatal. Adapun perkembangan kematian bayi di Kabupaten Katingan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.35 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2019 - 2022

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kelahiran Hidup	3.379	3.244	3.019	2.928
2.	Jumlah Kematian Bayi	45	20	53	25
3.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	13,3	6,2	9,8	8,53

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi pada tahun 2019 sebesar 13,3, menurun di tahun 2020 menjadi 6,2, dan meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 9,8 dan pada tahun 2022 turun kembali menjadi 8,53.



b. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berumur dibawah 5 (lima) tahun disuatu wilayah tertentu selama satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan, selain itu indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dalam tingkat kemiskinan penduduk. Berikut disajikan tabel Angka Kematian Balita di Kabupaten Katingan tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.36 **Angka Kematian Balita di Kabupaten Katingan Tahun 2019 – 2022**

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup	15,4	6,8	18,1	0,68

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Angka Kematian Balita Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sebesar 15,4, turun pada tahun 2020 menjadi 6,8, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 18,1 dan pada tahun 2022 turun menjadi 0,68.

c. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Adapun angka kematian ibu di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.37 **Angka Kematian Ibu di Kabupaten Katingan Tahun 2019 – 2022**

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	207,16	93	151,69	170,76

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Angka Kematian Ibu Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sebesar 207,16, menurun pada tahun 2020 menjadi 93, namun meningkat kembali tahun 2021 menjadi 151,69 dan pada tahun 2022 menjadi 170,76.

d. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka



diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Adapun jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2019 sebanyak 203 posyandu dan pada tahun 2022 dengan jumlah 204 posyandu.

Tabel 2.38 Rasio Posyandu per satuan Balita di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Posyandu (unit)	203	203	204	204
2	Jumlah Balita (anak)	14.142	14.554	12.341	15.450
3	Rasio Posyandu	1,4	1,4	1,33	1,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2023

e. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Melalui puskesmas dan puskesmas pembantu, masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan akan dengan mudah memperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan. Rasio puskesmas dan pustu merupakan perhitungan untuk mengetahui suatu wilayah dalam cakupannya untuk memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Tujuan agar pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Adapun jumlah puskesmas dan puskesmas yang tersebar di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat jumlah puskesmas di Kabupaten Katingan berjumlah 16 Puskesmas hingga tahun 2022. Sementara jumlah puskesmas pembantu pada tahun 2019 berjumlah 114 puskesmas pembantu, meningkat pada tahun 2021 sebanyak 123 puskesmas pembantu dan pada tahun 2022 menjadi 125 puskesmas pembantu.

Tabel 2.39 Rasio Puskesmas di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Puskesmas	16	16	16	16
2	Puskesmas Pembantu	113	113	113	115
3	Jumlah Penduduk (ribu)	169.997	162.222	163.099	163.989
4	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	2,82	2,96	2,94	2,93
5	Rasio Pustu per 10.000 penduduk	0,66	0,70	0,69	0,70

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2023



f. Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Adapun Rasio Rumah Sakit di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.40 Rasio Rumah Sakit di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Rumah Sakit	1	1	1	2
2	Jumlah Penduduk (ribu)	169.997	162.222	163,099	163.989
3	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	0,70	0,62	0,63	1,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2023

Diketahui bahwa jumlah fasilitas Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 hanya berjumlah berjumlah 1 (satu) Rumah Sakit dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 2 (dua) rumah sakit, hal ini tentunya menjadi kekurangan apabila melihat rasio ketersediaannya.

g. Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk adalah jumlah dokter dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1000. Adapun Rasio dokter per satuan penduduk yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41 Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Dokter (orang)	57	57	61	59
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	169.997	162.222	163.099	163,099
3	Rasio dokter per satuan penduduk	0,34	0,36	0,37	0,036

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2022, diolah, Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2023, diolah dan Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2023, diolah

h. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi



keselamatan ibu dan bayinya Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya, seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa. Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan tahun 2019-2022 di Katingan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.42 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Nakes (jiwa)	3.180	3.028	3.161	2.727
Jumlah seluruh ibu bersalin (jiwa)	3.801	3.938	2.510	3.209
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (persen)	83,66	80,3	79,4	84,9

Sumber: Profile Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 83,66 persen dan mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat sampai tahun 2022 hingga menjadi 84,9 persen.

i. Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization*

Cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* (UCI) adalah jumlah desa atau kelurahan UCI dibagi dengan jumlah seluruh desa atau kelurahan dikali 100. Adapun Cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* yang ada di Kabupten Katingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.43 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (%)	71,4	75,2	78,3	85,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa indikator cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan, kondisi ini perlu dicermati oleh pemerintah daerah, sebab akan berdampak negatif bagi kondisi kesehatan masyarakat, karena Desa/kelurahan UCI dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.



j. Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan adalah jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali 100.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Katingan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebesar 100 persen atau dengan kata lain seluruh pasien balita gizi buruk yang ditemukan selalu diberikan perawatan yang maksimal.

Tabel 2.44 Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan (%)	100	100	100	100
2	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan (anak)	5	5	10	37
3	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan (anak)	5	5	10	37

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2023, diolah, Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2023

k. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA adalah Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja pada selama satu tahun berbagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di satu wilayah pada kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.45 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	57,82	30,06	28,20	32,44
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja	218	132	152	181
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan di satu wilayah kerja (suspek)	377	493	539	558

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2023



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) pada tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi. Di tahun 2019 sebesar 218 penderita, mengalami penurunan jumlah penderita sampai 132 penderita pada tahun 2020, meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 152 penderita dan pada tahun 2022 menjadi 181 penderita. Peningkatan kasus penderita baru TBC BTS (+) perlu diwaspadai dan ditangani agar tidak menjadi semakin berkembang dan menular. Upaya pengobatan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan terus dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun. Ini terlihat dari statistis indicator perkiraan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja yang terus meningkat, bahkan jauh melampaui jumlah penderita baru.

1. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah Jumlah penderita DBD yang ditanani sesuai SOP di suatu wilayah selama satu tahun berbagi dengan penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah pada kurun waktu yang sama. Adapun Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.46 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100
2	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP (orang)	89	51	66	66
3	Jumlah penderita DBD yang ditemukan (orang)	89	51	66	66

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP setiap tahun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 selalu tuntas sebanyak jumlah penderita DBD yang ditemukan.

m. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali 100.

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa indikator cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Katingan selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana tahun-tahun tertentu memiliki cakupan yang luas dan mencapai 98,7 % pada tahun 2019 dan menurun sedikit pada tahun 2020



mencapai 92,2%. Namun tak dipungkiri pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan cakupan layanan menjadi 68,7% persen akan tetapi pada tahun 2022 mulai meningkat kembali ke angka 81,3% persen. Adapun rincian Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Katingan pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.47 Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Cakupan kunjungan bayi (%)	98,7	92,2	68,7	81,3
2	Jumlah Kunjungan Bayi (anak)	3.336	2.991	2.076	2.383
3	Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup (anak)	3.379	3.244	3.019	2.928

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2023

n. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, dapat dilihat bahwa indikator cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan selama 4 (tahun) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 pada tahun 2019 sebesar 84,9 persen, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 79,1 persen, namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali hingga menjadi 86,0 persen dan menurun Kembali pada tahun 2022 menjadi 83,7 persen. Adapun rincian cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan pada periode 2019 sampai dengan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.48 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)	84,9	79,1	86,0	83,7
Jumlah seluruh Ibu Hamil	3.977	3.941	3.321	3.342
Jumlah Kunjungan Ibu Hami K4 (%)	3.380	3.118	2.858	2.798

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2023

o. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa indikator cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Katingan selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana cakupan Pelayanan Ibu Nifas pada tahun 2019 sebesar 91,08 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 93,23 persen, pada tahun 2021 terjadi penurunan kembali menjadi 76,88 persen. Namun pada tahun 2022 terjadi kenaikan kembali hingga menjadi 88,84. Adapun rincian Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten, sebagai berikut:



Tabel 2.49 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (%)	82,02	80,0	82,2	79,0
Jumlah Kunjungan Nifas (KF4)	3.262	3.151	2.599	2.523
Jumlah Ibu Bersalin	3.977	3.938	3.161	3.190

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2023

p. Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa indikator Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Katingan selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani pada tahun 2019 sebesar 8,24 persen, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 4,48 persen dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 8,40 dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 4,93 persen.

Tabel 2.50 Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani (%)	8,28	4,48	8,40	4,93
Jumlah Sasaran Neonatal Resti	507	535	452	608
Jumlah Nonatal Resti ditangani	42	24	38	30

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2023

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Panjang Jalan di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 adalah 807,59 Km, dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 822,538 Km. Dari seluruh jalan yang ada di Kabupaten Katingan, pada tahun 2022 hanya 281,788 Km dalam kondisi baik. Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, kondisi ini sedikit mengalami peningkatan. Adapun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang ada di Kabupaten Katingan Tahun 2019 – 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.51 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap dan Baik di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Kondisi Jalan	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	208,718	215,208	264,246	281,788
Panjang Jalan Kondisi Mantap (km)	237,747	247,158	292,266	301,053
Panjang Jalan Keseluruhan (km)	807,59	808,665	817,544	822,538
Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	25,84	26,61	32,322	34,258
Proporsi Panjang Jalan Kondisi Mantap (%)	29,4	30,56	35,749	36,60

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Katingan, 2023

b. Panjang Jalan dilalui Roda Empat

Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kabupaten Katingan hingga pada tahun 2022 yang berupa permukaan aspal sepanjang 302,542 km dan permukaan tanah sepanjang 463,209 km. Terlihat panjang jalan yang permukaannya telah diaspal masih lebih sedikit dibandingkan dengan jalan yang permukaannya tanah.

Tabel 2.52 Panjang Jalan Yang Dapat Dilalui Roda Empat di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Permukaan Aspal (km)	279,941	285,349	299,206	302,542
Permukaan Tanah (km)	483,682	478,343	471,214	463,209
Permukaan Kerikil (km)	8,912	9,918	11,739	16,351
Permukaan Lainnya (km)	807,59	35,055	0,345	0,345

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Katingan

c. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap. Luas Jaringan Irigasi Kondisi Baik di Kabupaten Katingan dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi lebih cenderung menurun. Pada tahun 2019 Luas Jaringan Irigasi Kondisi Baik adalah 3.527 Ha, mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga



menjadi 2.773,95 Ha dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2021 dan 2022 menjadi 249,20 Ha.

Tabel 2.53 Persentase Irigasi di Kabupaten Katingan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha)	3.527	2.773,95	249,20	249,20
Luas Irigasi Kabupaten (Ha)	7.373	7.373	659,05	659,05
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	47,83	38	37,81	37,81

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Katingan, 2023

d. Rasio Ruang Terbuka Hijau

Sampai saat ini Kabupaten Katingan belum memiliki aturan tertulis tentang penataan kawasan dan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, hanya masih berbentuk draf Raperda RTRWK Kabupaten Katingan. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sesuai dengan amanat UU tersebut pada pasal 26-31 diatur kewajiban daerah untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Wilayah kota Kasongan sebagai ibukota Kabupaten Katingan telah ditetapkan mencakup 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Katingan Hilir, Tasik Payawan dan Tewang Sanggalang Garing. Dengan bertambahnya luas wilayah perkotaan ini, maka RTH publik di Kabupaten Katingan yang harus tersedia adalah 8.425,4 ha.

Tabel 2.54 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Luas ruang terbuka hijau (Ha)	9.028	9.028	9.028	9.028
Luas wilayah ber HPL/HGB (Ha)	0,86	25,595	25,595	25,595
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	10,498	35,273	35,273	35,273

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Katingan, 2023

2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

a. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan



tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio Permukiman Layak Huni adalah pebandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang dihuni terhadap keseluruhan luas permukiman.

Tabel 2.55 Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Rasio Permukiman Layak Huni	0,449	0,248	NA	NA

Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Katingan, 2023

b. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang.

Tabel 2.56 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah seluruh rumah layak huni (unit)	33.702	34.135	NA	NA
Jumlah rumah di suatu wilayah (unit)	39.471	39.471	NA	NA
Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	85,38	86,48	NA	NA

Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Katingan, 2023

c. Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.



Tabel 2.57 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Sumber Air Utama untuk Minum (air kemasan, air isi ulang & leding)	39,69	41,04	52,76	40,29
Air minum bersih	72,82	80,55	78,07	62,20
Fasilitas Tempat Buang Air Besar sendiri	81,78	82,26	83,66	82,78
Fasilitas Tempat Buang Air Besar sendiri/ bersama dengan tangki septik	67,22	61,58	63,21	72,34
Sumber penerangan utama listrik	98,25	98,85	98,28	97,68

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2023, diolah

d. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri baik untuk penerangan maupun penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Menurut kelompok pelanggan, pengguna listrik terdiri dari pelanggan rumah tangga, industri, badan sosial, usaha dan pemerintah. Rumah tangga pengguna listrik adalah rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai penerangan utamanya. Berdasarkan data statistik, dapat diketahui bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN tiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 2.58 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Katingan Menurut Penerangan Utama Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Listrik PLN	81,39	79,43	82,65	81,00
Listrik Non PLN	16,86	19,42	15,63	16,68
Bukan Listrik	1,75	1,15	1,72	2,32

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2023, diolah

2.3.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

a. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di kabupaten

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di kabupaten adalah jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dibagi dengan jumlah pelanggaran K3 dikali 100. Adapun data tersebut disajikan pada tabel dibawah.



Tabel 2.59 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	81,70	95,71	70	71

Sumber: Satpol PP Kab. Katingan, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Katingan mulai tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 sebesar 81,70 persen, meningkat pada tahun 2020 menjadi 95,71 dan turun kembali di tahun 2021 menjadi 70 persen, selanjutnya pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 71 persen.

b. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten adalah jumlah mobil pemadaman kebakaran dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100. Adapun Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten pada tahun 2019 sebesar 38,53 persen, dan di tahun 2020 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 40,15 persen dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2022.

Tabel 2.60 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	38,53	38,53	40,15	40,15

Sumber: Satpol PP Kabupaten Katingan, 2023

c. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK

Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pemadam kebakaran. Berdasarkan informasi/data dari Bidang Linmas, Satpol PP Kab. Katingan, capaian indikator Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Katingan tahun 2022 adalah 85,73 persen.

2.3.1.6. Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya



sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Masalah kesejahteraan sosial sendiri bisa diartikan sebagai kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diharapkan. Permasalahan sosial yang cukup signifikan yang menjadi persoalan di Kabupaten Katingan yaitu fakir miskin, korban bencana, penyandang disabilitas (mental dan fisik) dan lanjut usia terlantar.

a. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima bantuan sosial

Persentase masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial Indikator ini digunakan sebagai langkah dalam memetakan sejumlah masyarakat yang termasuk dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan mendapatkan bantuan/pelayanan sosial. Berikut adalah tabel Jumlah PPKS yang Memperoleh Bantuan di Kabupaten Katingan selama Tahun 2019 sampai dengan 2022 :

Tabel 2.61 Jumlah PPKS Yang Memperoleh Bantuan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial	58	60	62	64

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Katingan

b. Persentase PPKS yang mendapat penanganan dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Program Rehabilitasi Sosial merupakan layanan Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas ke fasilitas Kesehatan dan Pendidikan, sasaran layanan ini utamanya : anak, usia lanjut, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.



Tabel 2.62 Persentase PPKS Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Persentase PPKS yang mendapat penanganan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	60	62	65	70

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Katingan 2023

c. Persentase PSKS yang diberdayakan dalam peningkatan kesejahteraan sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Menurut Kementerian Sosial RI saat ini tercatat ada 6 jenis PSKS, yaitu :

1. **Pekerja Sosial Profesional** adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
2. **Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)** adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial
3. **Taruna Siaga Bencana (Tagana)** adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. **Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS** adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5. **Karang Taruna** adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
6. **Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3)** adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian / penyebarluasan



- informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
7. **Keluarga pioner** adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
 8. **Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM)** adalah Sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
 9. **Wanita pemimpin kesejahteraan sosial** adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya
 10. **Penyuluh Sosial** adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
 11. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSM** adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan
 12. **Dunia usaha** adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial

Tabel 2.63 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan

Indikator	2019	2020	2021	2022
Persentase PSKS yang diberdayakan dalam peningkatan kesejahteraan sosial	60	63	66	70

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Katingan, 2023, diolah

d. Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Ditangani

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, diketahui bahwa Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Ditangani di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 pada angka 90 persen dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 100 persen.



Tabel 2.64 Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

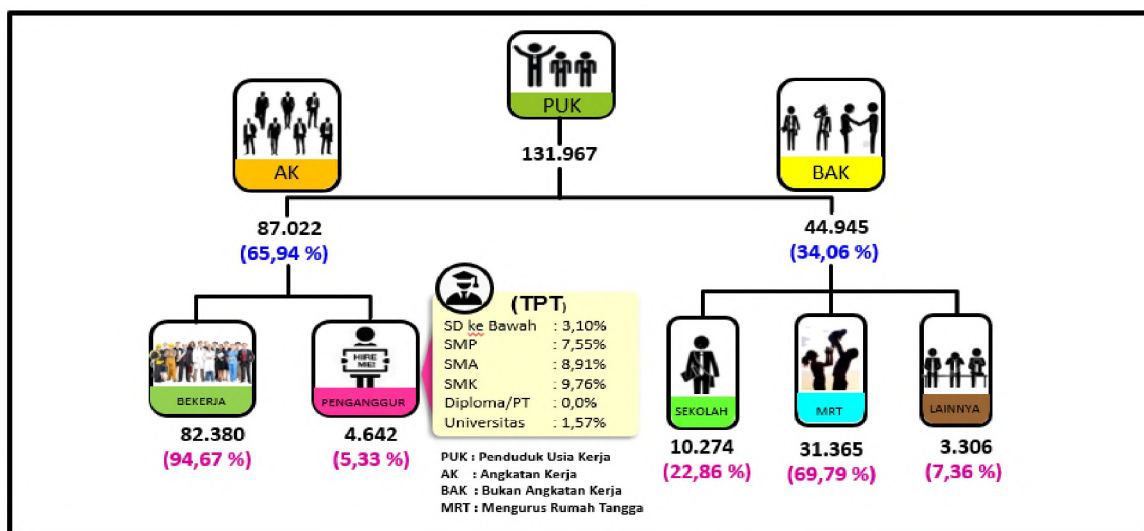
Indikator	2019	2020	2021	2022
Persentase Korban Bencana Alam/ Sosial Yang Ditangani (%)	90	95	96	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Katingan, 2023, diolah

2.3.1.7. Tenaga Kerja

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Katingan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.17 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Katingan Tahun 2022



Sumber: Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan, 2023

Pada urusan Ketenagakerjaan indikator yang dijelaskan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf "U" terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.65 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	70,79	64,55	64,38	65,9

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2023, diolah

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk Dalam Angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Angka pengangguran di Kabupaten Katingan cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 5,45 persen, meningkat pada tahun 2020 sebesar 5,69, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 5,50 dan pada tahun 2022 turun kembali menjadi 5,33. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.66 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,45	5,69	5,50	5,33

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2023, diolah

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan beberapa indikator lainnya.

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan dikalikan 100. Adapun Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	48,02	49,67	51,32	7,97

Sumber: DP3AF2KB Kabupaten Katingan, 2023



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami penurunan, dimana Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Tahun 2019 sebesar 51,68 persen dan tahun 2022 menurun menjadi 7,97 persen.

b. Rasio KDRT

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode satu tahun per rumah tangga dikalikan 100. Adapun Rasio KRT di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68 Rasio KDRT Di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Rasio KDRT	0,032	0,04	0,04	0,07

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio KDRT di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2019 sebesar 0,032 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 0,07.

c. Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak adalah Suatu pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Adapun Capaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69 Capaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak (poin)	659,8	704,23	195,75	NA

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa poin capaian Kabupaten Layak Anak di tahun 2021 menurun menjadi 195,75 poin. Untuk tahun 2022 tingkat capaian Kabupaten Layak Anak baru bisa dilaporkan di bulan Maret atau April tahun 2023.

d. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan adalah jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan



perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh unit terpadu di Kabupaten Katingan Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 100 persen dan di tahun 2022 sebesar 80 persen.

Tabel 2.70 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	80

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2023

2.3.1.9. Pangan

Regulasi Ketahanan Pangan adalah Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkara, dsb, sedangkan Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

a. Ketersediaan Pangan

Regulasi Ketahanan Pangan adalah Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkara, dsb, sedangkan Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71 Ketersediaan Pangan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Beras (ton)	2.204,83	48.459,58	46.809,00	NA
Daging (ton) :				
- Sapi Potong (kg)	331.500	116.837	140.043	NA
- Kerbau (kg)	722	1.083	2.078	NA
- Kambing (kg)	12.327	12.854	13.417	NA
- Babi (kg)	284.719	370.454	490.792	NA
- Ayam Buras (ekor)	2.703	100.723	101.793	NA
- Ayam Ras Pedaging (ekor)	2.087.655	118.447	177.146	NA



Indikator	2019	2020	2021	2022
- Itik/Entok (ekor)	6.179	12.630	21.499	NA
Produksi Perikanan Tangkap :				
- Ikan Perikanan Laut (ton)	2.005,53	2.132,09	2.332,09	NA
- Ikan Perairan Umum (ton)	3.108,61	3.149,73	4.767,91	NA
Produksi Perikanan Budidaya :				
- Ikan Perikanan Laut (ton)	0	0	0	NA
- Ikan Perikanan Umum (ton)	3.535,89	3.550,455	3.412,51	NA

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan, 2023, diolah, Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2023, diolah

2.3.1.10. Pertanian

Permasalahan pertanian erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Kabupaten Katingan selalu berusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan Pemerintah Daerah hingga tahun 2022 pencapaiannya sudah mencapai 100% (LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2023).

2.3.1.11. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang di dalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang sederhana namun tetap mempertahankan makna atau esensi dari masing-masing indikatornya dan memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu serta dijadikan sebagai acuan bersama bagi semua pemangku kepentingan dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun IKLH Kabupaten Katingan tahun 2019 mencapai 77,62, tahun 2020 sebesar 74,67, tahun 2021 mencapai 73,45 dan tahun 2022 sebesar 74,66.

Tabel 2.72 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,62	74,67	73,45	74,66

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, 2023, diolah



a. Persentase Penanganan Sampah

Adapun fokus penanganan sampah yang merupakan salah satu untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, persentase penanganan sampah di Kabupaten Katingan didapat dari volume sampah yang ditangani dalam satuan m³ dibagi dengan volume produksi sampah dalam satuan m³ dikalikan 100. Persentase tempat pembuangan sampah per satuan penduduk di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.73 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani (%)	13,92	41,66	64,00	70,03
Volume sampah yang ditangani (m ³)/hari	25.943	7.755	23.612	18.222
Volume produksi sampah (m ³)/hari	18.632	3.230	36.914	26.030
Persentase tempat pembuangan sampah persatuan penduduk (persen)	1,06	3,18	2,87	4,28

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terus meningkat. Pada tahun 2019 sebesar 13,92 persen dan terus meningkat sampai dengan tahun 2022 menjadi 70,03 persen.

b. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan Hukum Lingkungan adalah Jumlah kasus lingkungan yang dapat diselesaikan pemda berbagi dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Persentase penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.74 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah (kasus)	1	4	2	3
Jumlah kasus lingkungan yang ada (kasus)	1	4	2	3
Persentase Penegakan Hukum Lingkungan (persen)	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, 2023

c. Tutupan Lahan

Analisis penutupan lahan pada kawasan lindung menunjukkan bahwa 550.225,68 ha atau 99,31 wilayah Kabupaten Katingan masih sesuai



tutupan lahan alami. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam khususnya pemanfaatan lahan di Kabupaten Katingan masih cukup efisien. Berikut ini disajikan data tutupan lahan di Kabupaten Katingan.

Tabel 2.75 Analisis Tutupan Lahan di Kabupaten Katingan

No.	Tutupan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Hutan lahan kering primer	187.729,38	9,19
2	Hutan lahan kering sekunder	550.006,12	26,93
3	Hutan tanaman	7.217,58	0,35
4	Semak belukar	127.009,19	6,22
5	Perkebunan	68.077,45	3,33
6	Pemukiman	3.450,58	0,17
7	Tanah terbuka	40.467,89	1,98
8	Tubuh air	17.027,00	0,83
9	Hutan mangrove sekunder	5.337,10	0,26
10	Hutan rawa sekunder	475.023,29	23,26
11	Semak belukar rawa	251.234,79	12,30
12	Pertanian lahan kering	26.756,89	1,31
13	Pertanian lahan kering campur semak	190.869,11	9,35
14	Sawah	20.042,55	0,98
15	Transmigrasi	1.239,34	0,06
16	Tambang	26.222,84	1,28
17	Rawa	44.288,90	2,17
	Total	2.042.000,00	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023



Tabel 2.76 Kondisi Tutupan Lahan di Kawasan Lindung Setiap Kecamatan di Kabupaten Katingan

TUTUPAN LAHAN	KECAMATAN								TOTAL	%	
	BUKIT RAYA	KAMIPANG	KATINGAN HULU	KATINGAN KUALA	MARIKIT	MENDAWAI	PETAK MALAI	SANAMAN MANTIKEI			TASIK PAYAWAN
Hutan lahan kering primer	3549,22		10056,84		78961,29		11011,44	37044,02		140622,80	25,38
Hutan lahan kering sekunder	4769,76		1064,07		421,86		750,19	9824,88		16830,76	3,04
Hutan mangrove sekunder				2810,97						2810,97	0,51
Hutan rawa sekunder		143805,10		18877,22		139719,95			5172,45	307574,71	55,52
Pemukiman				30,57						30,57	0,01
Pertanian lahan kering				432,05		310,37				742,42	0,13
Pertanian lahan kering campur semak			2045,00	21,66	167,85					2234,50	0,40
Rawa		7976,96		306,68		4775,64				13059,29	2,36
Sawah				505,74						505,74	0,09
Semak belukar		201,02	68,58		1316,11			5,14		1590,84	0,29
Semak belukar rawa		14119,32		17284,00		18894,38			2165,14	52462,85	9,47
Tambang									285,26	285,26	0,05
Tanah terbuka		3617,37		641,50		10978,31				15237,18	2,75
Tubuh air		0,34		35,50		0,45				36,28	0,01
Total	8318,97	169720,11	13234,48	40945,88	80867,10	174679,10	11761,63	46874,05	7622,85	554024,16	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023



Untuk mendukung data mengenai tutupan lahan yang telah disajikan pada tabel diatas, berikut ini disajikan data *overlay* tutupan lahan dengan pola ruang Kabupaten Katingan.

Tabel 2.77 Hasil Analisis Overlay Tutupan Lahan dan Pola Ruang

Tutupan Lahan	Alokasi ruang				
	Kawasan Budidaya		Kawasan Lindung		Total
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
Hutan lahan kering primer	45686,73	2,29	140622,80	7,05	186309,53
Hutan lahan kering sekunder	530218,74	26,59	16830,76	0,84	547049,50
Hutan mangrove sekunder	2464,67	0,12	2810,97	0,14	5275,64
Hutan rawa sekunder	155373,59	7,79	307574,71	15,42	462948,30
Hutan tanaman	7190,87	0,36		0,00	7190,87
Pemukiman	3400,43	0,17	30,57	0,00	3431,01
Perkebunan	67552,03	3,39		0,00	67552,03
Pertanian lahan kering	25926,48	1,30	742,42	0,04	26668,90
Pertanian lahan kering campur semak	187797,48	9,42	2234,50	0,11	190031,98
Rawa	27864,49	1,40	13059,29	0,65	40923,78
Sawah	19487,61	0,98	505,74	0,03	19993,35
Semak belukar	124764,13	6,26	1590,84	0,08	126354,97
Semak belukar rawa	191142,78	9,58	52462,85	2,63	243605,63
Tambang	25831,22	1,30	285,26	0,01	26116,48
Tanah terbuka	24318,79	1,22	15237,18	0,76	39555,97
Transmigrasi	1244,73	0,06		0,00	1244,73
Tubuh air	119,49	0,01	36,28	0,00	155,77
Total	1440384,28	72,22	554024,16	27,78	1994408,45

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

2.3.1.12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

a. Rasio Penduduk ber KTP Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akte, NPWP, SIM, dan sebagainya. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia >17 tahun. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk



didapatkan dari rumus formula jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber-KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah. Status kepemilikan KTP di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.78 Rasio Penduduk ber KTP Satuan Penduduk di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Rasio penduduk ber KTP satuan penduduk (%)	98,24	99,64	99,40	98,87

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio penduduk ber KTP satuan penduduk di Kabupaten Katingan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami fluktuatif.

b. Persentase bayi berakte kelahiran

Persentase bayi berakte kelahiran adalah jumlah bayi berakte kelahiran dibagi dengan jumlah bayi dikalikan 100. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa persentase bayi berakte kelahiran di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2019 kepemilikan akte kelahiran sebesar 93,28 persen dan sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 96,21 persen. Adapun Persentase bayi berakte kelahiran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79 Persentase Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Persentase bayi berakte kelahiran (%)	93,28	93,28	93,67	96,21

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2023

c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK yang ada di Kabupaten Katingan dalam periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 berstatus “Sudah”.

d. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten adalah Ada atau tidaknya ketersediaan database kependudukan skala kabupaten. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten di Kabupaten Katingan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 “Ada”.



Tabel 2.80 Persentase Ketersediaan Database Kependudukan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2023

2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Perkembangan status desa

Pekembangan status desa di Kabupaten Katingan berdasarkan Indeks Desa Membangun pada tahun 2019 – 2022 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.81 Jumlah Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Mandiri	0	1	2	4
Maju	2	5	11	16
Berkembang	37	51	64	77
Tertinggal	95	91	73	57
Sangat Tertinggal	20	6	4	-
Jumlah	154	154	154	154

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Katingan, 2023

b. Persentase PKK Aktif

Persentase PKK aktif adalah jumlah PKK aktif berbagi dengan jumlah PKK dikalikan 100 persen. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase PKK aktif yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2019 sampai tahun 2022 sebesar 100 persen. Persentase PKK aktif di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.82 Persentase PKK Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah PKK Aktif (kelompok)	174	174	174	174
Jumlah PKK (kelompok)	174	174	174	174
Persentase PKK Aktif (%)	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2020-2022

2.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana merupakan salah satu program dari pemerintah pusat dalam rangka mengendalikan populasi penduduk yang terus meningkat. Keluarga berencana itu sendiri memiliki arti gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Salah satu dari program keluarga berencana berupaya mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara



konsisten dan berkesinambungan. Disamping itu program keluarga bertujuan untuk membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Akseptor KB dalam pembangunan memberikan kontribusi dalam rangka pengendalian jumlah penduduk agar ledakan penduduk dapat terkontrol dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Target dan realisasi akseptor baru cukup signifikan dalam pencapaiannya. Ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam ber KB cukup baik. Untuk akseptor aktif masih perlu ditingkatkan pencapaiannya karena realisasi capaian belum mencapai target.

a. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi/CPR. Perhitungan indikator ini adalah dengan cara membagi Jumlah Aseptor KB di bagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikalikan 100. Berdasarkan pada tabel di bawah, dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah pemakaian kontrasepsi dari tahun ke tahun hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah PUS yang menjadi Aseptor KB. Namun ditahun 2022 mengalami penurunan 67,68 persen.

Tabel 2.83 Angka Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR	81,95	82,42	97,56	67,68

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2023, Kabupaten Katingan dalam angka 2020-2023, diolah

b. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang /MKJP

Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang /MKJP adalah cara yang efektif dalam menjaga jarak kelahiran, perhitungan indikator ini yaitu Jumlah Aseptor MKJP dibagi Aseptor KB dikali 100. Data dari tahun 2019 sampai tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase MKJP cenderung naik dan tahun 2022 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan banyak aseptor yang masih belum konsisten menggunakan MKJP. Adapun Persentase MKJP yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.84 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang/ MKJP (%)	31,12	32,96	19,79	8,67

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2023, diolah



c. Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga

Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga adalah kelompok ketahanan keluarga yang tergabung dalam TRIBINA yaitu: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam menjalankan fungsi pokok ketahanan keluarga. Diharapkan kelompok ketahanan keluarga dapat dibentuk di setiap desa/kelurahan.

Tabel 2.85 Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga (%)	25,61	39,42	60,95	67,04

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2023

d. Cakupan remaja dalam pusat pelayanan informasi dan konseling remaja

Cakupan remaja dalam pusat pelayanan informasi dan konseling remaja adalah upaya peningkatan peranan PIK Remaja dalam mendapatkan informasi mengenai program KKBPK. PIK Remaja sebagai sarana fasilitasi kreatifitas remaja diharapkan dapat dibentuk di seluruh sekolah di setiap desa/kelurahan.

Tabel 2.86 Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Cakupan remaja dalam pusat pelayanan informasi dan konseling (%)	27,87	43,32	58,77	63,04

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2023

e. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet need*)

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet need*) di Kabupaten Katingan tahun 2019 persentasenya sebesar 8,46 persen dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022 hingga menjadi 35,01 persen.

Tabel 2.87 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet need*) di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022



Uraian	2019	2020	2021	2022
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet need</i>) (%)	8,46	9,48	8,07	35,01

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2023

f. Rasio jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)

Rasio jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) adalah jumlah kelompok UPPKS yang dibentuk di tingkat desa/ kelurahan. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa Rasio jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Katingan berjalan secara fluktuatif hal ini dikarenakan setiap tahun evaluasi dan pelaporan terhadap kelompok UPPKS yang ada dan aktif masih belum berjalan hal ini diakibatkan keterbatasan anggaran dan cakupan wilayah yang sulit dijangkau. Jumlah kelompok UPPKS yang ada di Kabupaten Katingan ada 23 kelompok ditahun 2021 yang dibina hanya 14 kelompok dan ditahun 2022 13 kelompok yang dibina.

Tabel 2.88 Rasio Jumlah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Cakupan Rasio jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera	25,61	39,42	60	56

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2023

g. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri di Kabupaten Katingan tahun 2019 sebesar 57,75 persen dan terus meningkat hingga mencapai 86,96 persen pada Tahun 2022.

Tabel 2.89 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	57,75	100	86,96	86,96

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2023



h. Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja

Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan tahun 2019 persentasenya sebesar 27,87 persen, meningkat sampai tahun 2022 menjadi 63,04 persen.

Tabel 2.90 Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja (%)	27,87	43,32	58,77	63,04

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2023

2.3.1.15. Perhubungan

a. Jumlah Terminal Angkutan Jalan

Terminal dapat dibedakan menjadi dua yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi. Pada umumnya terminal penumpang dan terminal barang dijadikan satu lokasi terminal karena untuk memudahkan bagi penumpang yang bepergian dengan membawa barang bawaannya.

Tabel 2.91 Jenis dan Jumlah Terminal di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Jenis Terminal	2019	2020	2021	2022
Kelas C (unit)	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan, 2023

b. Pengujian Kelayakan Angkutan Jalan

Pengujian kelayakan kendaraan bermotor angkutan jalan bertujuan untuk menjamin keselamatan moda transportasi yang dioperasikan mengangkut orang dan barang hingga dapat mencegah kecelakaan dalam berlalu lintas. Pelaksanakan pengujian kelayakan angkutan jalan di Kabupaten Katingan mulai tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.92 Pengujian Kelayakan Angkutan Jalan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022



Uraian	2019	2020	2021	2022
Kendaraan bermotor angkutan jalan (KIR) (unit)	35	0	0	1663

Sumber: Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan, 2023

c. Pemasangan Rambu-Rambu

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kabupaten Katingan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 1.336 unit rambu lalu lintas jalan maupun sungai, Pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.93 Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rambu Lalu Lintas Jalan Terpasang (unit)	1.015	1.036	1.116	1.116
Jumlah Rambu Sungai Terpasang (unit)	220	220	220	220
Rambu-rambu yang Terpasang (unit)	1.235	1.256	1.336	1.336

Sumber: Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan, 2023

d. Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut penumpang umum dan barang pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Banyaknya izin trayek di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.94 Izin Trayek di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Kategori	2019	2020	2021	2022
Izin Trayek Angkutan Jalan	-	-	-	-
Izin Trayek Angkutan Sungai	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan, 2023

e. Dermaga Sungai

Sungai Katingan yang berada di Kabupaten Katingan memiliki panjang 650 km, lebar 250 m, kedalaman berkisar 3-7 m, dan alur sungai yang bisa dilayari 520 km. Transportasi sungai sejauh ini masih menjadi andalan bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Katingan, untuk mengangkut orang dan barang maupun kendaraan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Katingan membangun dermaga sungai guna mendukung aktivitas masyarakat dan ekonomi daerah. Adapun dermaga yang tersedia di Kabupaten Katingan ditampilkan dalam tabel berikut:



Tabel 2.95 Dermaga sungai yang tersedia di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Dermaga Bongkar Muat/ Tambatan (unit)	28	28	28	28
Dermaga Penyeberangan (unit)	15	15	15	15
Total (unit)	43	43	43	43

Sumber: Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan, 2023

2.3.1.16. Komunikasi dan Informatika

a. Cakupan Layanan Komunikasi

Indikator cakupan layanan komunikasi memberikan informasi mengenai jangkauan pelayanan komunikasi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Formulasi untuk Cakupan Layanan komunikasi adalah Luas Wilayah Yang Tercoverage (terjangkau sinyal HP) (Km²) dibagi Luas Wilayah Keseluruhan (luas kabupaten katingan) (Km²). Adapun Cakupan Layanan komunikasi yang ada di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96 Cakupan Layanan Komunikasi di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Luas Wilayah Yang Tercoverage (terjangkau sinyal HP) (Km ²)	6.291	6.413	14.068	14.975
Luas Wilayah Keseluruhan (luas kabupaten katingan) (Km ²)	20.396,78	20.396,78	20.396,78	20.396,78
Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	30.84	31.44	68,97	73,42

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan, 2023

Cakupan layanan sinyal telekomunikasi yaitu semua wilayah yang masuk pada kategori lemah sinyal (hanya bisa mengakses sinyal 2G/3G atau sudah dapat mengakses sinyal 4G tetapi kondisi sinyal buruk) dan kuat sinyal (sudah bisa mengakses sinyal 4G dengan baik), sedangkan wilayah yang belum tercoverage sinyal telekomunikasi masuk pada wilayah blank spot (sama sekali tidak dapat mengakses sinyal telekomunikasi). Dalam penentuan formulasi wilayah yang tercoverage (terjangkau sinyal HP) adalah semua wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Katingan yang masuk pada kategori lemah dan kuat sinyal telekomunikasi, dengan luasan di tahun 2021 adalah sebesar 14.068 Km² dan meningkat menjadi 14.975 Km² di tahun 2022. Cakupan layanan telekomunikasi dari tahun 2019 sampai



dengan tahun 2022 terus meningkat dengan persentase terakhir menjadi sebesar 73,42%.

Selanjutnya untuk mengetahui akses masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informatika menggunakan tabel dibawah ini :

Tabel 2.97 Persentase Penduduk Mengakses Layanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Dalam 3 Bulan Terakhir Mengakses Internet (%)	33,66	36,80	45,39	57,78
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler Dalam 3 Bulan Terakhir (%)	74,77	72,60	77,04	80,40

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2020-2023, diolah

Sedangkan mengetahui data Desa blank spot di Kabupaten Katingan per 30 Maret 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.98 Data Desa Blank Spot di Kabupaten Katingan Per 30 Maret 2023

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah
1.	Katingan Hulu	1. Tumbang Kabayan 2. Tumbang Sabetung	2
2.	Bukit Raya	1. Tumbang Kajamei 2. Rangan Rondan 3. Rantau Pandan 4. Tanjung Batik 5. Tumbang Dahuei 6. Tumbang Karuei	6
Jumlah Desa Blank Spot			8 Desa

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan, 2023

Kemudian untuk mengetahui data Desa yang belum terjangkau dan lemah sinyal internet di Kabupaten Katingan per 30 Maret 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.99 Data Desa Yang Belum Terjangkau dan Lemah Sinyal Internet di Kabupaten Katingan Per 30 Maret 2023

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah
1.	Katingan Katingan Hilir	1. Tewang Kadamba	1
2.	Tewang Sangalang Garing	1. Bangkuang 2. Tewang Manyagen 3. Hampalam	5



No.	Kecamatan	Desa	Jumlah
		4. Tewang Baringin 5. Tewang Rangkang	
3.	Pulau Malan	1. Kuluk Bali 2. Manduing Lama 3. Manduing Taheta 4. Tura 5. Tumbang Tanjung 6. Tumbang Tungku 7. Tewang Karang	7
4.	Katingan Tengah	1. Mirah Kalanaman 2. Petak Puti 3. Samba Kahayan 4. Tewang Panjang 5. Tumbang Marak	5
5.	Sanaman Mantikei	1. Kamanto	1
6.	Marikit	1. Kuluk Leleng 2. Rangan Burih 3. Tumbang Dakei	3
7.	Katingan Hulu	1. Penda Tanggaring Lama 2. Rangan Ranjing 3. Tumbang Hangei II 4. Tumbang Jiga 5. Tumbang Labaning 6. Tumbang Mahop	6
8.	Tasik Payawan	1. Hiyang Bana	1
9.	Kamipang	1. Tumbang Runen	1
10.	Mendawai	1. Tewang Kampung	1
11.	Katingan Kuala	1. Kampung Keramat	1
Jumlah Desa Yang Belum Terjangkau Dan Lemah Sinyal Internet			32 Desa

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan, 2023

Dari 161 Kelurahan/Desa di Kabupaten Katingan, sudah terdapat 121 Kelurahan/Desa yang masuk dalam kategori kuat sinyal telekomunikasi, sedangkan 40 desa lainnya masih memiliki permasalahan akses sinyal telekomunikasi dan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Katingan khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Ada 8 desa masih masuk dalam kategori belum terjangkau sinyal telekomunikasi telepon dan internet (blank spot) dan ada 32 desa masuk dalam kategori belum terjangkau dan lemah sinyal internet.

2.3.1.17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas



kekeluargaan. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

a. Persentase Koperasi Aktif

Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Tabel 2.100 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koperasi Aktif (unit)	83	90	97	107
Jumlah Seluruh Koperasi (unit)	194	204	211	220
Persentase Koperasi Aktif (%)	42,78	44,12	45,97	48,63

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Katingan, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif yang ada di Kabupaten Katingan pada kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase koperasi aktif sebanyak 42,78 persen dan sampai dengan tahun 2022 menjadi 48,63 persen.

b. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro dan Kecil adalah jumlah usaha mikro dan kecil berbagi dengan jumlah seluruh UKM. Persentase Usaha Mikro dan Kecil adalah jumlah usaha mikro dan kecil berbagi dengan jumlah seluruh UKM. Patut diketahui, UU Cipta Kerja sudah merubah sebagian ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 perihal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Salah satu ketentuan yang diubah yakni mengenai kriteria dari UMKM itu sendiri. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) UMKM pada Pasal 35 PP UMKM 2021.

Kriteria UMKM seperti yang disebutkan di bawah mengubah klasifikasi UMKM yang ada, seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.66 dimana jumlah usaha menengah pada tahun 2020 sebelumnya ada 2 menjadi tidak ada atau 0, hal ini disebabkan oleh klasifikasi UKM yang sebelumnya merupakan usaha menengah, berubah jadi usaha kecil, sedangkan usaha kecil yang ada



berubah klasifikasi menjadi usaha mikro. Adapun data Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022 disajikan pada table di bawah ini :

Tabel 2.101 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah Usaha Menengah (unit)	2	2	0	0
Jumlah Usaha Kecil (unit)	397	399	2	2
Jumlah Usaha Mikro (unit)	1.160	1.206	3.248	3.313
Jumlah Seluruh UKM (unit)	1.559	1.607	3.250	3.315
Persentase UKM (%)	99,87	99,88	100,00	100,00

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Katingan, 2023

c. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM adalah jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM. Berdasarkan data di bawah, dapat dilihat bahwa Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Kabupaten Katingan tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terus meningkat. Pada tahun 2019 berjumlah 1.559 unit dan terus meningkat menjadi 3.315 unit pada tahun 2022.

Tabel 2.102 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit)	1.559	1.607	3.250	3.315

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Katingan, 2023

d. Jumlah BPR/LKM

Jumlah BPR/LKM adalah Jumlah BPR/LKM aktif. Berdasarkan data Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sampai 2022, tidak terdapat BPR/LKM di Kabupaten Katingan.

2.3.1.18. Penanaman Modal

Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Alasan Kabupaten Katingan untuk melaksanakan penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja di Kabupaten Katingan. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa,



mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

a. Jumlah Investor

Indikator ini digunakan untuk melihat jumlah investor berskala nasional yang berupa PMDN dan PMA, hal ini dilakukan karena semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investor PMDN tahun 2019 sebanyak 119 unit, dan mengalami penurunan sampai tahun 2022 menjadi 51 unit. Sedangkan Jumlah Investor PMA pada tahun 2019 berjumlah 14 unit terus menurun sampai tahun 2022 menjadi 10 unit.

Tabel 2.103 Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah investor PMDN (unit)	119	63	54	51
Jumlah Investor PMA (unit)	14	10	10	10

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, 2023

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Berdasarkan data, diketahui bahwa jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) di Kabupaten Katingan tahun 2019 sebesar Rp 3.790.278.623.286,00, terus meningkat sampai tahun 2021 menjadi 7.112.964.499.639,10 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp. 5.182.234.522.073,36. Sedangkan jumlah nilai investasi berskala asing (PMA) pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.852.401.015.342,41, meningkat di tahun 2020 menjadi Rp. 2.171.948.678.654,34, kemudian turun kembali di tahun 2021 menjadi Rp. 2.118.845.977.565,74, dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi Rp. 2.155.443.287.565,74. Berikut disajikan tabel Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022.

Tabel 2.104 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Realisasi PMDN Tahun Evaluasi	3.790.278.623.286	4.171.745.209.352,80	4.994.118.522.073,36	5.182.234.522.073,36
Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi	848.775.526.019	3.790.278.623.286,00	4.171.745.209.352,80	4.994.118.522.073,36



Uraian	2019	2020	2021	2022
Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	346,56	10,06	19,71	3,77
Jumlah nilai Investasi PMDN (Rupiah)	3.790.278.623 .286,00	4.171.745.2 09.352,80	4.994.118.5 22.073,36	5.182.234.5 22.073,36
Jumlah nilai investasi PMA (Rupiah)	1.852.401.015 .342,41	2.171.948.6 78.654,34	2.118.845.9 77.565,74	2.155.443.2 87.565,74

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, 2023

2.3.1.19. Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan.

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan, dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam satu periode tahun. Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “event” olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau “event” olahraga dalam satu periode tahun.

a. Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif

Jumlah organisasi pemuda selama tiga tahun terakhir yaitu mulai tahun 2019 sampai 2020 berjumlah 126 organisasi pemuda. Sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi 166 organisasi pemuda dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 122 organisasi pemuda, dikarenakan pada tahun 2022 adanya sinkronisasi dan validasi data dimana hasilnya ada organisasi yang sudah tidak aktif serta kepengurusannya berakhir. Berikut adalah tabel jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Katingan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.



Tabel 2.105 Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah Organisasi Pemuda	126	126	166	122

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan, 2023

2.3.1.20. Statistik

a. Buku Kabupaten Dalam Angka

Buku Kabupaten Dalam Angka disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dapat didownload di website BPS Kabupaten Katingan. Data didalam buku Buku Kabupaten Dalam Angka dapat digunakan oleh berbagai kalangan terutama pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan maupun mengevaluasi capaian pembangunan.

Tabel 2.106 Buku Kabupaten Dalam Angka di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	Formulasi	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan, 2023

b. Buku PDRB Kabupaten

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan Buku “PDRB Kabupaten”. Dokumen tersebut ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan dan disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan. Penyusunan buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Tabel 2.107 Buku PDRB Kabupaten di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	Formulasi	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
Buku PDRB Kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan, 2023

2.3.1.21. Kebudayaan

a. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan adalah jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang



Dilestarikan berbagi dengan total Benda, Situs dan Kawasan yang dimiliki daerah dikalikan 100. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di tahun 2019 sampai dengan 2022 sebesar 100 persen.

Tabel 2.108 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	12	9	9	7
Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki	12	9	9	15
Persentase Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	47

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan, 2023

b. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya adalah jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.109 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kegiatan)	2	0	2	3

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan, 2023

c. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya adalah jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada. Adapun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.110 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	2	2	2	2

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan, 2023



2.3.1.22. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas tingkat pendidikan di Kabupaten Katingan . Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.111 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	5.413	2.313	507	1.691

Sumber: Bagian Perpustakaan dan Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2023

2.3.1.23. Kearsipan

Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku adalah jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku berbagi dengan jumlah SKPD dikalikan 100. Adapun Penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.112 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat Daerah Yang mengelola Arsip secara baku (%)	24	28	29	29

Sumber: Bagian Perpustakaan dan Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2023

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Kabupaten Katingan. Urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.



2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

a. Produksi Perikanan

Indikator Produksi Perikanan menunjukkan jumlah produksi perikanan yang dihasilkan suatu daerah. Adapun produksi perikanan di Kabupaten Katingan Tahun 2019 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.113 **Produksi Perikanan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022**

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	5.800,10	6.210,30	15.355,29	7.979,88
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.576,00	3.550,49	3.412,51	6.288,07
Jumlah Total Produksi Perikanan (Ton)	9.376,10	9.760,79	18.767,80	14.267,95

Sumber: Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi perikanan terus fluktuasi dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Pada tahun 2019 jumlah produksi perikanan sebesar 9.376,10 ton terus meningkat sampai tahun 2021 menjadi 18.767,80 ton, namun turun menjadi 14.267,95 ton pada tahun 2022.

b. Konsumsi Ikan

Indikator Konsumsi Ikan adalah salah satu indikator penting dalam menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan. Adapun data konsumsi ikan di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.114 **Konsumsi Ikan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022**

Uraian	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Ikan (Kg)	42,00	42,50	NA	NA
Target Daerah (Kg)	46,908	47,111	NA	NA
Tingkat Capaian Konsumsi Ikan (%)	89,54	90,21	NA	NA

Sumber: Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan, 2023



2.3.2.2. Pariwisata

Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan suluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Kabupaten Katingan. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang Pariwisata untuk menarik turis datang, baik dari dalam negeri (turis domestik) maupun dari luar negeri (turis asing).

a. Kunjungan Wisata

Kunjungan Wisata menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun yang ke Kabupaten Katingan. Kunjungan wisatawan (wisman) yang datang ke Kabupaten Katingan merupakan barometer keberhasilan pariwisata Kabupaten Katingan terutama ketertarikan turis asing untuk berkunjung. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Katingan selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang bervariasi.

Tabel 2.115 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	26	5	2	85
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)	36.310	11.821	24.359	47.207
Jumlah Wisatawan (orang)	36.336	11.826	24.361	43.977

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Katingan tahun 2019 sebesar 36.336 orang, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 11.826 orang dan kembali ada peningkatan kembali ditahun 2021 sebesar 24.361 orang hal ini disebabkan karena terjadi pandemi Covid-19 dan pembatasan aktifitas sehingga kegiatan pendukung tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya kondisi tahun 2022 meningkat dan kembali normal sebesar 43.977 orang.

2.3.2.3. Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan dan perkebunan.



a. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar

Produktivitas padi atau pangan utama lokal lainnya perhektar adalah produksi tanaman padi atau bahan utama lokal lainnya dalam satuan ton berbagi dengan luas areal tanaman padi atau bahan utama lokal lainnya (jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalan) dalam satuan ha dikalikan 100.

Tabel 2.116 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Produksi Tanaman Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	22.0204,83	48.459,58	34.309,99	30.541,05
Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	12.493,56	17.741,63	13.163,74	11.024,32
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar (ton/ha)	1,78	2,73	2,61	2,77

Sumber: - Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2020-2023, diolah
- Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2023, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2019 sebesar 1,78 ton/ha, cenderung meningkat di tahun-tahun berikutnya dan kondisi pada tahun 2022 menunjukkan produktivitas sebesar 2,77 ton/ha.

2.3.2.4. Kehutanan

Sumberdaya hutan merupakan salah satu penyangga kehidupan yang harus dikelola dengan bijaksana agar mampu memberikan kontribusi dan manfaat secara optimal dan lestari. Hutan rakyat dapat memberikan manfaat sebagai salah satu penyangga ekonomi masyarakat antara lain dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah.

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai ekosistem, hutan sangat berperan dalam penyediaan sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Katingan tidak melaksanakan urusan



pilihan Kehutanan, mengingat tidak mengelola Taman Hutan Raya (TAHURA).

2.3.2.5. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, migas. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Katingan tidak melaksanakan urusan pilihan A. Energi Dan Sumber Daya Mineral.

2.3.2.6. Perdagangan

Perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

a. Pasar Tradisional

Pasar beserta aktivitasnya merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan mulai berkembangnya suatu daerah maupun ekonomi masyarakatnya, khususnya di wilayah yang mencakup beberapa desa yang berdekatan. Adapun jumlah pasar tradisional di Kabupaten Katingan yang telah dibangun oleh pemerintah daerah hingga tahun 2022 berjumlah 23 pasar.

Tabel 2.117 Pasar Tradisional di Kabupaten Katingan

No	Nama Pasar	Lokasi		Bentuk Bangunan
		Desa/Kel.	Kecamatan	
1.	Pasar Pagatan	Pagatan Hilir	Katingan Kuala	Toko, Los
2.	Pasar Subur Indah	Subur Indah	Katingan Kuala	Kios
3.	Pasar Jaya Makmur	Jaya Makmur	Katingan Kuala	Kios
4.	Pasar Mendawai	Mendawai	Mendawai	Toko, Los
5.	Pasar Mekar Tani	Mekar Tani	Mendawai	Los
6.	Pasar Perigi	Perigi	Mendawai	Kios
7.	Stasiun Pendaratan Ikan Perairan Umum (SPIPU) Ujung Hurung	Kasongan Baru	Katingan Hilir	Los
8.	Pasar Bajenta	Kasongan Lama	Katingan Hilir	Kios
9.	Pasar Kasongan	Kasongan Lama	Katingan Hilir	Kios,Toko
10.	Pasar Basah Kasongan	Kasongan Lama	Katingan Hilir	Los
11.	Pasar Kereng Pangi	Hampalit	Katingan Hilir	Kios,Los



No	Nama Pasar	Lokasi		Bentuk Bangunan
		Desa/Kel.	Kecamatan	
12.	Pasar Pendahara	Pendahara	Twg. Sanggalang Garing	Kios, Los
13.	Pasar Buntut Bali	Buntut Bali	Pulau Malan	Los
14.	Pasar Tura	Tura	Pulau Malan	Los
15.	Pasar Tumbang Samba	Tumbang Samba	Katingan Tengah	Kios
16.	Pasar Tumbang Kaman	Tumbang Kaman	Sanaman Mantikei	Kios
17.	Pasar Tumbang Hiran	Tumbang Hiran	Marikit	Kios
18.	Pasar Tumbang Sanamang	Tumbang Sanamang	Katingan Hulu	Kios
19.	Pasar Dahian Tunggal	Dahian Tunggal	Pulau Malan	Los
20.	Pasar Desa Jaya Makmur	Desa Jaya Makmur	Katingan Kuala	Blok Pasar
21.	Pasar Desa Tumbang Manggu	Desa Tumbang Manggu	Sanaman Mantikei	Blok Pasar
22.	Pasar Desa Jaya Makmur	Desa Jaya Makmur	Katingan Kuala	Blok Pasar
23.	Pasar Desa Tumbang Manggu	Desa Tumbang Manggu	Sanaman Mantikei	Blok Pasar

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kab. Katingan, 2023

2.3.2.7. Perindustrian

Persentase pertumbuhan industri di Kabupaten Katingan tahun 2019 sampai tahun 2022 menunjukkan fluktuasi. Pada Tahun 2019 persentase pertumbuhan industri sebesar 2,11 persen dan secara drastis meningkat menjadi 7,95 persen pada Tahun 2020, menurun kembali di tahun 2021 menjadi 1,23 persen dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 6,73 persen.

Tabel 2.118 Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Industri per tahun (unit)	679	733	742	792
Persentase Pertumbuhan Industri (%)	2,11	7,95	1,23	6,73

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kab. Katingan, 2023



2.3.2.8. Transmigrasi

Jumlah transmigran umum di Kabupaten Katingan mengalami stagnansi. Hal ini ditunjukkan oleh dengan jumlah transmigran umum tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 jumlahnya sama yaitu 3.681 orang. Selain itu, sejak tahun 2018 kawasan transmigrasi di Kabupaten Katingan sudah habis masa bina. Sementara itu transmigran swakarsa selama 4 (empat) tahun terakhir tidak ada.

Tabel 2.119 Jumlah Transmigran di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah transmigran (orang)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber: Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan, 2023

2.3.3. Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.3.1. Sekretariat Daerah

a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Katingan. Selain itu, laporna ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan SAKIP atau LKjIP Pemerintah Kabupaten Katingan beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.120 Nilai SAKIP Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP	CC	CC	CC	B

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Bila ditinjau pencapaian selama 4 (empat) tahun terakhir, maka diketahui bahwa pada Tahun 2019 nilai SAKIP Katingan berada pada Nilai CC, meningkat sampai tahun 2022 dengan nilai SAKIP berada pada B. Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen pemda untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

b. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan



daerah yaitu nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan.

Tabel 2.121 Nilai LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Nilai LPPD	2,5778	NA	3,1522	NA

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2023

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa nilai LPPD Kabupaten Katingan pada tahun 2019 mendapat nilai 2,5778 dan pada tahun 2022 nilai menjadi 3,1522 Walaupun mengalami penurunan, namun predikatnya masih tetap Tinggi, Untuk tahun 2023 masih belum dilaksanakan penilaian sampai RPD ini ditetapkan.

2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.4.1. Perencanaan

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Katingan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Tersedianya dokumen perencanaan hendaknya dapat memenuhi fungsi substantifnya. Sebagai wujud untuk memaknai fungsi tersebut maka perhatian terhadap visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD menjadi sangat penting. Adapun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025.



Tabel 2.122 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappedalitbang Kab. Katingan, 2023

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan RPJMD merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial. Adanya dokumen ini menjelaskan bahwa terdapat dokumen perencanaan yang telah dilegalkan melalui Peraturan Daerah yang kemudian memiliki konsekuensi yang jelas dan terarah dalam menentukan rangkaian pembangunan pada lima tahun ke depan. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang menjabarkan program-program selama 5 tahun dan berpedoman terhadap RPJPD. Ketersediaan RPJMD merupakan bentuk langkah-langkah pemerintah daerah di tiap 5 tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah.

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah/ selanjutnya digunakan sebagai acuan pembangunan dalam jangka menengah dan seklaigus menjadi pedoman penyusunan RKPD. Adapun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022.

Tabel 2.123 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Katingan, 2023

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan



operasional. Dengan demikian pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap SKPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan terkoordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Perda dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas pemenuhan dasar hukum berupa peraturan kepala daerah yang selalu mengiringi RKPD memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian outcome yang diharapkan.

Tabel 2.124 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Katingan, 2023

2.3.4.2. Keuangan

a. Penetapan Perda APBD

Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Hal ini berarti, paling lambat tanggal 31 November, rancangan Perda APBD harus sudah disepakati/disetujui. Selanjutnya, perda ini akan dievaluasi oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Perda.

Penetapan Perda APBD Kabupaten Katingan selama periode 2019 sampai dengan 2022 selalu tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kondisi ini mendorong terciptanya tertib administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Katingan.

2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang terkait Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan antara lain: merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan perencanaan pengembangan kepegawaian daerah, merumuskan kebijaksanaan peningkatan kualitas pegawai negeri sipil daerah.

a. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.125 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Diklat PIM (orang)	25	Pademi Covid 19	5	6
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS (orang)	217		114	135
Diklat Teknis (orang)	40		114	135
Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural (orang)	25		5	16

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pejabat di Kabupaten Katingan yang mengikuti Diklat PIM selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 sebanyak 25 orang, pada tahun 2020 tidak melaksanakan Diklat PIM karena Pademi Covid 19, pada tahun 2021 sebanyak 5 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 6 orang.

b. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, dapat diketahui bahwa jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 yaitu 30 orang. Sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 32 Orang. Sebagaimana data yang disajikan pada tabel diatas, maka diketahui persentase jabatan terisi sebanyak 75 persen pada Tahun 2022. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.126 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (formasi)	30	30	30	32
Pemangku Jabatan (orang)	28	27	29	24
Persentase Jabatan pimpinan tinggi Terisi (%)	93	90	97	75

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Katingan, 2023

c. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.127 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (formasi)	1.916	1.986	1.708	1.748
Pemangku Jabatan (orang)	1.216	1.207	969	1.070
Persentase Jabatan administrasi Terisi (%)	63	61	567	61

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Katingan, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 yaitu 1.986 orang, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 meningkat menjadi 1.748 Orang.

d. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sebanyak 3.353 orang dan tahun 2022 meningkat menjadi 3.401 orang. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.128 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (formasi)	3.353	3.423	3.472	3.401
Pemangku Jabatan (orang)	2.635	2.533	2.723	2589
Persentase Jabatan fungsional tertentu Terisi (%)	79	74	78	76

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Katingan, 2023

2.3.4.4. Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial.



a. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK

Data dari Laporan Semeseter Tahun 2022 Inspektorat menunjukkan bahwa BPK melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemerintah Kabupaten Katingan dari tahun 2006 sampai dengan 2022 pada semester II tahun 2022.

Pembahasan antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam hal ini Inspektur Kabupaten Katingan dilakukan atas usulan tindak lanjut sampai dengan tanggal 19 s.d. 21 Desember 2022 di Auditorium BPK Perwakilan Kalimantan Tengah dan secara online maupun Offline dengan menggunakan aplikasi SIPTL.

Lebih lanjut, Setelah pembahasan dilakukan, status pemantauan tindak lanjut per tanggal 31 Desember 2022 atas total LHP tahun 2006 s.d. 2022 dengan jumlah rekomendasi 769 realisasi Tindak lanjut sebanyak 672 dengan persentase 87%, menjadi sebagai berikut :

Tabel 2.129 Status Pemantauan Tindak Lanjut Per Tanggal 31 Desember 2022 Atas Total LHP Tahun 2006 - 2022

Tahun	Jml Rekomendasi	Jml Status 1 (sesuai)	Jml Status 2 (belum sesuai)	Jml Status 3 (belum ditindaklanjuti)	Jml Status 4 (Tidak dapat ditindaklanjuti)	(%)
2006 - 2022	769	672	99	0	5	87

Sumber: Inspektorat Kabupaten Katingan, Risalah Pembahasan Tindak Lanjut Semeseter II tahun 2022 dan Laporan Semester II tahun 2022

Tabel 2.130 Persentase Tindak Lanjut BPK Kabupaten Katingan dalam 4 Tahun terakhir dari 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Persentase tindak lanjut temuan BPK (%)	83,3	76,9	30,0	42,8
Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti	24	13	30	28
Jumlah total temuan BPK	20	10	9	12

Sumber: Inspektorat Kabupaten Katingan, Risalah Pembahasan Tindak Lanjut Semeseter II tahun 2022 dan Laporan Semester II tahun 2022

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

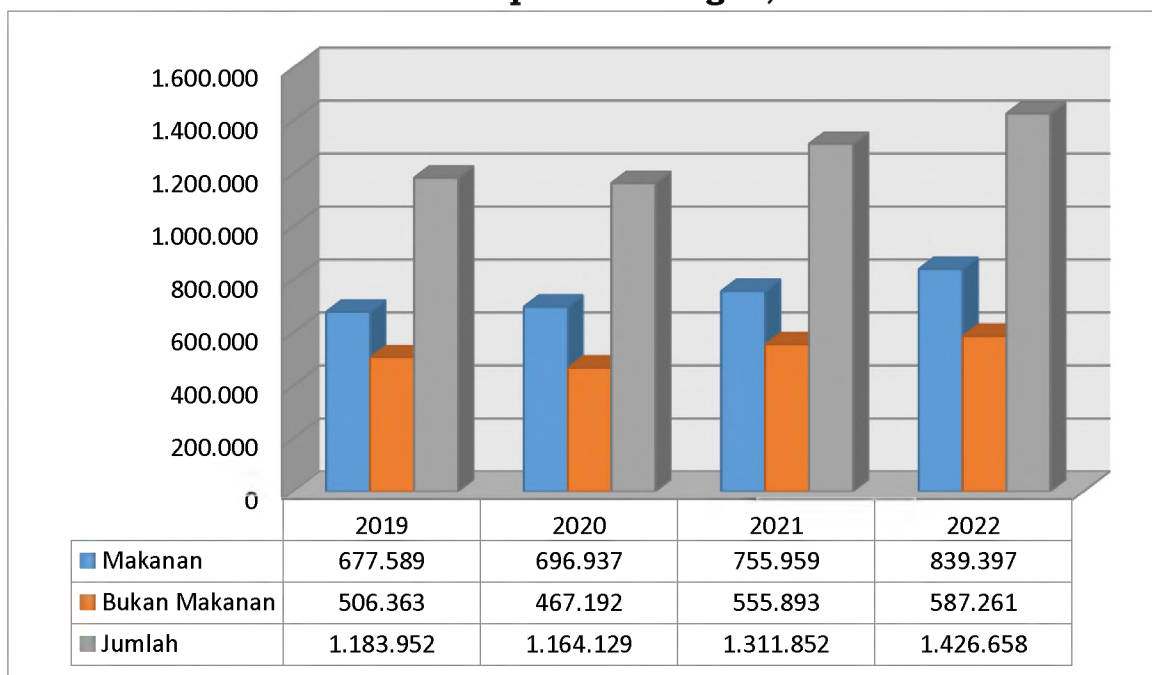
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.



2.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Sementara bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Gambar 2.18
Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Sebulan Menurut Jenis Konsumsi di Kabupaten Katingan, 2019-2022



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2022, diolah

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita atau Angka Konsumsi Rata-rata RT Per Kapita Sebulan (Pangan dan Non Pangan) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pada dua tahun terakhir ini rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Katingan tidak ada yang berada di bawah Rp.200.000,-, bahkan untuk semua jenis pengeluaran konsumsi rumah tangga. Adapun total pengeluaran rumah tanggai mengalami peningkatan dari Rp. 1.183.952,- di tahun 2019 menjadi Rp. 1.426.658,- di tahun 2022.



Tabel 2.131 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Katingan, 2019-2022

Golongan Pengeluaran (Rp)	Persentase Penduduk (%)	Persentase Penduduk (%)	Persentase Penduduk (%)	Persentase Penduduk (%)
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
< 150 000	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000 – 199 999	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000 – 299 999	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000 – 499 999	4,74	2,99	0,95	0,23
500 000 – 749 999	19,06	21,03	10,32	9,39
750 000 – 999 999	25,23	23,88	23,74	21,58
1 000 000 – 1 499 999	26,78	32,11	34,02	33,69
1 500 000+	24,18	19,98	30,97	35,10
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2020-2023, diolah

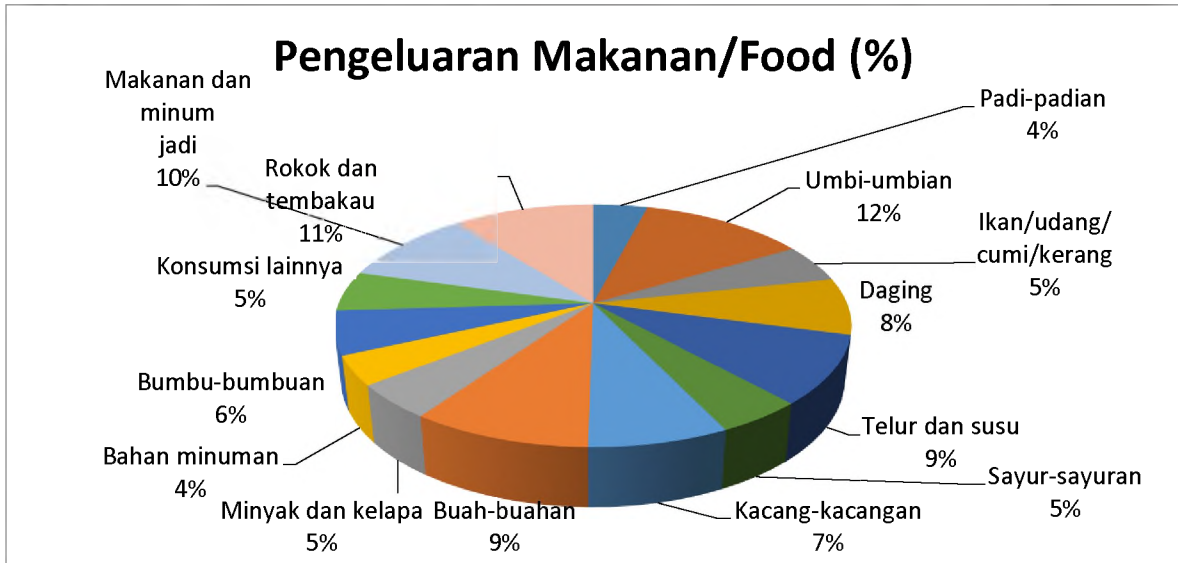
Adapun dominasi pengeluaran rata-rata di tahun 2022 pada golongan antara Rp. 1.500.000,- + yaitu sebesar 35,10%. Bila dibandingkan dengan pengeluaran tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan dari 30,97% di tahun 2021 menjadi 35,10% di tahun 2022.

2.4.2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Per Kapita

Pada tahun 2022, rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita sebulan di Kabupaten Katingan didominasi oleh pengeluaran untuk komoditas umbi-umbian. Sebesar 58,84% dari total pengeluaran penduduk per kapita selama sebulan dibelanjakan untuk komoditas makanan sebesar Rp.839.397,- meningkat dibanding tahun 2021. Untuk jenis pangannya, terbanyak didominasi umbi-umbian sebesar 12%, diikuti oleh pengeluaran untuk rokok dan tembakau sebesar 11% serta makan dan minum 10%.



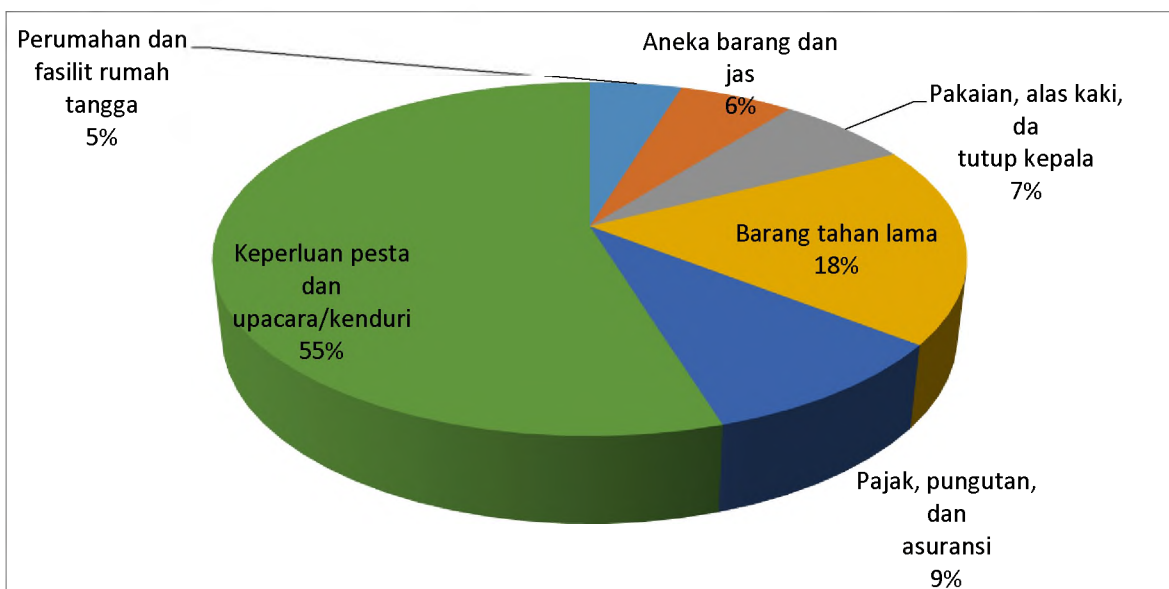
Gambar 2.19
Persentase Rata-rata Pengeluaran Untuk Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Makanan di Kab. Katingan Tahun 2022



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2022, diolah

Untuk pengeluaran non pangan di tahun 2022, masyarakat Katingan paling banyak membelanjakan untuk konsumsi keperluan pesta dan upacara/kenduri sebesar 55% dan belanja barang tahan lama sebesar 18% dari total pengeluaran per kapita selama sebulan sebesar Rp.587.261,-. Berikut data selengkapnya terkait jumlah pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan masyarakat Katingan di tahun 2022.

Gambar 2.20
Persentase Rata-rata Pengeluaran Untuk Bukan Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Non Makanan di Kabupaten Katingan Tahun 2022



Sumber: BFS Kab. Katingan, diolah



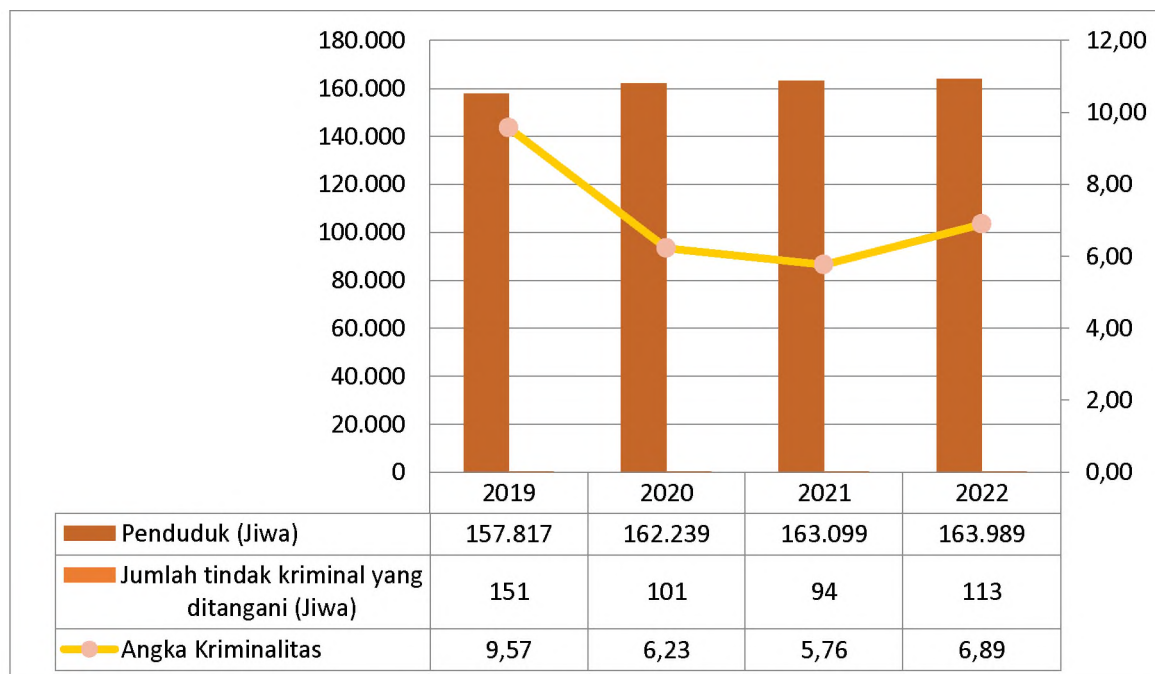
2.4.3. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada gambar di bawah, angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Katingan pada periode tahun 2019–2022 paling banyak di tahun 2019 sebesar 9,57 dan selanjutnya terus turun sampai angka 6,89 di tahun 2022.

Gambar 2.21
Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kabupaten Katingan
Tahun 2019 – 2022



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2023, diolah

2.4.4. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus



ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase Rasio Ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

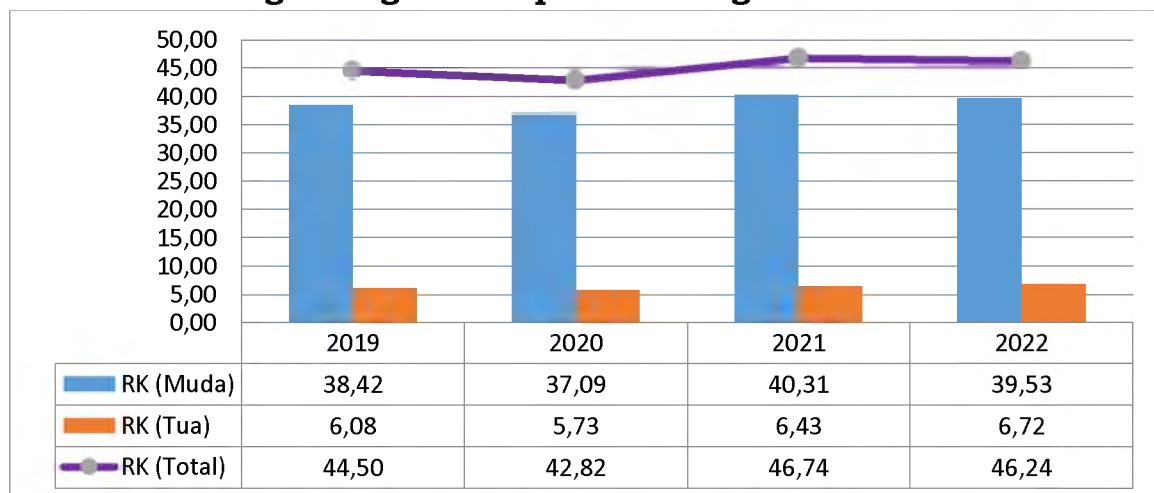
Tabel 2.132 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur Tua di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
0-14	41.963	42.134	44.804	44.322
15-64	109.215	113.600	111.148	112.134
>64	6.638	6.505	7.147	7.533
Rasio Ketergantungan	44,50	42,82	46,74	46,24

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2020-2023, diolah

Rasio Ketergantungan penduduk Kabupaten Katingan periode 2019-2022 mengalami fluktuasi. Berdasarkan data pada tabel di atas, rasio ketergantungan total penduduk Katingan menurun dari 44,50 persen di tahun 2019 menjadi 42,82 persen di tahun 2020. Pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 46,74, selanjutnya pada tahun 2022 menjadi 46,24.

Gambar 2.22 Rasio Ketergantungan Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022



Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2020-2023, diolah

2.4.5. Jumlah Desa Tertinggal

Status desa tertinggal di Kabupaten Katingan menunjukkan angka semakin menurun dari tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu 95 desa pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 menjadi 57 desa. Kondisi ini masih terus membutuhkan penanganan secara terpadu sehingga secara bertahap dapat terus mengurangi desa tertinggal dan dapat naik kelas menjadi desa berkembang, demikian juga desa berkembang dapat menjadi desa maju.



Sedangkan desa berkembang pada tahun 2019 sebanyak 37 desa terus meningkat menjadi 77 desa pada tahun 2022.

Tabel 2.133 Banyaknya Desa Tertinggal di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Desa Mandiri		2	2	4
Desa Maju	1	11	11	16
Desa Berkembang	37	64	64	77
Desa Tertinggal	95	73	73	57
Desa Sangat Tertinggal	21	4	4	0
Keseluruhan Desa	154	154	154	154

Sumber: IDM Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan 2022, Dinas PMDes Kab. Katingan, 2023

Keseluruhan capaian pembangunan Kabupaten Katingan sebagaimana telah diuraikan pada bab ini, disajikan pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.134 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Katingan Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	5	7	9	11	12
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.	Pertumbuhan PDRB (%)	6,59	5,81	-3,25	2,90	5,58	
2.	PDRB per kapita (ADHB) (Juta Rp.)	44,9	48,4	51,2	55,7	60,7	
3.	PDRB per kapita (ADHK) (Juta Rp.)	28,8	30,1	30,5	31,2	32,7	
4.	Indeks Gini	0,30	0,27	0,25	0,23	0,25	
5.	Persentase penduduk miskin (%)	5,22	5,02	4,79	5,25	5,50	
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,91	68,55	68,68	68,89	69,74	
7.	Angka Melek Huruf	99,29	99,68	99,20	99,78	99,70	
8.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,65	8,66	8,67	8,68	8,78	
9.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,21	12,51	12,67	12,81	12,97	
10.	Angka Usia Harapan Hidup	66,00	66,50	66,50	65,87	66,16	
11.	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif (%)	68,94	72,05	73,29	77,64		
12.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,49	70,79	64,55	64,38	65,9	
13.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,78	5,45	5,69	5,5	5,33	
14.	Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat atas Pelayanan Publik (poin)	NA	79,78	80,82	82,64/(B)	84,30	
15.	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	
16.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	25,88	25,82	26,71	27,54	26,51	
17.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB (%)	7,73	7,90	7,87	7,3	7,04	
18.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	14,70	14,75	15,43	16,67	17,02	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM						
2.1	Fokus Layanan Urusan Wajib						
A	Pendidikan						
1.	APK PAUD	86,51	86,94	87,16	134,93	117,59	



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	5	7	9	11	12
2.	APK SD	118,86	115,44	114,12	112,73	113,37	
3.	APM SD/SDLB/MI	100	99,87	99,85	100,00	99,11	
4.	APK SMP/MTs	89,58	77,73	78,27	80,13	81,19	
5.	APM SMP/MTs	76,28	76,05	75,98	67,83	78,75	
6.	Angka Melek Huruf	99,29	99,68	99,20	99,78	99,70	
7.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	77,36	84,85	77,94	86,41	72,17	
8.	Persentase sekolah yang melakukan pemuktahiran data pokok pendidikan (dapodik) (%)	83,33	83,75	83,96	91,81	93,75	
B Kesehatan							
Pelayanan Kesehatan Dasar							
1.	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	10,61	13,32	6,17	20,1	8,53	
2.	Angka Kematian Balita per 1000 KH	10,61	5,39	0,62	20,86	0,68	
3.	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	121,30	207,16	93	151,69	170,76	
4.	Persentase rumah tangga ber PHBS (%)	60	65	75	0,116	0,117	
5.	Persentase balita stunting menurun (%)	26,50	26	16	21,22	20	
6.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular (%)	85	100	85	79	100	
7.	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya (%)	0	4	6	6 PKM (75%)	0	
8.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	80,44	83,66	80,3	52	61,32	
9.	Tingkat pemenuhan dana operasional puskesmas dan jaringannya (%)	95	95	99	90	92	
10.	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut (%)	36,90	56,99	70	22,4	100	
11.	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja (%)	85	65	70	100	25	
12.	Jumlah desa/ kelurahan Open Defecation Free (ODF)	161	161	20 Desa	7 Desa	20 Desa	
13.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita Hipertensi (%)	57,75	69,58	53,01	70,1	100	



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	5	7	9	11	12
14.	Persentase ketersediaan Obat dan vaksin (%)	0,73	0,44	88	86,86	85	
15.	Cakupan pengawasan peredaran obat dan makanan yang aman dan sehat (%)	80	70	75	72	81,18	
16.	Tingkat Pelayanan RS	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	
17.	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar Mutu RS (%)	80	82	85	80	60,76	
18.	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang terpelihara (%)	70	72	75	93	0	
C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1.	Persentase jalan yang dibangun (%)	797,2 Km (panjang jalan)	2,51 (20,5 Km)	1,52 (12,61 Km)	1,05% (8,879 Km)	0,591%(4,994 Km)	
2.	Persentase jalan yang ditingkatkan (%)	-	13,76 (16,71 Km)	11,04 (15,08 Km)	8,165% (12,374 Km)	5,349%(8,107 Km)	
3.	Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara (%)	-	1,91 (3,15 Km)	2,42 (4,1 Km)	5,838% (10,169 Km)	6,98%(12,174 Km)	
4.	Persentase Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya (%)	100	100	100	100	100	
5.	Persentase lahan yang terlayani Jaringan Irigasi (%)	59,23	61,39	62,47	100,59% (11.815 Ha)	77,15%(8.444,69 Ha)	
6.	Persentase panjang kanal/sungai sebagai pengendali banjir yang dilakukan peningkatan/pemeliharaan (%)	9,26	16,43	19,28	104,184% (134,225 Ha)	32,46% (32.300 Ha)	



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	5	7	9	11	12
7.	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang (%)	n/a	80	80	80	74,5	
8.	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun (buku)	n/a	1	1	1	1	
9.	Tingkat Capaian Pemasukan Asli Daerah Melalui Alat Berat (%)	50,33	70	70	74,27	55,70	
D	Perumahan dan Kawasan Pemukiman						
1.	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang aman dan berkelanjutan (%)	n/a	61,90	66,91	71,64	60,44	
2.	Persentase Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah setempat (%)	n/a	3	8	65,6	7,87	
3.	Persentase jalan desa yang dibangun (%)	n/a	20	30	35,6	16,15	
4.	Persentase Rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan SPM Perumahan Rakyat (%)	n/a	26,14	30,40	34,67	40,3	
5.	Persentase jaringan LPJU yang berfungsi baik (%)	n/a	36	41	82	39,38	
6.	Persentase kawasan Perkotaan dan Perumahan yang memiliki akses jalan dan drainase yang memadai (%)	n/a	29,73	36,13	42,53	48,93	
7.	Persentase taman yang dibangun (%)	n/a	20	20	-	20	
8.	Persentase taman yang dipelihara (%)	n/a	100	100	20	100	
9.	Persentase bahu jalan dan drainase yang dibersihkan di wilayah perkotaan Kabupaten Katingan (%)	n/a	40	60	-		
E	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
1.	Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, keindahan) yang diselesaikan (%)	88,81	81,70	95,71	70	71	
2.	Persentase korban jiwa yang selamat akibat kebakaran (%)	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	5	7	9	11	12
3.	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan trantibum (%)	75	76	80	80	80	
4.	Tingkat penyelesaian pelanggaran terhadap Perda/Perkada	100	100	95,71	95	80	
5.	Persentase cakupan kecamatan siap siaga menghadapi bencana (%)	84,62	100	100	100	100	
6.	Presentase penurunan titik HOTSPOT kebakaran hutan dan lahan (%)	n/a	19,22	10	-		
7.	Presentase cakupan logistik dan peralatan tanggap darurat (%)	55,16	100	81,25	100	0	
8.	Presentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (%)	0	33,33	100	100	0	
F	Sosial						
1.	Persentase PMKS yang mendapat Bantuan Sosial (%)	57,25	57,60	57,66			
2.	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan (%)	n/a	60	70			
3.	Persentase PMKS tertangani (%)	43,84	73,21	75,80			
4.	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial (%)	85	100	100			
5.	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial dan komunitas adat terpencil yang diberdayakan (%)				80	90	
6.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)				80	85	
7.	Persentase desa yang aktif melakukan update data kesejahteraan sosial (%)				50	60	



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	5	7	9	11	12
8.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten (%)				100	95	
9.	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi baik (%)				85	80	
G	Tenaga Kerja						
1.	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%)	0	40	0	70 Orang	20 Orang	
2.	Persentase pencari kerja yang mendapat layanan AK. 1 (%)	79,2	37	16,8	14,82	103,7	
3.	Persentase tenaga kerja terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan (%)	53,8	53,63	72,71	71	72	
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	49,08	51,68	51,68	51,91	7,97	
2.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	80	
3.	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak (Poin)	659	659	675	100	-	
I	Pangan						
1.	Persentase penurunan kecamatan rawan pangan (%)	7,7	7,70	7,70	7,7	7,7	
2.	Jumlah data ketersediaan dan kerawanan pangan	24	24	24	24	24	
3.	Jumlah ragam pangan olahan	48	48	48	0	48	
J	Pertanahan						



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	5	7	9	11	12
1.	Persentase Tanah untuk fasilitas umum yang disediakan (%)	n/a	20	40	-		
K	Lingkungan Hidup						
1.	Persentase Dokumen terkait Lingkungan Hidup yang disusun (%)	n/a	3	3	1	3	
2.	Indek Kualitas Tutupan Lahan	n/a	77,75	78,25	86,92	87,1	
3.	Persentase jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (%)	n/a	70	75	70	30	
4.	Indeks Kualitas Air	n/a	51,67	53,33	50,67	50,67	
5.	Indeks Kualitas Udara	n/a	92,94	86,26	87,32	90,21	
L	Kependudukan dan Catatan Sipil						
1.	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen kependudukan (%)	92	96,09	99,25	98,41	98,41	
2.	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen catatan sipil (%)	40	41,31	47,29	70,25	72,09	
3.	Persentase kecamatan yang melakukan pemuktahiran informasi kependudukan (%)	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	33,07	33,07	33,07	38,47	40,90	
5.	Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	93,28	93,28	93,28	93,67	95,69	
6.	Perekaman KTP Elektronik	99,64	99,64	99,64	99,4	99,40	
7.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	4,17	4,17	4,17	12,50	12,50	
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	5	7	9	11	12
1.	Persentase Lembaga Keberdayaan Desa yang aktif (Posyandu, PKK, BUMDES, Mantir Adat, POSYANTEK) (%)	n/a	80	85	95	100	
2.	Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	n/a	80	85	95	65	
3.	Prosentase Laporan Keuangan Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik (%)	n/a	80	85	95,3	58,08	
N	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 (%)	78,69	78,87	79,05	94,08	0	
2.	Persentase Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	12,42	27,87	43,32	58,77	63,09	
3.	Persentase Kualitas Pemberdayaan Keluarga (%)	11,8	25,61	39,42	60,95	65,22	
O	Perhubungan						
1.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	60	-	-	-	67	Alat Rusak 2019-2021
2.	Persentase Rambu-Rambu Terpasang (%)	28	30	32	26,67	27	
3.	Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang dibangun (%)	100	100	100	100	85	
4.	Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang terpelihara (%)	100	100	100	100	75	
P	Komunikasi dan Informatika						
1.	Persentase Perangkat daerah yang memiliki infrastruktur TIK sesuai ketentuan (%)	47	53	66	81,57	82,5	Jlh perangkat daerah yang memiliki infrastruktur TIK sesuai ketentuan /seluruh PD yang ada x100%
Q	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	5	7	9	11	12
1.	Persentase Koperasi aktif (%)	42,23	44,10	44,12	46	48,6	
2.	Persentase UKM aktif (%)	100	99,87	99,87	92	93	
R	Penanaman Modal						
1.	Jumlah promosi investasi yang dilakukan (promosi)	3	4	4	1	1	
2.	Persentase LKPM yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	35	35	45	64,06	70,31	
3.	Persentase penyelesaian pengaduan sesuai SOP (%)	n/a	100	100	100	100	
4.	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP(%)	85	90	91	100	93	
S	Kepemudaan dan Olahraga						
1.	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	120	126	126	166	122	
2.	Persentase Pemuda Yang Berwirausaha (%)	0,23	0,28	0,33	0,45	0,44	
3.	Jumlah Pemuda Yang lulus seleksi mengikuti pemuda pelopor tingkat nasional (orang)	0	0	0	0	-	
4.	Jumlah peserta yang lulus seleksi mengikuti paskibra tingkat nasional (orang)	0	0	0	0	0	
5.	Jumlah Masyarakat / Kelompok Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada Even Olahraga (orang)	0	50	67	10	23	
6.	Jumlah pelajar yang lulus seleksi mengikuti event olahraga (orang)	0	0	67	11	23	
7.	Jumlah pelajar yang memenangkan medali pada event olahraga kabupaten (orang)	0	0	2	3	9	3 emas,4 perak, 2 perunggu
T	Statistik						
1.	Persentase data statistik yang terpublikasi (%)	8	14	28	100	100	Jlh buku data statistik yang terpublikasi dibagi jlh seluruh PD X 100%



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	5	7	9	11	12
U	Kebudayaan						
1.	Persentase Peningkatan Sanggar Seni Budaya Yang Aktif (%)	8 sanggar	12,50	25	37,5	50	
2.	Persentase Peningkatan Pelaku Seni dan Budaya Yang Aktif (%)	70 orang	14,29	29	14,29	57,14	
3.	Persentase Peningkatan Situs dan Cagar Budaya Yang Memenuhi Ketentuan (%)	2 situs	0	100	0	-	tidak ada kegiatan pendukung
V	Perpustakaan						
1.	Jumlah pengunjung ke Perpustakaan (orang)	n/a	5.413	2.313	507	1.691	
W	Kearsipan						
1.	Persentase Perangkat Daerah Yang mengelola Arsip secara baku (%)	20	24	28	29	0	
X	Persandian						
1.	Persentase penggunaan sandi dalam berkomunikasi (%)	5	15	25	47,36	60	Jlh penggunaan sandi dalam berkomunikasi/ seluruh penggunaan sandi dalam berkomunikasi yang seharusnya x 100%
2.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan						
A	Kelautan dan Perikanan						
1.	Jumlah Ragam Produk Hasil Perikanan (jenis)	1	3	6	12	13	
2.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	5.427,00	5.800,10	6.210,30	15.355,29	7.979,88	
3.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	4.296,87	3.576,00	3.550,49	3.412,51	6.288,07	
B	Pariwisata						



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	5	7	9	11	12
1.	Persentase Destinasi Wisata Yang Memenuhi Standar (%)	5	10	15	10	10	
2.	Persentase Peningkatan Jumlah wisatawan (%)	29.113 kunjungan	17,49	-59,38	-16,32	51,06	
C	Pertanian						
1.	Persentase prasarana dan sarana pertanian yang memadai (%)	18,34	21,69	35,06	3,02	12,47	
2.	Persentase usaha dan kelembagaan kelompok tani yang berkembang (%)	37,89	47,36	56,83	55,04	82,17	
3.	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	64.556	69.223,72	122.982,13	56,765	161.647	
4.	Persentase hasil produksi beras yang dipasarkan dalam kemasan (%)	15	20	25	30	35	
5.	Jumlah produksi tanaman perkebunan (ton)	14.167	50.961,84	53.154,21	55.450,00	22.643,20	
6.	Jumlah populasi ternak (ekor)	n/a	29,055	30.507	412.342,00	376.364,00	
7.	Persentase jumlah ternak yang terobati (%)	100	100	100	100	98	
8.	Persentase kebijakan perencanaan pertanian dan perikanan yang tepat sasaran (%)	100	100	100	100	90	
F	Perdagangan						
1.	Persentase Pertumbuhan Sektor PDRB Perdagangan Besar dan Eceran (%)	9,21	9,23	9,25	-	0	
2.	Persentase Tertib Niaga (%)	80	80	80	0	0	
3.	Persentase Alat UTP yang sesuai standar (%)	80	80	80	51,5	72,25	
G	Perindustrian						
1.	Jumlah Produk Unggulan yang menjadi OVOP (produk)	n/a	1	1	0	0	
2.	Jumlah IKM, Pengusaha, Investor yang menggunakan fasilitas kawasan industri hampangan	0	0	1	3	1	
3.	Persentase IKM berbasis teknologi (%)	0	10	12	38,25	38,74	



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	5	7	9	11	12
4.	Persentase IKM potensial yang mendapatkan bantuan (%)	0	15	15	3	7	
H	Transmigrasi						
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Transmigrasi (%)	1	3	0	1 Bangunan	0	
2.3	Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan						
A	Sekretariat Daerah						
1.	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	
2.	Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi (%)	100	100	100	100	100	
3.	Persentase kasus yang memperoleh bantuan hukum (%)	80	80	80	80	80	
4.	Persentase penerima dana hibah dan dana bantuan sosial yang tepat sasaran (%)	90	90	90	91	99,36	
5.	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	100	100	
6.	Persentase sarana dan prasarana rumah ibadah yang difasilitasi oleh Pemda (%)	23	10	5	5	5	
7.	Persentase administrasi dan koordinasi perekonomian yang dilaksanakan dengan baik (%)	70	75	80	85	94	
8.	Persentase Pengadaan Barang/Jasa melalui SPSE (%)	23,09	37,76	26,82	39,32	54,94	



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	5	7	9	11	12
9.	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	80	82	83	84	100	
10.	Persentase sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance (%)	55	60	61	65	65	
11.	Cakupan layanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang prima (%)	100	100	100	100	100	
B	Sekretariat Dewan						
1.	Persentase fasilitasi rapat-rapat DPRD (%)	90	92	92	95	100	
2.	Persentase fasilitasi tindak lanjut hasil rapat - rapat alat kelengkapan DPRD (%)	89,50	93	95	100	100	
2.4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
A	Perencanaan						
1.	Predikat tercapainya rencana kerja pemerintah daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
2.	Jumlah sistem pengelolaan data dan informasi yang dikembangkan	1	1	1	1	1	
3.	Tingkat ketepatan waktu penyusun Dokumen Rencana Daerah (%)	100	100	100	100	100	
4.	Tingkat keselarasan renja dan renstra OPD Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan SDA (%)	84	85	87	90		
5.	Tingkat keselarasan renja dan renstra OPD Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (%)	79	80	83	100	100	
B	Penelitian dan Pengembangan						
1.	Persentase Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi yang ditindaklanjuti (%)	81,82	82	82	83,33	75	
C	PENDAPATAN						



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	5	7	9	11	12
1.	Persentase Laporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tepat waktu (%)	80	100	100	100	100	
2.	Pertumbuhan PAD (%)	n/a	n/a	1,70	1	13,46	
3.	Persentase Objek Pajak yang ditagih (%)	66	69	72	75	80,44	
D	KEUANGAN						
1.	Persentase laporan penatausahaan keuangan daerah yang tepat waktu (%)	80	100	100	100	100	
2.	Cakupan Pengelolaan Aset Daerah (%)	80	100	100	100	100	
3.	Persentase Laporan Perbendaharaan dan Kasda yang tepat waktu (%)	80	100	100	100	100	
4.	Tingkat Ketepatan waktu penyusun dokumen penganggaran (%)	100	100	100	100	100	
E	Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan						
1.	Persentase aparatur yang memperoleh pendidikan kedinasan (%)	80	90	90	90	21	
2.	Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan (%)	80	90	90	90	83	
3.	Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan (%)	80	90	90	90	73	
2.5	Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah						
1.	Cakupan Obrik Pengawasan (%)	80	80	80	90	85	
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	
2.6	Fungsi Kewilayahan Kecamatan						
1.	Persentase pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (%)	90	90	90	90		



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	5	7	9	11	12
2.7	Unsur Pemerintahan Umum						
	Kesatuan Bangsa dan Politik						
1.	Cakupan partai politik yang sudah memahami peraturan perundang-undangan (%)	70	80	85	90	100	
2.	Persentase kecamatan yang diawasi keamanannya (%)	70	75	80	85	88	
3.	Persentase pemangku kepentingan yang memahami ideologi bangsa (%)	80	85	85	86	90	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1.	Persentase Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	38,63	42,77	40,13	42,37		
2.	Indeks Kemahalan Konstruksi	95,89	96,00	93,16	96,5		
3.	Angka kriminalitas (Kasus)	90	60	82	65	14	
4.	Rasio ketergantungan	48,04	44,50	42,82	46,74		

Sumber: diolah dari evaluasi hasil perangkat daerah, 2023



2.5. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Penerapan SPM di Kabupaten Katingan tahun 2021 telah dilaporkan dan menjadi bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Ringkasan pencapaian dari penerapan SPM di Kabupaten Katingan Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

2.5.1. Capaian Penerapan SPM Tahun 2019

A. Bidang Pendidikan

1. Jenis pelayanan dasar

Sesuai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 pada Poin B Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Jenis pelayanan dasar urusan pendidikan meliputi a. Pendidikan Anak Usia Dini; b. Pendidikan Dasar; dan c. Pendidikan Kesetaraan

Tingkat Partisipasi warga Negara berdasarkan usia dan jenjang pendidikan di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.135 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019

No	Tingkat partisipasi warga Negara	Indikator		Capaian Kinerja (%)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)				
1.	Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Kelompok Bermain	Jumlah anak usia 0-6 tahun	34,76
		4.964	14.282	
PENDIDIKAN DASAR (SD)				
2.	Usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Jumlah anak usia 7-12 pada kabupaten yang bersangkutan	112,39
		19.478	17.330	
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA (SMP)				
3.	Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 pada kabupaten yang bersangkutan	115,84



No	Tingkat partisipasi warga Negara	Indikator		Capaian Kinerja (%)
		8.218	7.094	

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Untuk tahun 2019 tidak ada regulasi Diklat Calon Kepala Sekolah dan Pelantikan Kepala Sekolah oleh karena itu ada beberapa Kepala Sekolah yang masih sebaga Plt (Pelaksana Tugas). Untuk rekapitulasi tenaga penunjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.136 Tenaga Penunjang Pendidikan Tahun 2019

No	Tingkat Satuan Pendidikan	Belum SMA/Sederajat	Sudah SMA/Sederajat	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	-
2	Pendidikan Dasar (SD)	6	1	7
3	Pendidikan Dasar (SMP)	31	25	56
Total		37	26	63

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Selain data-data tersebut di atas, sesuai Peraturan Pemerintah dalam rangka pemenuhan SPM bidang pendidikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini, kami sampaikan juga data-data lain sebagai berikut:

Tabel 2.137 Indikator dan Persentase

No	Indikator	Prosentase
1	Angka Melek Huruf	99,29 %
2	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,24 %
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,90 %
4	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	97,08 %
5	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	97,44 %
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	78,19 %

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Katingan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:



1. Belum adanya Tim Pengendalian SPM Kabupaten/Kota sehingga kesulitan untuk melakukan koordinasi terkait pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi penerapan SPM.
2. Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat bangunan yang rusak, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
3. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1;
4. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang SD dan SMP, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
5. Standar Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih perlu diupayakan pemenuhan Standar Nasional;
6. Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan metode penghitungan baru mencapai angka 8,65 (sumber BPS 2019) sebagai indikasi penuntasan wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun;
7. Masih banyak akses jalan dan akses internet yang belum bisa menjangkau kedaerah-daerah terpencil; dan
8. Banyaknya satuan PAUD yang belum terlayani seperti *Satu Desa Satu PAUD* dan Lembaga Kesetaraan per-Kecamatan (PKBM dan LKP);
Solusi dari permasalahan tersebut, yaitu:
 1. Segera membentuk Tim Pengendalian SPM Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;
 2. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;
 3. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S-1, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
 4. Melalui pemerataan di tingkat kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari SD dan SMP yang kurang guru ke sekolah yang sudah memenuhi kecukupan guru;
 5. Melakukan optimalisasi kegiatan PKG dan PKB;
 6. Melakukan inventarisasi dan penyisiran ke daerah-daerah yang pencapaian angka partisipasi sekolahnya masih rendah;
 7. Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan akses jalan dan akses internet; dan
 8. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan secara kooperatif.

B. Bidang Kesehatan

SPM bidang kesehatan meliputi 12 jenis pelayanan, sebagai berikut:

1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita



5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Tabel 2.138 **Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target/ Sasaran Setahun	Hasil/ Realisasi	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3977	3380	85
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3801	3226	85
3	Pelayana Kesehatan Bayi Baru Lahir	3516	3379	96
4	Pelayanan Kesehatan Balita	17,077	15,154	89
5	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	5338	4960	93
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	89,543	61,514	69
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15,154	12,226	81
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	28,628	20,087	70
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus	6,463	4,565	71
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	130	264	49
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB Paru	2,036	1,979	97
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	4,588	2,646	58

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Dukungan personil dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan didukung oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2019 sebagai berikut:



Tabel 2.139 Tabel Tenaga Kesehatan Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan Pendukung	Dukungan Personil
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Perbaikan Gizi Masyarakat Program Penyediaan Dana Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes dan Sarana Kesehatan Lainnya	Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan, Bidan, Perawat
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Bidan, Perawat, Dokter, Dokter Spesialis
3	Pelayana Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Bidan, Perawat, Dokter/DLP, Dokter Spesialis Anak
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Bidan, Perawat, Tenaga Gizi, Dokter/DLP, Dokter Spesialis Anak
5	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Program Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah	Tenaga Kesehatan (Dokter/Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Gizi, Tenaga Promkes); Tenaga Non Kesehatan Terlatih (Guru, dokter kecil, kaader kesehatan)
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Program Pelayanan Kesehatan Remaja	Bidan, Perawat, Tenaga Gizi, Dokter, Tenaga Promkes, Kader Posbindu PTM terlatih
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Lanjut Usia	Bidan, Perawat, Tenaga Gizi, Dokter, Promkes, Kader Posbindu PTM terlatih, Kader Posyandu Lansia
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Program P2PTM	Bidan, Perawat, Tenaga Gizi, Dokter/DLP, Tenaga Promkes
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus	Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Dokter, Perawat, Nutrisionist, Bidan, Tenaga Promkes
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Program Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	Dokter, Perawat, dan Kader (terlatih penanganan ODGJ)
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB Paru	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dokter, Perawat, Pranata Laboratorium Kesehatan (terlatih program TB Paru), bidan yang terlatih untuk menskrining gejala TB anak, petugas program TB di Kab/kota



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan Pendukung	Dukungan Personil
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dokter Spesialis sesuai kewenangannya, Dokter/Dokter Gigi,

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Dalam melaksanakan SPM bidang Kesehatan ditemui beberapa permasalahan. Adapun permasalahan dimaksud dan solusinya disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.140 Permasalahan dan solusi

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan diri pada awal kehamilan/pemeriksaan setelah trimester I	Sosialisasi dan kerjasama dengan kader kesehatan desa untuk deteksi dini risiko kehamilan; kunjungan rumah pada ibu hamil yang tidak datang ke posyandu
2	Masih ada ibu bersalin yang tidak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Monitoring dan evaluasi pada petugas kesehatan, pemberdayaan masyarakat atau keluarga ibu hamil
3	Pemantauan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Pemahaman faktor risiko terhadap bayi baru lahir
4	Pelayanan kesehatan belum menjangkau seluruh balita yang ada, maka diperlukan analisa penyebabnya	Pengembangan Posyandu Balita, sosialisasi program kesehatan di lintas sector
5	Penjaringan belum dapat dilakukan sesuai standar kepada semua siswa sasaran (usia 7-15 tahun), tahun 2019 hanya dilakukan pada siswa kelas 1 dan kelas 7	Koordinasi lintas sektor dan persiapan rujukan kesehatan jika ditemukan masalah pada siswa
6	Pelayanan Kesehatan belum menjangkau seluruh sasaran, karena besarnya jumlah sasaran (usia 15-59 tahun) dan masih mengandalkan kegiatan pelayanan di sarana kesehatan	Koordinasi lintas sektor dan sosialisasi pentingnya masalah PTM
7	Kegiatan skrining tidak seluruhnya menjangkau lansia yang ada, terutama pada daerah pedesaan dan yang tidak ada petugas kesehatan	Peningkatan kegiatan kunjungan lapangan/luar gedung, integrasi kegiatan pusling di desa yang jauh dan tidak ada petugas, peningkatan pendanaan dan bahan pendukung kegiatan skrining
8	Penderita hipertensi belum seluruhnya terdeteksi di wilayah kerja dan belum berobat secara teratur, keterbatasan dalam pelaksanaan skrining, data sasaran bukan data ril dilapangan (data hasil proyeksi);	Peningkatan ketenagaan, pendanaan, peralatan dan bahan pendukung kegiatan untuk mendukung kegiatan skining di lapangan
9	Hanya terbatas pelayanan di sarana kesehatan dan kegiatan skrining yang terbatas volumenya (perlu ketenagaan, dukungan dana dan peralatan), berkaitan dengan pola makan masyarakat; ketersediaan stik pemeriksaan,	Peningkatan penyuluhan tentang pentingnya pencegahan PTM, kerjasama lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat hidup sehat



No	Permasalahan	Solusi
10	ODGJ yang ditemukan sudah dalam keadaan tingkat berat, kurang mendapat perawatan medis; Ketersediaan obat; kurang dukungan keluarga	Penanganan harus lintas sektor, membentuk dan menambah kader kesehatan jiwa untuk mendeteksi secara dini gangguan jiwa di lingkungannya
11	Kegagalan proses pengobatan (minum obat tidak teratur, minum obat tidak sampai berakhir), penularan pada lingkungan dan keluarga	Kegiatan deteksi dini TB, Pelatihan petugas pelaksana TB, dan pembentukan pengawas minum obat TB; perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga
12	Adanya stigma negatif tentang penderita HIV di masyarakat	Sosialisasi dan kerjasama lintas sector

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

C. Bidang Pekerjaan Umum

SPM bidang pekerjaan umum diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai acuan pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM, yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1/PRT/M/2914 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2019 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.141 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
I	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100	100
		Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70	70
II	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Persentase tingkat kondisi jalan kab/kota baik dan sedang	60	30.47
		Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kab/kota	100	72.22
III	Informasi penataan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kab/kota beserta rinciannya melalui peta analog dan peta digital	100	100
	Penyediaan ruang terbuka hijau	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	50	

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019



Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum, yaitu:

1. Keterbatasan anggaran APBD untuk melaksanakan rencana kegiatan sehingga bantuan dana dari pusat sangat diperlukan
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga perlu adanya bimbingan teknis untuk mempertajam pengetahuan dan penambahan jumlah pegawai/staf untuk melakukan pelayanan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan, misalnya kurangnya jumlah truk pengangkut sampah dan personilnya, kurangnya lahan untuk lokasi TPA dan lain sebagainya.

Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan di atas, yaitu:

1. Menyusun proposal atau usulan untuk mendapatkan dana bantuan dari pusat, misal dana Pembantuan dan Dana Alokasi Kusus (DAK)
2. Menambah jumlah pegawai/staf baru atau honorer dan meningkatkan SDM pegawai/staf yang ada dengan mengikuti bimbingan teknis sesuai tugas dan bidang keahlian.
3. Menambah sarana dan prasarana untuk mengakomodasi pelayanan persampahan melalui pembelian truk sampah, bak armroll, pengadaan lahan untuk TPA serta penambahan tenaga petugas persampahan.

Tabel 2.142 Target Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100 %	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100 %	Setiap Tahun

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Realisasi dari pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum sebagaimana ditarget pada tabel di atas tidak dilaporkan dalam LPPD Tahun 2019. Hal yang sama juga terjadi pada SPM Bidang Perumahan Rakyat, tidak terdapat pelaporan pelaksanaannya.

D. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang



Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang urusan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

- Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota;
- Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Cakupan rasio petugas ketertiban perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten/Kota;
- Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota;
- Tingkat waktu tanggap (response time rate);
- Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi; dan
- Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran).

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan telah memasukan target SPM pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Katingan dari segi penganggarnya pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.143 Target Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Program	Indikator	Target
1.	Pemeliharaan ketentramandan ketertiban masyarakat	1). Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kab/kota	100 %
		2). Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	2 x Sehari
		3). Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kab/kota	1 orang setiap RT atau sebutan lainnya
2.	Penanggulangan bencana kebakaran	1). Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kab/kota	80 %
		2). Tingkat waktu tanggap	75%
		3). Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%
		4). Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 500-10.000 Ltr pa WMK	90%

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.



Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh sebagaimana berikut ini. Adapun permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Standar Minimal sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2019 yang masih terbatas dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan Damkar.
2. Kurangnya tenaga PPNS lingkup Satpol PP; dan
3. Minimnya personil Satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti Diklat Teknis.

Solusi dari permasalahan tersebut, yaitu:

1. Mengajukan dan mengusulkan alokasi anggaran berkaitan Sarana dan Prasarana Standar Minimal melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBD (Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, maupun Dana DAK).
2. Merencanakan dan mengajukan usulan penambahan personil anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Katingan untuk mengikuti Diklat Teknis.

E. Bidang Sosial

Realisasi dari penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.144 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2019

No	Program	Indikator	Target	Capaian
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	10	10
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	-	-
3	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasara tuna sosial diluar panti	40	20
4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah warga negara gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasara tuna sosial diluar panti	-	-



No	Program	Indikator	Target	Capaian
5	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	30	30

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagai berikut:

Permasalahan:

- Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani; dan
- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Solusi:

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

2.5.2. Capaian Penerapan SPM Tahun 2020

A. Bidang Pendidikan

1. Jenis pelayanan dasar

Realisasi pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.145 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	96,22
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	3,24
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	70,11

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2020



Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Katingan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Kurang maksimalnya Tim Pengendalian SPM Kabupaten/Kota dalam hal koordinasi, sehingga kesulitan untuk melakukan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi penerapan SPM;
2. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2020 untuk Jenjang Pendidikan Dasar mengalami Penurunan dari 114,11 % tahun 2019 pada tahun 2020 menjadi 96,22 % penyebabnya adalah karena ada usia dibawah 7 tahun dan diatas 16 tahun yang msh terdata di jenjang TK/RA dan di Jenjang Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA, dan sebagian Siswa yang belajar keluar daerah;
3. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2020 masih rendah untuk Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini yaitu 70,11 %, karena masih adanya satuan PAUD yang belum terlayani seperti Satu Desa Satu PAUD;
4. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3,74 untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan dari tahun 2019 yaitu 5,68%, karena masih adanya PKBM yang belum terlayani seperti Satu Kecamatan Satu PKBM; dan
5. Penyerapan Anggaran masih rendah, karena masih adanya kegiatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik yang tidak terlaksana atau tidak selesai, dan Rasionalisasi Kegiatan karena adanya Covid-19 khususnya dana APBD.

Solusi dari permasalahan tersebut, yaitu:

1. Tim Pengendalian SPM Kabupaten/Kota segera berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga Penerapan SPM ditingkat Satuan Pendidikan dan Desa dapat Maksimal;
2. Akan dilakukan koordinasi kepada sekolah SD dan SMP serta setingkatnya, untuk selalu aktif dalam hal singronisasi data setiap 2 minggu sekali sesuai dengan edarana dari kemendikbud maupun kemenag, serta menjaring anak usia sekolah untuk bersekolah;
3. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF akan bekerja keras untuk mensosialisasikan Satu Desa Satu PAUD ke Desa-desa yang belum memiliki satuan PAUD, dan akan memudahkan dalam satuan PAUD atau Lembaga desa dalam hal pemberian Rekomendasi yang akan mengusulkan ijin pendirian dan ijin operasional, untuk selanjutnya ditinjau lanjuti ke PTSP, dan sehingga mempunyai NPSN dan terdata di dapodikdasmen serta emis;
4. Akan dilakukan Pembinaan bagi satuan pendidikan yang memiliki Akte Notaris PKBM untuk mengembangkan atau membuka layanan seperti



- Pendidikan Kesetaraan, dan akan selalu dibimbing baik dari pencarian siswa maupun menyingronisasian di Dapodikdasmen; dan
5. Melakukan optimalisasi seluruh kegiatan baik itu DAK Fisik maupun DAK Nonfisik dengan aktif melakukan monitoring kegiatan di tiap tahap pencairan anggaran, dan menginventarisir kegiatan yang terkena Rasionalisasi pada tahun 2020 dan akan diakomodir di tahun 2021.

B. Bidang Kesehatan

Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.146 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target/ Sasaran Setahun	Hasil/ Realisasi	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.938	3.118	79,18
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.759	1.959	52,11
3	Pelayana Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.579	2.980	83,26
4	Pelayanan Kesehatan Balita	13.652	11.299	83,31
5	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	28.922	12.982	44,89
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	89.543	46.725	52,18
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.260	10.198	90,57
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	28.868	15.338	52,13
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus	6.463	3.055	47,27
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	258	219	84,88
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB Paru	2.369	1.183	49,94
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.939	2.659	67,52

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) indikator bidang kesehatan, pada tahun 2020 belum ada indicator yang capainnya 100% sesuai dengan ketentuan dan ada 3 (tiga) indikator yang capaian kinerjanya dibawah 50% yaitu pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar, pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus dan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis.

Dalam melaksanakan SPM bidang Kesehatan ditemui beberapa permasalahan. Adapun permasalahan dimaksud dan solusinya disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 2.147 Permasalahan dan solusi

No	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Ada ibu hamil yang tidak memeriksakan diri pada petugas kesehatan pada awal kehamilan	Sosialisasi dan kerjasama dengan kader kesehatan desa untuk deteksi dini resiko kehamilan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Masih ada ibu bersalin yang tidak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Monitoring dan evaluasi pada petugas kesehatan, pemberdayaan masyarakat atau keluarga ibu hamil
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pemantauan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Pemahaman faktor risiko terhadap bayi baru lahir
4	Pelayanan Kesehatan Anak Balita Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar belum menjangkau seluruh balita maka diperlukan Analisa sebab balita tidak mendapatkan pelayanan	Pengembangan posyandu balita, sosialisasi program kesehatan di lintas sector
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Penjaringan belum dapat dilakukan sesuai standar kepada semua siswa sasaran	Koordinasi lintas sektor dan persiapan rujukan jika ditemukan masalah
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah sasaran yang besar membuat indicator ini belum dicapai secara maksimal	Koordinasi lintas sektor dan sosialisasi masalah PTM
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah lansia yang berada dalam satu wilayah belum ada yang valid, kekurangan petugas yang melaksanakan screening	Harus dicari strategi untuk dapat menjangkau sasaran lansia
8	Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi Penderita hipertensi belum terdeteksi dan belum berobat secara teratur	Kekurangan petugas dalam melaksanakan screening, menggunakan data dari riset untuk dijadikan acuan penjaringan hipertensi
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Untuk melakukan screening dibutuhkan biaya yang cukup besar, kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan pola makan	Sosialisasi tentang PTM, kerjasama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa Orang dengan gangguan jiwa berat pada umumnya sudah terlantar dan tidak mendapat perawatan	Kerjasama lintas sektor, menambah kader jiwa untuk mendeteksi gangguan kejiwaan yang ada di sekitarnya
11	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberculosis (TB) Banyak pasien yang gagal berobat, pasien tidak minum obat sampai sembuh, penularan pada lingkungan dan keluarga	Deteksi dini TB, pelatihan petugas dengan kompetensi TB, kerjasama lintas sektor dan lintas bidang



No	Permasalahan	Solusi
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV Adanya stigma negatif tentang penderita HIV di masyarakat	Sosialisasi kerjasama lintas sektor dan mengubah stigma negatif masyarakat

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2020

C. Bidang Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- Penyediaan pengolahan air limbah domestik.

Realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.148 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	95,40
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	95,40

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2020

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum, yaitu:

- Pengurangan anggaran karena dialihkan untuk anggaran penanganan Covid 19 berdampak pada capaian kinerja dalam pelayanan penyediaan infrastruktur kepada masyarakat. Karena dengan pengurangan anggaran berarti infrastruktur yang terbangun akan mengalami pengurangan secara kuantitas;
 - Terjadinya perbedaan antara rencana dari beberapa program/kegiatan dengan kondisi di lapangan, khususnya program/kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
- Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan di atas, yaitu:
- Melakukan prioritas penganggaran terutama pada pelayanan infrastruktur kepada masyarakat;
 - Melakukan review desain dengan tetap mengacu berdasarkan anggaran yang tersedia;
 - Membuat sistem skala prioritas berdasarkan kegiatan teknis terutama kegiatan yang menyangkut pencapaian SPM; dan
 - Membuat sistem skala prioritas berdasarkan kegiatan teknis dalam pencapaian SPM.



D. Urusan Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan pembangunan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Katingan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Katingan. Realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.149 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Katingan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	0,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	0,00

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2020

Dukungan Personil Dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat ini, belum ada kejelasan dinas pelaksananya yaitu Dinas Sosial atau Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat ini, belum teranggarkan dan belum ada kejelasan dinas pelaksananya yaitu Dinas Sosial atau Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sehingga kedepannya perlu dimasukkan dalam RKPD/RPJMD dianggarkan dan Mengakomodir Target dan Anggaran Program/Kegiatan dimaksud pada tahun berikutnya.

E. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan telah memasukkan target SPM pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Katingan dari segi penganggarnya pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut:



Tabel 2.150 Realisasi Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada 647 orang	100 %	647
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	88.100 orang (55,6)
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	120.464 orang (76 %)
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	0 orang (100%)
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran adalah 4 orang	100 %	100

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2020

Untuk poin nomor 1 dan 2 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan, pada tahun 2020 di Kabupaten Katingan 4 orang yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang ditangani Bidang Damkar dan ada 1 (satu) indikator yang capaian kinerjanya 647%, yaitu pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terutama penegakan Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh sebagaimana berikut ini.

a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

– Permasalahan

Payung Hukum (Perda) yang mengatur tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kurangnya Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan, kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung dalam penegakan Perda/Perkada dan minimnya anggaran yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan dalam pencapaian target SPM serta masih rendahnya koordinasi di daerah juga menjadi kendala yang dihadapi dalam penanganan pelayanan



Ketentraman dan Ketertiban Umum bagi masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat (Linmas Desa) untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum sangat diperlukan yaitu melalui kegiatan pelatihan Linmas Desa yang ada di 154 Desa di Kabupaten Katingan.

– Solusi

Dalam memenuhi target perlu meningkatkan kualitas pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada masyarakat, membuat payung Hukum (Perda) yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, penambahan/rekrutmen Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi standar kualifikasi, penyiapan Sarana dan Prasarana pendukung dalam penegakan Perda/Perkada, Penyiapan anggaran yang cukup untuk menunjang pencapaian SPM di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum di daerah melalui Linmas Desa.

b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran dikawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdiksi tanggungjawab Pemerintah daerah Kabupaten Katingan.

– Permasalahan

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat sasaran dari indikator ini cakupannya sangat luas, mengingat luas wilayah Kabupaten Katingan yang sangat luas yang terdiri dari 13 Kecamatan dan dari 13 Kecamatan tersebut hanya 4 Kecamatan yang ada Pos dan Personil Pemadam Kebakarannya yaitu Pos Pemadam di Kasongan dan Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir, Pos Pemadam di Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Pos Pemadam Kebakaran di Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah dan Pos Pemadam Kebakaran di Pagatan Kecamatan Katingan Kuala. Kendala yang dihadapi terkait indikator ini yaitu kurangnya peran serta Masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran baik permukiman maupun lahan, kualitas aparatur pemadam kebakaran belum memadai, terbatasnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran serta minimnya anggaran sehingga kurang efektif dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

– Solusi

Peran serta Masyarakat sangat diperlukan dalam memenuhi target Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran mengingat Wilayah Kabupaten yang sangat luas yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 154 Desa sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam membantu anggota Pemadam Kebakaran melakukan



Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran perlu dilakukan Kegiatan Sosialisasi dan simulasi dalam memberdayakan masyarakat oleh Bidang Pemadam Kebakaran yang bekerjasama dengan stakeholder terkait, meningkatkan kualitas aparatur pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai dan penyiapan anggaran yang cukup sehingga bisa lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan damkar dilapangan.

F. Bidang Sosial

Realisasi dari penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Katingan pada tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.151 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas diluar panti yang dijangkau melalui Program Keluarga Harapan, PBI, JKN, BPNT dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penanganan Covid 19 sebanyak 281 orang	281	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar diluar panti yang dijangkau melalui Program Keluarga Harapan, PBI, JKN, BPNT dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penanganan Covid 19 sebanyak 5.181 orang	5.181 orang	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah lanjut usia diluar panti yang dijangkau melalui Program Keluarga Harapan, PBI, JKN, BPNT dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penanganan Covid 19 sebanyak 3.342 orang	3.342 orang	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Tidak ada kasus	-	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah korban bencana kabupaten yang dilayani Dinas Sosial selama tahun 2020 sebanyak 22.717 orang	22.717 orang	100

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2020

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagai berikut:

Permasalahan:



1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang di kehendaki Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
2. Masih tersebar dan belum terbangun system informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.
3. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana
4. Adanya perubahan iklim yang mengakibatkan intensitas terjadinya bencana didaerah semakin tinggi.
5. Adanya pandemi Virus Corona 19 yang melanda negara ini, termasuk Kabupaten Katingan yang mengakibatkan pergeseran anggaran belanja.
6. Meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana.

Solusi:

1. Menggunakan media komunikasi sosial yang ada secara efektif sebagai sarana informasi dan komunikasi yang terpadu dan terintegrasi.
2. Mengajukan proposal pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Bekerja sama dengan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah untuk penyediaan peralatan dan logistik bantuan untuk korban bencana.
3. Berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder yang ada (instansi vertikal, SOPD terkait, pihak swasta dan masyarakat).
4. Mengadakan Posko siaga dan rutin melaksanakan patroli dengan instansi terkait untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang lebih besar lagi.

Laporan bencana yang melanda di wilayah Kabupaten Katingan selama tahun 2020 tidak lagi didominasi oleh titik panas/hotspot serta kebakaran hutan dan lahan akan tetapi bencana banjir dan penanganan pandemi Corona Virus 19. Hal ini dikarenakan perubahan musim sepanjang tahun 2020 yang mengakibatkan curah hujan lebih tinggi daripada tahun tahun sebelumnya, serta merebaknya virus corona yang melanda negara ini hingga Kabupaten Katingan yang mengakibatkan pengaruh sektor sosial dan ekonomi masyarakat menjadi terganggu. Sepanjang tahun 2020, sudah terjadi beberapa kali bencana banjir, baik skala besar maupun kecil. Menurut laporan yang disusun, ada 2 (dua) kali banjir skala besar terjadi di Kabupaten Katingan, yaitu periode Bulan Mei – Juni serta di Bulan September yang melanda hampir semua wilayah kecamatan di Kabupaten Katingan. Sedangkan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid) 19 sejak Bulan April sampai Desember, BPBD Kabupaten Katingan yang juga ditunjuk sebagai Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Covid 19 bekerjasama dengan instansi lainnya, telah aktif melaksanakan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan penanggulangan persebaran virus. Baik dengan pendirian posko posko di perbatasan, posko di daerah karantina pasien, maupun melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan di lokasi lokasi yang disinyalir bisa dijadikan lokasi baru persebaran virus tersebut. Adapun kebakaran hutan/lahan maupun indikasi titik hotspot hampir



tidak terjadi di wilayah Kabupaten Katingan, baik dari wilayah hulu sampai wilayah hilir. Menurut laporan, baik yang diperoleh pada saat pelaksanaan patroli siaga bencana maupun dari Instansi Instansi terkait lainnya, sepanjang bulan Januari sampai dengan Nopember 2020, telah terdeteksi sebanyak 897 titik hotspot tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Katingan. Hal ini dikarenakan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Sedangkan laporan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan hampir tidak terjadi sepanjang tahun 2020, meskipun posko siaga bencana kebakaran hutan dan lahan telah dibentuk di Posko Kabupaten maupun di beberapa kecamatan yang berpotensi terjadi kebakaran. Untuk mengatasi bencana telah di bentuk forum koordinasi, patroli bersama dan posko bersama yang melibatkan BPBD, TNI, POLRI, Tagana, Dinas Kehutanan, Satpol PP, Manggala Agni dan Damkar Kabupaten Katingan.

2.5.3. Capaian Penerapan SPM Tahun 2021

A. Bidang Pendidikan

Realisasi pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.152 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	93,04
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	14,12
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	70,11

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2021

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Katingan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya sarana dan prasarana, penambahan tenaga pendidik walaupun tidak signifikan, serta lembaga swasta khususnya jenjang PAUD yang mulai mengurus ijin pendirian dan ijin operasional. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2021 untuk Jenjang Pendidikan Dasar mengalami Penurunan dari 96,22 % tahun 2020 pada tahun 2021 menjadi 93,04 % penyebabnya adalah karena ada usia dibawah 7



tahun dan diatas 16 tahun yang msh terdata di jenjang TK/RA dan di Jenjang Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA, dan sebagian Siswa yang belajar keluar daerah;

2. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2020 mengalami peningkatan 8,44 % untuk Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini yaitu 70,11 % tahun 2020 dan 79,55 % untuk tahun 2021 karena ada beberapa Desa yang telah memiliki satuan PAUD sesuai Satu Desa Satu PAUD;
3. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 14,12 untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan dari tahun 2020 yaitu 3,74 %, Karena ada salah satu Pondok Pesantren Syailillah (PPS) dibawah naungan Kemenag yang ikut serta menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan, dan kami tetap dengan fokus ke PKBM dengan Satu Kecamatan Satu PKBM;
4. Penyerapan Anggaran masih rendah, karena masih adanya kegiatan Fisik dan Nonfisik yang tidak terlaksana atau tidak selesai, karena penganggaran di APBD Perubahan waktu pelaksanaan tidak tercukupi serta Refocusing Kegiatan karena adanya Covid 19 khususnya dana APBD.

Solusi dari permasalahan tersebut, yaitu:

1. Akan dilakukan koordinasi kepada sekolah SD dan SMP serta setingkatnya, untuk selalu aktif dalam hal sinkronisasi data setiap 2 minggu sekali sesuai dengan edaran dari Kemendikbud maupun Kemenag, serta menjaring anak usia sekolah untuk bersekolah dan membuat rekapitulasi bagi siswa yang tidak sekolah dengan keterangan yang disesuaikan untuk di teruskan ke Bidang Pembinaan PAUD dan PNF untuk ditindaklanjuti oleh SKB dan PKBM setempat;
2. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF akan bekerja keras untuk mensosialisasikan Satu Desa Satu PAUD ke Desa-desa yang belum memiliki satuan PAUD, dan akan memudahkan dalam satuan PAUD atau Lembaga desa dalam hal pemberian Rekomendasi yang akan mengusulkan ijin pendirian dan ijin operasional, untuk selanjutnya ditinjau lanjuti ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu agar mempunyai NPSN dan terdata di Dapodikdasmen;
3. Akan dilakukan pembinaan bagi satuan pendidikan yang memiliki Akte Notaris PKBM untuk mengembangkan atau membuka layanan seperti Pendidikan Kesetaraan, dan akan selalu dibimbing baik dari pencarian siswa maupun mensinkronisasi di Dapodikdasmen serta membuka PKBM untuk Kecamatan yang belum memiliki Pendidikan Kesetaraan;
4. Melakukan optimalisasi seluruh kegiatan baik itu Fisik maupun Nonfisik, aktif melakukan monitoring kegiatan ditiap tahap pencairan anggaran, dan menginventarisir kegiatan yang terkena Refocusing pada tahun 2021 dan akan diakomodir di tahun 2022.

B. Bidang Kesehatan

Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 2.153 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target/ Sasaran Setahun	Hasil/ Realisasi	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 2.903 orang	3.321	87,41
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 1.655 orang	3.170	52,21
3	Pelayana Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 2.566 orang	3.019	85,00
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 6.600 orang	12.341	53,48
5	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 13.309 orang	25.475	52,24
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 58.938 orang	120.355	48,97
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 4.037 orang	14.338	28,16
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 23.664 orang	33.471	70,70
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 2.486 orang	3.150	78,92
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan adalah 213 orang	262	81,30
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 2.290 orang	2.911	78,67
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 2.260 orang	3.938	57,39

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2021



Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) indikator bidang kesehatan, pada tahun 2021 belum ada indikator yang capainnya 100 % sesuai dengan ketentuan dan ada 2 (tiga) indikator yang capaian kinerjanya dibawah 50 % yaitu pelayanan kesehatan pada usia Produktif dan pelayanan kesehatan Usia Lanjut.

Tabel 2.154 Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ada ibu hamil yang tidak memeriksakan diri pada petugas kesehatan pada awal kehamilan	Sosialisasi dan kerjasama dengan kader kesehatan desa untuk deteksi dini resiko kehamilan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Masih ada ibu bersalin yang tidak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Monitoring dan evaluasi pada petugas kesehatan, pemberdayaan masyarakat atau keluarga ibu hamil
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pemantauan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Pemahaman faktor risiko terhadap bayi baru lahir
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar belum menjangkau seluruh balita maka diperlukan Analisa sebab balita tidak mendapatkan pelayanan	Pengembangan posyandu balita, sosialisasi program kesehatan di lintas sektor
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Penjaringan belum dapat dilakukan sesuai standar kepada semua siswa sasaran	Koordinasi lintas sektor dan persiapan rujukan jika ditemukan masalah
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah sasaran yang besar membuat indicator ini belum dicapai secara maksimal	Koordinasi lintas sektor dan sosialisasi masalah PTM
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah lansia yang berada dalam satu wilayah belum ada yang valid, kekurangan petugas yang melaksanakan screening	Harus dicari strategi untuk dapat menjangkau sasaran lansia
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi belum terdeteksi dan belum berobat secara teratur	Kekurangan petugas dalam melaksanakan screening, menggunakan data dari riset untuk dijadikan acuan penjaringan hipertensi
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Untuk melakukan screening dibutuhkan biaya yang cukup besar, kebiasaan masyarakat yang kurang	Sosialisasi tentang PTM, kerjasama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat



No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
		memperhatikan pola makan	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang dengan gangguan jiwa berat pada umumnya sudah terlantar dan tidak mendapat perawatan	Kerjasama lintas sektor, menambah kader jiwa untuk mendeteksi gangguan kejiwaan yang ada di sekitarnya
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Banyak pasien yang gagal berobat, pasien tidak minum obat sampai sembuh, penularan pada lingkungan dan keluarga	Deteksi dini TB, pelatihan petugas dengan kompetensi TB, kerjasama lintas sektor dan lintas bidang
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Adanya stigma negatif tentang penderita HIV di masyarakat	Sosialisasi kerjasama lintas sektor dan mengubah stigma negatif masyarakat

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2021

C. Bidang Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- b. Penyediaan pengolahan air limbah domestik.

Realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.155 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2021

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum selama tahun 2021 mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

1. Pengurangan anggaran karena dialihkan untuk anggaran penanganan Covid 19 berdampak pada capaian kinerja dalam pelayanan penyediaan infrastruktur kepada masyarakat. Karena dengan pengurangan anggaran berarti infrastruktur yang terbangun akan mengalami pengurangan secara kuantitas.



2. Terjadinya perbedaan antara rencana dari beberapa program/kegiatan dengan kondisi di lapangan, khususnya program/kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum.

Terhadap permasalahan diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan telah mengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Melakukan prioritas penganggaran terutama pada pelayanan infrastruktur kepada masyarakat.
2. Melakukan review desain dengan tetap mengacu berdasarkan anggaran yang tersedia.
3. Membuat sistem skala prioritas berdasarkan kegiatan teknis terutama kegiatan yang menyangkut pencapaian SPM.
4. Membuat sistem skala prioritas berdasarkan kegiatan teknis dalam pencapaian SPM.

D. Urusan Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan pembangunan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Katingan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Katingan. Jenis – jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.156 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Katingan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	0,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	0,00

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2021

Dukungan Personil Dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat ini, belum ada kejelasan dinas pelaksanaannya yaitu Dinas Sosial atau Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.



Dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat ini, belum teranggarkan dan belum ada kejelasan dinas pelaksanaannya yaitu Dinas Sosial atau Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sehingga kedepannya perlu dimasukkan dalam RKPD/RPJMD dianggarkan dan Mengakomodir Target dan Anggaran Program/Kegiatan dimaksud pada tahun berikutnya.

E. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan

Jenis – jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Realisasi pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan Tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.157 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan

No	Nama Indikator	Target/ Sasaran Setahun (A)	Hasil/ Realisasi (B)	(A)/(B) (%)	Sumber Data
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	335 Orang	335 Orang	100	BIDANG TIBUM, PERDA DAN LINMAS
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	5 Orang	5 Orang	100	BIDANG DAMKAR

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2021

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh sebagaimana berikut ini.

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Standar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mendeteksi secara dini faktor resiko gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ada di lingkungan Masyarakat yaitu dengan



cara melakukan Deteksi Dini, memetakan daerah- daerah yang rawan gangguan keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta melakukan kerjasama lintas sektoral dengan stakeholder yang terkait.

a. Kendala

Kendala yang dihadapi terkait indikator ini adalah tidak adanya Payung Hukum (Perda) yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, kurangnya Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan, kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung dalam penegakan Perda/Perkada dan minimnya anggaran yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan dalam pencapaian target SPM serta masih rendahnya koordinasi di daerah juga menjadi kendala yang dihadapi dalam penanganan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum bagi masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat (Linmas Desa) untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum sangat diperlukan yaitu melalui kegiatan pelatihan Linmas Desa yang ada di 154 Desa di Kabupaten Katingan.

b. Tindak lanjut

Dalam memenuhi target perlu meningkatkan kualitas pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada masyarakat, membuat payung Hukum (Perda) yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, penambahan/rekrutmen Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi standar kualifikasi, penyiapan Sarana dan Prasarana pendukung dalam penegakan Perda/Perkada, Penyiapan anggaran yang cukup untuk menunjang pencapaian SPM di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum di daerah melalui Linmas Desa.

2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran dikawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdiksi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

a. Kendala

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat sasaran dari indikator ini cakupannya sangat luas, mengingat luas wilayah Kabupaten Katingan yang sangat luas yang terdiri dari 13 Kecamatan dan dari 13 Kecamatan tersebut hanya 4 Kecamatan yang ada Pos dan Personil Pemadam Kebakarannya yaitu Pos Pemadam di Kasongan dan Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir, Pos Pemadam di Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Pos Pemadam Kebakaran di Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah dan Pos Pemadam Kebakaran di Pagatan Kecamatan



Katingan Kuala. Kendala yang dihadapi terkait indikator ini yaitu kurangnya peran serta Masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran baik permukiman maupun lahan, kualitas aparatur pemadam kebakaran belum memadai, terbatasnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran serta minimnya anggaran sehingga kurang efektif dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

b. Tindak lanjut

Peran serta Masyarakat sangat diperlukan dalam memenuhi target Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran mengingat Wilayah Kabupaten yang sangat luas yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 154 Desa sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam membantu anggota Pemadam Kebakaran melakukan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran perlu dilakukan Kegiatan Sosialisasi dan simulasi dalam memberdayakan masyarakat oleh Bidang Pemadam Kebakaran yang bekerjasama dengan stakeholder terkait, meningkatkan kualitas aparatur pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai dan penyiapan anggaran yang cukup sehingga bisa lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan damkar dilapangan.

2. Jenis Pelayanan Dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan

Jenis – jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Realisasi pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan Tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.158 Realisasi Pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	733 Orang (0,44%)
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan	100 %	52.400 Orang (31%)



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
	terhadap bencana	dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	164 Orang (100%)

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2021

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Belum termuatnya pemenuhan urusan wajib sub urusan bencana dalam program prioritas.
2. Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana.
3. Terbatasnya kapasitas kemampuan sumberdaya manusia penanggulangan bencana.
4. Luasnya wilayah rawan bencana dan terbatasnya sarana prasarana dan teknologi untuk pencegahan dan penanggulangan bencana.

b. Solusi

1. Menyampaikan melalui surat agar pelayanan urusan wajib sub urusan bencana dapat dimuat dalam Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, agar selanjutnya dapat ditindaklanjuti dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.
2. Meminta penambahan anggaran dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana.
3. Mengusulkan upaya peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
4. Mengusulkan penyediaan sarana prasarana yang memadai dan teknologi yang maju untuk pencegahan dan penanggulangan bencana.

F. Bidang Sosial

Jenis – jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.



Realisasi dari penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Katingan pada tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.159 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	80%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	63,33%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	53,33%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	0% (Tidak Ada Kasus)	0% (Tidak Ada Kasus)
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100 %	90%

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2021

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagai berikut:

Permasalahan urusan sosial sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) belum menyajikan data yang detail dan spesifik terkait penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, dan gelandangan dan pengemis, sehingga kesulitan dalam menentukan jumlah penerima layanan yang tepat.
2. Karena keterbatasan data yang dimiliki, penyusunan anggaran untuk SPM Bidang Sosial masih belum tepat dan sesuai dengan jumlah pemerlu layanan.
3. Masih rendahnya pemahaman terkait SPM Bidang Sosial sehingga kesulitan dalam penentuan jenis layanan dan penerima layanan.
4. Adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.

Solusi :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Aparatur Desa di seluruh wilayah Kabupaten Katingan untuk pengumpulan data detail



terkait penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, dan gelandangan dan pengemis.

2. Meningkatkan kompetensi ASN Sosial dan Pekerja Sosial dalam pemahaman dan Penerapan SPM.

2.5.4. Capaian Penerapan SPM Tahun 2022

A. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Katingan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan yang mempunyai tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

1. Pendidikan dasar
2. Pendidikan kesetaraan
3. Pendidikan anak usia dini

Tabel 2.160 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 %	90,76
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	25,55
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	71,27

Sumber : Data Dapodikdasmen per Usia, Data Emis dan Data Kependudukan Semester I, 2022

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Katingan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya sarana dan prasarana, penambahan tenaga pendidik walaupun tidak signifikan, serta lembaga swasta khususnya jenjang PAUD yang mulai mengurus ijin pendirian dan ijin operasional. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan :
 - a. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2021 untuk Jenjang Pendidikan Dasar mengalami Penurunan 2,28 % dari 93,04 % tahun 2021 dan



pada tahun 2022 menjadi 90,76 % penyebabnya adalah karena ada usia dibawah 7 tahun dan diatas 16 tahun yang masih terdata di jenjang TK/RA dan di Jenjang Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA, dan sebagian Siswa yang belajar keluar daerah;

- b. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2022 mengalami kenaikan 1,16 % untuk Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini yaitu 70,11 % tahun 2021 dan 71,27 % untuk tahun 2022, karena satuan pendidikan telah mulai aktif mensinkronisasikan Dapodik, tetapi masih jauh dari target yang ingin dicapai yaitu masih ada Desa yang satuan PAUD belum memiliki NPSN;
 - c. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 16,69 % untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan dari tahun 2021 yaitu 8,86 % dan pada tahun 2022 menjadi 25,55 % Karena ada salah satu Pondok Pesantren Syailillah (PPS) dibawah naungan Kemenag yang ikut serta menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan, dan kami tetap dengan fokus ke PKBM dengan *Satu Kecamatan Satu PKBM*, masih terdapat 7 (tujuh) Kecamatan yang belum memiliki PKBM;
 - d. Penyerapan Anggaran semakin membaik, dilihat dari penyerapan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 95,84 % dan Program Pendidikan Non Formal 98,14 %, serta Program Pendidikan Anak Usia Dini 90,93 %. Capaian penyerapan BOP PAUD masih rendah.
2. Solusi :
- a. Akan dilakukan koordinasi kepada sekolah SD dan SMP serta setingkatnya, untuk selalu aktif dalam hal sinkronisasi data setiap 2 minggu sekali sesuai dengan edaran dari Kemendikbud maupun Kemenag, serta menjaring anak usia sekolah untuk bersekolah dan membuat rekapitulasi bagi siswa yang tidak sekolah dengan keterangan yang disesuaikan untuk di teruskan ke masing-masing Bidang Pembinaan PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan PNF/PPs untuk ditindaklanjuti oleh SKB, PKBM dan PPs setempat;
 - b. Untuk meningkatkan SPM Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan masyarakat setempat dengan sekolah daerah khusus atau terpencil membuka sekolah terintegrasi SD Negeri Tumbang Tangoi di Dusun Jamparan Kecamatan Petak Malai. Anak – anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar bisa mengenyam pendidikan yang layak dengan ditugaskan 1 (satu) orang guru PNS bersama dengan Tenaga Pengajar yang secara sukarela mengabdikan sebagai guru tambahan dan bantuan buku-buku pelajaran atau buku pegangan guru yang dikirim oleh kemendikbutristek;
 - c. Untuk pendataan siswa disekolah dan dimasukkan di Dapodik harus menggunakan NIK perekaman, supaya bagi siswa yang tidak mampu layak mendapatkan PIP (Program Indonesia Pintar) untuk mendorong peningkatan SPM tahun berikutnya;
 - d. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF akan bekerja keras untuk mensosialisasikan Satu Desa Satu PAUD ke Desa-desa yang belum



- memiliki satuan PAUD, dan akan memudahkan dalam satuan PAUD atau Lembaga Desa dalam hal pemberian Rekomendasi yang akan mengusulkan ijin pendirian dan ijin operasional, untuk selanjutnya ditinjau lanjuti ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu agar mempunyai NPSN dan terdata di Dapodikdasmen;
- e. Akan dilakukan pembinaan bagi satuan pendidikan yang memiliki Akte Notaris PKBM untuk mengembangkan atau membuka layanan seperti Pendidikan Kesetaraan, dan akan selalu dibimbing baik dari pencarian siswa maupun mensinkronisasi di Dapodikdasmen serta membuka PKBM untuk Kecamatan yang belum memiliki Pendidikan Kesetaraan, sesuai data masih ada 7 (tujuh) Kecamatan yang belum memiliki PKBM;
 - f. Melakukan optimalisasi seluruh kegiatan baik itu Fisik maupun Nonfisik, serta aktif melakukan monitoring kegiatan di tiap tahap pencairan anggaran, dan menginventarisir kegiatan pada tahun 2022 dan akan diakomodir di tahun 2023.

B. Urusan Kesehatan

Kedudukan Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan. Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. pelayanan kesehatan balita;
5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Tabel 2.161 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 2.798 orang	3.342	83,72



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 1.956 orang	3.190	61,32
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 2.386 orang	3.038	78,54
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 9.718 orang	15.450	62,90
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 21.999 orang	24.317	90,47
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 112.955 orang	131.800	85,70
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 9.117 orang	14.311	63,71
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 31.545 orang	37.907	83,22
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 1.936 orang	2.104	92,02
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan adalah 241 orang	266	90,60
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 2.433 orang	3.014	80,72



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 2.777 orang	3.341	83,12

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) indikator bidang kesehatan, pada tahun 2022 belum ada indikator yang capainnya 100 % sesuai dengan ketentuan dan ada 3 (tiga) indikator yang capaian kinerjanya masih sangat rendah yaitu Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin dan pelayanan usia lanjut.

Permasalahan dan solusi urusan kesehatan dapat dituangkan kedalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.162 Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas belum tercatat dengan baik dan terbatasnya SDM yang menangani hal tersebut.	Penempatan tenaga kesehatan yang kompeten dan melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan kader kesehatan serta meningkatkan peran aktif dan dukungan dari praktik Bidan Mandiri dalam pelayanan KIA
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Masih ada ibu bersalin yang tidak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dan minimnya fasilitas kesehatan sesuai standar serta akses fasyankes yang jauh dikarenakan kondisi	Pemenuhan media promosi kesehatan tentang pentingnya persalinan di fasyankes, memaksimalkan kembali koordinasi lintas sektor dan perlunya menerapkan kembali kemitraan bidan dan dukun bayi terutama bagi puskesmas yang



NO	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4
		geografis Kabupaten Katingan.	belum maksimal menjalin kemitraan.
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tidak semua hasil layanan kesehatan pada bayi tercatat dengan baik dan tidak semua desa di wilayah Kabupaten Katingan memiliki tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi layanan Kesehatan.	Melakukan proses pengarahan, bantuan dan pelatihan yang mendorong peningkatan kinerja dalam pelayanan yang bermutu serta melakukan pemetaan SDM agar terpenuhinya layanan kesehatan yang sesuai standar.
4	Pelayanan kesehatan balita	Tidak semua hasil layanan kesehatan pada balita tercatat dengan baik dan tidak semua desa di wilayah Kabupaten Katingan memiliki tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi layanan kesehatan balita.	Melakukan proses pengarahan, bantuan dan pelatihan yang mendorong peningkatan kinerja dalam pelayanan yang bermutu serta melakukan pemetaan SDM agar terpenuhinya layanan kesehatan yang sesuai standar.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Belum ada data sasaran yang tetap setiap tahunnya, Penjaringan belum dapat dilakukan kepada semua siswa sasaran dikarenakan beberapa siswa yang tidak hadir sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menyeluruh kepada semua siswa serta kurang koordinasi antar sektor.	Koordinasi lintas sektor terkait pelayanan kesehatan usia Pendidikan dasar, melakukan kerjasama dengan pemegang program lain saat melakukan pelayanan, dan untuk siswa yang tidak hadir dapat melibatkan petugas pustu yang bertugas di wilayah tersebut untuk mengisi form layanan kesehatan tersebut kepada yang bersangkutan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Belum optimal hubungan antar sektor dan masih ada masyarakat yang enggan memeriksakan diri ke fasyankes	Koordinasi lintas sektor, sosialisasi masalah PTM serta pemenuhan media promosi kesehatan dan meningkatkan kapasitas SDM untuk pelayanan kesehatan terupdate



NO	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sistem pencatatan yang masih belum baik, rendahnya kesadaran lansia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasyankes, tidak ada kunjungan rutin bagi lansia yang tidak hadir dalam posyandu dan tidak semua desa ada petugas Kesehatan.	Melakukan pencatatan dengan baik, melakukan promkes yang lebih aktif dari tingkat puskesmas sampai ke Polindes agar semua lansia dapat layanan kesehatan yang sesuai standar dan pemenuhan SDM untuk wilayah-wilayah desa yang masih belum ada tenaga kesehatan.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Belum optimalnya kerjasama antar sektor untuk kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular, kurangnya kesadaran masyarakat dan menganggap sepele penyakit hipertensi.	Melakukan penguatan kerjasama antar sektor sehingga layanan kesehatan dapat berjalan dengan optimal, pemenuhan media promkes dan peningkatan kapasitas SDM untuk pelayanan kesehatan terupdate.
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Untuk melakukan screening dibutuhkan biaya yang cukup besar, kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan pola makan dan gaya hidup sehat.	Sosialisasi tentang PTM, kerjasama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM.
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang dengan gangguan jiwa berat pada umumnya sudah terlantar dan tidak mendapat perawatan.	Kerjasama lintas sektor, sosialisasi kepada masyarakat, menambah kader jiwa untuk mendeteksi gangguan kejiwaan yang ada di sekitarnya.
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Masih ada 2 puskesmas yang belum memiliki tenaga laboratorium sehingga mengalami kendala dalam melakukan penegakkan diagnose TB melalui pemeriksaan	Koordinasi lintas sektor dalam pengusulan tenaga laboratorium (analisis) dan pemenuhan logistik di Puskesmas.



NO	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4
		bakteriologis TB dan kurang logistik untuk pemeriksaan TB di Puskesmas.	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antara puskesmas dengan klinik bidan swasta maupun klinik perusahaan dalam pelaksanaan skrining HIV ibu hamil, Masih kurangnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan tes HIV, Kurangnya media KIE HIV di fasyankes dan Kesulitan dalam mendapatkan/menjaring sasaran populasi kunci.	Membuat MoU antara puskesmas dan klinik bidan swasta maupun klinik perusahaan dalam pelaksanaan skrining HIV ibu hamil, Peningkatan Edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya melakukan tes HIV, Pemenuhan media KIE HIV di fasyankes dan Melakukan Kerjasama dengan penjangkau dan pihak terkait (Kelurahan atau kepala desa) dalam melakukan penjangkaran populasi kunci.

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dukungan personil untuk kegiatan dalam hal pencapaian kinerja masih kurang kuantitas dan kualitasnya untuk itu perlu dilakukan penambahan dan juga seleksi yang ketat sehingga petugas yang melakukan pelayanan di tingkat bawah dapat memiliki kompetensi yang diharapkan oleh undang-undang.

Kerjasama lintas sektor juga perlu terus ditingkatkan sehingga kinerja kesehatan dapat berjalan dengan lebih baik, karena program kesehatan tidak hanya dapat dilaksanakan oleh petugas kesehatan saja tetapi juga oleh SKPD lain yang terkait dengan kesehatan serta perlu adanya dukungan dari masyarakat secara keseluruhan.

C. Urusan Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari
2. Penyediaan pengolahan air limbah domestik



Tabel 2.163 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	97,62
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	80,71

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan, 2023

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum selama tahun 2022 mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

1. Terjadinya perbedaan antara rencana dari beberapa program/kegiatan dengan kondisi di lapangan, khususnya program/kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum.

Terhadap permasalahan di atas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan telah mengambil kebijakan sebagai berikut

1. Melakukan prioritas penganggaran terutama pada pelayanan infrastruktur kepada masyarakat.
2. Melakukan review desain dengan tetap mengacu berdasarkan anggaran yang tersedia.
3. Membuat sistem skala prioritas berdasarkan kegiatan teknis terutama kegiatan yang menyangkut pencapaian SPM.
4. Membuat sistem skala prioritas berdasarkan kegiatan teknis dalam pencapaian SPM.

D. Urusan Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan pembangunan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Katingan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan. Jenis – jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah



Tabel 2.164 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	80 %	0,00

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan, 2023

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat ini, belum terakomodir di dalam infutan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah sehingga perlu pengusulan nama program dan kegiatan baru yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan untuk dimasukan kedalam Renja tahun 2023, sehingga pada tahun 2023 sudah mengakomodir Target dan Anggaran Program/Kegiatan dimaksud.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan

Jenis – jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.



Tabel 2.165 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2022

NO	NAMA INDIKATOR	TARGET/ SASARAN SETAHUN (A)	HASIL/ REALISASI (B)	(A)/(B) (%)	SUMBER DATA
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	141 Orang	141 Orang	100	BIDANG TIBUM, PERDA DAN LINMAS
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	11 Orang	11 Orang	100	BIDANG DAMKAR

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, 2022

Tabel 2.165 menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2021 berdasarkan data yang diperoleh dari bidang penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya telah terjadi pelanggaran perda dan/atau perkara yang diselesaikan sebanyak 141 orang dan jumlah pelanggaran perda dan/atau perkara yang dilaporkan/dipantau sebanyak 141 orang. Sedangkan pelayanan penyelamatan kebakaran mencapai 100% dikarenakan dari jumlah kejadian kebakaran, secara keseluruhan telah mendapatkan layanan penyelamatan kebakaran.

Capaian SPM tidak hanya melihat dari target yang telah dicapai, tetapi juga hendaknya sesuai dengan mutu pelayanan dasar minimal yang menyangkut mutu pelayanan secara kualitas dan mutu secara kuantitas. Disadari sepenuhnya bahwa pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang sudah dicapai pada tahun 2022 belum seluruhnya sesuai dengan definisi operasional yang berkaitan dengan mutu pelayanan secara kualitas maupun kuantitas.

Permasalahan dan Solusi Jenis Pelayanan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan sebagai berikut :

a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Standar Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mendeteksi secara dini faktor resiko gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ada di lingkungan Masyarakat yaitu dengan cara melakukan Deteksi Dini, memetakan daerah-daerah yang rawan gangguan keamanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta melakukan kerjasama lintas sektoral dengan stakeholder yang terkait.

1) Kendala

Kendala yang dihadapi terkait indikator ini adalah tidak adanya



Payung Hukum (Perda) yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, kurangnya Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan, kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung dalam penegakan Perda/Perkada dan minimnya anggaran yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan dalam pencapaian target SPM serta masih rendahnya koordinasi di daerah juga menjadi kendala yang dihadapi dalam penanganan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum bagi masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat (Linmas Desa) untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum sangat diperlukan yaitu melalui kegiatan pelatihan Linmas Desa yang ada di 154 Desa di Kabupaten Katingan.

2) Tindak lanjut

Dalam memenuhi target perlu meningkatkan kualitas pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada masyarakat, membuat payung Hukum (Perda) yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, penambahan/rekrutmen Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi standar kualifikasi, penyiapan Sarana dan Prasarana pendukung dalam penegakan Perda/Perkada, Penyiapan anggaran yang cukup untuk menunjang pencapaian SPM di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum di daerah melalui Linmas Desa.

b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran dikawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdiksi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

1) Kendala

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat sasaran dari indikator ini cakupannya sangat luas, mengingat luas wilayah Kabupaten Katingan yang sangat luas yang terdiri dari 13 Kecamatan dan dari 13 Kecamatan tersebut hanya 4 Kecamatan yang ada Pos dan Personil Pemadam Kebakarannya yaitu Pos Pemadam di Kasongan dan Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir, Pos Pemadam di Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Pos Pemadam Kebakaran di Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah dan Pos Pemadam Kebakaran di Pagatan Kecamatan Katingan Kuala. Kendala yang dihadapi terkait indikator ini yaitu kurangnya peran serta Masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran baik



permukiman maupun lahan, kualitas aparatur pemadam kebakaran belum memadai, terbatasnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran serta minimnya anggaran sehingga kurang efektif dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

2) Tindak lanjut

Peran serta Masyarakat sangat diperlukan dalam memenuhi target Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran mengingat Wilayah Kabupaten yang sangat luas yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 154 Desa sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam membantu anggota Pemadam Kebakaran melakukan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran perlu dilakukan Kegiatan Sosialisasi dan simulasi dalam memberdayakan masyarakat oleh Bidang Pemadam Kebakaran yang bekerjasama dengan stakeholder terkait, meningkatkan kualitas aparatur pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai dan penyiapan anggaran yang cukup sehingga bisa lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan damkar dilapangan.

2. Jenis Pelayanan Dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan

Jenis – jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.166 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	148.547 Orang (86,02%)



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	200 Orang (0,11%)
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	16 Orang (0,15%)

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan 2022

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan Informasi Rawan Bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Untuk Tahun 2022 pelayanan informasi rawan bencana disampaikan melalui penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat. Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilaksanakan di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Mendawai dan Katingan Kuala, serta di ibukota Kabupaten Katingan (Kasongan), dengan jumlah peserta seluruhnya 356 orang. Selain itu pelayanan informasi berbagai jenis kebencanaan di Kabupaten Katingan disampaikan melalui penyebaran papan informasi, dalam hal ini melalui penyebaran spanduk himbauan kepada masyarakat desa-desa di 9 (sembilan) kecamatan lokasi kegiatan sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi. Sehingga total jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Katingan seluruhnya adalah 148.547 orang (86,02%). Melalui berbagai media informasi inilah kemudian disebarkan lebih lanjut kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Katingan.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota bahwa kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana



- 2) Pembuatan Rencana Kontinjensi;
- 3) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi;
- 4) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- 5) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap bencana; dan
- 6) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Untuk Tahun 2022, Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan terkendala terbatasnya anggaran untuk melaksanakan keenam kegiatan tersebut diatas, dimana kegiatan yang dapat dilaksanakan hanya penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana berupa pembagian selimut, handuk dan penyediaan tenda darurat bagi korban bencana banjir di Kabupaten Katingan. Adapun jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Katingan sangat terbatas, yaitu 200 Orang (0,11%) dari total keseluruhan warga yang terdampak bencana banjir.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota bahwa kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah *Zoonosis* Prioritas;
- 2) Respon Cepat Darurat Bencana;
- 3) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- 4) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana; dan
- 5) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana.

Untuk Tahun 2022 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah *Zoonosis* Prioritas yaitu pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit akibat virus Corona telah ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) Surat Keputusan Bupati Katingan tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Wilayah Kabupaten Katingan. Selain itu dalam rangka penanggulangan darurat banjir telah ditetapkan 5 (lima) surat keputusan Bupati Katingan tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Katingan Tahun 2022. Keseluruhan penetapan status darurat tersebut segera ditindaklanjuti dalam respon cepat darurat bencana kurang dari 24 jam berupa upaya-upaya penanganan darurat bencana dan penetapan Satuan Tugas dan Posko Penanganan Tanggap Darurat Bencana. Untuk penyelamatan



korban banjir yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi berjumlah 16 orang (0,15%) dari total warga yang terdampak bencana banjir.

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Belum termuatnya pemenuhan urusan wajib sub urusan bencana dalam program prioritas.
2. Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana.
3. Terbatasnya kapasitas kemampuan sumberdaya manusia penanggulangan bencana.
4. Luasnya wilayah rawan bencana dan terbatasnya sarana prasarana dan teknologi untuk pencegahan dan penanggulangan bencana.

b. Solusi

1. Menyampaikan melalui surat agar pelayanan urusan wajib sub urusan bencana dapat dimuat dalam Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, agar selanjutnya dapat ditindaklanjuti dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.
2. Meminta penambahan anggaran dalam rangka pemenuhan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana.
3. Mengusulkan upaya peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
4. Mengusulkan penyediaan sarana prasarana yang memadai dan teknologi yang maju untuk pencegahan dan penanggulangan bencana.

2.6 Urusan Sosial

Jenis – jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.



Tabel 2.167 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	100 %	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100 %	100%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Katingan, 2022

Permasalahan urusan sosial sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) belum menyajikan data yang detail dan spesifik terkait penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, dan gelandangan dan pengemis, sehingga kesulitan dalam menentukan jumlah penerima layanan yang tepat.
2. Karena keterbatasan data yang dimiliki, penyusunan anggaran untuk SPM Bidang Sosial masih belum tepat dan sesuai dengan jumlah pemerlu layanan.
3. Masih rendahnya pemahaman terkait SPM Bidang Sosial sehingga kesulitan dalam penentuan jenis layanan dan penerima layanan.

Solusi urusan sosial sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Aparatur Desa di seluruh wilayah Kabupaten Katingan untuk pengumpulan data detail terkait penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, dan gelandangan dan pengemis.
2. Meningkatkan kompetensi ASN Sosial dan Pekerja Sosial dalam pemahaman dan Penerapan SPM.



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Dengan disahkannya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah maka Pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta beberapa pasal Pajak dan Retribusi Daerah dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga dicabut, yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara : tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan



peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan. Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan.

Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri, dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Katingan dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, maka untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah selama periode RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2022 dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Dari hasil tersebut dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode dimaksud.

Capaian kinerja keuangan pada periode tersebut menjadi data dasar atau baseline data yang dibutuhkan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan periode Tahun 2024 sampai Tahun 2026. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah ke depannya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah, belanja (belanja langsung dan tidak langsung); serta pembiayaan daerah.

Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Katingan Tahun 2017-2022

Kode	Uraian	Realisasi APBD TA. 2017	Realisasi APBD TA. 2018	Realisasi APBD TA. 2019	Realisasi APBD TA. 2020	Realisasi APBD TA. 2021	Realisasi APBD TA. 2022	Rata2 Pertumbuhan
4	PENDAPATAN DAERAH	1.162.607.295.128,17	1,260,733,017,285.44	1,285,622,027,838.00	1,145,921,004,280.13	1,224,871,783,845.34	1,241,841,221,606.57	1,36%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	52.990.318.457,01	53,291,967,613.08	66,049,066,152.67	60,601,704,700.23	67,037,292,027.92	47,670,470,903.57	-0,26%
4.1.01	Pajak Daerah	24.244.009.315,00	13,601,096,740.00	20,855,317,940.42	16,919,152,120.00	14,754,038,100.80	21,994,182,840.96	5,35%
4.1.02	Retribusi Daerah	2.981.559.360,00	3,645,828,174.34	3,611,954,138.00	4,354,333,425.00	3,220,291,235.00	4,913,455,558.00	17,09%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.749.484.182,00	7,247,303,729.00	7,600,307,548.00	7,738,215,980.00	9,867,993,171.00	11,176,014,458.00	14,70%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.015.265.600,01	28,797,738,969.74	33,981,486,526.25	31,590,003,175.23	39,194,969,521.12	9,586,818,046.61	0,65%
								-
4.2	Pendapatan Transfer	1.082.316.925.280,81	1,180,055,487,926.72	1,182,262,836,555.33	1,050,416,365,210.90	1,123,156,836,343.42	1,193,197,959,563.00	2,03%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.049.384.047.722,00	1,147,366,309,456.00	1,147,757,416,293.00	1,020,531,370,898.00	1,086,745,605,001.00	1,140,029,797,935.00	1,91%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	920.151.106.522,00	1,007,006,624,056.00	1,003,741,055,494.00	863,011,124,898.00	936,104,779,001.00	1,009,216,765,255.00	2,24%
4.2.01.01.01	- Dana Transfer Umum – DBH	65.591.540.839,00	102,810,253,167.00	117,965,158,699.00	88,784,395,773.00	114,929,030,607.00	116,710,165,000.00	36,22%
4.2.01.01.02	- Dana Transfer Umum – DAU	696.300.554.000,00	695,606,221,000.00	712,958,173,000.00	634,091,753,000.00	625,956,787,000.00	666,363,499,255.00	-3,63%
4.2.01.01.03	- Dana Transfer Khusus - DAK Fisik	85.963.515.857,00	122,939,157,809.00	74,996,402,995.00	48,977,786,316.00	104,062,115,932.00	100,809,080,000.00	14,56%
4.2.01.01.04	- Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik	72.295.495.826,00	85,650,992,080.00	97,821,320,800.00	91,157,189,809.00	91,156,845,462.00	125,334,021,000.00	7,72%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0,00	0.00	150,000,000.00	10,079,243,000.00	0.00	1,738,575,000.00	-
4.2.01.05	Dana Desa	129.232.941.200,00	140,359,685,400.00	143,866,360,799.00	147,441,003,000.00	150,640,826,000.00	129,074,457,680.00	0,35%
								-
4.2.02	Transfer Antar Daerah	32.932.877.558,81	32,689,178,470.72	34,505,420,262.33	29,884,994,312.90	36,411,231,342.42	53,168,161,628.00	5,82%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	32.782.877.558,81	32,689,178,470.72	34,355,420,262.33	29,884,994,312.90	36,411,231,342.42	53,168,161,628.00	5,89%
4.2.02.0x	Bantuan Keuangan.	150.000.000,00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-
								-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	27.300.051.390,35	27,385,561,745.64	37,310,125,130.00	34,902,934,369.00	34,677,655,474.00	972,791,140.00	-13,98%
4.3.01	Hibah	27.300.051.390,35	25,885,561,745.64	37,310,125,130.00	34,902,934,369.00	2,824,760,600.00	972,791,140.00	-30,30%
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	31,852,894,874.00	0.00	-



Kode	Uraian	Realisasi APBD TA. 2017	Realisasi APBD TA. 2018	Realisasi APBD TA. 2019	Realisasi APBD TA. 2020	Realisasi APBD TA. 2021	Realisasi APBD TA. 2022	Rata2 Pertumbuhan
								-
5	BELANJA DAERAH	1.179.826.276.419,81	1,247,802,033,179.98	1,203,018,083,661.23	1,100,845,535,474.53	1,208,390,801,885.47	1,321,254,770,396.04	2,63%
5.1	Belanja Operasi	613.356.942.161,89	706,595,424,828.31	787,972,797,397.32	701,852,127,626.30	749,814,354,732.61	806,693,624,491.04	6,13%
5.1.01	Belanja Pegawai	382.400.878.360,05	444,399,732,755.08	457,399,580,875.84	451,083,723,763.47	409,053,422,538.28	421,159,975,966.64	2,35%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.884.374.189,84	213,669,482,561.23	276,796,118,804.48	200,995,939,180.83	266,049,553,823.46	326,429,754,975.40	18,68%
5.1.04	Belanja Subsidi	1.194.609.400,00	1,323,386,550.00	1,349,993,700.00	1,416,385,700.00	1,459,590,100.00	2,213,115,600.00	14,48%
5.1.05	Belanja Hibah	65.161.804.152,00	41,343,706,511.00	23,026,900,000.00	23,157,850,000.00	64,220,930,745.87	53,308,173,756.00	15,91%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.715.276.060,00	5,859,116,451.00	29,400,204,017.00	25,198,228,982.00	9,030,857,525.00	3,582,604,193.00	50,05%
								-
5.2	Belanja Modal	362.955.759.896,34	336,758,777,665.61	188,117,782,896.82	138,308,812,837.66	218,416,756,625.36	302,301,532,592.00	3,71%
5.2.01	Belanja Tanah	1.141.781.000,00	729,581,900.00	154,523,000.00	721,300,000.00	0.00	1,466,832,500.00	-
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	18.885.157.681,44	29,149,451,479.76	40,160,270,799.80	42,605,692,336.00	42,371,889,964.60	60,937,157,208.00	28,30%
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	39.143.821.971,00	24,822,239,010.79	49,714,048,674.02	38,763,843,708.97	59,853,368,408.95	105,926,727,808.00	34,65%
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	298.501.757.120,90	277,441,628,175.06	93,927,643,884.00	52,673,339,171.69	115,350,629,751.81	133,376,398,246.00	3,50%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.283.242.123,00	4,615,877,100.00	4,161,296,539.00	3,544,637,621.00	840,868,500.00	594,416,830.00	-28,58%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya							-
								-
5.3	Belanja Tidak Terduga	293.395.793,00	0.00	0.00	33,044,405,240.00	13,499,051,785.50	8,623,860,234.00	-
								-
5.4	Belanja Transfer	203.220.178.568,58	204,447,830,686.06	226,927,503,367.09	227,640,189,770.57	226,660,638,742.00	203,635,753,079.00	0,37%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.486.917.505,58	2,675,177,060.06	1,576,264,179.09	2,359,731,055.57	2,474,916,442.00	2,419,925,979.00	18,24%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	201.733.261.063,00	201,772,653,626.00	225,351,239,188.00	225,280,458,715.00	224,185,722,300.00	201,215,827,100.00	0,30%
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	-17.218.981.291,64	12,930,984,105.46	82,603,944,176.77	45,075,468,805.60	16,480,981,959.87	-79,413,548,789.47	-85,91%
								-
6	PEMBIAYAAN DAERAH							-
6.1	Penerimaan Pembiayaan	114.888.433.864,63	88,529,676,000	61,729,900,951.34	144,395,945,949.23	182,259,102,082.84	183,862,084,043.00	21,56%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	114.888.433.864,63	88,529,676,000	61,729,900,951.34	144,395,945,949.23	182,259,102,082.84	183,862,084,043.00	21,56%
								-



Kode	Uraian	Realisasi APBD TA. 2017	Realisasi APBD TA. 2018	Realisasi APBD TA. 2019	Realisasi APBD TA. 2020	Realisasi APBD TA. 2021	Realisasi APBD TA. 2022	Rata2 Pertumbuhan
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000,00	4,750,000,000	0.00	7,215,000,000.00	14,878,000,000.00	14,878,000,000.00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	9.000.000.000,00	4,750,000,000	0.00	7,215,000,000.00	14,878,000,000.00	14,878,000,000.00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	105.888.433.864,63	83,779,676,000	61,729,900,951.34	137,180,945,949.23	167,381,102,082.84	168,984,084,043.00	19,60%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	88.669.452.572,99	96,710,660,106	144,333,845,128.11	182,256,414,754.83	183,862,084,042.71	89,570,535,253.53	5,00%

Sumber : LRA dan CALK Tahun 2017; LRA dan CALK Tahun 2018, LRA dan CALK Tahun 2019, LRA dan CALK Tahun 2020, LRA dan CALK Tahun 2021, LRA Tahun 2022 unaudit (diolah)



a) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017-2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1. Berdasarkan data, perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Katingan sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, hal dikarenakan pada tahun tersebut pandemi Covid-19 mulai melanda di Indonesia yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan pendapatan baik pada PAD maupun pendapatan tranfer. Secara rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah di Kabupaten Katingan dalam kurun tahun 2017-2022 tersebut hanya sebesar 1,36 persen.

Realisasi PAD cenderung berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,26 persen, yang secara persentase pertumbuhan masing-masing komponen PAD berbeda-beda dan ada beberapa komponen justru meningkat realisasinya. Sementara itu, sumber pendapatan Kabupaten Katingan berasal dari pendapatan Dana Perimbangan yang sebagian besar berasal dari Dana Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum, Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Katingan setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan periode 2017-2022 terakhir sebesar 2,24 persen. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus, selain dari PAD dan Pendapatan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah.

b) Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar



dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah tahun 2017-2022, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 diperoleh gambaran pada periode tahun tersebut pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,63 persen. Belanja Operasi mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,13 persen dan Belanja Modal rata-rata pertumbuhannya terbesar 3,71 persen.

Untuk melihat kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Kabupaten Katingan pada tahun 2020 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp. 390,834,569,968.23 Nilai tersebut termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah “sedang” dan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 479,151,980,844.92 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah “sedang”.

Tabel 3.2
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2020-2021

No	Uraian	Realisasi Tahun	
		2020	2021
A	Pendapatan Umum Daerah		
1	Pendapatan Asli Daerah	60,601,704,700.23	67,037,292,027.92
2	Dana Bagi Hasil	88,784,395,773.00	114,929,030,607.00
3	Dana Alokasi Umum	634,091,753,000.00	625,956,787,000.00
	Jumlah A	783,477,853,473.23	807,923,109,634.92
B	Belanja Pegawai		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	311,410,189,674.00	246,699,753,758.00
2	Tambahan Penghasilan PNS	81,233,093,831.00	82,071,375,032.00
	Jumlah B	392,643,283,505.00	328,771,128,790.00
	Kemampuan Keuangan Daerah	390,834,569,968.23	479,151,980,844.92

Sumber : LRA dan CALK Tahun 2021, LRA Tahun 2022 unaudit (diolah)

c) Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Kabupaten Katingan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan berdasarkan data pada Tabel 3.1 tersebut, diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu melebihi dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu dan besarnya SiLPA tahun lalu perkembangannya cenderung mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 32.69 persen. Hal ini mengindikasikan



bahwa penyusunan perencanaan penganggaran di Kabupaten Katingan belum cukup baik.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Katingan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

a) Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Katingan kurun dalam 2 tahun terakhir tahun 2020-2021 mengalami penurunan dengan pertumbuhan sebesar -7,74 persen. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Katingan mengalami kenaikan dalam kurun waktu tersebut, dengan pertumbuhan sebesar 1,17 persen dan mengalami peningkatan juga pada Investasi Jangka Panjang sebesar 18,41 persen sebaliknya Aset Tetap dan Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar -8,06 dan sebesar 23,28 persen.

Tabel 3.3
Neraca Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020-2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Naik / turun	
			%	(Rp)
Aset Lancar	220.728.811.999,16	218.177.290.383,80	1,17	2.551.521.615,36
Investasi Jangka Panjang	67.059.917.939,27	56.635.837.791,19	18,41	10.424.080.148,08
Aset Tetap	2.480.832.435.188,13	2.698.177.064.680,26	(8,06)	(217.344.629.492,13)
Dana Cadangan	-	-	0,00	0,00
Aset Lainnya	127.589.570.954,02	166.308.209.313,09	(23,28)	(38.718.638.359,07)
Jumlah	2.896.210.736.080,58	3.139.298.402.168,34	(7,74)	(243.087.666.087,76)

Sumber : CALK Tahun 2021

b) Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Katingan selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi penurunan terutama pada komponen Kewajiban jangka pendek, sebesar – Rp. 3.751.677,60

Tabel 3.4
Kewajiban Kabupaten Katingan Tahun 2020-2021

Kewajiban Per 31 Desember 2021			
Jenis kewajiban	Saldo per 31 Desember 2021	Saldo per 31 Desember 2020	Kenaiikan/ (Penurunan)
			(dalam rupiah)
Kewajiban jangka pendek	5.562.169.893,82	9.313.680.571,42	(3.751.510.677,60)
Kewajiban jangka panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.562.169.893,82	9.313.680.571,42	(3.751.510.677,60)

Sumber : CALK Tahun 2021



Tabel 3.5
Neraca Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET	3,161,236,918,346.83	3,296,787,660,271.62	3,139,298,402,168.34	2,896,210,736,080.58	-2.74%
ASET LANCAR	112,369,054,979.65	200,316,158,328.69	218,177,290,383.80	220,728,811,999.16	29.45%
Kas di Kas Daerah	55,557,595,943.89	127,982,432,247.82	172,813,740,884.88	171,480,602,731.07	54.87%
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	46,680,000.00	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	148,000.00	9,000.00	30,597.00	-	15.35%
Kas di BLUD	4,271,828,914.55	7,297,420,766.47	4,836,168,077.31	9,690,018,018.34	45.82%
Kas di Bendahara BOS	-	-	1,916,836,691.18	1,777,925,045.72	-
Kas di Bendahara FKTP	-	-	2,642,958,504.46	901,338,247.98	-
Kas Lainnya	3,243,197,778.41	9,053,983,113.82	-	12,200,000.00	-
Setara Kas	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
Piutang Pajak Daerah	4,876,109,926.00	5,924,002,219.00	6,286,506,333.00	6,868,340,544.00	12.29%
Piutang Retribusi Daerah	54,690,000.00	20,598,336.00	48,997,336.00	80,946,901.00	46.91%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Piutang lain-lain PAD yang sah	2,406,105,112.00	2,547,962,595.00	939,419,715.00	715,598,671.58	-27.02%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Piutang Transfer antar Daerah	9,053,897,609.93	11,768,637,329.94	14,128,261,245.30	15,536,406,135.65	20.00%
Piutang Lainnya	412,226,766.00	366,119,651.00	385,119,651.00	378,119,651.00	-2.60%
Penyisihan Piutang	(2,169,512,113.39)	(2,636,974,066.79)	(3,095,084,006.24)	(3,601,015,630.40)	18.42%
Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-
Persediaan	34,662,767,042.26	37,991,967,136.43	17,227,655,354.91	16,888,331,683.22	-15.67%
					-
INVESTASI JANGKA PANJANG	49,090,472,337.19	49,090,472,337.19	56,635,837,791.19	67,059,917,939.27	11.26%
Investasi Non Permanen	402,109,620.00	402,109,620.00	402,109,620.00	402,109,620.00	0.00%
Investasi Permanen	48,688,362,717.19	48,688,362,717.19	56,233,728,171.19	66,657,808,319.27	11.34%
					-
ASET TETAP	2,786,936,028,644.59	2,834,311,070,793.63	2,698,177,064,680.26	2,480,832,435,188.13	-3.72%
Tanah	579,460,581,991.50	653,140,026,991.50	653,448,682,311.50	665,453,853,839.50	4.87%
Peralatan dan Mesin	324,697,986,668.94	368,116,925,895.35	421,585,927,851.12	467,873,890,034.84	12.96%
Gedung dan Bangunan	810,691,769,039.66	862,813,932,196.48	898,486,567,040.45	962,943,261,132.59	5.91%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,401,773,746,713.02	2,487,762,288,346.35	2,408,266,685,613.04	2,510,420,187,268.74	1.54%



Uraian	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
Aset Tetap Lainnya	34,367,091,966.46	41,530,795,688.15	190,825,463,634.15	192,670,648,089.15	127.10%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8,791,009,277.44	12,269,858,344.11	17,231,064,304.11	20,768,301,593.21	33.51%
Akumulasi Penyusutan	(1,372,846,157,012.43)	(1,591,322,756,668.31)	(1,891,667,326,074.11)	(2,339,297,706,769.90)	19.48%
					-
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
					-
ASET LAINNYA	212,841,362,385.40	213,069,958,812.11	166,308,209,313.09	127,589,570,954.02	-15.04%
Tagihan Jangka Panjang (Tagihan Piutang Penjualan Angsuran)	712,780,077.00	707,380,077.00	707,380,077.00	707,380,077.00	-0.25%
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	2,133,777,901.35	2,991,921,881.00	3,651,645,447.86	3,550,413,250.99	19.83%
Aset Lain-lain	209,994,804,407.05	209,370,656,854.11	161,949,183,788.23	123,331,777,626.03	-15.60%
JUMLAH ASET	3,161,236,918,346.83	3,296,787,660,271.62	3,139,298,402,168.34	2,896,210,736,080.58	-2.74%
					-
KEWAJIBAN	7,927,502,399.72	6,274,663,343.88	9,313,680,571.42	5,562,169,893.82	-4.23%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7,927,502,399.72	6,274,663,343.88	9,313,680,571.42	5,562,169,893.82	-4.23%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	143,000.00	-	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	6,483,333.33	13,172,000.00	-	2,000,000.00	-
Utang Beban	7,761,507,171.39	4,854,041,343.88	9,313,680,571.42	5,560,169,893.82	4.70%
Utang jangka pendek lainnya	159,368,895.00	1,407,450,000.00	-	-	-
					-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	7,927,502,399.72	6,274,663,343.88	9,313,680,571.42	5,562,169,893.82	-4.23%
					-
JUMLAH EKUITAS DANA	3,153,309,415,947.11	3,290,512,996,927.74	3,129,984,721,596.92	2,890,648,566,186.76	-2.72%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3,161,236,918,346.83	3,296,787,660,271.62	3,139,298,402,168.34	2,896,210,736,080.58	-2.74%

Sumber : LRA dan CALK Tahun 2018, LRA dan CALK Tahun 2019, LRA dan CALK Tahun 2020, LRA dan CALK Tahun 2021, LRA Tahun 2022 (diolah)



c) Ekuitas Dana

Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Katingan selama tahun 2018-2021 mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -2,72 persen diikuti perkembangan ekuitas dana dan kewajiban selama periode tahun 2018-2021 juga terjadi penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -2,74 persen.

Berdasarkan dari Neraca Kabupaten Katingan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	14.17	31.92	23.43	39.68
2	Rasio cepat (<i>quick ratio</i>)	9.80	25.87	21.58	36.65
3	Rasio total hutang terhadap total asset	0.25	0.19	0.30	0.19
4	Rasio hutang terhadap modal	0.25	0.19	0.30	0.19

Sumber : LRA dan CALK Tahun 2018, LRA dan CALK Tahun 2019, LRA dan CALK Tahun 2020, LRA dan CALK Tahun 2021, LRA Tahun 2022 (diolah)

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan berikut ini.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Katingan, yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar yang merupakan ukuran paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2018 sebesar 14,17%, hal ini berarti menunjukkan dari tahun 2017 kemampuan membayar hutang pemerintah Kabupaten Katingan sebesar 14 kali lebih.

2. Quick Rasio

Quick rasio digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penghitungan quick rasio dengan mengurangkan aktiva lancar dengan persediaan, hal ini dikarenakan



persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick rasio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, quick rasio pada tahun periode tahun 2018 quick rasio sebesar 9,80% hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Katingan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2018 sebesar 0,25. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. periode tahun 2018 sebesar 0,25. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Katingan, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada



pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta dalam penyajian laporan keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang disepakati setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Katingan tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut :

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pemerintah Kabupaten Katingan menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:
 1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.
 - b. Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam



upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

- c. Dalam rangka pemungutan pajak daerah, dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
 - d. Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - e. Penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.
2. Dana Perimbangan
 - a. Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Katingan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Secara keseluruhan, terus diupayakan peningkatan Dana Perimbangan terutama melalui DAK dan dana bagi hasil.
 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - a. Dana darurat yang diterima dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana korban/kerusakan akibat bencana.
 - b. Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang



tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.

- c. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- d. Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima pemerintah kabupaten merupakan lain-lain penerimaan yang sah.

2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kabupaten Katingan, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria:
 - 1) masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) merupakan objek pemeliharaan;
 - 3) jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - 4) pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem Informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.
- f. Belanja DPRD
 - 1) Penganggaran belanja DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pada tahun 2008



menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perubahan terakhir atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. Disamping itu mempedomani pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

- 2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD;
 - 3) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21; dan
 - 4) Untuk penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh pemerintah.
- g. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 1) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 2) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala



- Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah; dan
 - 4) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- h. Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dapat ditunda.
- i. Belanja Subsidi
- 1) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - 2) Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- j. Bantuan Sosial
- 1) Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
 - 2) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- k. Belanja Bagi Hasil
- Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- l. Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah



lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

- 2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan;
- 3) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

m. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Katingan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Katingan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang, Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; dan
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

a. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Katingan ditampilkan pada Tabel 3.7 sebagai berikut :



Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021

URAIAN	2018	2019	2020	2021
BELANJA	509,760,919,295.78	541,167,804,951.34	598,748,851,682.97	569,740,285,060.28
BELANJA PEGAWAI	444,395,032,755.08	457,391,755,875.84	451,083,732,763.47	409,053,422,538.28
Belanja Gaji dan Tunjangan	303,183,712,927.00	315,620,769,149.00	311,410,189,674.00	246,699,753,758.00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	91,054,570,559.72	88,904,442,856.00	81,233,093,831.00	82,071,375,032.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	-	-	-	63,788,090,907.40
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3,318,000,000.00	3,529,000,000.00	3,529,000,000.00	601,600,000.00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	11,784,808,888.00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	165,684,659.00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	401,433,300.00	722,505,117.00	220,438,539.00	-
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-
Belanja Uang Lembur	1,481,856,000.00	1,820,212,000.00	1,934,801,000.00	-
Belanja Honorarium PNS	464,900,000.00	393,600,000.00	244,835,000.00	-
Belanja Honorarium Non PNS	38,190,986,805.00	40,863,617,767.00	43,073,143,284.00	-
Belanja Pegawai BLUD	3,582,033,569.12	5,033,798,986.84	5,237,554,735.47	3,942,109,293.88
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	999,999,000.00	503,810,000.00	-	-
Belanja Pegawai Dana BOS	1,717,540,594.24	-	4,200,676,700.00	-
BELANJA BARANG DAN JASA	65,365,886,540.70	83,776,049,075.50	147,665,118,919.50	160,686,862,522.00
Belanja Jasa Kantor	-	-	97,708,945,931.00	100,768,363,673.00
Belanja Makanan dan Minuman	11,873,191,550.00	18,340,649,650.00	9,013,513,599.00	-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	314,831,000.00	1,536,559,350.00	523,979,500.00	-
Belanja Pakaian Kerja	247,891,000.00	332,036,390.00	219,100,000.00	-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4,150,892,525.00	2,037,517,680.00	3,150,160,100.00	-
Belanja Perjalanan Dinas	45,165,418,743.70	56,919,463,905.50	36,159,185,389.50	56,768,766,206.00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3,613,661,722.00	4,609,822,100.00	890,234,400.00	3,149,732,643.00

Sumber : LRA dan CALK Tahun 2018, LRA dan CALK Tahun 2019, LRA dan CALK Tahun 2020, LRA dan CALK Tahun 2021, LRA Tahun 2022 (diolah)



Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami kenaikan dan disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2018-2021

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
	(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
2018	509,760,919,295.78	1,252,552,033,179.98	40.70%
2019	541,167,804,951.34	1,203,018,083,661.23	44.98%
2020	598,748,851,682.97	1,108,060,535,474.53	54.04%
2021	569,740,285,060.28	1,223,268,801,885.47	46.58%

Sumber : LRA dan CALK Tahun 2018, LRA dan CALK Tahun 2019, LRA dan CALK Tahun 2020, LRA dan CALK Tahun 2021, LRA Tahun 2022 (diolah)

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah terjadi kenaikan dan penurunan, dari periode tahun 2018-2019 dengan kenaikan sebesar 4,28% dan pada periode tahun 2020-2021 terjadi penurunan sebesar 7,46%.

b. Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada tabel di bawah:



Tabel 3.9 --
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
A	Belanja	398.754.615.913	409.565.575.954	397.170.324.461	405.888.915.661
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	303.183.712.927	315.620.769.149	311.410.189.674	246.699.753.758
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	91.054.570.560	88.904.442.856	81.233.093.831	82.071.375.032
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya				63.788.090.907
4	Biaya Pemungutan Pajak	0	0	0	0
5	Insentif Pemungutan Pajak	401.433.300	722.505.117	220.438.539	0
6	Insentif Pemungutan Retribusi	0	0	0	0
7	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.318.000.000	3.529.000.000	3.529.000.000	12.552.093.547
8	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	796.899.126	788.858.832	777.602.417	777.602.417
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.750.000.000	0	7.215.000.000	14.878.000.000
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.750.000.000	0	7.215.000.000	14.878.000.000
	TOTAL A+B	403.504.615.913	409.565.575.954	404.385.324.461	420.766.915.661

Sumber : LRA dan CALK Tahun 2018, LRA dan CALK Tahun 2019, LRA dan CALK Tahun 2020, LRA dan CALK Tahun 2021, LRA Tahun 2022 (diolah)



3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

a. Sumber Penutup Defisit Riil

Dalam Sumber Penutup Defisit Riil pemerintah Kabupaten Katingan harus memanfaatkannya untuk penambahan program prioritas dalam upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.



Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran Periode Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	PENDAPATAN DAERAH	1,260,733,017,285	1,285,622,027,838	1,145,921,004,280	1,224,871,783,845
2	BELANJA DAERAH	1,247,802,033,180	1,203,018,083,661	1,100,845,535,475	1,208,390,801,885
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,750,000,000	0	7,215,000,000	14,878,000,000
A.	Defisit Riil	8,180,984,105	82,603,944,177	37,860,468,806	1,602,981,960
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	88,529,676,000	61,729,900,951	144,395,945,949	182,259,102,083
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan atas Investasi	-	-	-	-
	Total Realisasi Penerimaan	88,529,676,000	61,729,900,951	144,395,945,949	182,259,102,083
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	96,710,660,106	144,333,845,128	182,256,414,755	183,862,084,043

Sumber : LRA dan CALK Tahun 2018, LRA dan CALK Tahun 2019, LRA dan CALK Tahun 2020, LRA dan CALK Tahun 2021, LRA Tahun 2022 (diolah)



Tabel 3.11
SiLPA Riil Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	Rata-rata pertumbuhan
1	Jumlah SiLPA	88,529,676,000	61,729,900,951	144,395,945,949	182,259,102,083	43.29%
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	-
3	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	-
SILPA RIIL (1-2-3)		88,529,676,000	61,729,900,951	144,395,945,949	182,259,102,083	43.29%

Sumber : LRA dan CALK Tahun 2018, LRA dan CALK Tahun 2019, LRA dan CALK Tahun 2020, LRA dan CALK Tahun 2021, LRA Tahun 2022 (diolah)

Tabel 3.12
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
	Defisit Ril	8,180,984,105	82,603,944,177	37,860,468,806	1,602,981,960
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	88,529,676,000	61,729,900,951	144,395,945,949	182,259,102,083
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
7	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenaan	96,710,660,106	144,333,845,128	182,256,414,755	183,862,084,043

Sumber : LRA dan CALK Tahun 2018, LRA dan CALK Tahun 2019, LRA dan CALK Tahun 2020, LRA dan CALK Tahun 2021, LRA Tahun 2022 (diolah)



b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan guna memberikan gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran Kabupaten Katingan yang dapat dipergunakan untuk perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Saldo Kas Neraca Daerah	96,710,660,106	144,333,845,128	182,256,414,755	183,862,084,043
	Dikurangi				
2	Kewajiban kepada pihak ketiga samapi dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0
3	Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	96,710,660,106	144,333,845,128	182,256,414,755	183,862,084,043

Sumber : LRA dan CALK Tahun 2018, LRA dan CALK Tahun 2019, LRA dan CALK Tahun 2020, LRA dan CALK Tahun 2021, LRA Tahun 2022 (diolah)

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan guna menghitung kapasitas total keuangan daerah, serta dalam kerangka pendanaan bertujuan untuk mengalokasikan dana untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Pada tahun 2019 telah terbit beberapa peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah periode tahun selanjutnya. Peraturan tersebut diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta selanjutnya pada tataran teknis Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan pada tahun 2021 peraturan tersebut telah dimutakhirkan terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara terutama terkait pemulihan pasca Covid-19.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah ini, dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 hingga 2021 yang disesuaikan dengan dengan mempertimbangkan target-target keuangan dalam perubahan tahun 2022 dan APBD Tahun 2023.

Penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 dilakukan dengan memerhatikan asumsi dasar ekonomi makro yang diselaraskan dengan asumsi dasar pada APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi perekonomian Kabupaten Katingan di tahun 2024-2026 diasumsikan akan tetap searah dengan kondisi di tingkat Kalimantan Tengah dan Nasional.



Tabel 3.14
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2021-2022

	URAIAN	Realisasi APBD TA. 2020	Realisasi APBD TA. 2021	Realisasi APBD TA. 2022	Rata2 Pertumbuhan
4	PENDAPATAN DAERAH	1.145.921.004.280,13	1.224.871.783.845,34	1.229.305.793.966,39	3,63%
4,1	Pendapatan Asli Daerah	60.601.704.700,23	67.037.292.027,92	48.162.944.583,57	-8,77%
4.1.01	Pajak Daerah	16.919.152.120,00	14.754.038.100,80	21.978.971.285,96	18,09%
4.1.02	Retribusi Daerah	4.354.333.425,00	3.220.291.235,00	5.460.570.058,00	21,76%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.738.215.980,00	9.867.993.171,00	11.176.014.568,00	20,39%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31.590.003.175,23	39.194.969.521,12	9.547.388.671,61	-25,78%
4,2	Pendapatan Transfer	1.050.416.365.210,90	1.123.156.836.343,42	1.180.920.058.242,82	6,03%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.020.531.370.898,00	1.086.745.605.001,00	1.138.750.411.765,00	5,64%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	863.011.124.898,00	936.104.779.001,00	1.007.449.324.205,00	8,05%
4.2.01.01.01	- Dana Transfer Umum (DBH + DAU)	722.876.148.773,00	740.885.817.607,00	809.967.020.446,00	5,91%
4.2.01.01.03	- Dana Transfer Khusus (DAK Fisik+DAK Non Fisik)	140.134.976.125,00	195.218.961.394,00	197.482.303.759,00	20,23%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	10.079.243.000,00	0,00	1.738.575.000,00	#DIV/0!
4.2.01.05	Dana Desa	147.441.003.000,00	150.640.826.000,00	129.562.512.560,00	-5,91%
4.2.02	Transfer Antar Daerah	29.884.994.312,90	36.411.231.342,42	42.169.646.477,82	18,83%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	29.884.994.312,90	36.411.231.342,42	42.169.646.477,82	18,83%
4.2.02.0x	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
					#DIV/0!
4,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	34.902.934.369,00	34.677.655.474,00	222.791.140,00	-50,00%
4.3.01	Hibah	34.902.934.369,00	2.824.760.600,00	222.791.140,00	-92,01%
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	31.852.894.874,00	0,00	#DIV/0!
5	BELANJA DAERAH	1.100.845.535.474,53	1.208.390.801.885,47	1.325.620.285.389,94	9,74%
5,1	Belanja Operasi	701.852.127.626,30	749.814.354.732,61	810.147.965.640,94	7,44%
5.1.01	Belanja Pegawai	451.083.723.763,47	409.053.422.538,28	422.613.629.059,64	-3,00%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.995.939.180,83	266.049.553.823,46	328.737.956.359,30	27,96%
5.1.04	Belanja Subsidi	1.416.385.700,00	1.459.590.100,00	2.213.115.600,00	27,34%
5.1.05	Belanja Hibah	23.157.850.000,00	64.220.930.745,87	53.000.660.429,00	79,92%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.198.228.982,00	9.030.857.525,00	3.582.604.193,00	-62,25%
5,2	Belanja Modal	138.308.812.837,66	218.416.756.625,36	302.426.816.592,00	48,19%
5,3	Belanja Tidak Terduga	33.044.405.240,00	13.499.051.785,50	8.209.250.079,00	-49,17%
5,4	Belanja Transfer	227.640.189.770,57	226.660.638.742,00	204.836.253.078,00	-5,03%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.359.731.055,57	2.474.916.442,00	2.419.925.979,00	1,33%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	225.280.458.715,00	224.185.722.300,00	202.416.327.099,00	-5,10%



	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	45.075.468.805,60	16.480.981.959,87	-96.314.491.423,55	-373,92%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6,1	Penerimaan Pembiayaan	144.395.945.949,23	182.259.102.082,84	183.862.084.043,00	13,55%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	144.395.945.949,23	182.259.102.082,84	183.862.084.043,00	13,55%
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	7.215.000.000,00	14.878.000.000,00	14.878.000.000,00	53,10%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.215.000.000,00	14.878.000.000,00	14.878.000.000,00	53,10%
	PEMBIAYAAN NETTO	137.180.945.949,23	167.381.102.082,84	168.984.084.043,00	11,49%
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	182.256.414.754,83	183.862.084.042,71	72.669.592.619,45	-29,80%

Sumber : LRA dan CALK Tahun 2020, LRA dan CALK Tahun 2021, LRA Tahun 2022
(diolah)

a. Proyeksi Pendapatan

Secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Katingan masih bertumpu pada dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kondisi ini didukung oleh kebijakan pemulihan berbagai sektor ekonomisehingga memberikan dampak positif kepada proporsi dana transfer yang akan disalurkan ke daerah. Di samping itu juga dilakukan penguatan kebijakan untuk melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi serta perbaikan manajemen sumber pendapatan yang ada. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjarangan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Intensifikasi pajak meliputi validitas data pajak potensi pajak daerah, peningkatan sosialisasi perpajakan, peningkatan operasi, penegakan sanksi hukum, peningkatan pengawasan dan pembinaan aparat, penagihan terhadap penunggak daerah, dan pemberian hadiah wajib.

Target peningkatan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dapat dipungut. Mengacu pada kinerja perekonomian pusat dan Kabupaten Katingan yang dipekirakan belum akan mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2023, maka proyeksi pendapatan transfer tahun 2024 diasumsikan tidak jauh dengan tahun 2023. Pada awal tahun 2023 diharapkan target vaksinasi Covid-19



khususnya vaksin Booster terpenuhi sehingga telah tercapai herd immunity. Kondisi tersebut diasumsikan akan berdampak positif pada kinerja perekonomian.

Oleh karena itu, pada tahun 2024 sampai dengan 2026, pendapatan transfer diproyeksi naik perkomponen. Angka tersebut cukup realistis mengingat LPE Provinsi dan LPE Nasional telah ditargetkan secara normal. Meskipun demikian proyeksi pendapatan transfer belum berani dipasang angka di atasnya karena karakteristik pandemi yang penuh ketidakpastian.

Pada Tabel 3.15 disajikan proyeksi Pendapatan tahun 2024-2026 yang disajikan dengan format sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pendapatan pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,24 persen. Komponen pendapatan yang diproyeksikan meningkat diantaranya Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,00 persen, Pendapatan Transfer sebesar 4,43 persen, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,00 persen. proyeksi pendapatan Kabupaten Katingan tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.15
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026

	URAIAN	APBD TA. 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026	Rata2 Pertumbuhan
4	PENDAPATAN DAERAH	1,358,834,240,584	1,415,743,600,491	1,474,162,472,501	1,538,945,721,951	4.24%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	112,200,485,800	114,444,495,516	116,733,385,426	119,068,053,135	2.00%
4.1.01	Pajak Daerah	51,674,929,702	52,708,428,296	53,762,596,862	54,837,848,799	2.00%
4.1.02	Retribusi Daerah	7,123,068,218	7,265,529,582	7,410,840,174	7,559,056,977	2.00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,192,215,980	20,596,060,300	21,007,981,506	21,428,141,136	2.00%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33,210,271,900	33,874,477,338	34,551,966,885	35,243,006,222	2.00%
4.2	Pendapatan Transfer	1,246,633,754,784	1,301,299,104,975	1,357,429,087,075	1,419,877,668,816	4.43%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1,217,869,250,000	1,272,534,600,191	1,328,664,582,291	1,391,113,164,032	4.53%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,087,093,106,000	1,100,086,007,280	1,154,491,503,450	1,215,198,354,403	3.80%
4.2.01.01.01	- Dana Transfer Umum (DBH+DAU)	810,766,102,000	823,759,003,280	878,164,499,450	938,871,350,403	5.04%
4.2.01.01.03	- Dana Transfer Khusus (DAK F+DAK NF)	276,327,004,000	276,327,004,000	276,327,004,000	276,327,004,000	0.00%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	-
4.2.01.05	Dana Desa	130,776,144,000	172,448,592,911	174,173,078,840	175,914,809,629	11.29%
4.2.02	Transfer Antar Daerah	28,764,504,784	28,764,504,784	28,764,504,784	28,764,504,784	0.00%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	28,764,504,784	28,764,504,784	28,764,504,784	28,764,504,784	0.00%
	Bantuan Keuangan.	0	0	0	0	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	0	-
4.3.01	Hibah	0	0	0	0	-
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	0	-
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	-

Sumber : APBD Kabupaten Katingan Tahun 2023, BKAD, diolah



b. Proyeksi Belanja

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Perangkat Daerah (PD). Pada periode ini Pemerintah Kabupaten Katingan akan menggunakan prinsip *money follow* program dalam mengalokasikan pagu indikatif belanja langsung PD yang artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran terlebih dahulu.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap PD, di susun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap PD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja langsung PD diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien, antara lain melalui :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
3. Mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat;
4. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
 - a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi PD; dan
 - b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan PD dan



program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan.

6. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Katingan, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Anggaran belanja daerah Kabupaten Katingan dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi sesuai dengan tuntutan regulasi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2024 anggaran belanja daerah diproyeksi kenaikan belanja operasi pada pos Hibah sebesar Rp. 65.000.000.000 dikarenakan terbitnya Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 yang mengamanatkan bahwa penyediaan dana hibah kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.

Sedangkan arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2024-2026, meliputi:

1. Alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20%.
2. Alokasi anggaran kesehatan minimal 10%
3. Alokasi belanja infrastruktur minimal 25%
4. Alokasi anggaran pengawasan yang dihitung dari total belanja daerah.
5. Belanja hibah untuk pelaksanaan pemilukada.

Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal adalah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Penggunaan belanja operasi dibagi menjadi tiga kategori prioritas. Prioritas I digunakan untuk memenuhi belanja wajib mengikat, di antaranya belanja pegawai, belanja rutin Perangkat Daerah seperti tagihan listrik, telepon, air dan internet. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi komponen Belanja Operasi khususnya belanja pegawai ditargetkan naik $\pm 2,50$ persen per tahun. Penekanan kenaikan belanja pegawai sebesar 2,50 persen bertujuan untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala dan penambahan jumlah pegawai. Prioritas II meliputi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program-program prioritas. Prioritas III digunakan untuk membiayai program-program urusan di luar prioritas I dan



II. Selain itu, pada tahun 2024 perlu diprioritaskan belanja operasi untuk dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung untuk pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah, di antaranya pengembangan kawasan pariwisata percepatan pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan, dan pelayanan publik yang bersifat dasar.

Belanja transfer masih diprioritaskan untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Setelah itu, belanja transfer digunakan untuk mewujudkan infrastruktur desa yang tidak menjadi kewenangan kabupaten.

Belanja Daerah periode tahun 2024-2026 diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 1,78 persen, diantaranya, Belanja Operasi sebesar -1,51 persen, Belanja Modal sebesar 5,07 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar 133,33 persen, dan Belanja Transfer sebesar 9,90 persen. Adapun rincian proyeksi Belanja Kabupaten Katingan tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.16
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026

	URAIAN	APBD TA. 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026	Rata2 Pertumbuhan
5	BELANJA DAERAH	1,535,575,584,258	1,508,354,891,387	1,557,326,540,441	1,617,506,314,378	1.78%
5.1	Belanja Operasi	966,537,973,240	933,488,759,665	905,919,953,895	922,710,232,732	-1.51%
5.1.01	Belanja Pegawai	506,725,634,652	519,393,775,518	532,378,619,906	545,688,085,404	2.50%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385,619,910,667	344,634,984,147	348,081,333,988	351,562,147,328	-2.88%
5.1.04	Belanja Subsidi	1,460,000,000	1,460,000,000	1,460,000,000	1,460,000,000	0.00%
5.1.05	Belanja Hibah	71,740,762,762	65,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	-26.21%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	991,665,159	3,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	78.62%
5.2	Belanja Modal	342,441,164,094	246,961,923,358	321,581,539,128	363,030,986,782	5.07%
5.3	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	133.33%
5.4	Belanja Transfer	216,596,446,924	277,904,208,364	279,825,047,418	281,765,094,863	9.90%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4,498,692,724	4,498,692,724	4,498,692,724	4,498,692,724	0.00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	212,097,754,200	273,405,515,640	275,326,354,694	277,266,402,139	10.10%

Sumber : APBD Kabupaten Katingan Tahun 2023, BKAD, diolah



3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

a) Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA disajikan berdasarkan realisasi dan proyeksi, periode tahun 2018-2022 merupakan nilai realisasi, selanjutnya tahun 2023 berdasarkan APBD tahun 2023 dan periode tahun 2024 sampai dengan 2026 merupakan nilai proyeksi.

Tabel 3.17
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026

Tahun	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA)	Keterangan
	(a)	(b)
2018	88.529.676.000,39	realisasi
2019	61.729.900.951,34	realisasi
2020	144.395.945.949,23	realisasi
2021	182.259.102.082,84	realisasi
2022	183.862.084.043,00	realisasi
2023	191.620.343.674,00	APBD
2024	107.490.290.896,06	proyeksi
2025	98.043.067.940,31	proyeksi
2026	93.439.592.426,49	proyeksi

Sumber : LRA dan CALK Tahun 2018, LRA dan CALK Tahun 2019, LRA dan CALK Tahun 2020, LRA dan CALK Tahun 2021, LRA Tahun 2022 un (diolah)

b) Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 dan seterusnya, berdasarkan pengertian belanja wajib dan belanja mengikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mana pada Pasal 107 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan dan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun rincian proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Katingan tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.18

Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026

No	Uraian	APBD		Proyeksi					
		2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
A	Belanja Mengikat	506.725.634.652	33,00	519.393.775.518	34,43	532.378.619.906	34,19	545.688.085.404	33,74
1	Belanja Pegawai	506.725.634.652	33,00	519.393.775.518	34,43	532.378.619.906	34,19	545.688.085.404	33,74
B	Belanja Wajib								
1	Pendidikan	273.440.692.215	17,81	306.253.575.281	20,30	306.253.575.281	19,67	312.378.646.786	19,31
2	Kesehatan	236.654.761.809	15,41	254.877.178.468	16,90	254.877.178.468	16,37	267.621.037.392	16,55
3	Infrastruktur	342.441.164.094	22,30	246.961.923.358	16,37	321.581.539.128	20,65	363.030.986.782	22,44
4	Peningkatan kapasitas SDM	7.608.715.912	0,50	8.194.587.037	0,54	8.194.587.037	0,53	8.440.424.648	0,52
5	Penguatan APIP	10.178.622.250	0,66	11.400.056.920	0,76	11.660.629.650	0,75	12.099.694.699	0,75
C	Pengeluaran Pembiayaan	14.879.000.000		14.879.000.000		14.879.000.000		14.879.000.000	
1	Pembentukan Dana Cadangan								
2	Penyertaan modal daerah	14.879.000.000	0,97	14.879.000.000	0,99	14.879.000.000	0,96	14.879.000.000	0,92
3	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo								
4	Pemberian Pinjaman Daerah								
5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.								
	Total Belanja Wajib Mengikat	795.045.326.867		840.526.350.799		853.511.195.187		872.945.732.190	

Sumber : APBD TA. 2023, diolah



c) Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke Dana Cadangan.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- a) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito;
- b) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh PD;
- c) Pada anggaran Tahun 2023 perlu dipersiapkan dana cadangan untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang alokasi anggarannya akan disesuaikan dengan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ.

Adapun proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.19
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026

	URAIAN	APBD TA. 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026	Rata2 Pertumbuhan
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	Penerimaan Pembiayaan	191,620,343,674	107,490,290,896	98,043,067,940	93,439,592,426	-19.13%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	191,620,343,674	107,490,290,896	98,043,067,940	93,439,592,426	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	14,879,000,000	14,879,000,000	14,879,000,000	14,879,000,000	0.00%
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14,879,000,000	14,879,000,000	14,879,000,000	14,879,000,000	0.00%
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	

Sumber : APBD TA. 2023, diolah



Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang pada dasarnya digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas. Kapasitas riil Kabupaten Katingan dari tahun 2024 hingga 2026 diproyeksi dengan tren relatif meningkat namun landai. Untuk itu prioritas belanja harus diefektifkan, penghitungan proyeksi kapasitas keuangan daerah menggambarkan seluruh penerimaan daerah untuk mendanai belanja daerah. Dengan demikian, proyeksi kapasitas keuangan daerah Kabupaten Katingan secara rinci kapasitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.20
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026

	URAIAN	APBD TA. 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026	Rata2 Pertumbuhan
4	PENDAPATAN DAERAH	1,358,834,240,584	1,415,743,600,491	1,474,162,472,501	1,538,945,721,951	4.24%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	112,200,485,800	114,444,495,516	116,733,385,426	119,068,053,135	2.00%
4.1.01	Pajak Daerah	51,674,929,702	52,708,428,296	53,762,596,862	54,837,848,799	2.00%
4.1.02	Retribusi Daerah	7,123,068,218	7,265,529,582	7,410,840,174	7,559,056,977	2.00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,192,215,980	20,596,060,300	21,007,981,506	21,428,141,136	2.00%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33,210,271,900	33,874,477,338	34,551,966,885	35,243,006,222	2.00%
4.2	Pendapatan Transfer	1,246,633,754,784	1,301,299,104,975	1,357,429,087,075	1,419,877,668,816	4.43%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1,217,869,250,000	1,272,534,600,191	1,328,664,582,291	1,391,113,164,032	4.53%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,087,093,106,000	1,100,086,007,280	1,154,491,503,450	1,215,198,354,403	3.80%
4.2.01.01.01	- Dana Transfer Umum (DBH+DAU)	810,766,102,000	823,759,003,280	878,164,499,450	938,871,350,403	5.04%
4.2.01.01.03	- Dana Transfer Khusus (DAK F+DAK NF)	276,327,004,000	276,327,004,000	276,327,004,000	276,327,004,000	0.00%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	-
4.2.01.05	Dana Desa	130,776,144,000	172,448,592,911	174,173,078,840	175,914,809,629	11.29%
4.2.02	Transfer Antar Daerah	28,764,504,784	28,764,504,784	28,764,504,784	28,764,504,784	0.00%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	28,764,504,784	28,764,504,784	28,764,504,784	28,764,504,784	0.00%
	Bantuan Keuangan.	0	0	0	0	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	0	-
4.3.01	Hibah	0	0	0	0	-
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	0	-
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	-



	URAIAN	APBD TA. 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026	Rata2 Pertumbuhan
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	Penerimaan Pembiayaan	191,620,343,674	107,490,290,896	98,043,067,940	93,439,592,426	-19.13%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	191,620,343,674	107,490,290,896	98,043,067,940	93,439,592,426	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	14,879,000,000	14,879,000,000	14,879,000,000	14,879,000,000	0.00%
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14,879,000,000	14,879,000,000	14,879,000,000	14,879,000,000	0.00%
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	
	PEMBIAYAAN NETTO	176,741,343,674	92,611,290,896	83,164,067,940	78,560,592,426	-21.11%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0	

Sumber : APBD TA. 2023, BKAD, diolah



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode tahun sebelumnya. Di sisi yang lain, mandatori pembangunan dari nasional maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Perumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Katingan berdasarkan kondisi riil, pemetaan permasalahan pembangunan menjadi sangat strategis sebab menjadi agenda pembangunan yang harus dicari penyelesaiannya, pada prinsipnya mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis bertujuan untuk menjawab akar persoalan secara akurat, jujur, faktual, dan berdasarkan data berkaitan dengan kondisi daerah (internal maupun eksternal) yang berdampak terhadap strategi dan kemampuan daerah dalam mencapai tujuan.

Kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di suatu daerah di masa mendatang ini disebut sebagai Isu Strategis Daerah. Isu strategis dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan semestinya dan jika dapat dikelola secara tepat akan menjadi potensi pembangunan yang signifikan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis ini juga dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap sesuatu persoalan atau dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada proses penyusunan rencana itu dibuat. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas berbagai kondisi yang tidak ideal atau permasalahan di masa depan sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

4.1. PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan daerah tidak terlepas dari hasil kinerja indikator makro daerah. Pembahasan akan permasalahan daerah diawali dengan capaian indikator makro Kabupaten Katingan di Tahun 2021 yang disajikan sebagai berikut :

- a. Indek Pembangunan Manusia sebesar 68,89
Angka capaian ini menempatkan Kabupaten Katingan pada peringkat 11 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Jika dibandingkan dengan kinerja dari kabupaten sekitar, maka capaian Kabupaten Katingan berada sedikit di atas Kabupaten Pulang Pisau (68,53), tetapi dibawah Kabupaten Kapuas (69,63) dan Kabupaten Barito Selatan (70,54)
- b. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,25%



Hasil kinerja ini menempatkan Kabupaten Katingan lebih baik dibandingkan dengan capaian dari kabupaten sekitar, maka kinerja ini lebih baik dari Kabupaten Kapuas (5,35%), Kabupaten Gunung Mas (3,35%) dan Kabupaten Kotawaringin Timur (5,91%)

c. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,50%

Apabila dibandingkan dengan kinerja dari kabupaten sekitar, maka capaian Kabupaten Katingan berada di atas Kota Palangka Raya (5,86%), tetapi di bawah Kabupaten Barito Utara (5,14%) dan Kabupaten Kotawaringin Timur (5,15%)

d. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,90%

Kinerja ini menempatkan Kabupaten Katingan sedikit lebih baik dari capaian Nasional (1,06%), tetapi masih di bawah Provinsi Kalimantan Tengah (3,40%). Adapun jika dibandingkan dengan capaian kabupaten sekitar, kinerja ini sedikit di atas dari Kabupaten Kotawaringin Timur (2,10%) dan Kabupaten Seruyan (2,12%).

Pembahasan lanjutan akan permasalahan daerah dengan mengidentifikasi ke dalam beberapa aspek yang akan diuraikan lebih lanjut sebagaimana di bawah ini.

4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Katingan selama kurun waktu tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami perlambatan, dimana pada tahun 2018 LPE Kabupaten Katingan hanya mencapai 6,59 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 yang mencapai 6,56 persen. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2017 ke tahun 2018, namun LPE Kabupaten Katingan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,78 persen menjadi sebesar 5,81 persen. Walaupun, pada Tahun 2019 terjadi perlambatan ekonomi di Kabupaten Katingan, masih ada sektor-sektor yang tetap tumbuh secara signifikan diantaranya dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 0,9 menjadi 7,21 persen; sektor Industri Pengolahan tumbuh 0,35 menjadi 8,56 persen; sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh 5,11 menjadi 11,54 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 5,31 menjadi 8,14 persen; Jasa Perusahaan tumbuh 1,4 menjadi 7,24 persen; Jasa Pendidikan tumbuh 0,48 menjadi 8,24 persen; Jasa lainnya tumbuh 1,13 menjadi 8,70 persen.

Sektor yang mengalami penurunan yang cukup besar adalah pada sektor Pertambangan dan Penggalian dengan LPE hanya sebesar -10,19 persen, dan sektor lain yang mengalami penurunan diantaranya adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.



Pada tahun 2020 hingga tahun 2021, pada masa Pandemi Covid-19 melanda, LPE di Kabupaten Katingan begitu terdampak, dimana pada tahun 2020 LPE Kabupaten Katingan berkontraksi mencapai -3,25 persen dan pada tahun 2020 hanya mencapai 2,90 persen. Hal ini tentu harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Katingan untuk menaikkan LPE di tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan data, kurun waktu 2018-2021 terdapat 3 (tiga) sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Memperhatikan angka TPT Kabupaten Katingan dalam kurun waktu tahun 2019-2021, perlunya perhatian khusus oleh stakeholders ketenagakerjaan dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan, utamanya dalam mengatasi jumlah pengangguran. Adanya peningkatan angka TPT pada tahun 2020 (sebesar 5,69) walaupun di tahun 2021 menurun menjadi 5,50, hal ini menunjukkan masih terdapat kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, swasta dan pihak lainnya. Peningkatan ini juga bisa diindikasikan bahwa terdapat penambahan jumlah angkatan kerja yang belum dapat terserap oleh lapangan pekerjaan. Jumlah angkatan kerja yang belum dapat terserap inilah yang seyogyanya bisa terdata secara lebih akurat agar bisa diberi pelatihan khusus ataupun diarahkan terhadap lapangan pekerjaan yang sesuai. Dengan semakin meningkatnya pengangguran juga berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan.

3. Angka Kemiskinan

Berdasarkan data, angka kemiskinan di Kabupaten Katingan masih mengalami fluktuasi. Angka kemiskinan di Kabupaten Katingan pada tahun 2021 meningkat 0,46 dibandingkan pada tahun 2020, dimana semula pada tahun 2020 angka kemiskinan sebesar 4,79 persen menjadi 5,25 persen di tahun 2021. Hal ini menjadi beban yang cukup serius bagi Pemerintah Kabupaten Katingan, apabila tidak ditangani oleh melalui strategi penanganan kemiskinan secara tepat.

4.1.2. Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a) Layanan pendidikan belum berjalan sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan rendahnya angka partisipasi sekolah;
- b) Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- c) Selain itu fasilitas penunjang pendidikan termasuk pengembangan laboratorium dan perpustakaan sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;



- d) Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pengembangan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- e) Masih kurangnya tenaga pendidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik
- f) Masih rendahnya aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi serta sumberdaya pendukung.

2. Kesehatan

- a) terbatasnya informasi yang dapat diperoleh dari masyarakat terkait upaya intervensi kasus stunting;
- b) Masih belum optimalnya akses terhadap kesehatan yang berkualitas, ini disebabkan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, tenaga kesehatan, jaminan pembiayaan kesehatan, serta luasnya cakupan pelayanan.
- c) Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), serta angka kesakitan dan kematian yang diderita oleh masyarakat, baik berupa penyakit menular maupun penyakit tidak menular perlu diturunkan.
- d) Kualifikasi pendidikan SDM khususnya dokter spesialis dan sub spesialis yang masih kurang.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Masih rendahnya kapasitas Pengelolaan SPAM Perkotaan dan Perdesaan
- b) Kondisi jalan jalan mantap masih kurang dari 72% karena adanya peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten menyebabkan bertambahnya panjang jalan kabupaten sehingga berpengaruh terhadap target capaian kondisi jalan mantap.
- c) Belum optimalnya jaringan irigasi.
- d) Belum optimalnya cakupan layanan air minum
- e) Belum adanya peraturan rinci tata ruang sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang pada kawasan-kawasan yang ditetapkan sehingga pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang terbatas berdampak pada produktifitas kawasan belum optimal.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a) Penanganan rumah korban bencana yang belum maksimal;
- b) Masih adanya rumah tidak layak huni yang dihuni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- c) Masih terdapat kawasan kumuh terutama di kawasan perkotaan yang secara bertahap perlu dilakukan penanganan secara komprehensif.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi berbagai peraturan daerah guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.



- b) Masih belum optimalnya peran masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban.
- c) Belum memadainya sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana
- d) Sarana dan prasaran penyelamatan kebakaran dan non kebakaran yang kurang memadai.
- e) Masih rendahnya kapasitas, ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana.

6. Sosial

- a) Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar bagi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih kurang dan belum optimal peran berbagai pihak termasuk masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat yang belum efektif;
- b) Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal.

4.1.2.2. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a) Masih relatif tingginya angkatan kerja dengan keterampilan yang rendah dan belum sesuai kebutuhan pasar kerja, sehingga memiliki daya saing yang rendah.
- b) Belum optimalnya sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja
- c) Belum optimalnya Rencana Tenaga Kerja Kabupaten sebagai solusi mengatasi pencari kerja.
- d) Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap norma-norma dan aturan ketenagakerjaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Capaian point hasil evaluasi Kategori Layak Anak yang secara rutin dinilai oleh Kementrian P3A belum bisa ditingkatkan secara signifikan.
- b) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c) Belum terpenuhinya secara optimal hak-hak anak.

3. Pangan

- a. Ketergantungan masyarakat akan konsumsi pangan utama beras masih tinggi.
- b. Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan pasokan dan harga pangan
- c. Masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beranekaragam, seimbang dan aman.

4. Pertanian

- a) Masih terjadinya sengketa pertanian yang terjadi di masyarakat
- b) Belum tersedianya database tentang pemanfaatan lahan;

5. Lingkungan Hidup

- a) Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dari rumah tangga belum maksimal.



- b) Masih adanya pelaku usaha/kegiatan yang belum menerapkan pengelolaan limbah sebelum dilepas ke lingkungan.
- c) TP3R belum dapat dilaksanakan dengan optimal dalam upaya pengelolaan sampah untuk mengurangi kiriman sampah ke TPA.
- d) Kapasitas SDM petugas yang belum optimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- e) Belum terpenuhinya luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Belum memadainya dukungan sarana dan prasarana penunjang, serta sumber daya manusia dalam menunjang fungsi pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- b) Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat terkait kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) Belum memadainya sarana dan prasarana Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada masyarakat
- b) Belum berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan dan kurangnya peran serta lembaga keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha.
- c) Lemahnya proses pengadministrasian profil desa.
- d) Belum optimalnya pengembangan kawasan perdesaan

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Menurunnya persentase PUS yang memakai kontrasepsi modern (CPR) dan masih banyak masyarakat miskin yang tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi karena alasan ekonomi.
- b) Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)

9. Perhubungan

- a) Masih tingginya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan dan faktor lingkungan.
- b) Banyaknya ruas jalan dan persimpangan yang masih memerlukan pemasangan fasilitas keselamatan jalan seperti APILL, marka, rambu jalan, Guadrail, Cermin tikung serta pagar pengaman pejalan kaki.

10. Komunikasi dan Informatika

- a) Terbatasnya jumlah SDM di bidang TIK di Pemerintah Kabupaten
- b) Belum optimalnya proses integrasi aplikasi yang tersebar di instansi lingkup Pemerintah Kabupaten
- c) Penerapan e-government belum optimal

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Sulitnya akses Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- b) Rendahnya kualitas Kelembagaan dan organisasi manajemen Koperasi berimbas kepada kurang optimalnya kinerja Koperasi.
- c) Pemanfaatan teknologi oleh Koperasi dan Usaha Kecil Menengah masih kurang sehingga berdampak kepada lemahnya akses pasar.



- d) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi

12. Penanaman Modal

- a) Belum optimalnya identifikasi potensi investasi.
- b) Belum ditetapkannya regulasi terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko
- c) Tingkat kesadaran Pelaku Usaha belum sepenuhnya memahami perubahan regulasi
- d) Kondusifitas iklim investasi belum optimal

13. Kepemudaan dan Olahraga

- a) Belum optimalnya keterlibatan pemuda secara aktif dalam kegiatan kepemudaan dan pengembangan jiwa kewirausahaan
- b) Belum optimalnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta pemenuhan sarana dan prasarana olahraga.

14. Statistik

- a) SDM bidang Statistik tidak ada yang secara khusus menguasai tentang ilmu statistik sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan statistik;

15. Persandian

- a) Belum optimalnya antisipasi dalam menghadapi ancaman keamanan data dan informasi yang berkembang saat ini.
- b) Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan data dan informasi yang dimiliki.

16. Kebudayaan

- a) Pemahaman masyarakat terhadap warisan budaya termasuk nilai-nilai budaya dan cagar budaya masih sangat kurang;
- b) Terjadinya penurunan eksistensi kebudayaan lokal sehingga perlu dilestarikan.

17. Perpustakaan

- a) Tidak adanya petugas khusus yang menangani/mengelola perpustakaan sekolah dasar maupun perpustakaan masyarakat.
- b) Kurangnya sarana mobil keliling dibandingkan luas wilayah yang dilayani.

18. Kearsipan

- a) Belum tersedianya Depo Arsip yang representatif/standar/Gedung penyimpanan Arsip.
- b) Masih rendahnya minat dan terbatasnya sumber daya aparatur di bidang arsiparis.

4.1.2.3. Urusan Pilihan

1. Pariwisata

- a) Masih kurangnya penegetahuan dan keterampilan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif pengembangan destinasi pariwisata belum optimal;



- b) Belum optimalnya pengembangan pariwisata tematik maupun pengembangan potensi desa wisata;
- c) Kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan masih rendah;
- d) Aksesibilitas menuju destinasi pariwisata masih belum optimal;
- e) Penerapan konsep pengembangan kepariwisataan yang berbasis budaya dan lingkungan belum terintegrasi;
- f) Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata;

2. Pertanian

- a) Belum ada kebijakan yang efektif untuk menekan alih fungsi dan alih kepemilikan lahan pertanian produktif;
- b) Harga produk tidak menentu, dan anjloknya harga hasil pertanian;
- c) Sulitnya memenuhi target luas panen;
- d) Pengolahan hasil pertanian belum optimal dan aktivitas pertanian cenderung terfokus pada sektor hulu;
- e) Kurangnya SDM yang memadai untuk pelayanan kesehatan hewan.
- f) Masih kurangnya minat pembudidaya ternak dan kurangnya akses modal
- g) Masih minimnya infrastruktur pertanian, khususnya menyangkut jaringan irigasi, jalan, dan industri pengolahan hasil produk pertanian;
- h) Ketergantungan petani pada pupuk anorganik, pestisida, masih sangat tinggi;

3. Perdagangan

- a) Masih minimnya jaringan pasar yang terbentuk;
- b) Masih lemahnya interaksi antar golongan pedagang, yang menyebabkan pedagang golongan ekonomi lemah sulit mengembangkan usahanya;

4. Perindustrian

- a) Keterampilan Sumber Daya Manusia masih rendah;
- b) Sarana Produksi belum memadai;
- c) Mutu produk belum optimal;
- d) Promosi produk unggulan belum optimal.
- e) Belum optimalnya pengembangan industri

4.1.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sekretariat Daerah

- a) Masih kurangnya sosialisasi produk hukum daerah.
- b) Masih kurangnya kuantitas SDM pengelola aplikasi terkait pengadaan barang dan jasa.
- c) Belum ada upaya maksimal Perangkat Daerah Kabupaten Katingan dalam pemenuhan syarat akuntabilitas kinerja pemerintahan.

2. Sekretariat DPRD

- a) Belum optimalnya penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM kesekretariatan DPRD;
- b) Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis demi kemajuan wilayahnya;



- c) Perlunya peningkatan kapasitas DPRD dalam pembahasan produk legislasi daerah.

4.1.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan

- a) Belum optimalnya sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
- b) Belum optimalnya sinergitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
- c) Belum optimalnya kapasitas SDM perencana.

2. Keuangan

- a) Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah modul Keuangan Daerah masih dihadapkan pada kendala-kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi;
- b) Tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi sehubungan dengan telah bergesernya paradigma pengelolaan keuangan daerah belum dipahami secara optimal;
- c) Kualitas sumber daya manusia/aparatur pemerintahan daerah belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
- d) Belum optimalnya identifikasi aset pemerintah daerah;

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- a) Masih terdapat ketimpangan antara jumlah jabatan struktural dengan jumlah pegawai yang memiliki golongan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan
- b) Belum optimalnya kapasitas, integritas dan disiplin aparatur dalam pencapaian kinerja yang maksimal
- c) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja

4. Penelitian dan Pengembangan

- a) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan daerah.
- b) Belum optimalnya peran dan fungsi kelitbangan daerah dalam penyediaan data informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah
- c) Belum adanya tenaga fungsional kelitbangan.

4.1.2.6. Unsur Pengawasan

1. Pengawasan

- a) Masih adanya obyek pemeriksaan yang belum paham dalam menindaklanjuti rekomendasi/hasil temuan;
- b) Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan tidak pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan rekomendasi.



4.1.2.7. Unsur Pemerintahan Umum

1. Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

- a) Masih perlu ditingkatkannya wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa di kalangan masyarakat
- b) Belum optimalnya pembinaan terhadap Ormas dan LSM guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah
- c) Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik, kedewasaan perilaku berdemokrasi serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

4.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

1. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan penduduk Kabupaten Katingan periode 2019-2021 trennya berfluktuatif. Berdasarkan data, rasio ketergantungan total penduduk Katingan sebesar 42,82 persen di tahun 2020. Angka 42,82 persen menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42-43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 penduduk usia kerja di Katingan masih dibebani tanggung jawab terhadap penduduk muda dan terhadap penduduk tua.

2. Status Desa

Jumlah status Desa Mandiri dan Desa Maju di Kabupaten Katingan masih menunjukkan jumlah yang cukup kecil, dibandingkan jumlah keseluruhan desa, yaitu 154 desa. Kondisi ini membutuhkan penanganan secara terpadu sehingga secara bertahap dapat terjadi pengurangan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat naik kelas menjadi Desa Berkembang, demikian juga Desa Berkembang dapat menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri.

4.1.4. Identifikasi Permasalahan RPJPD Kabupaten Katingan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025. Dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Katingan, perlu diidentifikasi permasalahan pembangunan jangka panjang. Berikut hasil identifikasi permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Katingan pada tahap ke-4, sebagai berikut :



Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan dalam Pencapaian Tujuan RPJPD Kabupaten Katingan Periode RPJMD ke-4

Tujuan RPJPD Tahapan ke-4	Sasaran yang Ingin Dicapai	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Katingan yang maju, mandiri, adil dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.	1. Terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia	Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat	Penegakan hukum secara adil dan transparan
	2. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat		Pelestarian norma adat dan budaya masyarakat dayak
	3. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang professional dan netral	Reformasi Birokrasi belum optimal	Perbaikan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik.
	4. Terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri.	Kualitas SDM yang berdaya saing rendah	SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
	5. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh.	Belum meratanya kesejahteraan masyarakat dan masih tingginya angka kemiskinan	Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta penurunan angka kemiskinan
	6. Mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan	1. Kualitas SDM yang berdaya saing rendah 2. IPM dan IPG masih dalam kategori cukup	1. SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi 2. Peningkatan usia lama sekolah, usia harapan hidup, daya beli masyarakat perlindungan terhadap
	7. Meningkatnya kemampuan Iptek;		



Tujuan RPJPD Tahapan ke-4	Sasaran yang Ingin Dicapai	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	8. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;		anak dan kesetaraan gender
	9. Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak;		
	10. Terwujudnya kesetaraan gender.		
	11. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari	Kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan masih rendah	Pemantauan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan
	12. Memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah serta meningkatkan modal pembangunan	1. Berubahnya fungsi lahan akibat aktivitas ekonomi 2. Eksplorasi SDA yang kurang terkendali	1. Pelaksanaan konservasi lingkungan 2. Pengawasan dan pemantauan kegiatan yang berpotensi merusak SDA
	13. Terselenggaranya jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah desa;	1. Ketersediaan infrastruktur dasar, jaringan transportasi dan tidak ada lagi kewenangan Kabupaten dalam hal energi 2. Rendahnya partisipasi pihak swasta dalam	1. Peningkatan konektivitas, mendorong investasi jangkauan layanan energi yang merata 2. Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
	14. Tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga;		
	15. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat.		



Tujuan RPJPD Tahapan ke-4	Sasaran yang Ingin Dicapai	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
		pembangunan infrastruktur	

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan jangka panjang yang telah ditelaah dan capaian kinerja pembangunan beberapa tahun terakhir sebagaimana telah disajikan pada Bab II RPD ini, maka dirumuskan permasalahan pembangunan sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia dalam hal ini penduduk atau masyarakat suatu daerah merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Penduduk yang memiliki kualitas hidup yang baik, yang seringkali diwakili dengan indikator pendidikan, kesehatan dan penghasilan, niscaya memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan. Peran aktif penduduk dalam pembangunan tentu sangat berarti bagi penduduk itu sendiri, masyarakat luas, maupun bagi kemajuan daerah tersebut. Masyarakat dapat berperan dalam setiap aspek atau sektor pembangunan, dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.

Sama seperti daerah lain, Kabupaten Katingan juga sangat membutuhkan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan bahkan memiliki daya saing menghadapi tantangan dan kompetisi dengan SDM dalam negeri maupun luar negeri. Menilik capaian beberapa indikator terkait kualitas penduduk Katingan beberapa tahun terakhir, diperoleh gambaran bahwa kualitas SDM Kabupaten Katingan belum optimal.

Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM Katingan merupakan masalah pokok pembangunan sumber daya manusia. Untuk melihat sampai sejauh mana kualitas dan daya saing SDM disuatu tempat, dapat dilihat dari capaian Angka IPM yang menggunakan empat indikator mewakili tiga dimensi, yakni dimensi kesehatan berupa Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), dimensi pengetahuan berupa Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun keatas, serta dimensi penghidupan yang layak berupa rata-rata besarnya pengeluaran per kapita penduduk yang dikenal dengan angka Pengeluaran per Kapita (PNP per Kapita).

Secara umum nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Katingan selama periode 2017-2022 masih berada dalam kategori sedang (antara $60 \leq IPM \leq 70$) dan belum mampu meningkat masuk dalam kategori tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$) atau sangat tinggi ($IPM > 80$). Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Katingan baru mencapai pada angka 69,74 kondisi tersebut menggambarkan bahwa persoalan pembangunan manusia di Kabupaten Katingan masih harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah di masa yang



akan datang. Meski trend IPM Kabupaten Katingan meningkat, namun posisinya masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.

a. Pendidikan

Untuk memahami sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Katingan yang optimal, maka kesenjangan pembangunan manusia di bidang pendidikan dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS merupakan salah satu indikator input dalam bidang Pendidikan, sedangkan RLS merupakan indikator output dari sebuah proses pendidikan.

Bila dikaitkan dengan kedua indikator tersebut, maka secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Katingan yang dapat mempengaruhinya dapat dilihat dari hal-hal berikut :

- a. Jumlah maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang;
- b. Rasio murid terhadap guru sudah terpenuhi akan tetapi sebaran tenaga pengajar di semua jenjang tidak merata, kebanyakan menumpuk di daerah perkotaan dan tempat-tempat tertentu;
- c. Masih kurangnya ketersediaan fasilitas dan perlengkapan belajar siswa dan sarana pendidikan; dan
- d. Masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Capaian HLS dan RLS penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Katingan selalu meningkat selama periode tahun 2018-2021. HLS di tahun 2018 sebesar 12,21 tahun dan selalu meningkat sampai tahun 2021 menjadi 12,81 tahun, sedangkan RLS di tahun 2018 sebesar 8,65 tahun meningkat terus menjadi 8,68 tahun di tahun 2021. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Katingan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP. Kondisi menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Katingan masih tinggi, terutama mulai jenjang pendidikan SMP dan SMA.

Permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Katingan masih mengalami kendala terutama masalah penyebaran/penempatan guru di semua daerah belum merata walaupun secara rasio murid terhadap guru sudah memenuhi syarat dibawah 20 : 1 untuk SD dan 30 : 1 untuk SMP. Selain itu permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMP adalah belum memadainya guru bidang studi tertentu terutama Guru Matematika, Guru IPA, dan Guru Bahasa Inggris.

Selanjutnya dalam rangka mendukung proses belajar mengajar di sekolah diperlukan dukungan pengadaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum.

b. Kesehatan

Dimensi berikut untuk mengukur kualitas SDM adalah dimensi kesehatan yang dilihat dari besaran angka Usia Harapan Hidup (UHH). Untuk permasalahan kesehatan sendiri, dapat diukur dengan dua indikator yang



dapat memberikan gambaran tentang keadaan derajat kesehatan masyarakat Katingan, yakni :

1) Masih tingginya Angka Kematian Bayi

Masalah kematian bayi di Kabupaten Katingan masih cukup tinggi dimana AKB kurun waktu 2018-2021 mencapai angka tertinggi 20,1 di tahun 2021. Angka 20,1 menunjukkan bahwa setiap ada kelahiran 1.000 bayi pada tahun 2021, terdapat 20 bayi yang meninggal. Permasalahan ini harus menjadi perhatian secara mendalam oleh Perangkat Daerah terkait, terutama bagaimana pemerintah daerah dapat mengurangi resiko kematian bayi sampai angka 0 atau tidak ada kematian bayi.

2) Masih tingginya Angka Kematian Ibu

Selain masih terdapatnya kasus kematian balita, ternyata masalah kematian ibu pasca melahirkan juga masih cukup tinggi di Kabupaten Katingan.

Kedua indikator di atas, bila dianalisis lebih lanjut menggambarkan permasalahan aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan di Kabupaten Katingan masih rendah. Hal-hal berikut yang disinyalir menjadi akar masalahnya, yakni:

1) Adanya kecenderungan kenaikan Persentase Balita Gizi Buruk.

Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan bergizi dan seimbang pada anak, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh anak, belum adanya kesadaran masyarakat untuk melahirkan generasi sehat dan cerdas, terbatasnya pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita, adanya penyakit seperti TBC yang menyebabkan anak menjadi kurus dan menjadi gizi buruk

2) Tingginya Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting di Kabupaten Katingan tergolong masih tinggi, berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 sebesar 37,2%. Kemudian, berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) Kabupaten Katingan pada tahun 2016 sebesar 26,6%, tahun 2017 sebesar 23,06%, dan berdasarkan hasil Studi Faktor Gizi Terhadap Pertumbuhan Anak di Kabupaten Katingan tahun 2018 sebesar 28,5% hal ini menerangkan bahwa 1 dari 3 sampai dengan 4 anak di Kabupaten Katingan adalah stunting. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya upaya pencegahan stunting yang dilakukan, meliputi intervensi spesifik yaitu intervensi 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak ibu hamil sampai bayi usia 2 tahun (baduta) dan intervensi sensitif yaitu dukungan stakeholder di luar kesehatan, masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya asupan gizi bagi ibu hamil, rendahnya konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan, rendahnya pemberian asi eksklusif, rendahnya pemeriksaan K2 (ante natal care). Selain faktor gizi, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sanitasi dan ketersediaan air bersih sangat menentukan upaya pencegahan stunting.

3) Rendahnya kualitas sanitasi



Sanitasi meliputi 3 hal yaitu air limbah domestik, persampahan dan drainase. Permasalahan air limbah domestik adalah masih ada 33,55% penduduk yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS) yang terdiri dari 29,91% di wilayah perdesaan dan 3,64% di wilayah perkotaan. Permasalahan tersebut disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan di tempat terbuka, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah di sembarangan tempat.

Permasalahan persampahan adalah rendahnya tingkat layanan persampahan dan masih banyaknya masyarakat membuang sampah di sembarangan tempat sebesar 86,98%. Permasalahan drainase adalah masih adanya luas genangan air sebesar pada permukiman di perkotaan.

- 4) Tidak adanya penambahan jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit
Permasalahan lainnya di Kabupaten Katingan adalah berkaitan dengan sarana kesehatan, dimana jumlah puskesmas dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sama sekali tidak terdapat penambahan Puskesmas dan untuk jumlah Rumah Sakit pun hanya bertambah satu untuk melayani seluruh kabupaten. Hal ini menyebabkan sistem rujukan yang jauh dari tempat tinggal masyarakat.
- 5) Menurunnya cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization*
Cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 hanya mencapai 71,4%, menurun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 80,7%. Hal ini disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi pada anak, adanya pemahaman masyarakat yang keliru terhadap vaksin, penyediaan vaksin yang terbatas pada fasilitas kesehatan.
- 6) Meningkatnya jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja
Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) di tahun 2015 sebesar 97 kasus dan cenderung meningkat selama kurun waktu sampai dengan tahun 2019. Namun dalam kurun waktu 5 (enam) tahun tersebut terdapat penurunan jumlah kasus sampai 56 kasus pada tahun 2016. Peningkatan kasus penderita baru TBC BTS (+) ini meningkat cukup drastis pada tahun 2019 menjadi 168 kasus. Situasi ini perlu diwaspadai dan ditangani agar tidak menjadi semakin berkembang dan menular. Upaya pengobatan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan terus dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun. Ini terlihat dari statistis indikator perkiraan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja yang terus meningkat, bahkan jauh melampaui jumlah penderita baru.
- 7) Menurunnya Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas pada tahun 2015 sebesar 76,88 persen. Namun pada tahun 2016 terjadi kenaikan kembali hingga menjadi 88,84 persen dan turun menjadi 77,04 persen pada tahun 2017.
- 8) Penyebaran Penduduk.



Penyebaran penduduk Kabupaten Katingan yang tidak merata dibandingkan luas Kabupaten Katingan dengan kepadatan penduduk pada tahun 2021 sebesar 9 jiwa/km², berimplikasi pada semakin jauhnya jangkauan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, layanan administrasi kependudukan dan infrastruktur jalan serta layanan air bersih dan sanitasi layak. Hal ini memerlukan terobosan dalam mendekatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Selain permasalahan tersebut di atas, pencapaian indikator bidang Kesehatan siklus hidup serta penanganan penyakit menular dan tidak menular di tahun 2021, capaiannya indikator SPM masih dibawah 60% antara lain :

- Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin = 52%
- Pelayanan pada Usia Pendidikan Dasar = 45%
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif = 30%
- Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi = 39%
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus = 47%
- Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis = 50%

Hubungan masalah antara masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Katingan dengan penyebab masalah tersebut dapat dijelaskan secara sistematis pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Pemetaan Permasalahan Sumber Daya Manusia

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya antara kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)	Belum optimalnya cakupan pelayanan pendidikan	
		Menurunnya pengunjung perpustakaan	Menurunnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan masalah: <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya angka kematian bayi dan balita - Meningkatnya angka kematian ibu - Menurunnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan - Kenaikan persentase balita gizi buruk - Menurunnya Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization - Meningkatnya jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya penambahan jumlah puskesmas dan Rumah Sakit - Terjadinya penurunan rasio dokter per satuan penduduk - Terjadinya penurunan rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk - Rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat. - Rendahnya pemahaman masyarakat akan asupan makanan bergizi dan seimbang - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara berkala - Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh bayi, balita dan anak



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pemahaman masyarakat akan manfaat imunisasi. - Rendahnya kepatuhan masyarakat untuk mengkonsumsi obat TBC sesuai aturan pakai.
		Jangkauan pelayanan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, dan setaraan gender terbatas	Penyebaran penduduk yang tidak merata dan mencakup wilayah yang sangat luas

2. Belum optimalnya penanganan tingkat kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Katingan. Walaupun data beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Katingan yaitu 4,79% pada Tahun 2019, namun penanggulangan masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi prioritas. Untuk itu perlu dilakukan penanganan yang paripurna bagi penanganan kemiskinan di Kabupaten Katingan. Hal yang penting untuk penanganan masalah tersebut, yaitu menemukan dan mengenali apa penyebab dari kemiskinan tersebut. Berikut ini beberapa hal masalah dan akar masalah yang memberi kontribusi bagi masalah pokok kemiskinan.

a. Pendidikan

Pendidikan masyarakat Kabupaten Katingan kebanyakan tamat SD dan tidak tamat SMP sehingga peluang masuk pada pasar tenaga kerja menjadi kecil. Bangunan SMP rata – rata berada di ibukota Kecamatan dan Sekolah Satu Atap SD-SMP hanya ada di desa-desa relatif besar. Begitu pula dengan tingkat Pendidikan SMA/SMK hanya ada di ibukota Kecamatan dan terbanyak di Kota Kasongan.

b. Sosial

- 1) Masih rendahnya Persentase Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan.
Data tahun 2021 menunjukkan bahwa Persentase Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan baru mencapai **14,3** persen. Tentu angka ini masih sangat jauh dari kondisi ideal bagi penanganan PMKS, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih besar.
- 2) Tidak adanya penambahan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Permasalahan lainnya di Kabupaten Katingan adalah berkaitan dengan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, dimana jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sama sekali tidak terdapat penambahan yaitu hanya berjumlah 3 buah panti asuhan.

c. Ketenagakerjaan

- 1) Meningkatnya Jumlah Pengangguran Terbuka



Tenaga kerja merupakan salah satu unsur dalam penilaian kondisi ekonomi di suatu daerah. Dalam hal ini untuk urusan ketenagakerjaan masalah yang terjadi adalah semakin meningkatnya jumlah pengangguran terbuka.

2) Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan data pada BAB II dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 sebesar 70,50 persen, menurun di tahun 2020 menjadi 64,55 persen, dan kembali turun di tahun 2021 menjadi 64,38 persen.

Masalah pokok kemiskinan di Kabupaten Katingan dapat dijelaskan secara sistematis pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Pemetaan Permasalahan Kemiskinan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kemiskinan	Pendidikan rata-rata penduduk Katingan hanya tamat SD dan tidak tamat SMP	– Keberadaan SMP dan SMA hanya berada di ibukota Kecamatan dan Kota Kasongan.
		Masih rendahnya penanganan dan pemberian bantuan bagi PMKS	– Terbatasnya pendanaan bagi penanganan PMKS. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan hanya berkisar 15 kelompok pada Tahun 2017, sementara jumlah kelompok yang perlu diberi bantuan sebanyak 1.124. – Tidak adanya penambahan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
		Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka	– Rendahnya kesempatan kerja – Kurangnya keterampilan tenaga kerja sehingga sulit untuk diterima dalam dunia kerja – Kurangnya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga swasta

3. Belum optimalnya pengelolaan sektor potensial untuk mendorong perekonomian daerah

Kabupaten Katingan merupakan daerah penyangga atau *hinterland* bagi ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai gerbang dari dan menuju ibukota provinsi, Katingan memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan dan memasarkan potensi dan hasil kekayaan alam yang dimilikinya. Pengembangan dan pemasaran potensi ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Katingan. Data LPE Kabupaten Katingan pada selama 6 (enam) tahun terakhir umumnya



paling tinggi atau kedua lebih tinggi bila dibandingkan dengan LPE Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Katingan mengalami kontraksi hingga 3,25 persen, yang berarti jauh lebih dalam dibanding provinsi maupun nasional. Kontraksi perekonomian nasional, provinsi dan Kabupaten Katingan merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020.

Meski demikian, Gini Ratio Katingan termasuk yang paling rendah di Provinsi Kalimantan Tengah yang menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan relatif baik. Demikian pula dengan pendapatan per kapita penduduk Katingan dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Semua ini dapat menjadi langkah awal untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan ke depannya.

Memperhatikan data-data yang ada, berikut potensi kekayaan alam Katingan yang masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan dikelola secara optimal dan lestari, sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Katingan. Beberapa masalah yang melatarbelakangi belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam tersebut dijelaskan berikut ini.

a. Pertanian

Salah satu sumber daya alam yang potensial dikembangkan yaitu pertanian dalam arti luas, termasuk pula pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sektor ini selain menyerap jumlah tenaga kerja terbanyak, juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Katingan. Meski kontribusi lapangan usaha sektor ini besar terhadap PDRB, namun pada sektor pertanian berdasarkan data, diketahui bahwa Produksi Tanaman Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 produksinya mencapai 71.443 Ton, namun pada tahun 2020 turun menjadi 48.459 Ton. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh menurunnya juga Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya, dimana pada tahun 2020 luas areal tanaman padi hanya mencapai 17.741 ha.

Selain itu, terjadi penurunan Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Katingan, dimana pada tahun 2017 Skor Pola Pangan Harapan mencapai 85,500, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi hanya 81,860.

Dari segi infrastruktur pendukung, ketersediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pertanian di pedesaan masih rendah. Data menunjukkan sudah ada upaya untuk meningkatkan ketersediaan prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah, namun persentasenya belum mencapai seluruh areal sawah yang ada. Selain itu, terbatasnya ketersediaan jalan yang baik pada daerah-daerah sentra pertanian juga menjadi kendala. Permasalahan ini menyebabkan petani kesulitan membawa hasil pertaniannya dan cenderung berbiaya tinggi saat memproduksi hasil panennya. Peluang ini sering dimanfaatkan para tengkulak dan pedagang dari luar daerah untuk mengambil keuntungan dari keterbatasan ini. Gambaran kondisi ini nampak ada di wilayah Kecamatan Katingan Kuala dan Mendawai



yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dilihat dari aspek ekonomi, secara umum ada beberapa penyebab produk pertanian tanaman pangan, palawija dan hortikultura mengalami penurunan antara lain:

- Kurangnya upaya untuk pengembangan jenis-jenis tanaman pangan dan hortikultura lokal menjadi produk unggul dan berdaya saing.
- Lemahnya kelembagaan pertanian.
- Kurangnya bantuan permodalan untuk usaha tani.
- Masih rendahnya aktivitas penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura
- Kurangnya pengetahuan dan keterampilan baru dalam budidaya pertanian.
- Kurangnya kemampuan mengolah lahan dengan teknologi pertanian yang baik.

Selain pertanian, sektor perikanan merupakan bagian atau sub sektor dari pertanian yang mempunyai potensi sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Potensi perikanan tangkap sungai, darat dan laut di Kabupaten Katingan memiliki peluang usaha bagi masyarakat terutama dalam budidaya perikanan tambak pada perairan umum dan laut. Besarnya potensi pengembangan sektor perikanan secara umum dalam lima tahun terakhir justru mengalami kecenderungan penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dari 5,29% di tahun 2016 menjadi 5,02% pada tahun 2020.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan umumnya tidak dilaksanakan dengan baik di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Katingan. Hal tersebut mengakibatkan hingga akhir tahun 2020 realisasi produksi ikan daerah mencapai 8.832,27 ton, atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 9.222,37 Ton. Adapun jumlah konsumsi ikan masyarakat Katingan sebanyak 40,98 kg/perkapita/tahun pada tahun 2016. Munculnya permasalahan dalam upaya peningkatan sektor perikanan antara lain:

- Kurangnya pemanfaatan sumber daya perikanan tambak, kolam dan keramba.
- Masih kurangnya produksi perikanan budidaya dan tangkap.
- Keterbatasan tenaga penyuluh dan penyuluhan perikanan.
- Kurangnya pengelolaan hasil produksi perikanan.
- Terbatasnya permodalan dan akses perbankan.
- Terbatasnya ketersediaan bibit ikan yang dikembangkan oleh UPT. Pembibitan Ikan Hampalit.

b. Kehutanan

Katingan masih memiliki kawasan hutan yang luas dengan berbagai keanekaragamannya. Namun dengan semakin banyaknya aktivitas manusia menyebabkan luas tutupan lahan dan hutan di Katingan semakin tahun semakin berkurang, seperti penebangan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan lahan pertanian, serta bencana kebakaran



hutan/lahan. Untuk menyelamatkan potensi hutan di Katingan, perlu diadakan tinjauan terhadap permasalahan yang ada, yakni:

- 1) Kewenangan pengelolaan hutan
Sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan hutan diserahkan ke pemerintah Provinsi. Selain itu terbitnya PP No.18 Tahun 2016 mempertegas aturan tersebut yang menyatakan Kabupaten Katingan tidak memiliki kewenangan urusan kehutanan sebab tidak memiliki tanaman hutan raya. Akibatnya, pengawasan dan pembinaan di lapangan tidak dapat dilakukan langsung oleh pemerintah kabupaten.
- 2) Menurunnya kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB
Berdasarkan data pada BAB II dapat dilihat PDRB sektor kehutanan mengalami peningkatan dari Rp. 260.302 di tahun 2015 menjadi Rp. 275.695 di tahun 2020. Tetapi secara umum besarnya kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan dalam lima tahun terakhir ini justru mengalami perlambatan dari angka 4,75% di tahun 2015 menjadi 3,32% di tahun 2020. Artinya peran sub sektor kehutanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diprediksi juga semakin menurun berbanding lurus dengan hilangnya kewenangan daerah dalam mengelola perijinan dan pemanfaatan hasil hutan di wilayah Kabupaten Katingan karena sejak tahun 2017 diambil alih oleh pemerintah provinsi.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Katingan juga memiliki potensi energi dan kandungan mineral yang dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi, seperti bahan tambang batubara, emas (dan mineral pengikat seperti perak), bijih besi, pasir zircon (termasuk ilmenit dan rutil), galena, mineral bukan logam, intan, bauksit, dan batuan (bahan untuk bangunan). Potensi ini hanya sebagian kecil yang sudah dimanfaatkan dan dikelola. Adapun permasalahan dalam mengelola potensi energi dan sumber daya mineral Katingan, yakni:

- 1) Kewenangan pengelolaan energi dan sumber daya mineral
Sama seperti kehutanan, kewenangan mengenai energi dan sumber daya mineral tidak lagi menjadi kewenangan Pemda Katingan. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang menyatakan Kabupaten Katingan tidak memiliki kewenangan urusan mengenai energi dan sumber daya mineral sebab tidak memiliki panas bumi. Sehingga pengawasan dan pembinaan di lapangan tidak dapat dilakukan.
- 2) Masih tingginya luas area penambangan Liar
Pertambangan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Katingan sekaligus memunculkan permasalahan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan bahan tambang yang tidak terkendali menyebabkan areal pertambangan tanpa liar di Kabupaten Katingan yang masih tinggi, baik itu disepanjang bantaran sungai maupun di tempat lainnya. Aksi tambang tanpa izin ini menyebabkan sungai dan tanah tercemar limbah merkuri serta banyak hutan dan lahan yang hilang dan berganti menjadi kawasan tandus.



3) Menurunnya Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Jika dilihat dari Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB, tahun 2016 kontribusinya mencapai 8,60%, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi hanya 5,32. Hal ini dipengaruhi oleh banyak lahan yang sudah mendapatkan izin tambang namun sampai saat ini masih belum beroperasi.

d. Rendahnya upaya pengembangan sektor pariwisata

Secara umum, Kabupaten Katingan memiliki potensi yang besar dalam pengembangan pariwisata berbasis lingkungan dan budaya, terutama bila dikaitkan dengan posisi dan kondisi alamnya. Namun potensi tersebut belum didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana wisata, SDM pengelola pariwisata, perlindungan situs dan pelestarian budaya lokal, serta inventarisasi data potensi wisata yang potensial dikembangkan, ditambah dengan pandemi covid-19 yang sedang melanda wilayah Indonesia dan salah satunya yaitu Kabupaten Katingan, maka hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Katingan, baik nusantara maupun mancanegara.

Berdasarkan data diketahui bahwa Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke kabupaten Katingan pada tahun 2020 hanya mencapai 11.821 orang, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 36.310 orang. Sama halnya dengan wisatawan nusantara, Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 jumlahnya mencapai 211 orang, namun pada tahun 2020 hanya mencapai 5 orang.

Kondisi demikian juga diakibatkan oleh jumlah hunian wisawatan di Katingan yang masih sangat minim. Hanya terdata di lokasi tertentu seperti TN. Sebangau di Punggualas dan objek wisata Danau Bulat, tetapi hunian kamar hotel di Kota Kasongan dan sekitarnya tidak ada. Adapun kawasan pemukiman warga seperti di Desa Keruing sebagai bagian dari atraksi wisata juga belum layak untuk dijadikan tempat inap karena prasarana pendukungnya terbatas, seperti air bersih dan kamar mandi yang terstandar.

e. Masih rendahnya daya saing investasi daerah

Salah satu ukuran untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah adalah jumlah dan nilai investasi skala nasional/asing yang masuk di daerah tersebut. Keterbukaan daerah dan pelayanan perizinan yang mudah menjadi salah satu kunci bagi pihak swasta untuk berinvestasi di Katingan.

Dalam tiga tahun terakhir tercatat jumlah investor penanaman modal dalam negeri (PMDN) menunjukkan trend yang positif, walaupun sempat mengalami pelambatan pada tahun 2016 yang hanya berada diangka 73. Akan tetapi pada Tahun 2017 jumlah investor PMDN meningkat hingga menjadi 99. Jumlah investor PMA selama kurun waktu 2015 sampai 2016 tetap pada angka 16 investor. Akan tetapi pada tahun 2017 terjadi penurunan hingga menjadi 10 investor. Secara umum, investasi terbesar di Katingan adalah di sektor perkebunan (sawit dan karet) dan pertambangan. Di satu sisi,



meningkatnya investasi di kedua sektor ini akan membuka peluang lapangan kerja baru, akan tetapi disisi lain akan menyebabkan pembukaan lahan yang berdampak pada berkurangnya luasan hutan dan tutupan lahan di Katingan. Selain itu, dengan semakin banyak peluang usaha baru akan mendorong terjadinya persaingan dan kompetisi di segala bidang usaha dan pekerjaan. Akibatnya, setiap orang termasuk masyarakat lokal yang tidak siap dengan perubahan ini lambat laun dapat tersingkir.

Perkembangan pelaku usaha dan kelembagaan ekonomi seperti koperasi aktif, UMKM dan UKM cukup memprihatinkan. Rendahnya kualitas pengelolaan koperasi terlihat dari masih banyaknya jumlah koperasi yang tidak ada aktivitasnya. Demikian juga dengan UKM, meski ada peningkatan dari sisi jumlah tetapi sampai saat ini di Katingan belum ada produk UMKM dengan skala usaha industri dan mandiri yang menjadi produk unggulan daerah yang dapat bersaing secara kompetitif baik di skala lokal, regional, apalagi nasional. Faktor modal dan keterampilan menjadi hambatan utama sehingga koperasi dan UMKM di Katingan belum berkembang dengan baik.

Adapun produktivitas tenaga kerja di Katingan trendnya terus meningkat, dan capaian tertinggi berada pada lapangan usaha Sektor Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, Jasa Perusahaan dan Administrasi Pemerintahan. Namun sektor ini hanya menyerap tenaga kerja dengan angka di bawah 1% karena sektor ini memerlukan kapasitas dan keterampilan tertentu. Sebaliknya, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak tetapi dari segi produktivitas berada di urutan ke-8 terkecil dari sembilan sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Katingan.

Keterhubungan antara masalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam di Katingan dengan masalah dan akar masalahnya, dijelaskan secara sistematis pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Pemetaan Permasalahan Pengelolaan Sektor Potensial untuk Mendorong Perekonomian Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pengelolaan sektor potensial untuk mendorong perekonomian	Masih rendahnya upaya pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Belum berkembangnya usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas dan berkelanjutan • Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur pertanian di pedesaan dan kawasan sentra produksi. • Kurangnya upaya untuk pengembangan jenis-jenis tanaman pangan dan hortikultura lokal menjadi produk unggul dan berdaya saing. • Lemahnya kelembagaan pertanian, kurangnya akses permodalan, lemahnya kapasitas petani, teknologi pengolahan lahan dan nilai tambah produk pertanian. • Kurangnya pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			perikanan tambak, baik segi produksi, kelembagaan, nilai tambah produk, permodalan dan ketersediaan bibit.
		Masih rendahnya daya saing daerah dan kemandirian masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya upaya promosi investasi daerah dan kualitas layanan perijinan • Masih rendahnya kapasitas pelaku usaha lokal, kelembagaan ekonomi dan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM • Masih rendahnya kapasitas tenaga kerja dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Masih rendahnya koordinasi dan sinergi diantara stakeholder yang ada dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal
		Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata daerah berbasis alam	Belum berkembangnya potensi pariwisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi

Sumber: hasil analisis

4. Terbatasnya dukungan infrastruktur bagi pembangunan

Berbagai aktivitas pembangunan membutuhkan dukungan infrastruktur. Infrastruktur di suatu daerah diyakini merupakan komponen pendukung pembangunan yang tidak dapat disepelekan. Tak dapat dipungkiri, seringkali keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditandai dengan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang baik dan cakupan yang luas dan merata.

Posisi Kabupaten Katingan yang sangat strategis sebab dekat dengan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, sudah selayaknya memiliki infrastruktur yang baik. Namun kondisi yang ada, masih ditemui keterbatasan penyediaan infrastruktur wilayah. Masalah dan akar masalah yang menyebabkan kondisi ini, antara lain:

a. Pekerjaan Umum

1) Rendahnya Panjang Jalan Kondisi Baik.

Permasalahan yang muncul dalam aspek pekerjaan umum adalah 74,16 persen kondisi jalan yang ada pada Kabupaten Katingan masih dalam kondisi tidak baik. Dimana secara jumlah panjang jalan di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 adalah 807,59 Km.. Dari seluruh jalan yang ada di Kabupaten Katingan, pada tahun 2019 hanya 208,718 Km dalam kondisi baik atau 25,84 persen. Rendahnya Panjang Jalan Kondisi Baik ini disebabkan oleh minimnya pemeliharaan dan peningkatan kondisi jalan.



- 2) Masih Tingginya Panjang Jalan dilalui Roda Empat yang berupa Permukaan Tanah

Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kabupaten Katingan hingga pada tahun 2019 yang berupa permukaan aspal sepanjang 279,941 km dan permukaan tanah sepanjang 483,682 km.

Penjelasan mengenai kondisi ini, apabila dana terbatas dan skala prioritas adalah menambah panjang jalan, maka tidak diprioritaskan untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan. Kondisi jalan tanah dapat diabaikan, yang ingin dicapai adalah jalan fungsional. Apabila beban jalan meningkat, maka kondisi jalan sebaiknya ditingkatkan. Namun bila kondisi jalan tanah masih dilalui oleh kendaraan dengan beban yang tidak besar, maka masih bisa dalam bentuk pemeliharaan, tidak dalam bentuk peningkatan, terutama bila pendanaan terbatas.

- 3) Cenderung menurunnya Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Katingan pada Tahun 2015 mencapai 52%, dan mengalami kenaikan hingga tahun 2017 menjadi 75%. Namun pada tahun 2019 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik mengalami penurunan menjadi hanya 47,83%.

- 4) Masih rendahnya pelayanan air bersih dan air minum layak

Penyediaan prasarana dan sarana utilitas (air bersih, limbah, sampah dan rumah layak huni) di Katingan masih terbatas. Sampai akhir tahun 2017, tercatat baru 63,34% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum bersih dan 43,83% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air layak. Namun tahun berikutnya terjadi penurunan kinerja pelayanan air minum bersih yaitu menjadi 59,65% sedangkan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air layak turun menjadi 32,82%.

Permasalahan mendasar dari masih terbatasnya akses air bersih selain karena faktor kesadaran masyarakat yang masih kurang juga karena perilaku hidup sebagian masyarakat Katingan yang sangat tergantung dan masih bermukim di sepanjang sungai Katingan. Padahal kondisi sungai ini berdasarkan hasil penelitian sudah tercemar zat berbahaya seperti merkuri dan bahan kimia lainnya hasil pembuangan aktivitas tambang dan pupuk kimia dari kegiatan perkebunan.

b. Perumahan dan Pemukiman

- 1) Masih rendahnya Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 yaitu 9,9% dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 15,66%. Meski demikian, Rasio Permukiman Layak Huni tersebut masih terbilang sangat rendah.

- 2) Belum meratanya penataan kawasan permukiman dan perumahan

Kualitas penyediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan menjadi salah satu permasalahan dalam penataan kawasan permukiman dan perumahan sehat di Katingan. Saat ini, sudah mulai tumbuh keinginan masyarakat Katingan untuk hidup sehat bahkan sampai ke pedesaan. Sampai akhir tahun 2017 tercatat dari 154 desa dan 7 kelurahan yang



ada, baru 114 desa/kelurahan atau 70,81% yang melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Adapun total jumlah pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal yang sudah terbangun baru 315 unit. Jumlah ini masih belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat mengingat dengan semakin bakyat tumbuh kawasan pemukiman baru atau perluasan kawasan yang ada, akan meningkatkan kebutuhan akan pengolahan limbah dan sanitasi yang layak.

Dengan semakin banyak muncul perumahan dan kawasan baru, tentu produksi sampah sejenis rumah tangga juga semakin banyak. Dengan semakin banyak sampah yang dihasilkan, semestinya kinerja penanganan sampah juga semakin baik. Dari data yang ada infrastruktur yang tersedia untuk pembuangan sampah ternyata masih sangat kurang. Baru 42,14% tempat pembuangan sampah yang mampu dilayani, dimana dari total volume produksi sampah yang dihasilkan di tahun 2017 sebesar 47.457 m³/hari yang dihasilkan, baru sekitar 20.000 m³/hari yang mampu ditangani. Hal ini pula yang menyebabkan Kabupaten Katingan dalam periode lima tahun ini belum memperoleh penghargaan bidang kebersihan kota atau Kalpataru.

3) Masih rendahnya Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN

Berdasarkan data pada BAB II, dapat dilihat persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik tahun 2019 hanya sebesar 81,39 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 83,67 persen. Kondisi ini disebabkan belum optimalnya pelayanan sampai ke seluruh wilayah. Hal yang menyulitkan untuk melaksanakan pemantauan pelayanan listrik ini, sebab tidak ada lagi kewenangan Kabupaten Katingan dalam hal energi sejak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

c. Perhubungan

1) Minimnya Jumlah Terminal Angkutan Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perhubungan adalah masih belum terdapatnya terminal Kelas A dan B, saat ini di Kabupaten Katingan baru terdapat terminal Kelas C dan jumlahnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 hanya berjumlah 1 unit dan pada tahun 2022 ini sudah tidak ada.

2) Tidak tersedianya Pelabuhan Laut yang memadai

Kabupaten Katingan memiliki aliran sungai yang membentang dari ujung wilayah utara dan bermuara langsung ke Laut Jawa di wilayah selatan. Artinya, dengan topografi wilayah seperti ini, Katingan potensial memiliki pelabuhan laut yang dapat digunakan untuk bongkar muat barang dan lalu lintas antar pulau. Kondisi yang ideal dikembangkan berada di sekitar Pulau Damar atau Bajungkal di daerah Sei Kaki. Namun akses jalan darat menuju wilayah ini belum ada, mengakibatkan rencana pengembangan Pelabuhan Pegatan-Mendawai belum bisa dilaksanakan. Selain terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD Katingan, juga rencana



pembangunan jalan dan pelabuhan ini memerlukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Bila pembangunan pelabuhan ini dapat terlaksanakan, maka diharapkan mampu melayani angkutan barang dan kendaraan dari Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya dan Kota Palangka Raya menuju Pulau Jawa dan sekitarnya.

d. Komunikasi dan Informatika

Penyediaan sarana layanan komunikasi dan jaringan internet saat ini dirasakan semakin penting. Namun keterbatasan ketersediaan layanan ini menjadi kendala ketersediaan informasi dan layanan elektronik bagi masyarakat. Kondisi geografi Katingan yang sangat luas dan banyaknya posisi desa/kelurahan yang terpencil menjadi faktor utama terbatasnya layanan komunikasi di Katingan. Untuk layanan sinyal HP yang terjangkau baru mencakup 5.979 km² di tahun 2017, padahal luas Katingan mencapai 20.396,78 km².

Namun untuk areal *blank spot* atau tanpa jaringan, terdapat di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Petak Malai walaupun di beberapa titik masih memungkinkan adanya layanan sinyal komunikasi telepon (HP) yang tidak konsisten.

Untuk layanan komunikasi umum yang dipusatkan pada fasilitas umum di perkotaan, baru tersedia layanan internet dan CCTV sebagai alat pantau aktivitas di lokasi RTH Taman dalam Kota Kasongan saja. Dengan estimasi jumlah Taman Kota se-Kabupaten Katingan adalah 20 lokasi tersebar di 13 Kecamatan, maka saat ini terealisasi baru sebesar 20%.

Masalah masih terbatasnya dukungan infrastruktur bagi pembangunan dijelaskan secara sistematis pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Pemetaan Permasalahan Infrastruktur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terbatasnya dukungan infrastruktur bagi pembangunan	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur jalan, yang ditandai dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya panjang jalan kondisi baik - Masih tingginya panjang jalan dilalui roda empat yang berupa permukaan tanah - Masih ada desa/kecamatan yang tidak terjangkau jalan darat 	Terjadi penurunan sebab minim pemeliharaan dan peningkatan kondisi jalan, sehingga mengalami penurunan kondisi jalan. Bila dana terbatas, dan skala prioritas adalah menambah panjang jalan, maka tidak diprioritaskan untuk pemeliharaan jalan. Kondisi jalan tanah tidak masalah yang penting fungsional. Bila beban jalan meningkat, maka kondisi jalan sebaiknya ditingkatkan. Namun kalau kondisi jalan tanah masih dilalui oleh kendaraan dengan beban yang tidak besar, maka masih bisa dalam bentuk pemeliharaan saja tidak



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			dalam bentuk peningkatan, terutama bila pendanaan terbatas.
		Belum meratanya penyediaan jaringan air bersih dan penataan kawasan permukiman dan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak meratanya ketersediaan jaringan air bersih bagi masyarakat di desa dan perkotaan • Masih rendahnya kualitas dan jumlah sarana dan prasarana sanitasi lingkungan • Masih rendahnya kualitas penanganan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga
		Masih rendahnya persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	Belum optimalnya pelayanan sampai ke seluruh wilayah. Hal yang menyulitkan untuk melaksanakan pemantauan pelayanan listrik ini, sebab tidak ada lagi kewenangan Kabupaten Katingan dalam hal energi.
		Masih rendahnya pelayanan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya jumlah terminal angkutan umum • Tidak tersedianya pelabuhan laut
		Terbatasnya layanan komunikasi dan jaringan internet terpasang	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi geografis Katingan yang luas dan letak desa/ kelurahan yang terpencil • Terbatasnya kemampuan menyediakan layanan internet terpasang (wifi) di Kantor Pemerintah dan Kantor Desa, serta fasilitas umum.

Sumber: hasil analisis

5. Tata Kelola Pemerintahan

Hasil penilaian akuntabilitas kinerja pemerintahan yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap Kabupaten Katingan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022 nilai SAKIP Kabupaten Katingan mencapai predikat B. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan Kabupaten Katingan terus diperbaiki dan ditingkatkan. Walau demikian, nilai SAKIP ini masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas implementasi manajemen kinerja dan reformasi birokrasi.

Berdasarkan data pada Bab II, diketahui bahwa nilai LPPD Kabupaten Katingan pada tahun 2013 (2,4329) mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai 2,9860 pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 2,5778. Walaupun mengalami penurunan, namun predikatnya masih tetap Tinggi.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) merupakan permasalahan utama rendahnya capaian realisasi anggaran karena terjadi penumpukan belanja di akhir tahun. Untuk mencapai tingkat optimalisasi



anggaran dan kinerja, tentunya proses PBJP tidak dapat dihilangkan dari upaya peningkatan pelayanan teknologi informasi, yaitu peningkatan layanan/standarisasi layanan pengadaan elektornik (LPSE).

Permasalahan lainnya yaitu pelayanan dasar yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Katingan belum dilaksanakan dengan baik. Informasi penerapan SPM yang dimuat pada Bab II menunjukkan Sebagian realisasi indikator kinerja SPM masih rendah dan ada juga yang tidak memiliki laporan kinerja.

Hal-hal yang menjadi penyebabnya belum optimalnya kualitas penerapan reformasi birokrasi dan percepatan penerapan SPM ada beberapa faktor, yakni:

a. Terbatasnya kapasitas ASN Pemerintah Kabupaten Katingan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Jumlah ASN Kabupaten Katingan sampai akhir tahun 2018 tercatat berjumlah 3.784 orang. Bila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Katingan, jumlah ini tidaklah berimbang. Belum lagi adanya ketidakseimbangan antara penambahan dengan pengurangan pegawai menjadi penyebab munculnya permasalahan ini. Pengadaan CPNS sebagai jalur utama dalam menambahkan pegawai tidak efektif dikarenakan adanya kebijakan moratorium CPNS. Penambahan pegawai yang dimungkinkan melalui penerimaan mutasi pegawai dari luar daerah dan pengangkatan pegawai non PNS. Penerimaan mutasi dari luar daerah tidak bisa ditentukan targetnya karena Pemerintah Daerah yang sebatas pasif menerima secara selektif atas permohonan mutasi yang masuk. Sedangkan pengangkatan pegawai non PNS terkendala oleh belum adanya regulasi manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai salah satu kategori Aparatur Sipil Negara selain PNS.

Disisi lain masih terdapat pegawai yang belum memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan. Data menunjukkan masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan. Dengan diambil alihnya kewenangan melaksanakan diklat penjenjangan oleh Provinsi mengakibatkan kesempatan mengikuti diklat kepemimpinan terbatas. Selain itu, terbatasnya pendanaan bagi ASN mengikuti diklat-diklat teknis menyebabkan banyak ASN Katingan yang tidak bisa mencapai minimal 30 jam pelatihan dalam setahun. Hal ini terlihat dari realiasi alokasi untuk belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS sejak tahun 2015 terus berkurang dari 8,3 milyar menjadi 2,6 milyar di tahun 2017.

b. Belum optimalnya kualitas perencanaan

Sampai saat ini *e-planning* belum dapat diintegrasikan dengan *e-budgeting*. Permasalahan yang dihadapi karena aplikasi dalam mengintegrasikan kedua sistem ini memerlukan dukungan input data dan informasi seperti dokumen RPJMD, RKPD, dan RENSTRA perangkat daerah. ASN disemua perangkat daerah masih belum semuanya mampu menyusun program dan kegiatan yang signifikan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat secara umum sesuai dengan tugas pokok dan



fungsinya. Salah satu kelemahan dalam kondisi ini adalah belum tersedianya tenaga ASN yang menjadi fungsional perencana.

c. Belum memadai antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan belanja pembangunan

Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah (sebagaimana tabel 3.1) ditunjukkan dari persentase realisasi peningkatan daerah terutama dari pos PAD yang rata-rata pertumbuhannya dalam 5 tahun ini mencapai 1,2%. Demikian pula di pos Dana Perimbangan rata-rata pertumbuhannya mencapai 8,7%, bahkan untuk item DAU justru mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata hingga -3,6%.

Disisi lain, nilai belanja daerah dan ratio peningkatannya terus mengalami kenaikan (sebagaimana Tabel 3.2). Yang paling signifikan terlihat pada belanja tidak langsung, rata-rata pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir mencapai 15,9% dan untuk belanja langsung bagi pembangunan mencapai 6,1%. Kondisi ini bila dibiarkan akan menimbulkan limitasi dalam kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pembangunan.

Namun demikian, dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan terbukti mampu memperoleh WTP berturut-turut pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2020, meski ditahun 2017 menurun menjadi WDP. Pencapaian WTP ini perlu dipertahankan melalui tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan aset daerah.

d. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan

Pelaksanaan pengawasan pembangunan daerah juga belum optimal. Indikasi dari masalah ini adalah masih banyak temuan hasil pemeriksaan BPK sampai 2016 baik yang belum ditindaklanjuti maupun temuan baru. Kondisi ini dimungkinkan karena faktor implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang belum optimal, terkelola dan terukur. Kedepan pelaksanaan atas praktik pengendalian intern perlu dilakukan dengan baik melibatkan seluruh unit organisasi dan efektivitas pengendalian perlu dievaluasi untuk memetakan penanganan atas kelemahan yang ada.

e. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

Saat ini tuntutan masyarakat untuk adanya peningkatan layanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari aparat pemerintah sebagai pelayan publik semakin tinggi. Apalagi bila kondisi ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa pemberian pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan oleh beberapa OPD Kabupaten Katingan masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan belum terpenuhinya serta masih rendah kualitas sarana dan prasarana pelayanan, masih rendahnya kualitas SDM, belum tersedianya sistem pelayanan publik yang memadai serta belum optimalnya tingkat



partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat Tahun 2020 mencapai nilai 80,82, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun mengalami peningkatan, namun kualitas pelayanan publik kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan dan terus diperbaiki.

Adapun masalah pokok terkait tata kelola pemerintahan yang dijabarkan kedalam masalah dan akar masalahnya disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.6 Pemetaan Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Belum optimalnya penerapan Reformasi Birokrasi dan percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minil (SPM)	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya kapasitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan - Belum optimalnya kualitas perencanaan - Belum memadai antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan belanja pembangunan - Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan - Masih rendahnya kualitas dan sistem pelayanan publik

Sumber: hasil analisis

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1. Isu Internasional

Sebagai bagian dari masyarakat internasional tentunya dinamika yang terjadi secara global sangatlah penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut sering memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan perkembangan daerah, terutama kaitannya dengan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang mendatang. Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungancukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Katingan adalah adanya Pandemi COVID-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi COVID-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari virus corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah diberbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia.

Beberapa dampak yang terjadi akibat COVID-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi



investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi. Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan di setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran.

Isu strategis Pandemi COVID-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif bagaimana perencanaan pembangunan ke depan di tengah Pandemi COVID-19. Selain isu strategis Pandemi COVID-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan, beberapa isu internasional yang cukup relevan dengan Indonesia dan secara khusus pembangunan Katingan diuraikan sebagai berikut:

4.2.1.1. Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pada awal Januari 2007 para pemimpin negara-negara anggota ASEAN memutuskan untuk mempercepat tercapainya ASEAN *Community*-bukan saja *Economic Community* tetapi juga ASEAN *Community*-dari 2020 menjadi 2015, atau lima tahun lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community*/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain : a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) program Pembangunan seperti MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) *Policy Paper* mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC h) dan pembentukan Komite Nasional AEC 2015, i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community* dan *The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang akan menjadi



panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan.

Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 lalu. *ASEAN Community 2025* merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN *Economic Community* (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN *Political-Security Community* (APSC), dan ASEAN *Socio-Culture Community* (ASCC).

Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat berproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen.

Negara seperti Indonesia dianggap pelaku usaha dunia sebagai pasar yang diminati dan dilakukan penetrasi. Sebenarnya bila dianggap sebagai pasar tetapi pada saat bersamaan dijadikan tempat berproduksi, Indonesia tetap mendapatkan keuntungan. Namun, bila yang terjadi ialah Indonesia sebagai pasar, sedangkan negara tetangga, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam yang dijadikan tempat berproduksi, maka ini tidak perlu menguntungkan bagi Indonesia. Sebab disisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha.

4.2.1.2. Lingkungan Hidup

Kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan hidup yang dipicu oleh berbagai kejadian diberbagai pelosok penjuru dunia berupa kebakaran hutan, bencana alam banjir, longsor, gempa bumi dan sebagainya yang banyak dikaitkan dengan gejala *global warming* dan perubahan iklim dunia, menumbuhkan perhatian yang besar dari berbagai kelompok masyarakat dunia untuk semakin memperhatikan, menjaga serta memelihara planet bumi.

a. Sampah Plastik

Sehubungan dengan Hari Lingkungan Hidup yang jatuh setiap tanggal 5 Juni, pada Tahun 2018 diperingati dengan tema "Kendalikan Sampah Plastik". Tema ini diangkat sebagai perwujudan komitmen bersama seluruh pihak dalam upaya mengatasi bahaya sampah plastik di berbagai belahan dunia, juga di Indonesia. Tema ini mengandung arti motivasi kerja sekuat tenaga untuk atasi sampah, juga kerja yang sistematis dalam mengurangi sampah, mengolah sampah, dan melakukan pengelolaan sampah berkelanjutan melalui kegiatan daur ulang, atau dikenal dengan istilah 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*); serta yang penting adalah upaya bersama kolaborasi semua pihak, pemerintah/pemda, masyarakat dan dunia usaha.



Seperti negara lain, Indonesia dihadapkan pada permasalahan dampak dari peningkatan aktivitas dan kebutuhan manusia, yaitu berupa penumpukan sampah plastik, yang hingga kini perlu dilakukan tindak lanjut pengelolaan yang cepat, tepat, dan ramah lingkungan. Hal ini sangat penting, mengingat sampah plastik merupakan benda yang tidak dapat terurai dalam waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun, dan dapat mengakibatkan pencemaran tanah, air, dan laut.

Berdasarkan pidato sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2018 lalu, komposisi sampah plastik di Indonesia saat ini sekitar 16% (sipsn.menlh.go.id) dari total timbunan sampah secara nasional. Sementara komposisi sampah plastik di kota-kota besar seperti Jakarta, sekitar 17% (Riset bersama Indonesia Business Link dan Laboratorium Teknik Penyehatan dan Lingkungan UI 2016). Komposisi sampah plastik menunjukkan trend meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, dari 11% di tahun 2005 menjadi 15% di tahun 2015. Sumber utama sampah plastik berasal dari kemasan (*packaging*) makanan dan minuman, kemasan *consumer goods*, kantong belanja, serta pembungkus barang lainnya.

Dari total timbunan sampah plastik, yang telah dilakukan daur ulang diperkirakan baru 10-15% saja, selain itu 60-70% ditimbun di TPA, dan 15-30% belum terkelola dan terbuang ke lingkungan, terutama ke lingkungan perairan seperti sungai, danau, pantai, dan laut (Data Program Adipura KLHK 2016). Dengan demikian, guna mengatasi persoalan sampah kemasan plastik, maka diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat, seperti sinergi antara perlindungan lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial dengan tujuan akhir melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*).

b. Pemanasan Global Atau Perubahan Iklim

Selain isu mengenai sampah, perhatian masyarakat internasional terkait lingkungan hidup juga tertuju pada pemanasan global atau perubahan iklim. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah melakukan upaya sukarela dengan intervensi kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional GRK dengan target penurunan emisi 2020 sebesar 26% untuk seluruh sektor termasuk Program REDD+ di sektor kehutanan. Berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk tahun 2020-2030 Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 29% sampai 41% dari *Business as usual* dengan baseline 2,87 Gton CO₂e untuk semua sektor. Target tersebut telah disampaikan di dalam NDC yang mana juga menggabungkan antara upaya mitigasi dan adaptasi.

Lebih lanjut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan pada acara *The 22nd Session of the Conference of the Parties (COP 22)* Tahun 2018 di Marakesh, dua sektor utama yang berkontribusi besar dalam upaya penurunan emisi yaitu energi dan lahan. Untuk energi, Indonesia akan menggunakan energi terbarukan sebesar 23% di Tahun 2025 dan setidaknya 31% di Tahun 2050. Pada waktu yang sama penggunaan batubara diminimalisasi sampai 30% di 2025 dan setidaknya 25% di 2050 dengan



menggunakan teknologi bersih. Sedangkan pada sector lahan melalui program REDD+ diproyeksikan potensi menurunkan emisi sebesar 0,8 Gton CO₂e per tahun.

4.2.1.3. Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Pada bulan September 2015, Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia, telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi agenda global 2030. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Tujuan dan 169 Target untuk periode pelaksanaan Tahun 2015-2030. Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Komitmen Indonesia telah dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan lebih lanjut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

Prinsip dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sesuai dengan amanat Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka akan disusun dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional akan disusun Dokumen Renaksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dan pada tingkat provinsi akan disusun Dokumen Renaksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Pemerintah provinsi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan di wilayahnya.



Matriks RAD Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAD Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun RAD TPB/ SDGs tingkat Kabupaten/Kota secara mandiri yang sistematis selaras dengan Pedoman Penyusunan Renaksi. Pembagian kewenangan Renaksi TPB/SDGs pada tingkat nasional dan daerah selaras dengan pembagian kewenangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4.2.2 Isu atau Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional dalam penyusunan RPD perlu dilakukan untuk mengetahui isu atau kebijakan nasional apa saja yang perlu ditindaklanjuti atau diselaraskan dengan pemerintahan daerah. Dalam penyusunan RPD Kabupaten Katingan, dilakukan telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Undang-Undang mengenai Desa dan Pemerintahan Daerah, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

4.2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

RPJMN tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Visi pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi pembangunan nasional terdiri atas 9 (sembilan), yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Visi dan misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, yaitu:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.



- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha.

Selain itu, RPJMN juga memberikan arah kebijakan pembangunan untuk setiap provinsi di Indonesia. Pada arah kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat beberapa proyek prioritas nasional yang berlokasi di Katingan. Beberapa proyek prioritas nasional yang berlokasi di Katingan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 4.7 Proyek Prioritas Nasional Berlokasi di Katingan, Kalimantan Tengah

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis						
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Batangjung	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah	>1				
Pembangunan KA Barang Kalimantan (Puruk Cahu - Bangkuang; - Batangjung; Gunung mas -Katingan) (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	96 (selesai)	3.001,44	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub, Pemda, KPBU
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi						
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	62,63	225,02	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	392	29,52	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Permbdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	392	54,23	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	470	131,38	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,59	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, diolah



4.2.2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk menetapkan prioritas dalam Daftar Usulan yang akan diajukan kepada Pemerintah Daerah/Kabupaten.

4.2.2.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan dari terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Terbitnya undang-undang ini membawa warna baru bagi berbagai aspek terkait dengan pemerintahan daerah. Salah satu hal yang juga perlu mendapatkan perhatian yaitu adanya perubahan urusan pemerintahan daerah yang berdampak pada kelembagaan, perencanaan dan penganggaran di daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka seluruh pemerintah daerah berkewajiban



untuk melakukan penyesuaian perangkat daerahnya. Konsekuensi logis dari penerapan peraturan pemerintah ini yaitu berubahnya susunan perangkat daerah yang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kondisi ini juga diikuti dengan adanya perubahan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini merupakan amanat dari Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; RPJMD; dan c. RKPD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dengan Perda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Perda. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Perkada.

Undang-Undang ini juga memberikan porsi yang cukup besar bagi pengembangan inovasi. Bahkan mendorong adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang



menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimanamendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis.

4.2.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Dengan demikian, jenis SPM terdiri atas SPM: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) dan penganggaran pembangunan Daerah (APBD) sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4.2.2.5. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID-19/Corona Virus Disease 2019) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) baik pada seluruh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan Kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jumlah



pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan Work From Home, Physical Distancing, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sector ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sector pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

4.2.3 Isu atau Kebijakan Provinsi

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan perlu memerhatikan kebijakan pembangunan yang ada di tingkat provinsi. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sinergi pembangunan anatar provinsi dan kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Pada kesempatan ini dilakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan kebijakan mengenai *Heart of Borneo*.

4.2.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Sebagaimana Pasal 260 dan 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2020, dengan demikian harus melakukan



penyusunan dan penetapan Perda tentang RPJMD. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur pada bulan Mei 2021 menjadi titik dimulainya Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Isu strategis yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya oleh Provinsi Kalimantan Tengah dalam masa pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, meliputi:

1. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah
3. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 4.0
4. Pembangunan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5. Pengembangan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Tengah
6. Pelestarian Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan
7. Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
8. Perwujudan Ketentraman dan Ketertiban Berbasis Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat yang Berkeadilan
9. Pemekaran Wilayah
10. Penurunan Angka Stunting
11. Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan
12. *Corporate Education* dalam Manajemen ASN
13. Tumpang Tindih Lahan

Dengan mempertimbangan arahan pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah khususnya periode keempat RPJMD tahun 2021–2025, serta Visi Kepala Daerah Terpilih maka, Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut: “Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”. Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam Misi Pembangunan.

Misi Provinsi Kalimantan Tengah 2021- 2026 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

4.2.3.2. Heart of Borneo

Heart of Borneo (HoB) adalah inisiatif tiga negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi di Borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan inisiatif HoB adalah untuk



mempertahankan dan memelihara keberlanjutan manfaat salah satu kawasan hutan hujan terbaik yang masih tersisa di Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Jantung Kalimantan adalah bagian kawasan HoB di Indonesia.

Heart of Borneo (HoB) merupakan inisiatif pemerintah sehingga program dan kegiatan HoB diprakarsai oleh pemerintah bekerja sama dengan para mitra. Dalam pelaksanaannya semua kegiatan HoB dikoordinasikan oleh pemerintah melalui Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) di tingkat nasional, Kelompok Kerja Provinsi (Pokjaprov) di tingkat provinsi dan Kelompok Kerja Kabupaten (Pokjakab) di tingkat kabupaten. Pokjanas HoB bekerja untuk memfasilitasi isu-isu yang terjadi di tingkat nasional, demikian juga dengan Pokjaprov dan Pokjakab masing-masing untuk isu-isu di tingkat provinsi dan kabupaten. Anggota Pokjanas adalah kementerian terkait dan perwakilan Pokjaprov yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan. Demikian juga untuk Pokjaprov dan Pokjakab beranggotakan dinas dan instansi terkait yang masing-masing ditetapkan oleh gubernur dan bupati.

Visi yang ingin dicapai melalui inisiatif *Heart of Borneo* adalah terwujudnya pengelolaan dan konservasi yang efektif di kawasan hutan hujan ekuator. *Heart of Borneo* yang meliputi 23 juta hektar melalui jejaring kawasan lindung, hutan produksi dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, yang memberi manfaat bagi masyarakat dan alam, melalui kerjasama internasional yang dipimpin oleh masing-masing pemerintah negara di Borneo, yang didukung oleh industri dan upaya global yang berkelanjutan.

Misi pengelolaan kawasan *Heart of Borneo* adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020, 23 juta hektar jejaring kawasan lindung, cadangan lintas batas, dan koridor dikelola secara berkelanjutan dan zona penyangga berfungsi untuk menjamin masa depan semua spesies prioritas dan kawasan HoB endemik didirikan.
2. Pada tahun 2020, tidak ada konversi hutan yang bernilai konservasi tinggi untuk penggunaan lahan lain di kawasan HoB.
3. Pada tahun 2020, mekanisme pembiayaan jangka panjang memberikan manfaat diversifikasi dan adil bagi masyarakat lokal dan pemerintah, dan meningkatkan barang dan jasa ekosistem.

Luas kawasan HoB di tiga negara meliputi areal seluas kurang lebih 23 juta hektar yang secara ekologis saling berhubungan. Wilayah HoB sebagian besar berada di Indonesia yaitu sekitar 72% yang didominasi oleh hutan hujan tropis. Kawasan HoB memiliki 7 fungsi penting yaitu tutupan kawasan hutan, melimpahnya keanekaragaman hayati, menara air, kelerengan kawasan, penyimpan karbon, sosial-budaya dan ekowisata. Salah satu fungsi penting kawasan HoB adalah sebagai menara air, dimana 14 dari 20 sungai utama di Pulau Borneo berhulu di kawasan HoB, seperti Sungai Barito, Sungai Mahakam, Sungai Kapuas dan lainnya.

Program atau inisiatif *Heart of Borneo* dikembangkan tidak hanya untuk tujuan-tujuan konservasi semata, namun lebih penting lagi bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan HoB. Lingkungan dan keanekaragaman hayati merupakan pilar-pilar program HoB selain sosial



ekonomi dan pengembangan institusi. Oleh karena itu, khusus di wilayah Indonesia, kerjasama lintas sektoral dan peran serta aktif pemerintah provinsi dan kabupaten di kawasan HoB menjadi sangat penting. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat lokal, yaitu masyarakat lokal yang berinteraksi langsung dengan sumberdaya alam di kawasan HoB, harus menjadi bagian pokok dalam pembangunan di kawasan HoB.

4.2.4 Isu atau Kebijakan Kabupaten Katingan

Penelaahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) harus dilakukan dalam tahap penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

4.2.4.1. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005–2025 merupakan pedoman pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun. Ini berarti, penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan harus memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025 pada periode/tahapan berkenaan. Untuk pembangunan Kabupaten Katingan periode 2024-2026 mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahap Keempat (2023-2028).

Beberapa isu yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025, sebagai berikut:

1. Masih dijumpai penduduk dengan tingkat pendapatan rendah.
2. Sulit menciptakan kesempatan kerja yang luas.
3. Minim investasi di berbagai sektor.
4. Masih tertinggal sektor Pertanian dan Perdesaan.
5. Masih terjadi penyusutan SDA dan Degradasi Lingkungan.
6. Sulitnya Aksesibilitas.
7. Masih rendah Kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan.
8. Masih lemah Penegakan Hukum.
9. Belum mantapnya otonomi daerah.
10. Belum jelas tapal batas wilayah.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan juga isu strategis di atas, perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Katingan saat ini memasuki tahap ke-4. Tahap keempat RPJPD Kabupaten Katingan ini ditujukan untuk untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Katingan yang maju, mandiri, adil dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek



kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang professional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender.

Sejalan dengan tingkat kemajuan masyarakat, sumber daya manusia Kabupaten Katingan diharapkan berkarakter cerdas, kompetitif dan inovatif, berakhlak mulia, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah serta meningkatkan modal pembangunan Kabupaten Katingan pada masa yang akan datang. Kondisi maju, mandiri, adil dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah desa; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat.

4.2.4.2. Telaah RTRW Kabupaten Katingan

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pembangua jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan 2019-2039 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan Kabupaten yang berkembang dan sejahtera serta berjati diri melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimum dengan berbasis agrobisnis serta berwawasan lingkungan.

Kemudian untuk tujuan penataan ruang Kabupaten Katingan meliputi:

- a. Pemerataan ekonomi Kabupaten;
- b. Pengembangan pusat-pusat pemukiman;



- c. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur;
- d. Peningkatan produksi pertanian;
- e. Peningkatan dan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agropolitan;
- f. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung; dan
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain:

1. Strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. Membentuk pola ruang dan struktur ruang yang menunjang penyebaran ekonomi;
 - b. Mengembangkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan;
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya;
 - d. Mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan; dan
 - e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi.
2. Strategi pemerataan penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang menyeluruh, meliputi:
 - a. Mengembangkan kualitas sarana dan prasarana wilayah;
 - b. Mengembangkan ruas jalan terusan ruas Pegatan–Kasongan dan Kasongan– Pendahara, sebagai akses menuju ruas jalan trans Kalimantan poros selatan bagian utara dan selatan Kabupaten Katingan;
 - c. Pembangunan sub terminal di semua kecamatan kecuali di pusat kegiatan lokal kasongan, Buntut Bali dan Tumbang Samba sebagai perpindahan moda dari pelabuhan sungai ke daratan dan sebaliknya;
 - d. Membangun sarana perhubungan skala nasional; dan
 - e. Mengembangkan prasarana perhubungan sungai sebagai jalur alternatif.
3. Strategi pengembangan sektor unggulan, meliputi:
 - a. Meningkatkan kegiatan pertanian dengan sub sektornya, melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
 - d. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan potensial antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan peternakan; dan
 - e. Memilih sektor unggulan yang berdaya saing tinggi.
4. Strategi peningkatan kualitas lingkungan, meliputi:
 - a. Mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan; dan
 - b. Melakukan konservasi dan rehabilitasi pada kawasan lindung.
5. Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, meliputi:



- a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

4.2.4.3. Lingkungan Hidup Dalam Isu Strategis Pembangunan

Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan multidimensi yang saling terkait satu dengan yang lain, oleh karena itu semua pihak wajib secara sinergis memainkan peran sesuai posisi dan fungsi kita masing-masing untuk mewujudkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup dewasa ini disebabkan karena pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih diarahkan pada sektor ekonomi dan sosial, dimana pertimbangan terhadap aspek lingkungan masih kurang. Dalam semangat pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sehingga konsekuensinya, kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang di dasari pada 3 pilar yakni ekonomi, sosial dan ekologi/lingkungan.

Dengan memperhatikan arah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai agenda global yang focus menangani masalah sosial, ekonomi dan lingkungan, maka perlu adanya komitmen untuk meningkatkan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan pembangunan yang baik dan mengurangi penurunan kualitas lingkungan, maka perlu dilakukan identifikasi mengenai isu-isu prioritas lingkungan hidup yang muncul sesuai dengan karakteristik daerah di Kabupaten Katingan.

Berdasarkan DIKPLHD Tahun 2019 (DLH Kabupaten Katingan, 2020) dikemukakan bahwa:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2019 adalah sebesar 73,99 yang didapat dari nilai-nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 92, Indeks Kualitas Air sebesar 51,67, dan Indeks Tutupan Hutan sebesar 77,23. Jika dibandingkan dengan Target Indeks Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan untuk Tahun 2019, dimana IKLHnya sebesar 72,64, dengan Indeks Kualitas Udara sebesar 92, Indeks Kualitas Air sebesar 50, dan Indeks Tutupan Hutan sebesar 75,1. Maka, IKLH Kabupaten Katingan dapat melebihi target Indeks Kinerja Utamanya, meskipun untuk Indeks Kualitas Air masih sedikit berada dibawah target.
- b. Isu-isu prioritas pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Katingan Tahun 2019 yang dilaporkan pada Tahun 2020 adalah: (a) Kualitas



- air/Pencemaran air, (b) Banjir, (c) Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan), (d) Sampah/Persampahan, dan (e) Lahan Kritis.
- c. Isu-isu tersebut, secara keseluruhan bersifat Urgen (Perlu segera untuk ditangani), Konsisten (Penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi), Sensitif (Potensial menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda), dan Aktual (Mendapat perhatian publik yang luas), serta Signifikan (Dampak nyata yang ditimbulkannya terhadap publik).
 - c. Satu dari lima isu-isu prioritas tersebut yaitu Banjir, merupakan TUPOKSI dari Perangkat Daerah lain yaitu BPBD. Kerusakan lingkungan hidup juga menyebabkan bencana banjir besar yang melanda Kabupaten Katingan selama tahun 2021. Hujan yang mengguyur secara terus menerus selama beberapa hari ini menyebabkan debit air Sungai Katingan dan Sungai Samba meluap. Kondisi banjir tidak bisa dihindarkan sehingga banjir melanda wilayah Kabupaten Katingan. Berdasarkan pendataan BPBD Kabupaten Katingan, peristiwa banjir yang dipicu oleh faktor cuaca tersebut telah merendam beberapa wilayah di 13 kecamatan yang ada di kabupaten Katingan, dan berdampak pada 15.911 KK atau 25.443 jiwa. Selain itu, sebanyak 15.439 unit rumah, 67 unit tempat ibadah, 78 unit fasilitas pendidikan, 36 unit fasilitas kesehatan, 40 unit perkantoran, 19 pos PPKM dan 794.100 hektar luas wilayah juga terdampak banjir.

Selanjutnya ditegaskan, memperhatikan hasil analisis DPSIR terutama komponen respon dari isu-isu prioritas yang dipetakan kausalitasnya, serta inovasi daerah dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Katingan Tahun 2019. Maka rencana tindak lanjut yang disesuaikan dengan strategi pencapaian, perlu dilakukan tindak lanjut berupa:

- a. Upaya peningkatan kualitas air/penurunan pencemaran air pada badan air (Sungai, Danau, Bekas Galian Tambang, Situ, dll), akan dilakukan dengan memperbanyak kegiatan pendidikan lingkungan yang dimulai dengan mengembangkan sekolah lapangan pada DAS Mikro disekitar daerah-daerah dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidupnya yang telah Melampaui Batas sesuai Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan yang telah disusun Tahun 2019.
- b. Penanganan banjir dan Lahan kritis pada daerah-daerah yang selalu mengalami banjir berulang setiap tahunnya, terutama pada delapan kecamatan yang relative selalu mengalami banjir tahunan berulang (Kecamatan Katingan Hulu, Marikit, Sanaman Mantikei, Katingan Tengah, Pulau Malan, Tewang Sanggalang Garing, Katingan Hilir dan Kecamatan Tasik Payawan), juga pada daerah-daerah dalam KHG dan pesisir, yang akan dipadukan dengan kegiatan RHL dan bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan Tim Restorasi Gambut Daerah, BPDASHL Kahayan, KPHP Unit XVII dan Unit XXX, Pemegang IUPHHK dan IPPKH, serta LSM Lokal, atau pihak-pihak lainnya.
- c. Penanganan kebakaran hutan dan lahan, akan dilakukan dan difokuskan pada wilayah-wilayah kiri-kanan sungai dan jalan dan akan bekerjasama



dengan pihak-pihak seperti pada RTL 2. Pemerintah Kabupaten Katingan akan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota tetangga, serta mendukung percepatan PERDA Penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah dan pembentukan regulasi pada tingkat kabupaten. Selain itu, sesuai Keputusan Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Dirjen PPI-KLHK No. : SK.9/PKHL/PKHL/PPI.4/3/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Desa Sasaran Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020, untuk Kabupaten Katingan akan difokuskan pada Sembilan desa, desa-desa tersebut adalah: Desa Hyang Bana, Desa Jahanjang, Kelurahan Kasongan Baru, Kelurahan Kasongan Lama, Desa Talingke, Desa Luwuk Kanan, Desa Tewang Manyangen, Desa Tewang Tampang, dan Desa Tumbang Liting.

- d. Penanganan Sampah/Persampahan akan dilaksanakan dengan membangun unit-unit pengelolaan persampahan pada lokasi-lokasi baru yang sesuai dengan arahan RTRWK dan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan, serta kegiatan pemugaran dan peremajaan sarana prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah sesuai persyaratan teknis. Selain itu, akan ditingkatkan upaya-upaya daur ulang sampah anorganik dan pengomposan sampah organik dengan memfasilitasi dan mengasistensi para pemulung dan pengolah kompos, bekerjasama dengan petani tanaman hortikultura dan parapihak lainnya.

4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Katingan

Perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Katingan untuk periode 2024-2026 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek internal dan eksternal. Aspek-aspek tersebut telah diwakili oleh analisis terhadap permasalahan pembangunan di Katingan, dinamika isu dan/atau kebijakan yang berkembang di lingkungan internasional, nasional, provinsi dan di tingkat Kabupaten Katingan serta mempertimbangkan kondisi terkait penanganan dan pemulihan akibat bencana Pandemi COVID-19 yang memerlukan upaya refocusing kegiatan dan anggaran untuk beberapa tahun ke depan sebagaimana diuraikan dan hasil telaahan tersebut menghasilkan isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan dukungan sumber daya aparatur yang bersih, profesional dan dapat merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran dalam



rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, diharapkan dapat mewujudkan *good governance*. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Diharapkan melalui peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi serta berbagai inovasi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara berkualitas dan merata akan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan dan optimalisasi capaian pembangunan maupun pelayanan publik di Katingan.

2. Penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan sejak lama dengan berbagai pendekatan dan strategi. Dalam pelaksanaannya, upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan keterpaduan dan dilakukan secara terus-menerus.

3. Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja.

Di dalam upaya mengurangi angka pengangguran diperlukan upaya peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja, antara lain dengan mendirikan pusat latihan kerja, pelatihan keterampilan, *workshop* hingga memberikan bantuan peralatan produktif kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesempatan kerja dan tenaga kerja terampil, inisiatif dan kreatif.

4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan.

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat yang dilandasi kesadaran spiritualisme dan kebangsaan. Namun demikian, pembangunan Pendidikan di Kabupaten Katingan tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain; pemerataan dan perluasan akses layanan Pendidikan; peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus; peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan yang memenuhi standar dan perbaikan tata kelola Pendidikan.

5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pembangunan dimensi Kesehatan menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia.



Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi merupakan tujuan pembangunan kesehatan. Saat ini, Indonesia tengah mengalami perubahan pola penyakit yang sering disebut transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat PTM seperti stroke, jantung, diabetes dan lain-lain (Hasil Riskesdas Tahun 2018). Dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini, PTM menjadikan resiko tinggi terinfeksi jika dihubungkan dengan COVID-19 ini. Selain itu, Pemerintah harus melakukan upaya penanganan masalah kesehatan lainnya yang merupakan program prioritas nasional seperti penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), menurunkan angka stunting pada balita dan pelaksanaan GERMAS.

6. Pengarusutamaan gender.

Konsep pengarusutamaan gender merupakan peran dan status yang melekat pada laki-laki atau perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman, bukan berdasarkan perbedaan biologis. Pengarusutamaan gender, merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan.

7. Pengembangan sektor potensial untuk penguatan ekonomi daerah

Potensi pertanian di Kabupaten Katingan masih tinggi, hal ini terlihat dari besaran dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Katingan masih tinggi, selain itu produktivitas hasil pertanian dalam arti luas diharapkan bergerak positif. Dengan hal ini, untuk mempercepat pergerakan perekonomian daerah perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan. Struktur perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Namun sektor industri pengolahan masih sangat lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya dan potensi lokal harus lebih ditingkatkan produktifitasnya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah. Potensi SDA yang dimiliki Kabupaten Katingan, namun belum optimal dikembangkan adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Harus diakui bahwa karakter dan kontribusi nyata sektor ekonomi kreatif belum secara optimal diberdayakan. Untuk itu, ke depan keterlibatan pemerintah, baik secara pendanaan, maupun secara peran fasilitator dan kontributor pendukung dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis alam harus lebih ditingkatkan melalui dukungan dalam pengembangan ekonomi kreatif kepariwisataan yang fokus bertemakan alam atau berbasis alam.



Peningkatan daya saing pariwisata perlu dilakukan dengan strategi yang tepat baik dari aspek pengelolaan destinasi wisata, pemasaran pariwisata, dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menghidupkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Upaya pengembangan kepariwisataan dalam sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan ekonomi Kabupaten Katingan harus bertransformasi dari ketergantungan kepada sektor eksploitasi SDA menjadi pengembangan jasa sektor Pariwisata yang berbasis alam.

Selain itu, optimalisasi industri pengolahan dan aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi swasta. Dengan adanya peran investasi swasta maka pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap sumber alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai di masa yang akan datang.

8. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur.

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konektivitas antar wilayah yang baik ditunjukkan dari jalan maupun akses transportasi yang dimiliki, sehingga makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Pembangunan dan pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang. Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan daya dorong yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat pondasi perekonomian mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan



sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan. Infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telpon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang. Sehubungan dengan efektifitas pembangunan tersebut, maka dukungan dan bantuan dari pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan desa itu sendiri sangat berarti. Upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mengubah pola pikir serta sikap mental masyarakat. Melalui upaya terpadu ini, diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kelompok kehidupannya serta membantu dan memberdayakan masyarakat dalam berbagai kegiatan produktif yang sesuai dengan potensinya masing-masing.

9. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pembangunan daerah tidak terlepas dari aktivitas untuk mengisi atau memanfaatkan ruang. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan seringkali menemui masalah kepentingan ekonomi yang berbenturan dengan lingkungan hidup ataupun sosial budaya. Pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, aspek sosial dan kelembagaan untuk keberlanjutan hidup manusia pada masa yang akan datang. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara serasi, selaras, seimbang dan lestari demi terjaminnya keberlanjutan pembangunan daerah harus menjadi syarat penting dalam pembangunan terutama dalam pembangunan fisik dan infrastruktur wilayah. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, maka keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam perlu terus dipelihara dan dimanfaatkan. Upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan penyempurnaan atas pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA sehingga diharapkan pengelolaan sumber daya berbasis lahan dapat lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Katingan. Selain itu, pemanfaatan dan pendayagunaan SDA diharapkan dapat dilakukan dengan mengacu kepada hasil pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan. Bila ditemui adanya kesalahan pengelolaan oleh pemegang izin, maka pemerintah daerah harus segera mengambil Tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal lain yang penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah penerapan pembangunan rendah emisi.

Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Katingan adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga banjir yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan



musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Edukasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan yang rawan terjadi di sejumlah wilayah penting disebarluaskan. Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diharapkan dapat dilakukan secara bersamaan dan bersinergi untuk pembangunan jangka menengah ke depan.

10. Pengamalan nilai kebangsaan dalam sosial budaya bermasyarakat.

Sosial dan budaya adalah suatu unsur terkecil dalam tatanan hidup bersama. Dalam tatanan hidup bersama sosial dan budaya berkaitan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Menyimpangnya nilai-nilai agama dan Pancasila dalam sosial budaya masa kini mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang mengusik persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pemahaman dan kesadaran akan sosial dan budaya yang berpancasila diharapkan dapat dikembangkan kembali. Dengan memperbaiki sosial-budaya berarti memperbaiki juga kualitas SDM dari akar-akarnya. Dengan begitu sosial dan budaya mampu mendorong kesejahteraan dan kedamaian dalam tatanan hidup bersama yang penuh dengan rasa aman yang mendorong perkembangan dan pembangunan daerah. Dalam pembangunan daerah diperlukan stabilitas dan wilayah yang kondusif sehingga tujuan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.



037B V

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran untuk pembangunan Kabupaten Katingan tahun 2024-2026. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Katingan merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang melalui pendekatan visi dan misi RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025.

5.1. VISI RPJPD

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Katingan periode tahun 2024-2026 merupakan bagian dari pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 pada periode/tahap keempat dan pedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap keempat RPJPD tersebut, maka akan disusun tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.

Adapun visi pembangunan daerah sesuai RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 adalah :

"KABUPATEN KATINGAN YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA"

Dimaksudkan dengan Kabupaten Katingan yang maju, didasarkan beberapa ukuran, yaitu:

1. Ditinjau dari aspek ekonomi, kemajuan dapat diukur dari:
 - a) Tingkat pendapatan yang tinggi dan pembagiannya yang relative merata.
 - b) Peran sektor industri pengolahan terutama pengolahan hasil-hasil pertanian sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin



- meningkat, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan pendapatan maupun dalam penyerapan tenaga kerja.
- c) Dalam proses produksi, berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa;
 - d) Lembaga dan pranata ekonominya telah tersusun dan tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi;
 - e) Perekonomiannya stabil sehingga gejolak yang berasal dari dalam maupun luar dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.
2. Tingkat kemajuan masyarakat Kabupaten Katingan juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial dan politik, yaitu:
- a) Makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.
 - b) Laju pertumbuhan penduduk yang sesuai dengan daya dukung wilayah.
 - c) Angka harapan hidup yang lebih tinggi;
 - d) Kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.
 - e) Memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap.
 - f) Peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan keamanan.
 - g) Tersedianya infrastruktur dasar dan fisik yang semakin maju.

Kabupaten Katingan yang dibangun bukan hanya yang maju, tetapi juga mandiri. Langkah awal kemandirian dalam konteks Kabupaten Katingan dapat diterjemahkan sebagai keberhasilan pemekaran wilayah. Oleh karena itu, pembangunan sebagai upaya mengisi pemekaran haruslah merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Karena itu membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi dan pemerataannya. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

3. Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada :
- a) Ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; Masyarakat yang maju, mandiri berarti juga masyarakat yang produktif dan inovatif, yang tercermin dalam sikap profesional, disiplin, etos kerja tinggi, serta mampu menyesuaikan diri secara bertahap terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) sehingga dapat bersaing dalam era globalisasi tanpa kehilangan nilai-nilai budaya setempat.



- b) Pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah semakin meningkat, sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar menjadi cenderung semakin berkurang;
- c) Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.
- d) Apabila karena SDA tidak lagi memungkinkan, telah dipersiapkan keunggulan lain, sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan.
- e) Daya tahan dan daya saing yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak sosial ekonomi nasional maupun global.

Pembangunan Kabupaten Katingan tidak cukup hanya menuju masyarakat yang mandiri dan maju, melainkan juga masyarakat yang Adil dan Sejahtera.

Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan dan pemerataan merupakan ciri yang harus ditonjolkan dalam pembangunan Kabupaten Katingan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; peduli terhadap keamanan masyarakat dan lingkungan; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, masyarakat yang berkeadilan berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.

Dimaksud dengan “Sejahtera” yaitu secara materil terpenuhi melalui pertumbuhan (ekonomi) yang terus meningkat diikuti peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, rasa aman masyarakat serta diimbangi dengan pemerataan pendapatan, kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik.

5.2. MISI RPJPD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mencapai visi pembangunan Kabupaten Katingan, maka telah ditetapkan 6 (enam) misi sebagaimana di dalam RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan mengutamakan sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri agar terwujud perekonomian rakyat yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Dengan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi yang diprioritaskan pada sektor-sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri diharapkan mampu menggerakkan pembangunan di sektor-sektor yang lain.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan pendidikan yang terencana agar tercipta produktivitas penduduk yang tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan yang semakin meningkat. Pembangunan Sumber Daya Manusia disamping meningkatkan



kompetensi (knowledge, skill, attitude) juga meningkatkan derajat kesehatan, dan pendapatan per kapita riil. Adanya peningkatan kualitas SDM sebagai cerminan kemampuan penguasaan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

3. Membuka isolasi daerah melalui Pembangunan Infrastruktur sehingga terjamin kelancaran arus barang, manusia, modal dan informasi dari dan ke Kabupaten Katingan secara cepat dan murah. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur: jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, dan permukiman, listrik dan air bersih, penerbangan perintis (baik untuk pertahanan/keamanan dan umum/busines), akan tercipta daya tarik yang semakin tinggi bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Katingan.
4. Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya (termasuk kemitraan sosial dan kesetia-kawanan sosial), Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban agar supaya terwujud masyarakat Kabupaten Katingan yang bermoral, beretika, berbudaya dan berdaya saing tinggi. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan harkat, martabat, dan harga diri, serta bercitra baik (kreatif, inovatif, rajin) dan menekan gangguan keamanan, menstabilkan kondisi sosial politik melalui Penegakkan Hukum, Keamanan dan Ketertiban menuju tercipta Kabupaten Katingan yang aman damai dan bersatu, sesuai motto Penyang Hinje Simpei.
5. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara bijaksana, menstabilkan keseimbangan ekosistem, menghemat penggunaan SDA, menghentikan pemborosan penggunaan berbagai sumber daya, menghentikan kerusakan lingkungan hidup agar terwujud pembangunan Kabupaten Katingan yang berkelanjutan.
6. Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih serta memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai NKRI, meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan Otonomi Daerah semakin nyata dan bertanggung jawab sebagai perwujudan dari tata pemerintahan yang baik dan bersih.

5.3. TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJPD (RPJMD ke 4)

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok dalam enam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, maka disusunlah tahapan dan skala prioritas utama yang



disesuaikan dengan periodenisasi masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Katingan.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, Tahapan RPJMD ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Katingan yang maju, mandiri, adil dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender.

Sejalan dengan tingkat kemajuan masyarakat, sumber daya manusia Kabupaten Katingan diharapkan berkarakter cerdas, kompetitif dan inovatif, berakhlak mulia, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah serta meningkatkan modal pembangunan Kabupaten Katingan pada masa yang akan datang.

Kondisi maju, mandiri, adil dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah desa; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat.



5.4. TUJUAN DAN SASARAN RPD

Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 hingga arahan tahapan pembangunan jangka panjang sebagaimana yang diuraikan di atas, menjadi dasar atau acuan bagi pelaksanaan pembangunan selama 3 (tiga) tahun yang akan datang dan diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran RPD. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu akhir periode RPD. Pernyataan tujuan dirinci kedalam sasaran agar memperjelas apa yang akan dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian beberapa hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Secara umum penjabaran atas visi misi RPJPD kedalam tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 mengacu pada pendekatan kinerja pembangunan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Tujuan dan sasaran RPD yang disusun dari rangkuman masing-masing misi dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Katingan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 - 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	
Tujuan 1	Memperkuat struktur ekonomi daerah yang maju dan berkelanjutan
Sasaran 1.1	Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan
Tujuan 2	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing
Sasaran 2.1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing
Tujuan 3	Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata
Sasaran 3.1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar



TUJUAN/SASARAN DAERAH	
Tujuan 4	Terwujudnya kondusifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan).
Sasaran 4.1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal.
Tujuan 5	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan
Sasaran 5.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Sasaran 5.2	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah.
Tujuan 6	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel
Sasaran 6.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel
Sasaran 6.2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Penentuan target indikator tujuan maupun sasaran pada RPD merupakan hasil analisis dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sampai saat ini dan kondisi nasional, provinsi, dan kabupaten. Target yang akan dicapai sampai dengan 2026 mempertimbangkan kemampuan daerah dan kondisi eksternal dengan asumsi dampak pandemi masih akan dirasakan yang dibarengi dengan upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19. Adapun tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 secara lengkap ditampilkan pada tabel berikut :



Tabel 5.2 Rangkuman Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target RPD Kabupaten Katingan 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
				2021	2022	2024	2025	2026	
1	Memperkuat struktur ekonomi daerah yang maju dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) PDRB per Kapita (ADHB)	% Juta Rp.	2,90 55,7	5,58 60,07	5,84 57,2	5,90 58,5	6,00 59,2	6,00 59,2
1.1	Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,35	1,47	2,36	2,37	2,50	2,50
		Persentase Kecamatan Rawan Pangan	%	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
		LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Resparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	1,17	6,85	1,20	1,25	1,30	1,30
		LPE Kategori Industri Pengolahan	%	3,07	7,93	3,12	3,15	3,18	3,18
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	NA	NA	2,28	2,43	2,77	2,77
		Persentase pertumbuhan nilai investasi	%	0,5	0,5	0,6	0,8	1	1
2	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka angka	68,89 85,72	69,74 85,38	69,80 85,80	69,85 86,00	70,00 86,20	70,00 86,20
2.1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,68	8,78	8,80	8,82	8,84	8,84
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,81	12,97	12,99	13,01	13,02	13,02
		Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	65,87	66,16	67,16	67,51	68,02	68,02
		Prevalensi stunting	%	21,22	20	14	12	10	10
		Persentase penduduk miskin	%	5,25	5,50	4,95	4,70	4,45	4,45
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,50	5,33	5,20	5,15	5,00	5,00
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	85,56	85,72	86,20	86,37	86,54	86,54
3	Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata	Indeks Infrastruktur Persentase kecamatan yang terhubung dengan poros kabupaten	angka %	NA 76,07	NA 76,07	29,54 81,00	30,23 81,00	30,92 81,00	30,92 81,00
3.1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	35,75	36,60	40,33	45,54	48,03	48,03
		Persentase jembatan dalam kondisi mantap	%	45,68	80,25	75,31	77,78	80,25	80,25
		Persentase desa yang terlayani sektor transportasi	%	NA	NA	20	25	30	30
		Persentase RT yang memiliki akses air minum layak	%	NA	NA	34,57	34,69	34,82	34,82
		Persentase RT yang memiliki akses sanitasi layak	%	NA	NA	34,78	36,02	37,26	37,26
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap	%	37,81	39,34	43,17	46,05	49,37	49,37
		Persentase permukiman kumuh yang ditangani	%	53	60	70	78	85	85



NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
				2021	2022	2024	2025	2026	
4	Terwujudnya kondisifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan).	Indeks Kerukunan Umat Beragama Persentase penyelesaian kasus SARA	angka %	NA 100	NA 100	77,07 100	77,12 100	77,17 100	77,17 100
4.1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal.	Persentase penurunan kasus kriminal	%	50	50	50	50	50	50
		Persentase penanganan kasus K3	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase konflik sosial yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	9	47	60	73	100	100
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	73,45	74,08	74,62	74,97	75,38	75,38
5.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas air	angka	50,67	50,67	52,50	52,75	53,00	53,00
		Indeks kualitas udara	angka	87,32	90,21	89,00	89,50	90,00	90,00
		Indek kualitas tutupan lahan	angka	87,92	87,10	86,00	86,25	86,75	86,75
5.2	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	angka	163,20	157,71	144,40	143,40	142,40	142,40
6	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks RB	predikat huruf	C	C	CC	CC	B	B
6.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	predikat huruf	C	CC	CC	B	BB	BB
		Nilai LPPD	kriteria	Sedang	NA	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Opini BPK	predikat huruf	WTP	NA	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai MCP	nilai	81	83	84	85	86	86
6.2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks SPBE	predikat	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	skor	80,56	84,81	85,00	85,50	86,00	86,00
		Persentase desa berkembang	%	42	50	63	69	76	76



Keterkaitan hubungan sasaran RPJPD dengan Tujuan dan Sasaran RPD digambarkan dalam tabel berikut :

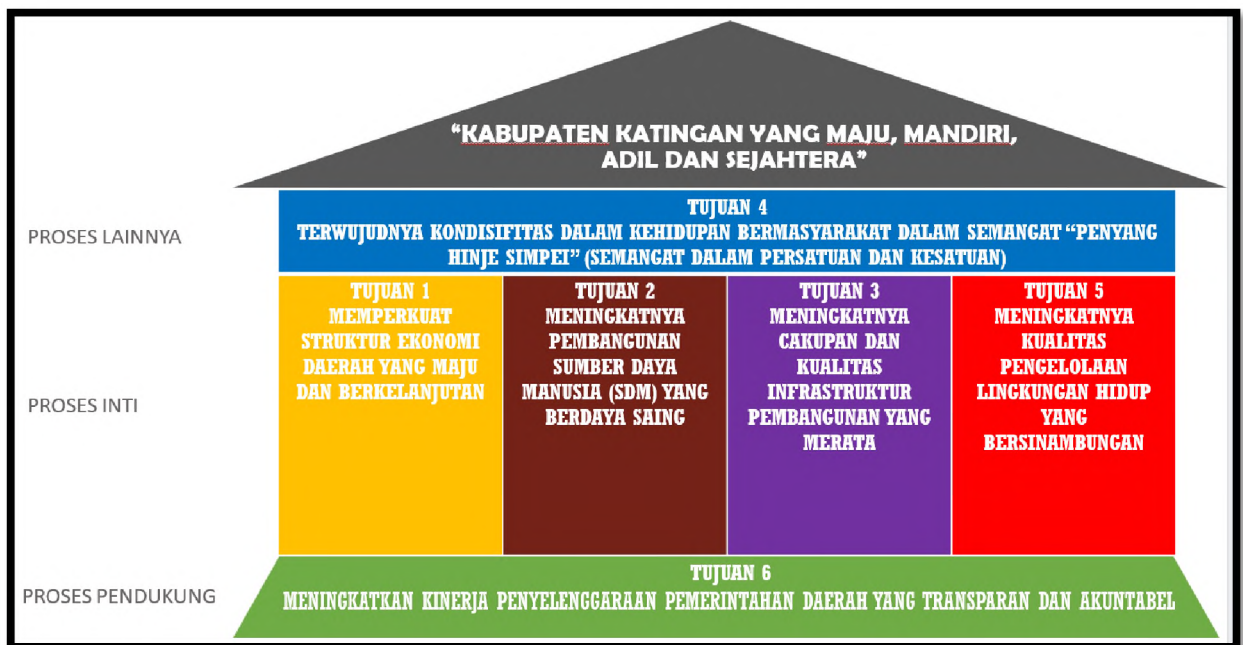
Tabel 5.3 Hubungan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026

SASARAN POKOK RPJPD TAHUN 2005-2025	TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2024-2026
Terwujudnya perekonomian rakyat yang tangguh dan berdaya saing tinggi, yang diprioritaskan pada sektor-sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industry sehingga mampu menggerakkan pembangunan di sektor-sektor yang lain	Memperkuat struktur ekonomi daerah yang maju dan berkelanjutan * Meningkatkan daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ketahanan pangan
Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga tercipta produktivitas penduduk yang tinggi termasuk meningkatnya peran perempuan dan generasi muda dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), semakin rendahnya Indeks Kemiskinan manusia	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing * Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing
Terbukanya isolasi daerah melalui Pembangunan Infrastruktur sehingga terjamin kelancaran arus barang, manusia, modal, jasa dari dan ke Kabupaten Katingan secara cepat dan murah. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur : jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, dan permukiman, listrik dan air bersih, penerbangan perintis (baik untuk pertahanan/keamanan dan umum/busines), akan tercipta daya tarik yang semakin tinggi bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Katingan	Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata * Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Katingan yang bermoral, beretika, berbudaya dan berdaya saing tinggi. Kondisi ini erat hubungannya dengan peningkatan daya saing melalui peningkatan harkat, martabat, dan harga diri, serta bercitra baik (kreatif, inovatif, rajin) dan menekan gangguan keamanan, menstabilkan kondisi sosial politik melalui Penegakkan Hukum, Keamanan dan Ketertiban menuju tercipta Kabupaten Katingan yang aman damai dan bersatu, sesuai motto Penyang Hinje Simpei.	Terwujudnya kondisifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan). * Meningkatkan rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal.
Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara bijaksana, terciptanya keseimbangan ekosistem, menghemat penggunaan SDA, berkurangnya pemborosan	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan * Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan



SASARAN POKOK RPJPD TAHUN 2005-2025	TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2024-2026
penggunaan berbagai sumber daya, dapat diturunkannya kerusakan lingkungan hidup pada tingkat yang minimal sehingga terwujud pembangunan Kabupaten Katingan yang berkelanjutan.	* Meningkatkan ketahanan terhadap bencana daerah.
Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih serta semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai NKRI, meningkatnya kualitas pelayanan umum dengan diterapkannya pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan Otonomi Daerah semakin nyata dan bertanggung jawab sebagai perwujudan dari tata pemerintahan yang baik dan bersih.	<p>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel</p> <p>* Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih dan akuntabel</p> <p>* Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat</p>

Gambar 5.1
Dukungan Tujuan dan Sasaran RPD
terhadap Visi RPJPD Kabupaten Katingan



5.5. PENJABARAN (CASCADING) TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME

Pencapaian pembangunan daerah tidak lepas dari peran perangkat daerah dalam melaksanakan bidang urusan hingga program urusan yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan Perangkat Daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian setiap urusan Perangkat Daerah di Kabupaten Katingan. Keterkaitan kebijakan IKU daerah dengan bidang urusan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 5.4 Penjabaran Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026

TUJUAN 1	Memperkuat struktur ekonomi daerah yang maju dan berkelanjutan						
INDIKATOR TUJUAN	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) PDRB per Kapita (ADHB)						
SASARAN	(1.1) Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan						
INDIKATOR SASARAN	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		Persentase Kecamatan Rawan Pangan	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Resparasi Mobil dan Sepeda Motor	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persentase pertumbuhan nilai investasi
BIDANG URUSAN	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pangan	Perdagangan	Perindustrian	Pariwisata	Penanaman Modal
KINERJA BIDANG URUSAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat	Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal
	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan		Meningkatnya pemanfaatan pangan yang berkualitas serta terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB		
				Terwujudnya iklim usaha yang kondusif	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		
				Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas		
				Meningkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan terhadap ketentuan yang	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		
				Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat			
				Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan			

TUJUAN 2	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing						
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
SASARAN	(2.1) Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing						
INDIKATOR SASARAN	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka Harapan Hidup (AHH)	Prevalensi stunting	Persentase penduduk miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
BIDANG URUSAN	Pendidikan		Kesehatan		Sosial	Tenaga Kerja	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KINERJA BIDANG URUSAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan	Meningkatnya Kesetaraan Gender,
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan		Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya efektivitas dan cakupan pengawasan dan pembinaan dalam pemenuhan ketentuan perizinan pedagang besar farmasi (PBF) cabang, sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan industri produk obat tradisional (usaha kecil obat tradisional dan usaha mikro obat tradisional)		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak - haknya	
			Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga		Tersedianya Data Fakir Miskin		
			Meningkatnya Indeks Pembangunan				



TUJUAN 3	Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata						
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Infrastruktur						
	Persentase kecamatan yang terhubung dengan poros kabupaten						
SASARAN	(3.1) Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar						
INDIKATOR SASARAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persentase jembatan dalam kondisi mantap	Persentase desa yang terlayani sektor transportasi	Persentase RT yang memiliki akses air minum layak	Persentase RT yang memiliki akses sanitasi layak	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap	Persentase permukiman kumuh yang ditangani
BIDANG URUSAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Perhubungan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
KINERJA BIDANG URUSAN	Terwujudnya konektivitas jalan		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Tersedianya akses air minum dan sanitasi layak dan aman			Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM)
			Terwujudnya Konektivitas Nasional	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang pekerjaan umum			Luas kawasan permukiman kumuh <10 Ha yang ditangani
			Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Terlaksananya pengelolaan SDA terpadu			Meningkatnya jumlah rumah layak huni
							Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Pemukiman

TUJUAN 4	Terwujudnya kondisifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan).			
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Kerukunan Umat Beragama			
	Persentase penyelesaian kasus SARA			
SASARAN	(4.1) Meningkatkan rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal.			
INDIKATOR SASARAN	Persentase penurunan kasus kriminal	Persentase penanganan kasus K3	Persentase konflik sosial yang ditangani	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
BIDANG URUSAN	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Kesatuan Bangsa dan Politik	Kebudayaan
KINERJA BIDANG URUSAN	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar			Kelestarian Cagar Budaya
				Pemajuan Kebudayaan

TUJUAN 5	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan			
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			
SASARAN	(5.1) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			(5.2) Meningkatkan ketahanan terhadap bencana daerah
INDIKATOR SASARAN	Indeks kualitas air	Indeks kualitas udara	Indek kualitas tutupan lahan	Indeks Risiko Bencana (IRB)
BIDANG URUSAN	Lingkungan Hidup			ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
KINERJA BIDANG URUSAN	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
	Meningkatnya Penanggungjawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUULH yang diterbitkan			
	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah			



TUJUAN 6	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel						
INDIKATOR TUJUAN	Indeks RB						
SASARAN	(6.1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel				(6.2) Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		
INDIKATOR SASARAN	Nilai SAKIP	Nilai LPPD	Opini BPK	Nilai MCP	Indeks SPBE	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase desa berkembang
BIDANG URUSAN	Sekretariat Daerah ; Perencanaan Pembangunan ; seluruh Program Penunjang Urusan		Keuangan	Inspektorat ; Keuangan; Perencanaan Pembangunan	Komunikasi dan Informatika Persandian	Sekretariat Daerah ; Penanaman Modal ; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kewilayahan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KINERJA BIDANG URUSAN					Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien
					Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah		Berkembangnya status pembangunan desa
					Tersedianya Infrastruktur Digital		Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
					Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi		
					Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah		

Penjabaran tujuan dan sasaran hingga tingkat bidang urusan pemerintahan daerah untuk menjamin sinergitas pembangunan daerah, dimana kinerja bidang urusan dibahas dalam Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, bidang urusan/sub urusan diterjemahkan menjadi program, dengan begitu program-program yang ada dalam bidang urusan yang diampu oleh perangkat daerah secara langsung merupakan dukungan untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPD.



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan ataupun langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, strategi dijabarkan lagi menjadi arah kebijakan yang memberikan gambaran upaya lebih rinci bagi pencapaian sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan selama periode 2024-2026 ditempuh dengan upaya sebagai berikut :

1. Penguatan ekonomi lokal (pertanian, perdagangan, industri kecil dan pariwisata) yang mendorong keberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi menuju kemandirian

Sektor pertanian adalah sektor yang paling besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Hingga kini, sebagian besar masyarakat Katingan banyak memiliki usaha di sektor pertanian dalam arti luas. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan dalam periode 2024-2026 masih akan lebih fokus mengembangkan sektor ini sebagai sektor unggulan bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Untuk itu dalam tiga tahun ke depan pengembangan komoditi unggulan sektor pertanian akan menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah. Adapun komoditi pertanian yang akan dikembangkan adalah padi, durian, pisang dan tanaman cabai. Selain komoditi utama tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan berencana pula mengembangkan komoditi jagung dan bawang merah yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat Katingan, sekaligus untuk menekan inflasi terhadap komoditi tersebut pada wilayah pedalaman Katingan dan kebutuhan saat hari raya tertentu yang permintaannya bisa melonjak.

Adapun tujuan lain dari penguatan ekonomi lokal tersebut dimaksudkan mendukung program pembangunan ekonomi hijau di Katingan, termasuk menjaga agar tidak terjadi alih fungsi lahan dari pertanian (padi, buah-buahan dan hortikultura) ke perkebunan sawit. Untuk itu, kebijakan daerah terhadap pengembangan sektor pertanian akan diselaraskan dengan kebijakan Provinsi Kalimantan dalam pengembangan zona ekonomi, dimana Kabupaten Katingan masuk dalam zona 2 sebagai wilayah yang dikembangkan untuk potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Agar pengembangan empat komoditi



tersebut berhasil, perlu diperkuat pula dengan kebijakan penguatan rantai nilai komoditi pertanian, perikanan, dan perkebunan. Hal ini dapat diwujudkan dengan kegiatan hilirisasi atau penambahan rantai nilai produk dari sektor pertanian dan perikanan yang menjadi komoditi unggulan masyarakat. Untuk itu, kebijakan ini akan diarahkan pula pada pembentukan pasar dan penyerapan produk langsung maupun olahannya.

Penguatan regulasi untuk mempermudah proses pelayanan perizinan sebagai salah daya tarik investasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesempatan kerja melalui peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Untuk mewujudkan upaya tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan penyiapan kompetensi dan produktivitas bagi kelembagaan keuangan mikro, UMKM, dan koperasi. Penguatan industri daerah, mengembangkan sentra pertumbuhan baru, dan pengembangan produk lokal berdasarkan wilayah atau yang dikenal dengan istilah *one village one product* (OVOP) dalam upaya memperkuat terbentuknya rantai nilai komoditi pertanian, perikanan, perkebunan, termasuk pula pengembangan potensi pada sektor pariwisata.

Selain itu, penguatan untuk pengembangan sektor perdagangan dan industri pengolahan, diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah yang sedang berkembang dan memacu pendapatan masyarakat. Penguatan yang dilakukan dapat berupa produk pengolahan sederhana, *packaging*, dan *branding* terhadap komoditi dan produk olahan khas Kabupaten Katingan.

Potensi lain yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dan sudah memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pusat adalah rencana penyiapan lokasi untuk dijadikan kawasan strategis pengembangan Pusat Perfilman Asia Tenggara yang berada di Kecamatan Pulau Malan. Rencana strategi pengembangan kawasan ini tentunya masih mengacu pada konsep pembangunan ekonomi berbasis kelestarian lingkungan. Pemerintah Kabupaten Katingan dalam hal ini, wewenangnya terbatas pada penyediaan lahan. Meski demikian efek domino dari terlaksananya proyek ini adalah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Katingan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait pengembangan sektor pariwisata, Kawasan Punggualas menjadi salah satu objek wisata minat khusus berbasis alam yang menjadi salah satu destinasi wisata di Kalimantan Tengah. Wilayah ini secara khusus banyak diminati oleh wisatawan mancanegara dan lokal, sehingga berpotensi menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, dukungan pembangunan infrastruktur menuju dan pada wilayah ini akan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Katingan, termasuk pula kawasan wisata alam lainnya yang berpotensi dikembangkan dan menarik minat wisatawan datang berkunjung.



2. Penguatan Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif dan terampil

Manusia merupakan modal utama pembangunan untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah, Strategi ini sangat mendukung upaya peningkatan angka IPM Kabupaten Katingan dari kategori sedang. Pendidikan dan kesehatan merupakan dua urusan yang menentukan kualitas Sumber Daya Manusia, sebagaimana negara maju dapat dikenali dari mutu kesehatan dan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Fokus peningkatan kualitas pendidikan dilihat dari akses, sarana dan prasarana serta kualitas guru. Terlebih di era pandemi ini, pembelajaran jarak jauh masih berlaku sehingga aktivitas belajar mengajar menggunakan teknologi informasi sangat diperlukan. Peningkatan pendidikan yang berkualitas diarahkan untuk menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun serta menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat tertinggal serta masyarakat penyandang cacat termasuk penyelenggaraan pendidikan alternatif dan pendidikan khusus.

Prioritas pembangunan di bidang pendidikan dengan upaya mengurangi angka putus sekolah, sehingga tercapai Angka Harapan Lama Sekolah menuju 13,02 tahun pada akhir periode RPD. Selain itu upaya mendorong peningkatan partisipasi pendidikan dan melanjutkan pendidikan menuju jenjang yang lebih tinggi akan mendorong peningkatan Rata-rata lama Sekolah.

Isu kesehatan penanganan Covid-19 masih dilakukan, namun tidak mengesampingkan isu kesehatan lainnya seperti stunting dan kesehatan ibu hamil. Peningkatan kualitas layanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan jumlah, jaringan, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kesehatan masyarakat, meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, penempatan tenaga kesehatan di desa sangat terpencil dan terpencil, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kehamilan, memberikan penyuluhan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, mendorong asupan gizi selama kehamilan, meningkatkan pemahaman orang tua tentang pola asuh bayi, meningkatkan cakupan imunisasi balita, meningkatkan kesadaran pemberian asi eksklusif pada bayi 0-6 bulan serta pemenuhan gizi bayi optimal, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan, meningkatkan pengawasan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas, mengupayakan akreditasi puskesmas untuk mendukung kualitas layanan kesehatan. Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin, meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat sejak usia dini serta pengembangan manajemen Kesehatan.

Upaya meningkatkan kualitas dan daya saing SDM adalah melalui penurunan angka kemiskinan secara terpadu, karena dampak kemiskinan



akan meningkatkan kriminalitas, depresi, konflik sosial, pengangguran dan kesulitan akses terhadap layanan pendidikan maupun layanan kesehatan, dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran diperlukan stimulus bagi masyarakat, terutama masyarakat kelompok usia produktif. Salah satu stimulus yang diberikan adalah pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha bagi UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Pengembangan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja juga diupayakan melalui kebijakan untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pertanian dan kelautan. Upaya ini, berkaitan dengan teknologi pengolahan tanaman pangan dan hasil perikanan yang merupakan sektor-sektor dominan bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga kesinambungan antara pelatihan dan tenaga kerja dapat dikembangkan secara sinergis melalui penyiapan/peningkatan keterampilan kerja kepada masyarakat maupun bantuan langsung.

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, maupun pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan.

3. Penguatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur daerah yang menjangkau seluruh wilayah

Guna mendukung pencapaian tujuan 1 dan tujuan 2, perlu ada strategi umum terhadap pengembangan infrastruktur daerah yang menjadi prioritas untuk mendukung pusat-pusat ekonomi daerah. Selain memperkuat dan memperjelas arah pembangunan infrastruktur ke depan, secara kewilayahan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus transportasi pada daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dan perlu menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung. Pembangunan infrastruktur berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi agar menjadi lebih kuat serta sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan antarwilayah, karena jika kesenjangan antarwilayah dapat teratasi maka daya saing antarwilayah akan meningkat. Pembangunan infrastruktur terdiri dari fasilitas fisik dan non fisik yang keduanya saling berkaitan dan saling mendukung. Penyediaan dan percepatan pembangunan infrastruktur diarahkan pada perbaikan infrastruktur yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan untuk mendukung sektor pertanian, industri, pariwisata, kawasan terisolir, dan kawasan ekonomi strategis. Sedangkan



infrastruktur teknologi dan informasi disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini yang semakin maju di mana komunikasi dapat terjalin melalui internet. Infrastruktur teknologi dan informasi merupakan suatu kebutuhan dikarenakan proses pembatasan aktivitas masyarakat selama masa pandemi telah mempengaruhi proses belajar, proses ekonomi masyarakat dan proses pelayanan publik dilakukan secara online.

Prioritas pembangunan infrastruktur tersebut diantaranya adalah membangun dan melanjutkan rencana pengembangan jalan darat di wilayah utara dan wilayah selatan sampai pada rencana pembangunan dermaga pelabuhan laut Bajungkal dan dermaga Kereng Pakahi. Prioritas ini diharapkan mendukung pengembangan sektor pertanian pada sentra produksi padi dan palawija di Kecamatan Katingan Kuala dan Mendawai. Selain itu, dampaknya juga akan mendorong kemajuan sektor pariwisata yang melewati kawasan sekitar TN Sebangau, seperti kawasan Punggu Alas yang saat ini terkenal dengan perlindungan orang utan liar, selain wisata budaya dan wisata alam.

Selain fokus pada pengembangan infrastruktur kewilayahan, pengembangan sanitasi Kabupaten Katingan juga menjadi perhatian khusus, mencakup pengolahan air limbah pemukiman, sistem pengelolaan persampahan, cakupan layanan air bersih dan layanan drainase, layanan komunikasi dan informasi, serta penataan kawasan permukiman. Untuk percepatan pembangunan sanitasi permukiman, secara khusus kebijakan dan perencanaannya kedepan disusun melalui Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten sebagai acuan pencapaian Universal Acces dan capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tahun 2030 sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam RPJMN 2020-2024. Demikian pula untuk rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk didalamnya rencana penanganan permukiman pada kawasan kumuh di Kabupaten Katingan akan diperkuat dengan konsep yang telah disusun dalam Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Katingan. Kesemua rencana tersebut, tentunya akan disesuaikan dan diintegrasikan lebih lanjut dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039.

4. Pemantapan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui upaya pendekatan sosial budaya dan moderasi beragama

Dalam mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Katingan diperlukan daerah yang aman, tentram dan tertib. Hal ini mendorong wilayah menjadi lebih kondusif yang tentu memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di suatu daerah. Adapun kondisi yang diharapkan dapat dicapai melalui penerapan strategi ini adalah semakin mantapnya peran serta masyarakat Katingan dalam menjaga keutuhan NKRI melalui pendekatan sosial budaya dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan semakin patuhnya masyarakat dan pelaku usaha terhadap penegakan hukum dan peraturan yang berlaku.



Masyarakat Dayak di Kalimantan secara umum dan di Katingan secara khusus, sejak dulu sudah memiliki kearifan lokal yang dapat mempererat konsep persatuan dan kesatuan bangsa serta gotong royong, dan harmonisasi antar lapisan masyarakat yang berbeda-beda adat, budaya, agama, istiadat dan sosial budaya. Falsafah Huma Betang (rumah besar) yang dimiliki masyarakat suku Dayak, lahir untuk menyatukan konsep bebas terpimpin dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna menciptakan keharmonisan dan mencegah perselisihan yang berarti. Menurut Prof. Dr. H. Norsanie Darlan, Guru Besar Universitas Palangkaraya (Kompas.com, 6 Agustus 2012), ada ruang bebas yang merupakan sarana dalam mewujudkan pembangunan masyarakat merujuk pada budaya suku Dayak. Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, justru ruang publik yang bebas tersebut diharapkan menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Kearifan lokal seperti ini perlu mendapat perhatian bagi kelestariannya di masa mendatang. Dengan menafsirkan ruang publik yang bebas dalam tatanan pembangunan masyarakat tersebut akan terjadi kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum. Bahkan, tingginya kekerabatan karena adanya rasa persaudaraan yang tinggi, tidak saling menyalahkan satu sama yang lain. Masyarakat Dayak sungguh memberikan kearifan yang sangat tinggi harganya. Tidak pernah ada perselisihan, yang berarti dalam kehidupan Huma Betang. Saling menghargai, menghormati dan saling tolong menolong tercipta sejak beberapa abad silam dan masih bisa dilihat hingga sekarang. Falsafah huma betang dalam kehidupan masyarakat Kalteng betul-betul hidup bersama dalam suatu suasana harmonis manakala pendatang berpegang menganut budaya "di mana bumi di injak, di situ langit dijunjung". Mencermati kehidupan yang konsisten pada kearifan lokal huma betang itu, tidak keliru manakala budaya yang berkembang dalam masyarakat di seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk di Katingan dipertahankan bagi kelanjutan pembangunan di masa mendatang. Adapun kata "Penyang Hinje Simpei" yang menjadi moto Kabupaten Katingan berasal dari bahasa Sangiang. Berdasarkan penjelasan dari Tengang D. Halip, artinya adalah semangat persatuan dan kesatuan.

Memperhatikan semakin berkurangnya pemahaman dan pengetahuan generasi muda terhadap kearifan lokal dan pelestarian budaya lokal, Pemerintah Kabupaten Katingan akan menerapkan konsep ini menjadi kebijakan daerah guna membangun dan memelihara semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.

5. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana

Isu pengelolaan lingkungan yang berdampak secara global yakni emisi gas rumah kaca dan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dalam tiga tahun ke depan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan saat ini. Terkait isu ini, Pemerintah Kabupaten



Katingan sangat mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan menetapkan visi lingkungan “Konservasi Katingan untuk Borneo” dan “Kasongan Kota Hijau”. Keseriusan pemerintah daerah terhadap perlindungan alam juga diwujudkan dengan dukungan terhadap pengembangan Kawasan Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka di wilayah utara Katingan dan Kawasan Taman Nasional Sebagai di wilayah selatan yang berbatasan juga dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya. Selain itu, di Kabupaten Katingan juga dibentuk Kebun Raya Katingan sebagai pusat konservasi, pelestarian dan pengembangan tanaman buah-buahan tropis khususnya buah-buahan lokal yang ada di Kalimantan.

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjalin keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan demi kepentingan generasi saat ini dan masa yang akan datang. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu yang di dalamnya terdapat pemanfaatan, penataan, pengawasan, pemulihan pengendalian, pemeliharaan juga pengembangan lingkungan hidup itu sendiri. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk mengelola sumberdaya alam secara efisien, adil dan berkelanjutan yang didukung oleh lembaga pemerintahan yang handal dan penegakan hukum yang tegas dengan tetap mengacu pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup erat kaitannya dengan kebencanaan dikarenakan upaya menjaga kelestarian lingkungan juga dapat meminimalisir kejadian bencana. Pemetaan dan pemantauan wilayah rawan bencana, diarahkan pemantauan wilayah rawan bencana yang diakibatkan kondisi topografi dan geografis di daerah Kabupaten Katingan yang memiliki dataran tinggi maupun dataran rendah serta hutan maupun lahan perkebunan, seperti kebakaran hutan dan banjir.

6. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel

Memperhatikan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan PermenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, sasaran perubahan yang ingin dicapai sampai akhir tahun 2023 melalui strategi ini adalah:

- Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pememerintah Kabupaten Katingan
- Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Pemkab Katingan yang diukur dari semakin meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja, mempertahankan opini WTP dari BPK, meningkatnya pencapaian dan penerapan SPM, dan optimalisasi penerapan E-Gov/PTSP.
- Meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik
- Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang



oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, adil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah.

Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang menerapkan Standar Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan untuk memudahkan pelayanan pemerintahan, begitu pula dalam fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengarahkan penggunaan dana desa yang mendorong peningkatan status desa.

Rumusan strategi di atas, merupakan prioritas pembangunan daerah dalam 3 (tiga) tahun periode RPD yang dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan yang akan dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan menjadi pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu pelaksanaan RPD. Arah kebijakan RPD, menentukan tahapan dan prioritas pembangunan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran dalam RPD.



Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Katingan 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
				2024	2024	2026
1	Memperkuat struktur ekonomi daerah yang maju dan berkelanjutan					
1.1	Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan	1. Penguatan ekonomi lokal (pertanian, perdagangan, industri kecil dan pariwisata) untuk mendorong keberdayaan masyarakat dan kemandirian ekonomi	<p>1. Pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan total produksi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, diversifikasi produk pertanian, pemasaran, daya saing produk, pengembangan agrowisata, dan peningkatan ketahanan pangan.</p> <p>2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok</p> <p>3. Peningkatan kapasitas pelaku usaha</p> <p>4. Peningkatan daya tarik pariwisata</p> <p>5. Peningkatan kapasitas kewirausahaan, UMKM dan koperasi</p> <p>6. Peningkatan daya tarik dan iklim investasi yang kondusif serta industrialisasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja</p>	■	■	■



NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
				2024	2024	2026
2	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing					
2.1	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	2. Penguatan Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif dan terampil	7. Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan dengan menerapkan prinsip Merdeka Belajar. 8. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta 9. Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan pelaksanaan perlindungan sosial 10. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan pemberdayaan tenaga kerja 11. Peningkatan kualitas anak dan peran perempuan dalam pembangunan	■	■	■
3	Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata					
3.1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	3. Penguatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur daerah yang menjangkau seluruh wilayah	12. Peningkatan konektivitas inter dan intra kabupaten 13. Peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan air minum 14. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan 15. Peningkatan kualitas dan cakupan irigasi daerah 16. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) melalui penyediaan akses perumahan dan permukiman layak	■	■	■



NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
				2024	2024	2026
4	Terwujudnya kondisifitas wilayah dan masyarakat yang berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan)					
4.1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal.	4. Pemantapan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui upaya pendekatan sosial budaya dan moderasi beragama	17. Pengembangan wawasan kebangsaan dan peningkatan fasilitasi kerukunan umat beragama	■	■	■
			18. Peningkatan koordinasi dan pengawasan trantibumlinmas dalam penegakan peraturan daerah	■	■	■
			19. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan ekspresi kebudayaan dan kearifan lokal	■	■	■
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan					
5.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	5. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana	20. Pembinaan, pemantuan dan pengawasan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, termasuk limbah B3	■	■	■
			21. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	■	■	■
			22. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.	■	■	■
5.2	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah.		23. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	■	■	■
			24. Peningkatan pengelolaan mitigasi bencana	■	■	■



NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
				2024	2024	2026
6	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel					
6.1	Meningkatnya kualitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	6. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	25. Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel	■	■	■
			26. Penguatan implementasi manajemen ASN	■	■	■
			27. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah	■	■	■
6.2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		28. Penguatan implementasi SPBE dan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	■	■	■
			29. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	■	■	■
			30. Penguatan pembinaan dan pengawasan desa	■	■	■



Gambar 6.1.
Fokus/Tema Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Katingan



6.2. PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Program prioritas daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Program pembangunan daerah disajikan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Rencana program pembangunan daerah akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah untuk dijabarkan ke kegiatan yang paling berdaya ungkit untuk mencapai *outcome* program.

Selain itu, penerapan dari standar pelayanan minimal (SPM) juga menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Penerapan jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dimuat dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya, di perencanaan tahunan akan dimuat dalam RKPD dan dianggarkan di APBD. Adapun program perangkat daerah yang mendukung penerapan jenis pelayanan dasar pada 6 (enam) bidang urusan untuk tahun 2019 dan 2020 disajikan dalam Tabel 6.3 di bawah. Pencapaian indikator SPM tahun 2019 dan 2020 telah disajikan pada Bab II dokumen ini.

Tabel 6.2 Program Prioritas Daerah yang Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Kinerja		Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
			2019	2020		
I. BIDANG PENDIDIKAN						
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	34,76%	96,22%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Kinerja		Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
			2019	2020		
		dasar (SD/Mi, SMP/MTs)				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	112,3%	3,24%	Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	115,8%	70,11%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
II. BIDANG KESEHATAN						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	85%	79,18%	1. Perbaikan Gizi Masyarakat 2. Program Penyediaan Dana Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes dan Sarana Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	85%	52,11%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	96%	83,26%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	89%	83,31%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	93%	44,89%	Program Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	69%	52,18%	Program Pelayanan Kesehatan Remaja	Dinas Kesehatan



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Kinerja		Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
			2019	2020		
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	81%	90,57%	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Lanjut Usia	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	70%	53,13%	Program P2PTM	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	71%	47,27%	Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	49%	84,88%	Program Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	97%	49,94%	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	58%	67,52%	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
III. BIDANG PEKERJAAN UMUM						
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	95,40	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	95,40	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
IV. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT						
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni	Jumlah Warga Negara korban bencana yang	0	0	-	Dinas Perumahan, Kawasan



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Kinerja		Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
			2019	2020		
	bagi korban bencana Kab/kota	memperoleh rumah layak huni				Pemukiman dan Pertanahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	-	
V. BIDANG TRANTIBUMLINMAS						
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara		647 Orang	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		88.100 Orang (55,6%)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		120.464 Orang (76%)	Program Pengurangan Resiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		0 Orang (100%)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Program Penanganan Bencana (Tanggap Darurat)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		100%	Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
VI. BIDANG SOSIAL						
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang	10%	100%	1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi	Dinas Sosial



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Kinerja		Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
			2019	2020		
	telantar di luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			Kesejahteraan Sosial	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		100%	2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	20%	100%	3. Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	-	100%	4. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	30%	-	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
				100%	Program Penanggulangan Bencana, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan 2020, diolah

Program perangkat daerah yang mendukung penerapan SPM untuk tahun 2021 sampai dengan 2022 disajikan pada tabel di bawah. Lebih lanjut, penerapan SPM pada masing-masing program tersebut dirinci kedalam kegiatan dan sub kegiatan yang dimuat dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah pengampu SPM.



Tabel 6.3 Program Prioritas Daerah yang Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Katingan Tahun 2021-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Perangkat Daerah Daerah	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja		Perangkat Daerah	
					2021	2022		
I. BIDANG PENDIDIKAN								
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Program Pengelolaan Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94.70 %	95.20%	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	72.70 %	73.20 %	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3,25 %	3.50 %	
				4	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	93.40 %	93.90 %	
II. BIDANG KESEHATAN								
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	92%	95%	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan						
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan						



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Perangkat Daerah Daerah	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja		Perangkat Daerah
					2021	2022	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan					
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan					
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan					
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan					
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan					
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan					
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan					
11	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan					



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Perangkat Daerah Daerah	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja		Perangkat Daerah	
					2021	2022		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan Kesehatan						
III. BIDANG PEKERJAAN UMUM								
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	46,5%	52,5%	1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (2021-2022) 2. Dinas PUPR (2023)
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	38,62%	41,46%	1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (2021-2022) 2. Dinas PUPR (2023)



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Perangkat Daerah Daerah	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja		Perangkat Daerah	
					2021	2022		
IV. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT								
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan		<i>(program tidak dipakai oleh Perangkat Daerah terkait)</i>			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Program Pengembangan Perumahan		<i>(program tidak dipakai oleh Perangkat Daerah terkait)</i>			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan
V. BIDANG TRANTIBUMLINMAS								
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	70%	75%	Satuan Polisi Pamong Praja/Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	162.200 org	162.200 org	Badan Penanggulangan Bencana



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Perangkat Daerah Daerah	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja		Perangkat Daerah	
					2021	2022		
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	162.200 org	162.200 org	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	30 mnt	30 mnt	Satuan Polisi Pamong Praja/Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
VI.	BIDANG SOSIAL							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80%	85%	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti						
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti						



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Perangkat Daerah Daerah	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja		Perangkat Daerah	
					2021	2022		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti						Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Program Penanganan Bencana	1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	90%	95%	



Program Prioritas Daerah merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa program yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pelaksanaan Program Prioritas Daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang berpedoman kepada strategi dan arah kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Program Prioritas Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan. Program Prioritas Daerah Kabupaten Katingan mulai tahun 2024 sampai dengan 2026 disajikan pada **Lampiran Bab VI Tabel 6.4**, dikelompokkan berdasarkan tujuan, dan sasaran yang mendukung pencapaian target sasaran. Berikut rumusan program prioritas yang dijabarkan langsung menurut sasaran RPD :



TABEL 6.4
PROGRAM PRIORITAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2024-2026

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Katingan Tahun Periode 2024 s/d 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Tujuan 1 : Memperkuat struktur ekonomi daerah yang maju dan berkelanjutan														
Sasaran 1.1 : Meningkatkan daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan														
Strategi 1 : Penguatan ekonomi lokal (pertanian, perdagangan, industri kecil dan pariwisata) untuk mendorong keberdayaan masyarakat dan kemandirian ekonomi														
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				625.000.000,00		1.650.000.000,00		1.675.000.000,00		3.950.000.000,00		
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap)	6511.7 Ton	6511.7 Ton	300.000.000,00	6781 Ton	800.000.000,00	6602.48 Ton	800.000.000,00	6602.48 Ton	1.900.000.000,00	Dinas Perhubungan dan Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan (budidaya)	5.988,64 Ton	5.988,64 Ton	300.000.000,00	6.288,07 Ton	800.000.000,00	6.602,48 Ton	800.000.000,00	6.602,48 Ton	1.900.000.000,00	Dinas Perhubungan dan Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Ragam Produk Hasil Perikanan (jenis)	3 Jenis	3 Jenis	25.000.000,00	3 Jenis	50.000.000,00	3 Jenis	75.000.000,00	3 Jenis	150.000.000,00	Dinas Perhubungan dan Perikanan
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.284.500.000,00		5.517.250.000,00		5.727.075.000,00		14.528.825.000,00		
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Capaian produktivitas pertanian perhektar	70 Persen	80 Persen	986.500.000,00	85 Persen	1.986.500.000,00	90 Persen	1.980.600.000,00	90 Persen	4.953.600.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang memadai	35,86 Persen	35,89 Persen	960.500.000,00	35,92 Persen	1.964.500.000,00	35,95 Persen	1.968.600.000,00	35,95 Persen	4.893.600.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	100 Persen	250.000.000,00	100 Persen	350.000.000,00	100 Persen	450.000.000,00	100 Persen	1.050.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang ditindaklanjuti	40 Persen	40 Persen	687.500.000,00	46 Persen	716.250.000,00	48 Persen	767.875.000,00	48 Persen	2.171.625.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah Usaha dan Kelembagaan Kelompok Tani yang Berkembang	85,24 Persen	86,44 Persen	400.000.000,00	88,58 Persen	500.000.000,00	90,78 Persen	560.000.000,00	90,78 Persen	1.460.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				953.000.000,00		1.189.437.000,00		1.386.309.000,00		3.528.746.000,00		
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	61 Persen	75 Persen	323.500.000,00	85 Persen	466.937.000,00	100 Persen	553.809.000,00	100 Persen	1.344.246.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan ragam pangan dan pangan olahan	30 Persen	40 Persen	450.000.000,00	44 Persen	500.000.000,00	48 Persen	600.000.000,00	50 Persen	1.550.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase pemenuhan data ketersediaan dan kerawanan pangan	50 Persen	50 Persen	94.500.000,00	55 Persen	97.500.000,00	65 Persen	107.500.000,00	65 Persen	299.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	60 Persen	70 Persen	85.000.000,00	80 Persen	125.000.000,00	90 Persen	125.000.000,00	100 Persen	335.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				735.370.000,00		956.800.000,00		1.100.320.000,00		2.792.490.000,00		
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	0 Persen	100 Persen	190.000.000,00	100 Persen	231.800.000,00	100 Persen	266.570.000,00	100 Persen	688.370.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	0 Persen	100 Persen	26.000.000,00	100 Persen	40.000.000,00	100 Persen	46.000.000,00	100 Persen	112.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM Mengikuti Pendidikan dan	0 Orang	90 Orang	444.370.000,00	90 Orang	600.000.000,00	90 Orang	690.000.000,00	270 Orang	1.734.370.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	0 Persen	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	57.500.000,00	100 Persen	157.500.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang berkembang	0 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	25.000.000,00	50 Pelaku Usaha	35.000.000,00	50 Pelaku Usaha	40.250.000,00	150 Pelaku Usaha	100.250.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1.365.000.000,00		1.770.000.000,00		1.875.000.000,00		5.010.000.000,00		
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan	0 Persen	100 Persen	15.000.000,00	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	23.000.000,00	100 Persen	58.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	0 Persen	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	230.000.000,00	100 Persen	450.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	0 Persen	100 Persen	770.000.000,00	100 Persen	870.000.000,00	100 Persen	880.000.000,00	100 Persen	2.520.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	0 Persen	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda	0 Persen	100 Persen	500.000.000,00	100 Persen	600.000.000,00	100 Persen	650.000.000,00	100 Persen	1.750.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	2 Komoditas	2 Komoditas	60.000.000,00	2 Komoditas	80.000.000,00	3 Komoditas	92.000.000,00	5 Komoditas	232.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.880.218.253,00		2.205.206.370,00		2.235.428.189,00		6.320.852.812,00		
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	6,4 Persen	6,4 Persen	1.533.433.408,00	6,6 Persen	1.851.586.214,00	6,8 Persen	1.869.739.020,00	6,8 Persen	5.254.758.642,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	2 Persen	2 Persen	82.482.900,00	3 Persen	84.084.509,00	4 Persen	85.686.118,00	4 Persen	252.253.527,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jenis Informasi Industri yang tersedia	80 Persen	80 Persen	264.301.945,00	90 Persen	269.535.647,00	100 Persen	280.003.051,00	100 Persen	813.840.643,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.909.302.906,00		2.450.000.000,00		2.550.000.000,00		6.909.302.906,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata Yang Memenuhi	100 Persen	1.450.000.000,00	100 Persen	1.850.000.000,00	100 Persen	1.950.000.000,00	100 Persen	5.250.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase hasil pemasaran pariwisata	100 Persen	300.000.000,00	100 Persen	380.000.000,00	100 Persen	380.000.000,00	100 Persen	1.060.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi	100 Persen	159.302.906,00	100 Persen	220.000.000,00	100 Persen	220.000.000,00	100 Persen	599.302.906,00	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			619.500.000,00		619.500.000,00		619.500.000,00		1.858.500.000,00	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor	61 Perusahaan	50.000.000,00	67 Perusahaan	50.000.000,00	69 Perusahaan	50.000.000,00	70 Perusahaan	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor	2 Persen	50.000.000,00	2 Persen	50.000.000,00	2 Persen	50.000.000,00	2 Persen	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	63,93 Persen	469.500.000,00	80 Persen	469.500.000,00	85 Persen	469.500.000,00	75 Persen	1.408.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi Penanaman Modal yang lengkap, akurat	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tujuan 2 : Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing													
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing													
Strategi 2 : 2.Penguatan Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif dan terampil													
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			91.477.989.995,00		95.807.389.079,00		106.956.792.583,00		294.242.171.657,00	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	91,39 Persen	37.475.253.892,00	65,50 Persen	41.275.253.890,00	65,75 Persen	43.825.253.890,00	65,90 Persen	122.575.761.672,00	Dinas Pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100,39 Persen	9.938.837.438,00	73 Persen	9.938.837.438,00	75 Persen	9.938.837.438,00	77 Persen	29.816.512.314,00	Dinas Pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	102,44 Persen	40.819.543.665,00	91,12 Persen	41.348.942.751,00	91,82 Persen	49.948.346.255,00	92 Persen	132.116.832.671,00	Dinas Pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	N/A Persen	2.332.600.000,00	7 Persen	2.332.600.000,00	9 Persen	2.332.600.000,00	11 Persen	6.997.800.000,00	Dinas Pendidikan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pengembangan kurikulum yang dilakukan di Satuan Pendidikan	N/A Persen	463.040.000,00	83,80 Persen	463.040.000,00	83,88 Persen	463.040.000,00	84,05 Persen	1.389.120.000,00	Dinas Pendidikan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan	N/A Persen	121.500.000,00	75,03 Persen	121.500.000,00	75,05 Persen	121.500.000,00	75,07 Persen	364.500.000,00	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase kualitas pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra	N/A Persen	33.33 Persen	327.215.000,00	33.50 Persen	327.215.000,00	33.66 Persen	327.215.000,00	33.66 Persen	981.645.000,00	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			137.066.427.823,00		161.765.203.048,00		170.767.236.456,00		469.598.867.327,00			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Puskesmas	N/A Persen	90 Persen	113.859.995.273,00	95 Persen	138.090.183.248,00	100 Persen	146.436.278.956,00	100 Persen	398.386.457.477,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita	N/A Persen	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	150.000.000,00	100 Persen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan	N/A Persen	100 Persen	825.161.000,00	100 Persen	866.400.000,00	100 Persen	909.740.000,00	100 Persen	2.601.301.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	N/A Persen	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	150.000.000,00	100 Persen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	N/A Persen	100 Persen	995.725.550,00	100 Persen	1.045.511.800,00	100 Persen	1.097.787.000,00	100 Persen	3.139.024.350,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	N/A Persen	100 Persen	2.538.000.000,00	100 Persen	2.398.000.000,00	100 Persen	2.443.500.000,00	100 Persen	7.379.500.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan	N/A Persen	90 Persen	0,00	95 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	N/A Persen	100 Persen	316.400.000,00	100 Persen	332.220.000,00	100 Persen	348.831.000,00	100 Persen	997.451.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	N/A Persen	100 Persen	328.976.000,00	100 Persen	328.976.000,00	100 Persen	365.874.000,00	100 Persen	1.023.826.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	N/A Persen	100 Persen	440.150.000,00	100 Persen	440.150.000,00	100 Persen	485.264.500,00	100 Persen	1.365.564.500,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	N/A Persen	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	82.687.500,00	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	282.687.500,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	N/A Persen	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	82.687.500,00	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	282.687.500,00	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/A Persen	100 Persen	202.000.000,00	100 Persen	212.100.000,00	100 Persen	222.705.000,00	100 Persen	636.805.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/A Persen	100 Persen	293.750.000,00	100 Persen	308.437.500,00	100 Persen	323.858.000,00	100 Persen	926.045.500,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	N/A Persen	16 Persen	3.970.000.000,00	14 Persen	3.970.000.000,00	12 Persen	4.069.425.000,00	12 Persen	12.009.425.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	N/A Persen	7,3 Persen	0,00	7 Persen	0,00	6,5 Persen	0,00	6,5 Persen	0,00	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	99 Persen	95 Persen	10.669.680.000,00	95 Persen	10.669.680.000,00	97 Persen	10.712.441.000,00	97 Persen	32.051.801.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian Yang memenuhi Standar	69 Persen	90 Persen	968.000.000,00	95 Persen	1.416.650.000,00	98 Persen	1.487.487.500,00	98 Persen	3.872.137.500,00	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proposi Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	34 Persen	93 Persen	1.258.590.000,00	97 Persen	1.321.519.500,00	97 Persen	1.364.044.500,00	97 Persen	3.944.154.000,00	Dinas Kesehatan
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			4.858.068.836,00	5.532.356.732,00	5.643.003.867,00	16.033.429.435,00					
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	85 Persen	98 Persen	474.800.000,00	98 Persen	579.262.947,00	98 Persen	590.848.206,00	98 Persen	1.644.911.153,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	85 Persen	98 Persen	1.124.726.500,00	98 Persen	1.270.940.945,00	98 Persen	1.296.359.764,00	98 Persen	3.692.027.209,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence /mCPR)	85 Persen	97 Persen	1.144.242.336,00	98 Persen	1.292.993.840,00	100 Persen	1.318.853.717,00	100 Persen	3.756.089.893,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Keluarga Sejahtera yang difasilitasi	85 Persen	98 Persen	2.114.300.000,00	98 Persen	2.389.159.000,00	100 Persen	2.436.942.180,00	100 Persen	6.940.401.180,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			2.216.910.000,00	2.510.630.200,00	2.667.172.664,00	7.394.712.864,00					
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang diberdayakan dalam peningkatan kesejahteraan sosial	65 Persen	70 Persen	246.700.000,00	75 Persen	300.974.000,00	80 Persen	346.120.100,00	80 Persen	893.794.100,00	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat penanganan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	75 Persen	80 Persen	1.200.000.000,00	85 Persen	1.270.000.000,00	90 Persen	1.302.000.000,00	90 Persen	3.772.000.000,00	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial	80 Persen	82 Persen	275.000.000,00	84 Persen	335.500.000,00	86 Persen	385.825.000,00	86 Persen	996.325.000,00	Dinas Sosial
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen	100 Persen	450.210.000,00	100 Persen	549.256.200,00	100 Persen	570.092.564,00	100 Persen	1.569.558.764,00	Dinas Sosial
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan TMP yang terpelihara	65 Persen	70 Persen	45.000.000,00	75 Persen	54.900.000,00	80 Persen	63.135.000,00	80 Persen	163.035.000,00	Dinas Sosial
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				1.218.046.281,00		1.622.483.972,00		1.763.898.241,00		4.604.428.494,00	
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	65 Persen	65 Persen	83.097.294,00	70 Persen	90.022.069,00	75 Persen	146.946.844,00	75 Persen	320.066.207,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakeriaan)	60 Persen	60 Persen	242.952.645,00	64 Persen	302.296.978,00	67 Persen	311.641.310,00	67 Persen	856.890.933,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	15 Persen	15 Persen	566.000.000,00	20 Persen	865.357.871,00	25 Persen	904.692.321,00	25 Persen	2.336.050.192,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan di luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	55 Persen	55 Persen	325.996.342,00	60 Persen	364.807.054,00	65 Persen	400.617.766,00	65 Persen	1.091.421.162,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN				1.521.674.153,00		1.762.230.741,00		1.797.478.356,00		5.081.383.250,00	
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga yang melakukan PPRG (penyusunan penganggaran responsif gender)	85 Persen	98 Persen	399.098.516,00	98 Persen	450.981.323,00	97 Persen	460.000.949,00	98 Persen	1.310.080.788,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan kualitas terhadap perlindungan perempuan	85 Persen	99 Persen	55.000.000,00	100 Persen	104.888.948,00	100 Persen	106.986.727,00	100 Persen	266.875.675,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan kualitas terhadap keluarga	85 Persen	99 Persen	110.000.000,00	100 Persen	124.300.000,00	100 Persen	126.789.000,00	100 Persen	361.089.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	85 Persen	99 Persen	106.928.800,00	100 Persen	120.829.544,00	100 Persen	123.246.135,00	100 Persen	351.004.479,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan Kabupaten Layak Anak	85 Persen	99 Persen	300.000.000,00	100 Persen	339.000.000,00	100 Persen	345.780.000,00	100 Persen	984.780.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	85 Persen	99 Persen	550.646.837,00	99 Persen	622.230.926,00	99 Persen	634.675.545,00	99 Persen	1.807.553.308,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tujuan 3 : Meningkatkan cakupan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata														
Sasaran 3.1 : Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar														
Strategi 3 : Penguatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur daerah yang menjangkau seluruh wilayah														
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			110.057.180.605,00		117.942.647.905,00		117.880.173.595,00		345.880.002.105,00		
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase lahan yang terlayani jaringan irigasi (%)	77,15 Persen	78 Persen	12.033.257.400,00	79 Persen	12.634.920.270,00	80 Persen	13.266.666.283,00	80 Persen	37.934.843.953,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Air Minum yang aman	72,60 Persen	72,60 Persen	350.040.000,00	72,80 Persen	367.500.000,00	73 Persen	385.875.000,00	73 Persen	1.103.415.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	N/A Rumah Tangga	1000 Rumah Tangga	1.000.000.000,00	1000 Rumah Tangga	1.534.094.500,00	1000 Rumah Tangga	1.634.999.225,00	1000 Rumah Tangga	4.169.093.725,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	N/A Persen	2,78 Persen	210.040.000,00	2,90 Persen	242.042.000,00	3,02 Persen	266.244.100,00	3,02 Persen	718.326.100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	N/A Persen	50 Persen	1.920.870.000,00	75 Persen	2.016.913.500,00	100 Persen	2.117.759.175,00	100 Persen	6.055.542.675,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase jalan desa yang dibangun	N/A Persen	60 Persen	1.900.010.000,00	70 Persen	1.995.010.500,00	80 Persen	2.094.761.025,00	80 Persen	5.989.781.525,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jalan Lingkungan Perumahan dalam kondisi baik	N/A Persen	80 Persen	265.608.000,00	80 Persen	278.888.400,00	80 Persen	292.832.820,00	80 Persen	837.329.220,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	36,60 Persen	43,03 Persen	92.377.355.205,00	45,54 Persen	98.873.278.735,00	48,03 Persen	97.821.035.967,00	48,03 Persen	289.071.669.907,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Mantap	N/A Persen	75,31 Persen	0,00	77,78 Persen	0,00	80,25 Persen	0,00	80,25 Persen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			12.672.763.646,00		15.473.600.664,00		15.901.819.166,00		44.048.183.476,00		
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Mendapat Bantuan SPM Perumahan Rakyat	12,83 Persen	12,83 Persen	500.000.000,00	43,73 Persen	500.000.000,00	68,30 Persen	500.000.000,00	68,30 Persen	1.500.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha yang ditangani	36 Persen	36 Persen	500.000.000,00	37 Persen	500.000.000,00	38 Persen	500.000.000,00	38 Persen	1.500.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Mendapat Bantuan (RTLH)	4.68 Persen	4.68 Persen	500.000.000,00	9.36 Persen	500.000.000,00	14.04 Persen	500.000.000,00	14.04 Persen	1.500.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase / Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	65 Persen	65 Persen	11.172.763.646,00	70 Persen	13.973.600.664,00	75 Persen	14.401.819.166,00	75 Persen	39.548.183.476,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			350.000.000,00		2.350.000.000,00		2.350.000.000,00		5.050.000.000,00		
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang dibangun dan	100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	100 Persen	1.150.000.000,00	100 Persen	1.150.000.000,00	100 Persen	2.450.000.000,00	Dinas Perhubungan dan Perikanan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan yang terpasang	64 Persen	64 Persen	200.000.000,00	66 Persen	1.200.000.000,00	67 Persen	1.200.000.000,00	67 Persen	2.600.000.000,00	Dinas Perhubungan dan Perikanan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang dibangun dan	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	Dinas Perhubungan dan Perikanan
Tujuan 4 : Terwujudnya kondisifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan).														
Sasaran 4.1 : Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal.														
Strategi 4 : Pemantapan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui upaya pendekatan sosial budaya dan moderasi beragama														
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			1.627.248.127,00		1.857.210.000,00		2.339.175.599,00		5.823.633.726,00		
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	85 Persen	100 Persen	1.627.248.127,00	100 Persen	1.857.210.000,00	100 Persen	2.339.175.599,00	100 Persen	5.823.633.726,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			54.937.200.000,00		8.599.728.000,00		11.981.113.045,00		75.518.041.045,00		
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemangku kepentingan yang dikoordinasikan melalui penguatan ideologi pencasila dan karakter kebangsaan	80 Persen	85 Persen	830.000.000,00	88 Persen	1.305.588.004,00	90 Persen	1.043.082.636,00	90 Persen	3.178.670.640,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan partai politik yang sudah memahami peraturan	85 Persen	88 Persen	52.870.000.000,00	90 Persen	5.701.939.996,00	95 Persen	8.440.000.000,00	95 Persen	67.011.939.996,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang	80 Persen	85 Persen	450.000.000,00	88 Persen	580.000.000,00	90 Persen	580.000.000,00	90 Persen	1.610.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	80 Persen	85 Persen	510.000.000,00	88 Persen	635.000.000,00	90 Persen	640.000.000,00	90 Persen	1.785.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang tindaklanjuti	80 Persen	85 Persen	277.200.000,00	88 Persen	377.200.000,00	90 Persen	1.278.030.409,00	90 Persen	1.932.430.409,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.360.000.000,00		2.250.000.000,00		2.300.000.000,00		5.910.000.000,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang lestari	70 Persen	80 Persen 1.160.000.000,00	90 Persen 1.900.000.000,00	100 Persen 1.950.000.000,00	100 Persen 5.010.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata		
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan	100 Persen	100 Persen 200.000.000,00	100 Persen 350.000.000,00	100 Persen 350.000.000,00	100 Persen 900.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan														
Sasaran 5.1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan														
Strategi 5 : 5.Penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana														
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				10.430.000.000,00		7.871.840.000,00		7.971.640.000,00		26.273.480.000,00		
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	20 Persen	20 Persen	100.000.000,00	20 Persen	200.000.000,00	20 Persen	200.000.000,00	20 Persen	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan	100 Persen	100 Persen	4.010.000.000,00	100 Persen	1.010.000.000,00	100 Persen	1.010.000.000,00	100 Persen	6.030.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	2 Persen	2 Persen	1.380.000.000,00	2 Persen	1.348.000.000,00	2 Persen	1.388.000.000,00	2 Persen	4.116.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara limbah	15 Persen	20 Persen	20.000.000,00	25 Persen	20.000.000,00	30 Persen	20.000.000,00	30 Persen	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	48 Persen	75 Persen	90.000.000,00	80 Persen	110.000.000,00	85 Persen	120.000.000,00	85 Persen	320.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang telah diakui	10 Persen	10 Persen	20.000.000,00	10 Persen	50.000.000,00	10 Persen	50.000.000,00	10 Persen	120.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan	10 Persen	10 Persen	950.000.000,00	10 Persen	500.000.000,00	10 Persen	500.000.000,00	10 Persen	1.950.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diterima masyarakat	10 Persen	10 Persen	300.000.000,00	10 Persen	108.000.000,00	10 Persen	150.000.000,00	10 Persen	558.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	50 Persen	60 Persen	40.000.000,00	70 Persen	60.000.000,00	80 Persen	60.000.000,00	80 Persen	160.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	30 Persen	30 Persen	3.520.000.000,00	40 Persen	4.465.840.000,00	50 Persen	4.473.640.000,00	50 Persen	12.459.480.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan														
Sasaran 5.2 : Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah.														
Strategi 5 : 5.Penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana														
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.185.932.000,00		4.746.771.578,00		4.047.855.535,00		14.980.559.113,00		
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penanggulangan bencana daerah	100 Persen	100 Persen	3.785.932.000,00	100 Persen	2.596.771.578,00	100 Persen	2.747.855.535,00	100 Persen	9.130.559.113,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	15 Menit	15 Menit	2.400.000.000,00	15 Menit	2.150.000.000,00	15 Menit	1.300.000.000,00	15 Menit	5.850.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tujuan 6 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel														
Sasaran 6.1 : Meningkatnya kualitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel														
Strategi 6 : Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel														
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			12.592.909.763,00		14.223.578.382,00		9.303.705.414,00		36.120.193.559,00		
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	100 Persen	10.238.461.484,00	100 Persen	11.751.407.600,00	100 Persen	6.733.977.983,00	100 Persen	28.723.847.067,00	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	2.354.448.279,00	100 Persen	2.472.170.782,00	100 Persen	2.569.727.431,00	100 Persen	7.396.346.492,00	Sekretariat Daerah
5	01		PERENCANAAN			1.392.749.370,00		2.262.298.200,00		2.470.534.001,00		6.125.581.571,00		
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen Renstra dan Renja yang	100 Persen	100 Persen	1.392.749.370,00	100 Persen	2.262.298.200,00	100 Persen	2.470.534.001,00	100 Persen	6.125.581.571,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
X	XX					661.621.422.324,00		689.219.703.048,00		718.620.858.891,00		#####		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	3.409.713.349,00	B Predikat	4.303.841.363,00	B Predikat	4.202.841.363,00	B Predikat	11.916.396.075,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	AA Predikat	AA Predikat	7.178.805.551,00	AA Predikat	8.402.226.939,00	AA Predikat	8.911.004.998,00	AA Predikat	24.492.037.488,00	Inspektorat
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	7.154.119.517,00	B Predikat	7.625.271.970,00	B Predikat	8.309.199.595,00	B Predikat	23.088.591.082,00	Dinas Perhubungan dan Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	11.293.180.098,00	B Predikat	11.823.837.192,00	BB Predikat	12.089.045.538,00	BB Predikat	35.206.062.828,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	20.386.915.155,00	B Predikat	25.170.721.665,00	B Predikat	34.443.542.648,00	B Predikat	80.001.179.468,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	BB Predikat	BB Predikat	2.948.876.301,00	A Predikat	2.935.177.222,00	A Predikat	3.059.150.121,00	A Predikat	8.943.203.644,00	Kecamatan Tasik Payawan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	N/A Predikat	B Predikat	3.425.954.869,00	BB Predikat	3.435.693.820,00	A Predikat	3.569.427.858,00	A Predikat	10.431.076.547,00	Kecamatan Kamipang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	6.281.242.723,00	BB Predikat	6.335.907.792,00	BB Predikat	6.580.710.500,00	BB Predikat	19.197.861.015,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	A Predikat	C Predikat	2.762.689.157,00	B Predikat	2.769.903.763,00	B Predikat	2.898.035.328,00	B Predikat	8.430.628.248,00	Kecamatan Sanaman Mantikei
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	2.539.171.107,00	B Predikat	2.557.628.247,00	BB Predikat	2.711.172.640,00	B Predikat	7.807.971.994,00	Kecamatan Bukit Raya
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	A Predikat	B Predikat	2.544.220.061,00	BB Predikat	2.544.220.061,00	BB Predikat	2.641.423.301,00	BB Predikat	7.729.863.423,00	Kecamatan Marikit
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	11.770.521.974,00	B Predikat	13.916.087.619,00	B Predikat	14.987.374.304,00	BB Predikat	40.673.983.897,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	BB Predikat	BB Predikat	4.715.804.662,00	A Predikat	4.718.610.198,00	A Predikat	4.889.425.165,00	A Predikat	14.323.840.025,00	Kecamatan Katingan Tengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	5.215.115.124,00	BB Predikat	5.216.105.244,00	BB Predikat	5.329.336.041,00	BB Predikat	15.760.556.409,00	Kecamatan Katingan Hilir
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	2.500.080.616,00	B Predikat	2.507.992.394,00	B Predikat	2.622.917.464,00	B Predikat	7.630.990.474,00	Kecamatan Petak Malai
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	8.000.000.000,00	B Predikat	8.040.423.862,00	B Predikat	8.235.556.448,00	B Predikat	24.275.980.310,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	4.609.935.674,00	B Predikat	5.479.101.650,00	B Predikat	5.979.101.651,00	B Predikat	16.068.138.975,00	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	5.527.593.285,00	B Predikat	6.361.880.809,00	B Predikat	6.555.437.738,00	BB Predikat	18.444.911.832,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	BB Predikat	BB Predikat	6.592.292.109,00	A Predikat	8.160.058.480,00	A Predikat	8.521.901.984,00	A Predikat	23.274.252.573,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	N/A Predikat	CC Predikat	292.203.422.190,00	B Predikat	293.034.402.190,00	BB Predikat	294.409.902.190,00	B Predikat	879.647.726.570,00	Dinas Pendidikan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	5.870.979.873,00	BB Predikat	5.880.319.555,00	A Predikat	6.118.631.244,00	A Predikat	17.869.930.672,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	N/A Predikat	B Predikat	3.497.016.047,00	BB Predikat	3.508.443.097,00	A Predikat	3.623.095.124,00	A Predikat	10.628.554.268,00	Kecamatan Pulau Malan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	BB Predikat	14.097.011.873,00	BB Predikat	12.843.056.165,00	BB Predikat	13.812.607.200,00	BB Predikat	40.752.675.238,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	AA Predikat	B Predikat	3.618.615.442,00	BB Predikat	3.620.279.220,00	BB Predikat	3.728.606.430,00	BB Predikat	10.967.501.092,00	Kecamatan Katingan Kuala
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	AA Predikat	A Predikat	104.554.788.319,00	A Predikat	104.497.038.320,00	A Predikat	105.895.120.245,00	A Predikat	314.946.946.884,00	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	2.536.078.655,00	B Predikat	2.547.309.925,00	B Predikat	2.643.984.335,00	B Predikat	7.727.372.915,00	Kecamatan Mendawai
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	100 Angka	99 Angka	5.933.108.392,00	100 Angka	6.789.890.378,00	100 Angka	6.902.139.979,00	100 Angka	19.625.138.749,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	26.616.453.517,00	B Predikat	27.976.342.541,00	B Predikat	29.292.624.585,00	B Predikat	83.885.420.643,00	Sekretariat DPRD
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	AA Predikat	AA Predikat	4.756.594.281,00	AA Predikat	5.444.244.840,00	AA Predikat	5.625.850.338,00	AA Predikat	15.826.689.459,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	5.011.050.000,00	B Predikat	6.130.155.000,00	B Predikat	6.341.670.500,00	B Predikat	17.482.875.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	AA Predikat	AA Predikat	4.460.596.642,00	AA Predikat	6.002.664.424,00	AA Predikat	6.281.567.847,00	AA Predikat	16.744.828.913,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	A Predikat	B Predikat	5.038.821.835,00	B Predikat	5.050.870.500,00	B Predikat	5.186.190.298,00	A Predikat	15.275.882.633,00	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	8.519.274.597,00	BB Predikat	9.069.274.597,00	A Predikat	9.675.274.597,00	A Predikat	27.263.823.791,00	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	0 Predikat	BB Predikat	6.537.961.219,00	BB Predikat	7.733.855.204,00	A Predikat	7.856.708.982,00	A Predikat	22.128.525.405,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	3.858.101.356,00	BB Predikat	4.558.101.356,00	A Predikat	4.834.785.003,00	A Predikat	13.250.987.715,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	5.943.258.907,00	B Predikat	6.187.889.556,00	B Predikat	6.561.263.106,00	B Predikat	18.692.411.569,00	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	AA Predikat	B Predikat	3.567.551.323,00	BB Predikat	3.575.936.705,00	A Predikat	3.720.976.267,00	A Predikat	10.864.464.295,00	Kecamatan Katingan Hulu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	AA Predikat	B Predikat	32.006.308.033,00	BB Predikat	37.168.571.584,00	BB Predikat	44.193.085.297,00	BB Predikat	113.367.964.914,00	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	4.138.198.491,00	B Predikat	5.296.367.601,00	BB Predikat	5.380.170.639,00	BB Predikat	14.814.736.731,00	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5	01	PERENCANAAN				983.034.602,00		2.011.903.267,00		2.215.553.715,00		5.210.491.584,00		
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai tata cara peraturan-perundang	100 Persen	100 Persen	983.034.602,00	100 Persen	2.011.903.267,00	100 Persen	2.215.553.715,00	100 Persen	5.210.491.584,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	02	KEUANGAN				332.996.841.013,00		341.364.846.120,00		349.949.752.586,00		#####		
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan pengelolaan	100 Persen	100 Persen	327.694.825.827,00	100 Persen	335.072.427.640,00	100 Persen	343.410.314.136,00	100 Persen	1.006.177.567.603,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan aset	100 Persen	100 Persen	1.132.557.849,00	100 Persen	1.197.852.980,00	100 Persen	1.317.638.278,00	100 Persen	3.648.049.107,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pertumbuhan realisasi PAD (%)	7 Persen	7 Persen	4.169.457.337,00	8 Persen	5.094.565.500,00	9 Persen	5.221.800.172,00	9 Persen	14.485.823.009,00	Badan Pendapatan Daerah
6	01	INSPEKTORAT DAERAH				2.603.959.625,00		3.740.999.221,00		3.778.409.213,00		10.123.368.059,00		
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2 Level	3 Level	2.225.019.000,00	4 Level	3.257.269.190,00	4 Level	3.289.841.882,00	4 Level	8.772.130.072,00	Inspektorat
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang tidak mendapat temuan hasil pengawasan yang material	85 Persen	85 Persen	0,00	85 Persen	0,00	85 Persen	0,00	85 Persen	0,00	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat kapabilitas APIP	3 Level	3 Level	378.940.625,00	4 Level	483.730.031,00	4 Level	488.567.331,00	4 Level	1.351.237.987,00	Inspektorat
Tujuan 6 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel														
Sasaran 6.2 : Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat														
Strategi 6 : Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel														
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				326.648.100,00		326.648.100,00		326.648.100,00		979.944.300,00		
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanganan Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	326.648.100,00	100 Persen	326.648.100,00	100 Persen	326.648.100,00	100 Persen	979.944.300,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		1.800.000.000,00		
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	38,47 Persen	40 Persen	0,00	60 Persen	0,00	80 Persen	0,00	80 Persen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen	98,07 Persen	98,50 Persen	200.000.000,00	99,00 Persen	200.000.000,00	99,50 Persen	200.000.000,00	99,50 Persen	600.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	93,67 Persen	95 Persen	0,00	97 Persen	0,00	99 Persen	0,00	99 Persen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen catatan	70,25 Persen	75 Persen	200.000.000,00	80 Persen	200.000.000,00	85 Persen	200.000.000,00	85 Persen	600.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Perekaman KTP Elektronik	99,40 Persen	99,50 Persen	200.000.000,00	99,70 Persen	200.000.000,00	99,90 Persen	200.000.000,00	99,90 Persen	600.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja	12,50 Persen	16 Persen	0,00	24 Persen	0,00	32 Persen	0,00	32 Persen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	01	02	KECAMATAN			7.165.366.704,00		7.262.177.566,00		7.618.686.856,00		22.046.231.126,00		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	90 Persen	100 Persen	115.000.000,00	100 Persen	115.000.000,00	100 Persen	115.000.000,00	100 Persen	345.000.000,00	Kecamatan Katingan Kuala
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 Persen	90 Persen	38.225.746,00	90 Persen	38.225.746,00	90 Persen	45.000.000,00	90 Persen	121.451.492,00	Kecamatan Kamipang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	90 Persen	100 Persen	220.000.000,00	100 Persen	220.000.000,00	100 Persen	230.000.000,00	100 Persen	670.000.000,00	Kecamatan Katingan Tengah
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 Persen	100 Persen	37.279.520,00	100 Persen	39.143.496,00	100 Persen	41.100.671,00	100 Persen	117.523.687,00	Kecamatan Bukit Raya
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 Persen	100 Persen	55.000.000,00	100 Persen	55.000.000,00	100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	170.000.000,00	Kecamatan Katingan Hilir
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	85 Persen	100 Persen	55.000.000,00	100 Persen	56.000.000,00	100 Persen	58.800.000,00	100 Persen	169.800.000,00	Kecamatan Tasik Payawan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	90 Persen	100 Persen	77.000.000,00	100 Persen	77.000.000,00	100 Persen	77.000.000,00	100 Persen	231.000.000,00	Kecamatan Katingan Hulu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	95 Persen	95 Persen	78.000.000,00	95 Persen	83.500.000,00	95 Persen	87.500.000,00	95 Persen	249.000.000,00	Kecamatan Petak Malai
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	95 Persen	95 Persen	31.791.100,00	95 Persen	32.600.000,00	95 Persen	35.000.000,00	95 Persen	99.391.100,00	Kecamatan Mendawai
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	85 Persen	100 Persen	66.240.900,00	100 Persen	69.552.945,00	100 Persen	73.030.591,00	100 Persen	208.824.436,00	Kecamatan Marikit
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 Persen	90 Persen	26.900.000,00	90 Persen	28.400.000,00	90 Persen	29.000.000,00	90 Persen	84.300.000,00	Kecamatan Pulau Malan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 Persen	100 Persen	51.359.256,00	100 Persen	54.359.256,00	100 Persen	54.359.256,00	100 Persen	160.077.768,00	Kecamatan Sanaman Mantikei

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	90 Persen	100 Persen	45.335.293,00	100 Persen	45.335.293,00	100 Persen	45.335.293,00	100 Persen	136.005.879,00	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100 Persen	100 Persen	9.000.000,00	100 Persen	10.000.000,00	100 Persen	12.000.000,00	100 Persen	31.000.000,00	Kecamatan Sanaman Mantikei
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	90 Persen	90 Persen	321.302.370,00	90 Persen	321.302.370,00	90 Persen	321.302.370,00	90 Persen	963.907.110,00	Kecamatan Katingan Hulu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100 Persen	100 Persen	28.685.000,00	100 Persen	29.850.000,00	100 Persen	35.000.000,00	100 Persen	93.535.000,00	Kecamatan Petak Malai
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100 Persen	90 Persen	10.000.000,00	90 Persen	10.000.000,00	90 Persen	15.000.000,00	90 Persen	35.000.000,00	Kecamatan Pulau Malan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	85 Persen	90 Persen	2.000.000,00	90 Persen	4.000.000,00	90 Persen	4.400.000,00	90 Persen	10.400.000,00	Kecamatan Marikit
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	90 Persen	90 Persen	642.604.741,00	90 Persen	642.604.741,00	90 Persen	642.604.741,00	100 Persen	1.927.814.223,00	Kecamatan Katingan Kuala
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	N/A Persen	100 Persen	15.000.000,00	100 Persen	15.750.000,00	100 Persen	16.537.500,00	100 Persen	47.287.500,00	Kecamatan Bukit Raya
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100 Persen	100 Persen	687.602.370,00	100 Persen	687.602.370,00	100 Persen	697.602.370,00	100 Persen	2.072.807.110,00	Kecamatan Katingan Hilir
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100 Persen	100 Persen	321.302.370,00	100 Persen	321.302.370,00	100 Persen	321.302.370,00	100 Persen	963.907.110,00	Kecamatan Katingan Tengah
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	90 Persen	90 Persen	30.000.000,00	90 Persen	30.000.000,00	90 Persen	35.000.000,00	90 Persen	95.000.000,00	Kecamatan Mendawai
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	85 Persen	90 Persen	2.000.000,00	90 Persen	4.000.000,00	90 Persen	4.400.000,00	90 Persen	10.400.000,00	Kecamatan Tasik Payawan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	90 Persen	90 Persen	321.302.370,00	90 Persen	321.302.370,00	90 Persen	321.302.370,00	100 Persen	963.907.110,00	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100 Persen	90 Persen	10.000.000,00	90 Persen	10.000.000,00	90 Persen	15.000.000,00	90 Persen	35.000.000,00	Kecamatan Kamipang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	85 Persen	100 Persen	197.064.718,00	100 Persen	221.500.000,00	100 Persen	226.925.000,00	100 Persen	645.489.718,00	Kecamatan Tasik Payawan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	228.100.000,00	228.100.000,00	100 Persen	100 Persen	256.000.000,00	712.200.000,00	Kecamatan Petak Malai
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	241.214.900,00	242.000.000,00	100 Persen	100 Persen	255.000.000,00	738.214.900,00	Kecamatan Mendawai
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90 Persen	100 Persen	162.300.190,00	162.300.190,00	100 Persen	100 Persen	233.300.000,00	557.900.380,00	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90 Persen	100 Persen	338.000.000,00	338.000.000,00	100 Persen	100 Persen	338.000.000,00	1.014.000.000,00	Kecamatan Katingan Hulu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	85 Persen	85 Persen	274.076.234,00	283.032.925,00	85 Persen	85 Persen	310.649.950,00	867.759.109,00	Kecamatan Marikit
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	294.504.000,00	296.072.518,00	100 Persen	100 Persen	294.504.000,00	885.080.518,00	Kecamatan Katingan Tengah
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	97.80 Persen	90 Persen	299.590.000,00	300.500.000,00	90 Persen	90 Persen	310.500.000,00	910.590.000,00	Kecamatan Pulau Malan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	97.80 Persen	90 Persen	219.578.716,00	219.578.716,00	90 Persen	90 Persen	250.000.000,00	689.157.432,00	Kecamatan Kamipang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90 Persen	100 Persen	208.000.000,00	208.000.000,00	100 Persen	100 Persen	208.000.000,00	624.000.000,00	Kecamatan Katingan Kuala
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	85 Persen	85 Persen	578.000.000,00	583.000.000,00	85 Persen	85 Persen	638.000.000,00	1.799.000.000,00	Kecamatan Katingan Hilir
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	280.000.000,00	294.000.000,00	100 Persen	100 Persen	308.700.000,00	882.700.000,00	Kecamatan Bukit Raya
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	261.469.910,00	265.469.910,00	100 Persen	100 Persen	271.469.910,00	798.409.730,00	Kecamatan Sanaman Mantikei
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	85 Persen	100 Persen	65.107.000,00	68.362.350,00	100 Persen	100 Persen	77.562.500,00	211.031.850,00	Kecamatan Marikit
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	85 Persen	100 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	100 Persen	100 Persen	42.000.000,00	122.000.000,00	Kecamatan Tasik Payawan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	110.000.000,00	100 Persen	120.000.000,00	100 Persen	330.000.000,00	Kecamatan Katingan Hilir
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	100 Persen	10.000.000,00	100 Persen	10.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00	Kecamatan Katingan Kuala
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	100 Persen	100 Persen	16.630.000,00	100 Persen	16.630.000,00	100 Persen	16.630.000,00	100 Persen	49.890.000,00	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	100 Persen	15.000.000,00	100 Persen	15.067.964,00	100 Persen	45.067.964,00	Kecamatan Sanaman Mantikei
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	90 Persen	90 Persen	30.000.000,00	90 Persen	30.000.000,00	90 Persen	35.000.000,00	90 Persen	95.000.000,00	Kecamatan Mendawai
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	100 Persen	100 Persen	8.800.000,00	100 Persen	8.800.000,00	100 Persen	8.800.000,00	100 Persen	26.400.000,00	Kecamatan Petak Malai
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.255.182.598,00		4.759.600.857,00		4.983.097.372,00		13.997.880.827,00	
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas	50 Persen	50 Persen	659.000.000,00	50 Persen	803.800.000,00	60 Persen	812.414.000,00	70 Persen	2.275.214.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	81,82 Persen	83 Persen	3.596.182.598,00	83 Persen	3.955.800.857,00	85 Persen	4.170.683.372,00	85 Persen	11.722.666.827,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				100.000.000,00		110.000.000,00		113.300.000,00		323.300.000,00	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI	Cukup Baik Predikat	Baik Predikat	100.000.000,00	Baik Predikat	110.000.000,00	Baik Predikat	113.300.000,00	Baik Predikat	323.300.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				2.105.000.000,00		3.149.536.656,00		3.149.536.656,00		8.404.073.312,00	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Kantor Desa Dalam Kondisi Baik	60 Persen	70 Persen	450.000.000,00	80 Persen	1.494.536.656,00	90 Persen	1.494.536.656,00	90 Persen	3.439.073.312,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa Sesuai Ketentuan	60 Persen	70 Persen	50.000.000,00	80 Persen	50.000.000,00	90 Persen	50.000.000,00	90 Persen	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Lengkap Dan Baik	97 Persen	98 Persen	325.000.000,00	99 Persen	325.000.000,00	100 Persen	325.000.000,00	100 Persen	975.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa Yang Mendapat Akses Teknologi Tepat Guna	8 Persen	19 Persen	1.280.000.000,00	49 Persen	1.280.000.000,00	78 Persen	1.280.000.000,00	78 Persen	3.840.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



6.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya pada Bab VI ini perlu dilengkapi dengan aspek spasial. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan mempertimbangkan dimensi keruangan, sebagaimana telah diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan dan arahan pembangunan kewilayahan Kabupaten Katingan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan 2019-2039, arahan kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang potensial untuk dikembangkan, meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi
- b. kawasan peruntukan pertanian
- c. kawasan peruntukan perkebunan
- d. kawasan peruntukan pertambangan
- e. kawasan peruntukan industri
- f. kawasan peruntukan pariwisata
- g. kawasan peruntukan permukiman
- h. kawasan peruntukan budidaya lain
- i. kawasan peruntukan Bandar Udara
- j. kawasan peruntukan Pusat Perfilman Asia Tenggara

Berikut ini akan diuraikan potensi pengembangan masing-masing kawasan yang disebutkan diatas.

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, meliputi:

1) Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan hutan produksi tetap, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Mendawai dan Kecamatan Katingan Kuala.

2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan produksi terbatas, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai.

3) Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Mendawai, dan Kecamatan Katingan Kuala.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian, meliputi:

1) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan



- Kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan tersebar di seluruh kecamatan.
- 2) Kawasan Pertanian Hortikultura
Kawasan pertanian hortikultura tersebar di seluruh kecamatan.
 - 3) Kawasan Peternakan
Kawasan peternakan tersebar di seluruh kecamatan.
- c. Kawasan Peruntukan Perkebunan, meliputi:
Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan.
- d. Kawasan Peruntukan Pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan berupa wilayah pertambangan mineral dan batubara, meliputi:
- 1) Wilayah Usaha Pertambangan Logam
Wilayah Usaha Pertambangan Logam, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Sanaman Matikei, dan Kecamatan Katingan Tengah.
 - 2) Wilayah Usaha Pertambangan Bukan Logam
Wilayah usaha pertambangan bukan logam, meliputi: Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Meridawai, dan Kecamatan Katirigan Kuala.
 - 3) Wilayah Usaha Pertambangan Batubara
Wilayah usaha pertambangan batubara, meliputi: Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, dan Kecamatan Mendawai.
 - 4) Wilayah Usaha Pertambangan Radioaktif
Wilayah usaha pertambangan radioaktif, meliputi:
Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Petak Malai Katingan Tengah, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir dan Kecamatan Tasik Payawan.
 - 5) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
Wilayah pertambangan rakyat, meliputi: Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing.
- e. Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan peruntukan industri terdiri dari:
- 1) Kawasan peruntukan industri rumah tangga tersebar di setiap kecamatan.
 - 2) Kawasan peruntukan industri sedang dan besar terkonsentrasi di Kecamatan Katingan Hilir.
 - 3) Kawasan peruntukan industri minapolitan terkonsentrasi di kecamatan Katingan Kuala.
- f. Kawasan Peruntukan Pariwisata



- Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi: wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah.
- g. Kawasan Peruntukan Permukiman
Kawasan peruntukan permukiman, meliputi a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- 1) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi kawasan perkotaan ibu kota kecamatan.
 - 2) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di setiap kecamatan.
- h. Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya
Kawasan peruntukan budidaya lainnya meliputi:
- 1) Kawasan perikanan tangkap laut disesuaikan dengan kewenangan kabupaten dan perikanan tangkap perairan umum tersebar di wilayah kecamatan yang memiliki potensi
 - 2) Kawasan pertahanan, keamanan dan perlindungan masyarakat
 - 3) Hutan pendidikan
 - 4) Kebun raya
 - 5) Kawasan budidaya perikanan tersebar pada seluruh kecamatan di kabupaten katingan; dan
 - 6) Kawasan konservasi perairan laut
- i. Kawasan Peruntukan Bandar Udara
Kawasan peruntukan bandar udara, meliputi: Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Katingan Hilir dan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hulu, dan Kecamatan Katingan Kuala.
- j. Kawasan Peruntukan Pusat Perfilman Asia Tenggara
Kawasan peruntukan pusat perfilman asia tenggara berada di Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing.

2. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Jaringan jalan, meliputi:

- a. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai arteri meliputi: Kasongan-Tangkling; dan Pelantaran-Kasongan.
- b. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan strategis nasional yaitu: batas Kalimantan Barat- Tumbang Kaburai; Tumbang Kaburai-Tumbang Sanarnang; Tumbang Sanamang-Tumbang Hiran; dan Tumbang Hiran-Tumbang Samba.
- c. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai kolektor primer 1 yaitu jaringan jalan Tumbang Samba-Rabambang.
- d. jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai kolektor primer 3 yaitu jaringan jalan Pundu-Tumbang Samba;
- e. jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai jalan lokal primer ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- f. jaringan jalan strategis kabupaten yaitu jaringan jalan Hampangen-Mendawai-Selat Jeruju;
- g. jaringan jalan lingkaran dalam; dan
- h. jaringan jalan lingkaran luar;

Jaringan angkutan sungai, meliputi:



- a. Katingan Kuala - Mendawai - Kamipang - Tasik Payawan - Katingan Hilir- Tewang Sangalang Garing - Pulau Malan - Katingan Tengah - Marikit -Katingan Hulu - Bukit Raya (jalur Sungai Katingan); dan
- b. Katingan Kuala - Meridawai - Kamipang - Tasik Payawan - Katingan Hilir-Tewang Sangalang Garing - Pulau Malan - Katingan Tengah - Sanaman Mantikei - Petak Malai (jalur Sungai Katingan - Sungai Samba).

Sedangkan Jaringan prasarana angkutan sungai, meliputi dermaga pengumpan di Jahanjang.

3. Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan yang merupakan kawasan strategis di kabupaten meliputi:

- a. kawasan strategis nasional;
- b. kawasan strategis provinsi; dan
- c. kawasan strategis kabupaten.

Kawasan strategis nasional, terdiri atas: kawasan strategis dan sudut pandang kepentingan keanekaragaman hayati Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka dan Taman Nasional Sebangau; dan kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*).

Kawasan strategis provinsi, meliputi:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - 1) kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet);
 - 2) kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Katingan Kuala;
 - 3) kawasan minapolitan; dan
 - 4) kawasan Pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangannya.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, berupa Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Pahewan Kalaru.
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi: Kawasan Strategis DAS Terpadu; Taman Nasiorial Bukit Baka Bukit Raya; dan Taman Nasiorial Sebangau.
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi, meliputi: Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi kabupaten; dan Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut kabupaten.

Kawasan strategis kabupaten, meliputi:

- a. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi;
- b. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya;
- c. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan; dan
- d. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.

Selain arah kebijakan pengembangan kewilayahan yang telah diuraikan diatas, arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Katingan 2024-2026 juga perpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026. Pembangunan kewilayahan menjadi fokus pembangunan/prioritas dengan mengembangkan potensi daerah berdasarkan komoditi ataupun keunggulan



daerah. Untuk itu skenario rencana pembangunan Kabupaten Katingan pada tahun 2024-2026 berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan) yang berdasarkan kepada rencana pembangunan wilayah pengembangan diuraikan sebagai berikut:

6.3.1. Pembangunan Wilayah Pengembangan Sektor Pertanian dan Pengembangan Komoditi Unggulan

Berdasarkan kajian terhadap potensi lahan pertanian dengan mempertimbangkan indikator luas pertanaman, penyerapan tenaga kerja, trend produksi dan sumbangsih ekonomi keluarga petani di Kabupaten Katingan diperoleh tiga komoditas utama yang akan dikembangkan, yaitu padi, durian dan pisang, sedangkan tanaman cabai menjadi salah satu komoditi utama dikarenakan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Pengembangan keempat komoditi ini tersebar pada 3 zona/wilayah di Kabupaten Katingan, yaitu Zona Utara, Zona tengah dan Zona Selatan Kabupaten Katingan. Adapun Zona Utara meliputi Kecamatan Sanaman Mantikei, Marikit, Katingan Hulu, Petak Malai dan Bukit Raya; Zona Tengah meliputi Kecamatan Katingan Hilir, Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan dan Katingan Tengah; sedangkan Zona Selatan meliputi Kecamatan Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala. Selain komoditi utama tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan berencana pula mengembangkan komoditi jagung dan bawang merah yang dikonsentrasikan pada wilayah/zona tengah dan selatan yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan masyarakat akan 2 komoditi ini sekaligus untuk menekan inflasi pada kedua wilayah tersebut.

Pertanian tanaman pangan bagi petani di Zona Utara dan Tengah lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan subsistensi pangan dan masih dilakukan setahun sekali. Kondisi ini sangat berbeda dengan Zona Selatan yang sebagian sudah melakukan sistem pertanian padi sawah yang intensif dengan tujuan untuk dijual. Potensi pertanian hortikultura sangat besar di Kabupaten Katingan meskipun sampai saat ini baru komoditas durian dan pisang yang menjadi unggulan daerah. Petani yang membudidayakan jenis komoditas hortikultura yang lain terutama sayur mayur masih sangat terbatas. Tanaman hortikultura sejauh ini merupakan tanaman komersial yang banyak diusahakan oleh petani transmigran atau pendatang. Karena itu ke depan potensi pengembangan komoditas ini masih sangat terbuka.

Berikut rencana pengembangan komoditi unggulan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Katingan berbasis kewilayahan.

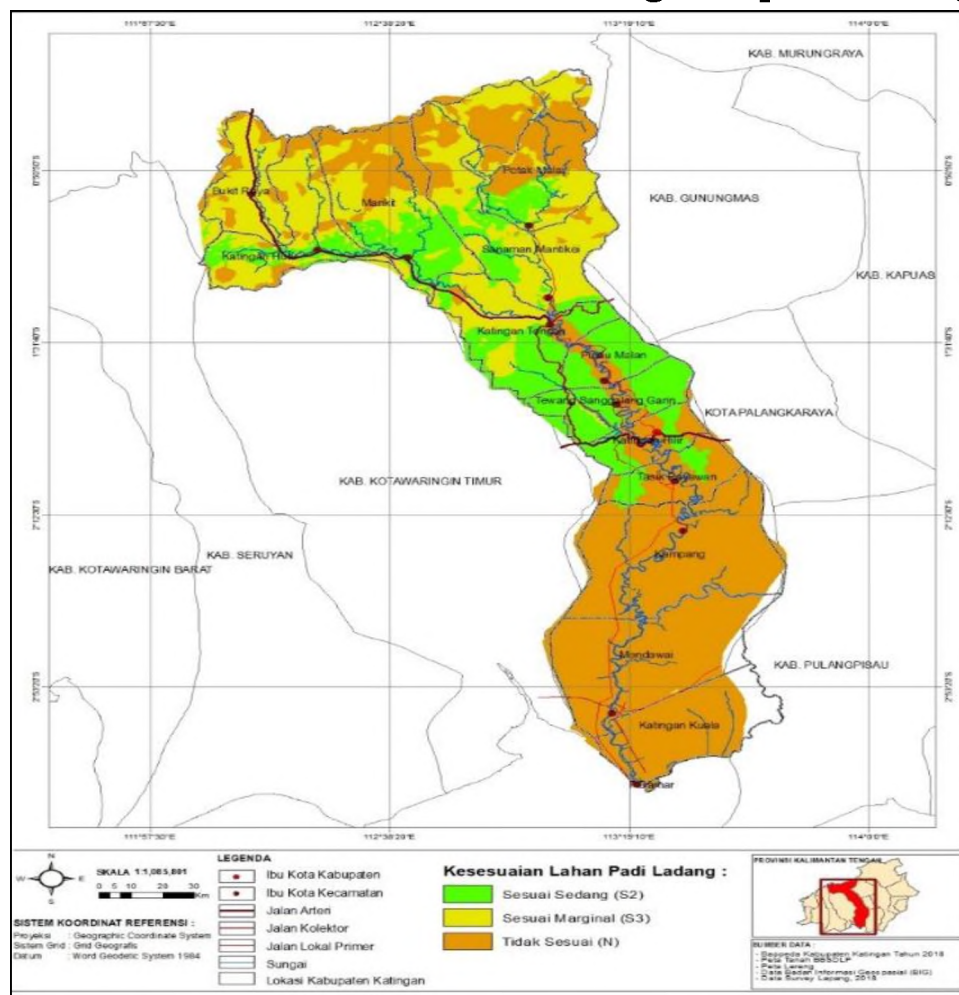
A. Padi

Kabupaten Katingan memiliki potensi padi sawah/rawa dan padi ladang yang masih dapat terus dikembangkan. Komoditi padi di Kabupaten Katingan diusahakan pada beberapa tipe lahan meliputi sawah/rawa dan ladang (lahan kering). Pengembangan padi sawah dipusatkan pada zona yang memiliki ketersediaan lahan sawah/rawa yang potensial diolah untuk meningkatkan produktivitas padi di Kabupaten Katingan.



Beberapa jenis padi ladang memiliki rasa yang khas dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pengembangan padi ladang dapat dilakukan dengan melakukan eksplorasi dan pendaftaran pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia terhadap padi ladang di sentra-sentra produksi agar diperoleh varietas lokal yang unggul dan layak untuk dikembangkan. Sampai saat ini, sudah ada tujuh varietas lokal padi di Kabupaten Katingan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu varietas Babilem Hai, Babilem Kurik, Sirandah, Hiup, Jaragan Mayang, Jaragan Baputi dan Pudak.

Gambar 6.2
Peta Kelas Kesesuaian Lahan Padi Ladang Kabupaten Katingan



Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018

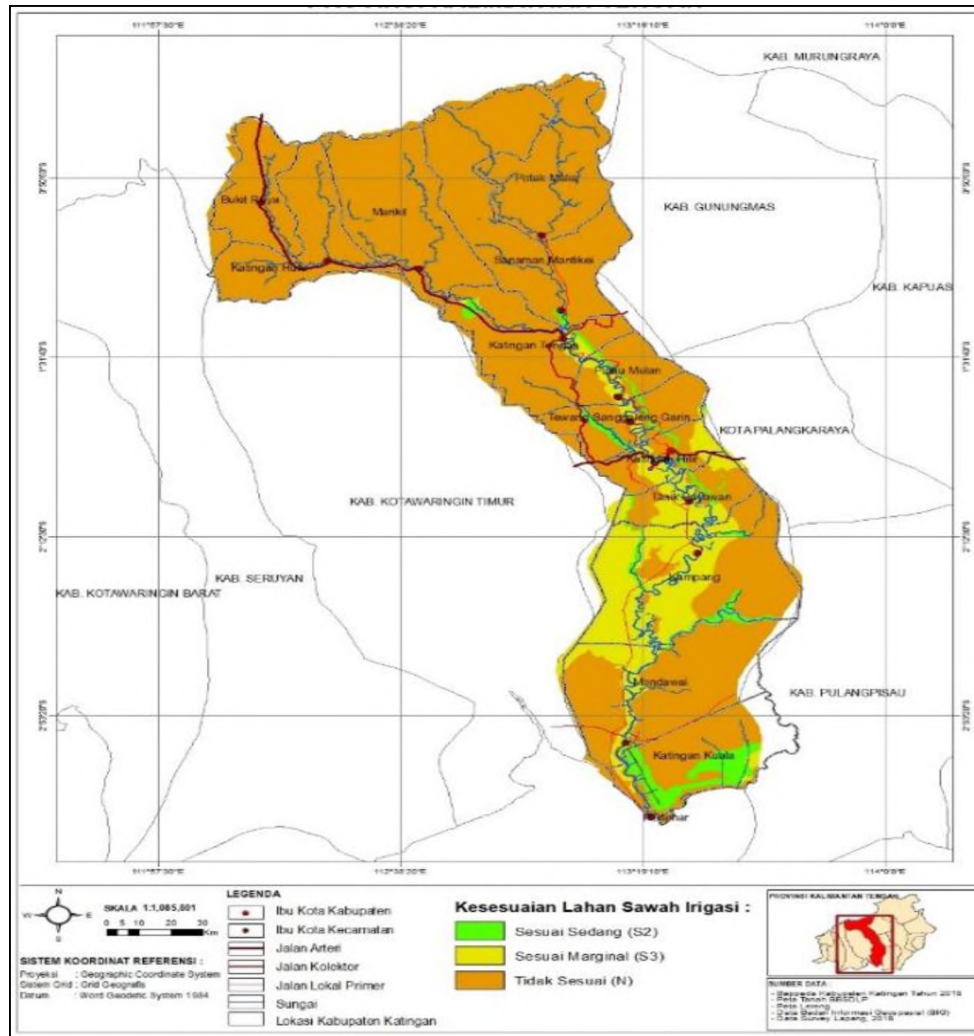
Berdasarkan kajian kesesuaian lahan jenis tanah, lereng dan curah hujan), daerah di Kabupaten Katingan yang memiliki potensi dan dikembangkan sebagai lahan padi ladang berada pada zona tengah dan zona utara dengan dominasi potensi tertinggi berada pada zona tengah yaitu Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan dan Katingan Tengah.

Untuk padi sawah, daerah yang berpotensi akan dikembangkan dan memiliki lahan sawah irigasi berada pada zona selatan dan sebagian kecamatan yang berada di zona tengah Kabupaten Katingan, dengan dominasi potensi tertinggi berada pada zona selatan yaitu Kecamatan Katingan Kuala, sedangkan untuk zona tengah dikembangkan untuk irigasi sederhana. Khusus zona tengah,



pada tahun 2019 dibangun Bendung Sungai Manten yang diharapkan dapat mengalir areal sawah seluas ± 3.000 ha, meliputi Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing.

Gambar 6.3
Peta Kelas Kesesuaian Lahan Sawah Irigasi Kabupaten Katingan



Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018

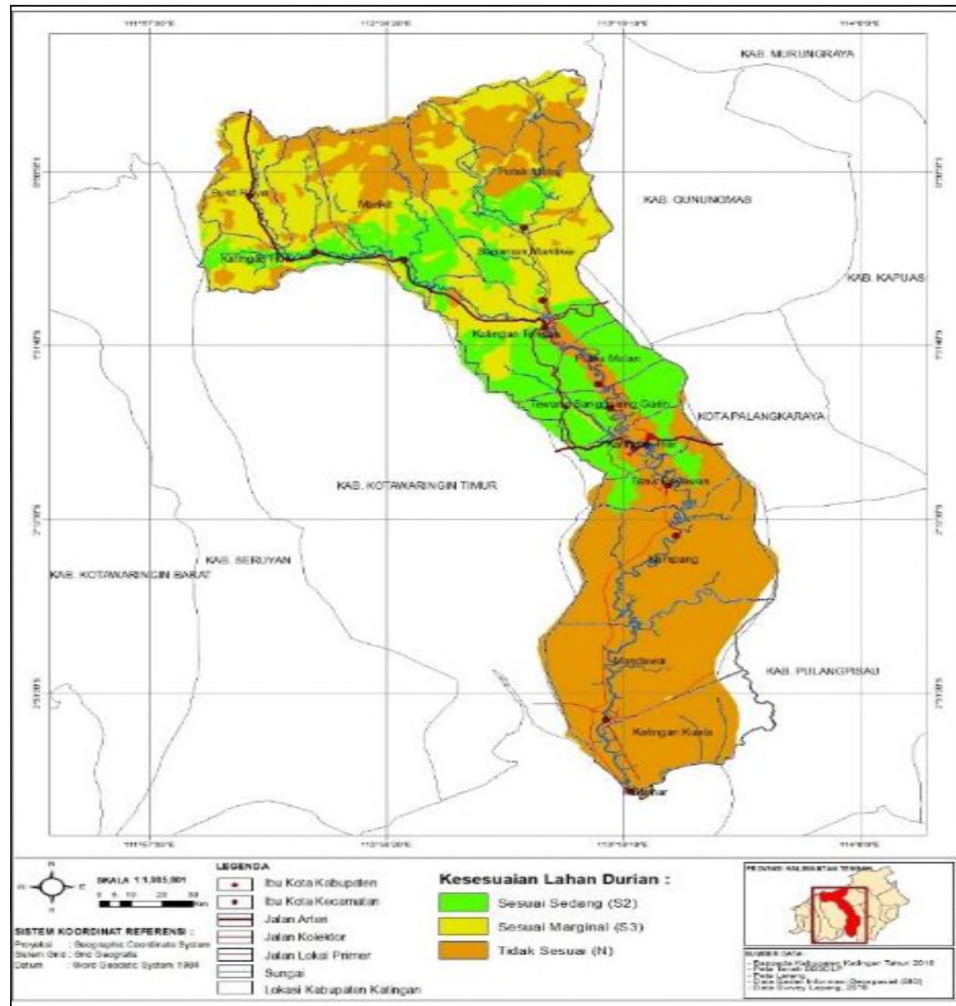
B. Durian

Durian Katingan adalah jenis buah musiman yang memiliki banyak varian dan memiliki citra khas yang membedakan dengan varian jenis durian lain yang tumbuh di wilayah Kalimantan. Durian dari Katingan saat ini menjadi salah satu komoditi unggulan buah-buahan yang sudah dikenal bahkan sampai keluar pulau Kalimantan.

Memperhatikan peluang ini, Pemerintah Kabupaten Katingan dalam lima tahun ke depan berencana akan meningkatkan nilai tambah dan mengembangkan jenis durian unggul dari bibit lokal sebagai upaya regenerasi tanaman agar produksi durian dari Katingan tetap ada dan berkelanjutan. Jenis bibit yang akan dikembangkan adalah Undang, Lunek, Lagas, Undang Buyu, Koko, Kalasi, dan Gelapir, dengan wilayah pengembangan berada pada zona tengah dan zona utara Kabupaten Katingan, dengan dominasi potensi tertinggi berada pada zona tengah yaitu Kecamatan Tewang Sangalang Garing.



Gambar 6.4
Peta Kelas Kesesuaian Lahan Durian Kabupaten Katingan



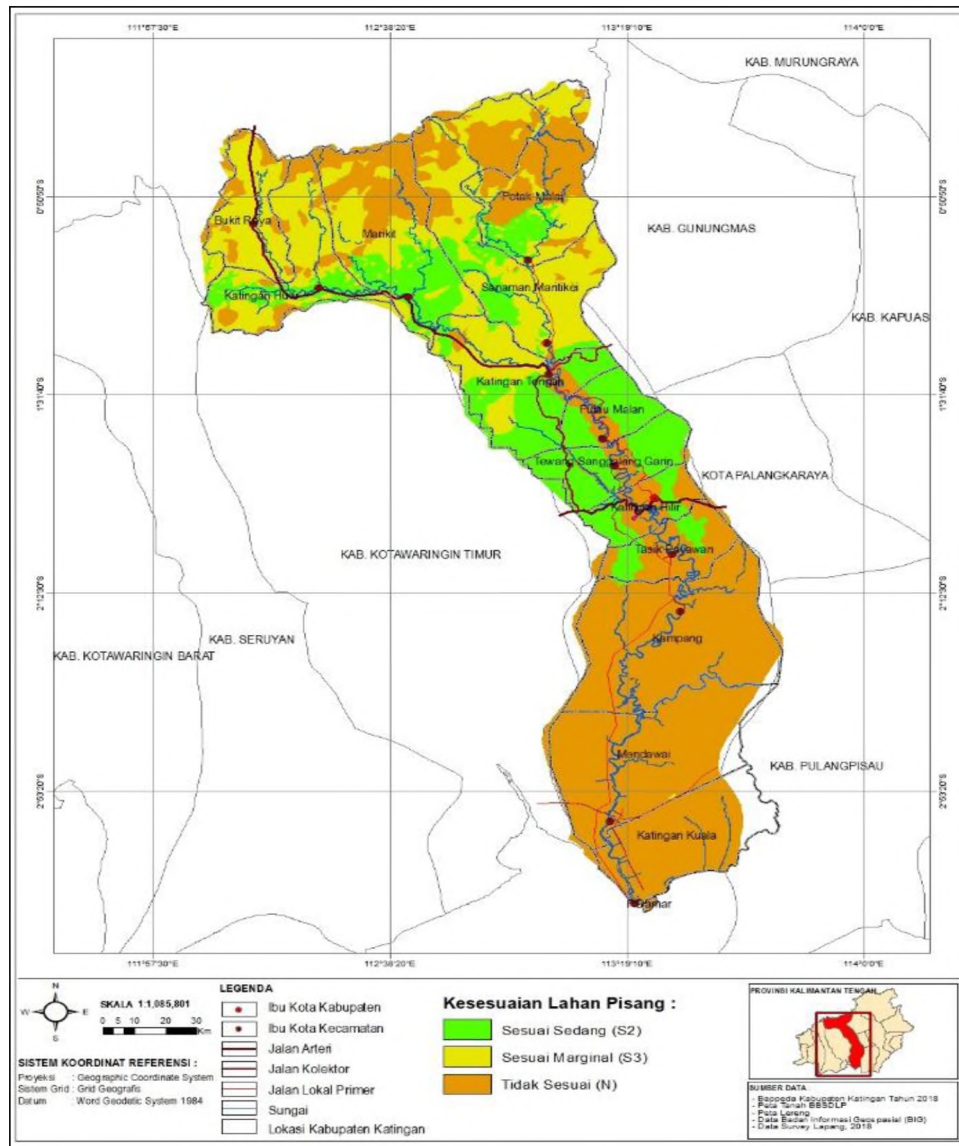
Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018

C. Pisang

Komoditi pisang saat ini juga menjadi salah satu produk unggulan masyarakat Katingan. Hanya saja yang dimanfaatkan masih pada buah segar, dan belum berkembang sampai pada produk olahan dan industri skala kecil dan menengah. Komoditi ini juga akan menjadi salah satu produk daerah yang akan dikembangkan kedepan, terutama nilai tambah dan produk olahannya. Daerah yang memiliki potensi terbesar untuk pengembangan komoditi pisang berada di zona tengah dan zona utara Kabupaten Katingan, dengan dominasi potensi tertinggi berada pada Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan.



Gambar 6.5
Peta Kelas Kesesuaian Lahan Pisang Kabupaten Katingan



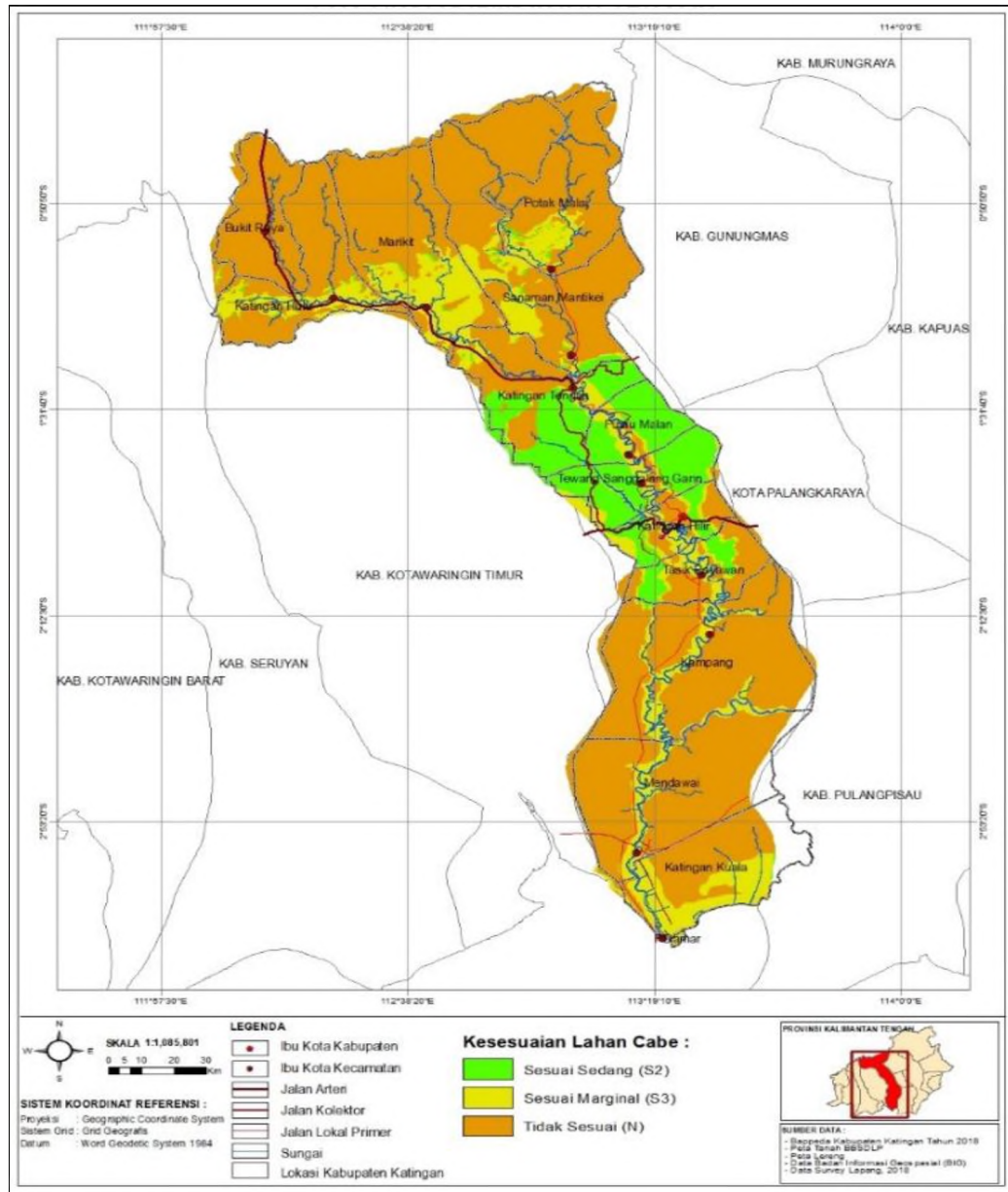
Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018

D. Cabai

Daerah yang akan dikembangkan dan memiliki potensi terbesar untuk lahan cabai berada pada zona tengah dan selatan Kabupaten Katingan, dengan dominasi potensi tertinggi berada zona tengah yaitu pada Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Katingan Hilir.



Gambar 6.6
Peta Kelas Kesesuaian Lahan Cabai Kabupaten Katingan



Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018

E. Jagung

Pemerintah Kabupaten Katingan berencana mengembangkan pertanian jagung sebagai salah satu komoditi unggulan baru di Kabupaten Katingan, hal ini dilakukan untuk mendukung program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang sedang berupaya mewujudkan swasembada jagung melalui peningkatan produksi jagung secara berkelanjutan. Produksi jagung di Kabupaten Katingan mengalami peningkatan produksi dalam dua tahun terakhir. Tahun 2017 luas tanam jagung 1.732 hektar yang terdiri dari 1.597 hektar merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dan 135 hektar milik swadaya masyarakat, luas panen jagung pipilan 48 hektar dengan produksi 133 ton. Sedangkan pada tahun 2018 luas tanam 1.129 hektar yang terdiri dari bantuan Pemerintah Pusat seluas 987 hektar dan 142 hektar milik swadaya masyarakat, luas panen



(jagung pipilan) 146 hektar dengan produksi 973 ton, selebihnya dipanen muda (untuk sayuran). Dalam 5 tahun kedepan, pengembangan tanaman jagung di Kabupaten Katingan akan diarahkan pada zona tengah dan selatan.

F. Bawang Merah

Selain jagung, komoditi bawang merah juga menjadi komoditi unggulan baru di Kabupaten Katingan. Pemilihan komoditi ini untuk menekan inflasi terhadap komoditi tersebut pada wilayah pedalaman Katingan dan kebutuhan saat hari raya tertentu yang permintaannya bisa melonjak. Tahun 2018, telah dilakukan penanaman (Luas Tambah Tanam) seluas 3 hektar di Kecamatan Katingan Hilir dengan produktivitas sebesar 3 ton/hektar dan produksi sebesar 9 ton, sedangkan tahun 2019 akan dilakukan pengembangan pada kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan. Dalam 5 tahun kedepan, pengembangan tanaman bawang merah di Kabupaten Katingan akan diarahkan pada zona tengah dan selatan.

Untuk mendukung pengembangan beberapa komoditi ini, Pemerintah Daerah berencana mengembangkan kawasan-kawasan agrowisata di Kabupaten Katingan, dengan memadukan variasi komoditi-komoditi unggulan dan komoditi non unggulan yang merupakan buah lokal, yakni langsung/tanggu madu dan nangkadak (nangka cempedak).

6.3.2. Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan untuk Mendukung Kegiatan Pertanian, Industri dan Pariwisata

A. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pengembangan Infrastruktur terutama jalan dan jembatan masih merupakan salah prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan. Selain untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, rencana pengembangan infrastruktur juga akan difokuskan pada daerah-daerah yang menjadi pusat pengembangan pertanian, perindustrian dan pariwisata.

Tujuan Pemerintah Kabupaten Katingan melanjutkan kebijakan ini guna tercapainya aksesibilitas angkutan barang, orang/tenaga kerja/jasa yang memadai, yakni hasil produksi pertanian, barang kebutuhan rumah tangga dan industri, pengangkutan material konstruksi, serta pariwisata sehingga secara umum memacu pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat Kabupaten Katingan yang Bermartabat.

Pengembangan infrastruktur jalan di Kabupaten Katingan yang diprioritaskan antara lain meliputi:

1. Pembangunan ruas jalan Mendawai sampai ke Pelabuhan Laut Bajungkal (Sei Kaki) dimana jalan ini direncanakan melewati kawasan industri dan kawasan Agropolitan.
2. Pembangunan Ruas Jalan Kereng Pangi-Baun Bango–Kampung Keramat-Pagatan, sekaligus akses untuk menuju obyek wisata Punggualas yang berada di jalan masuk Taman Nasional Sebangau di Desa Keruing.
3. Pembangunan trase jalan Tumbang Sanamang sampai batas dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.



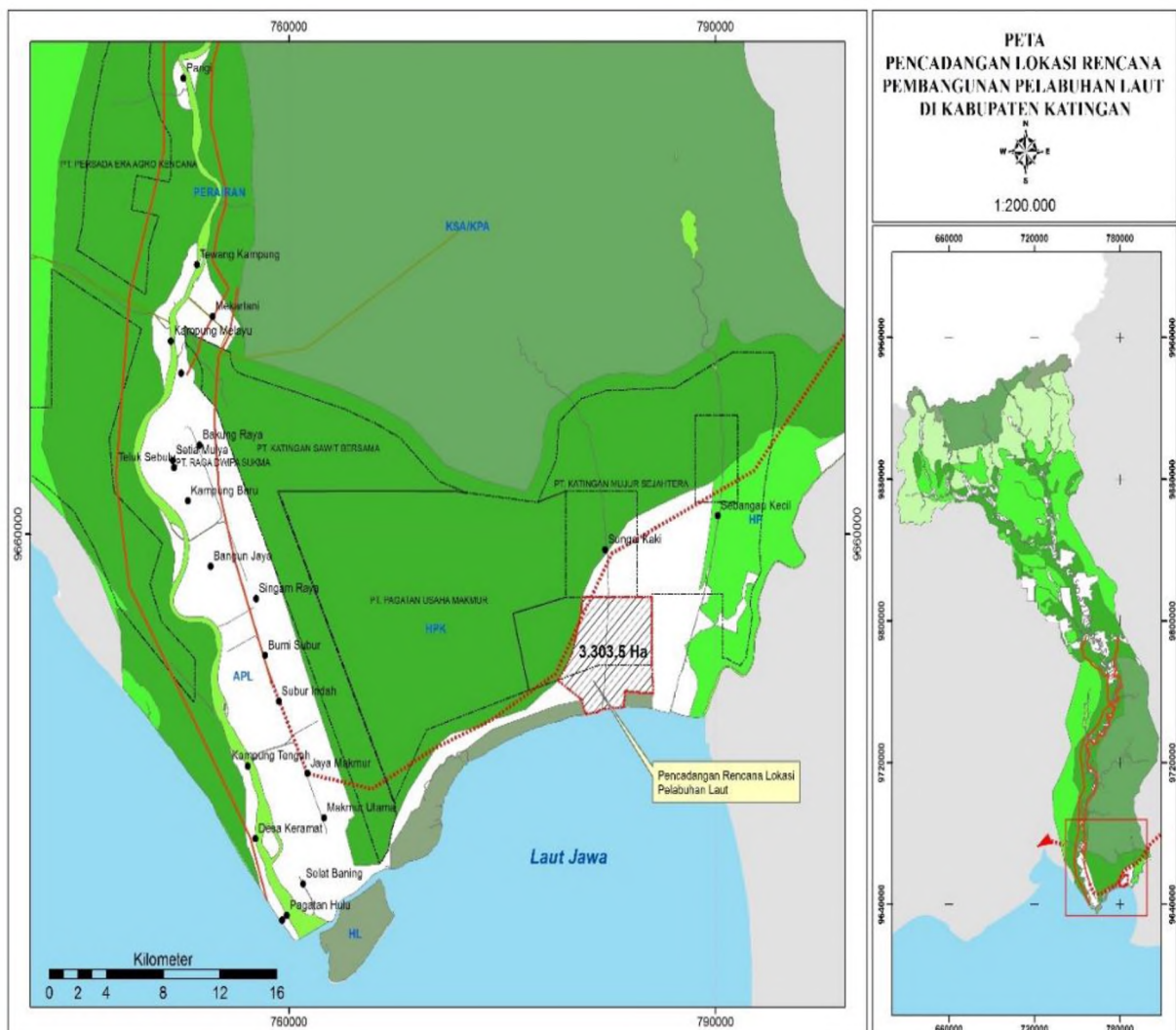
4. Peningkatan Jalan Mendawai – Katingan I – Katingan II, jalan ini merupakan jalan Poros/Penghubung Desa sekaligus Jalan yang berada pada Kawasan Agropolitan dan Pertanian serta Industri Pertanian dan Gudang Bulog.
5. Pembangunan Jalan Telangkah – Tumbang Samba, jalan ini berada pada di sebelah kiri mudik sungai Katingan yang menghubungkan desa-desa dan kawasan-kawasan pertanian.

Selain itu, sedang dibangun melalui kerjasama antar pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintahan Kabupaten Katingan dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringan Timur trase jalan penghubung antar kabupaten yaitu Trase Jalan Pegatan-Kampung Melayu-batas Kotawaringin Timur.

B. Pembangunan Pelabuhan

Kabupaten Katingan dalam perkembangannya lebih diarahkan sebagai wilayah dengan fungsi utama regional dan menjadi outlet ekonomi dan produksi yang diharapkan dapat melayani Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya dan Kota Palangkaraya.

Gambar 6.7
Rencana Pencadangan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Laut



Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Tengah



Sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah pengembangan kawasan juga didukung dengan pengembangan transportasi laut berupa pelabuhan pengumpan yaitu Pelabuhan Pegatan-Mendawai serta pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kecamatan Katingan Kuala. Pada saat ini baik Pemerintah Kabupaten maupun melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya mendorong Pemerintah Pusat untuk mengembangkan Pelabuhan Pegatan-Mendawai di wilayah tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Katingan memantapkan pencadangan kawasan pengembangan Pelabuhan Mendawai-Pegatan (Pelabuhan Bajungkal) di daerah Sei Kaki. Pencadangan rencana lokasi pelabuhan laut dicadangkan seluas 3.303,5 Ha sepenuhnya pada kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL) berdasarkan RTRW Provinsi perda Nomor 5 tahun 2015 dan Perda RTRW Kabupaten Katingan.

C. Pembangunan Jaringan Irigasi

Kabupaten Katingan mempunyai potensi Bidang Pertanian tanaman pangan, sehingga untuk rencana lima tahun kedepan fokus pemeliharaan jaringan irigasi yang diarahkan pada Daerah Irigasi Rawa (DIR) melalui pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Adapun jumlah Daerah Irigasi Rawa (DIR) yang dikelola adalah 46 DIR dengan Luas Baku 18.482 Ha, Luas Potensial 10.946 Ha dan Luas Fungsional 3.344 Ha, tersebar hampir diseluruh kecamatan.

Di Kabupaten Katingan juga terdapat beberapa Daerah Irigasi Rawa (DIR) yang menjadi kewenangan provinsi yaitu Luasan 1.000 Ha – 3.000 Ha dan kewenangan pusat luasan lebih dari 3.000 Ha, tersebar di 5 kecamatan yang potensial dan fungsional dikembangkan, yakni Kecamatan Katingan Kuala, Mendawai, Kamipang, Tasik Payawan dan Tewang Sanggalang Garing.

Kabupaten Katingan juga mengupayakan Pembangunan Irigasi Permukaan dalam hal ini Irigasi Teknis dengan rencana pembangunan Bendung Manten di desa Tewang Manyangen Kecamatan Tewang Sangalang Garing, dengan harapan pola tanam dapat dilaksanakan menjadi 2 (dua) kali setahun, dengan adanya ketersediaan air untuk lahan sawah disekitarnya melalui Bendung Manten tersebut.

Kondisi Jaringan Irigasi masih perlu mendapat perhatian dengan perlu dilengkapi Bangunan dan Bangunan Pelengkap seperti: pintu air, tabat/drumple, gorong-gorong, jalan inspeksi dan jembatan serta infrastruktur lainnya. Selanjutnya guna menjaga kondisi Jaringan tetap dalam kondisi baik diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan.

Pengelolaan di Bidang Sumber Daya Air juga dilaksanakan Program Pengendalian Banjir, hal ini dilakukan melalui kegiatan Normalisasi Sungai dan Pengendalian genangan/banjir melalui pembangunan Kanal Pengendalian Banjir.

Kondisi sungai dan anak anak sungai yang ada masih sangat diperlukan dilakukannya Normalisasi dan Pemeliharaan guna membentuk profil sungai dengan daya tampung debit yang memadai dan juga tetap



dilakukan kegiatan yang perlu secara konsisten untuk mengatasi banjir, genangan dan limpasan air permukaan dengan sistem Kanal Pengendali Banjir khususnya mengatasi genangan di wilayah strategis seperti di Kota Kasongan.

6.3.3. Pengembangan Ekowisata pada Kawasan Punggualas Taman Nasional Sebangau untuk Kegiatan Pariwisata berbasis Alam

Sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah terkait pengembangan obyek-obyek pariwisata, dimana salah satu lokasi yang secara bersama-sama akan dikembangkan dengan Pemerintah Kabupaten Katingan adalah Kawasan Ekowisata Punggualas yang merupakan kawasan pelestarian ekosistem hutan rawa gambut dan menjadi habitat orang utan liar, hewan dan tumbuhan endemik lainnya.

Lokasi ini berada di Kecamatan Kamipang dan menjadi bagian dari Taman Nasional Sebangau. Dalam lima tahun kedepan kawasan ini didorong menjadi lokasi kawasan wisata yang akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perdesaan meliputi Desa Baun Bango, Jahanjang, Keruing dan Muara Bulan. Untuk mendukung pengembangan kawasan ini, pemerintah daerah akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukungnya untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas menuju lokasi
- Meningkatkan kegiatan promosi wisata daerah
- Pengembangan dan penguatan kelembagaan pariwisata daerah
- Meningkatkan pemberdayaan dan pengetahuan masyarakat sekitar tentang konsep ekowisata dan konservasi cagar budaya
- Secara intens membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait, Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk dukungan pendanaan dan pengembangannya.

Untuk kawasan lain yang saat ini sudah berkembang seperti obyek wisata Bukit Batu (Kasongan), Danau Bulat (Jahanjang). Riam Mangkikit (Tumbang Kalemei) dan obyek wisata lain ditambah dengan beberapa situs/cagar budaya, bangunan dan atraksi budaya lokal akan tetap dikembangkan secara bersama-sama dalam beberapa paket wisata daerah. Kedepannya pengembangan wisata daerah dan kebijakannya secara khusus akan dirumuskan lebih lanjut dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Wisata Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2024.

6.3.4. Pengembangan Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara,

Katingan memiliki lahan dan kawasan hutan yang masih luas yang bila dikelola secara produktif dan berkelanjutan akan meningkatkan nilai ekonomi yang tinggi. Rencana penyediaan lahan untuk mendukung rencana pengembangan kawasan strategis di Kalimantan Tengah menjadi salah satu dasar yang melatarbelakangi rencana pengembangan pusat produksi perfilman di Asia Tenggara. Kebijakan ketataruangan Kabupaten Katingan sebagaimana termuat dalam Perda RTRW Kabupaten Katingan, kawasan ini akan dikembangkan menjadi kawasan strategis yang berada di Kecamatan Pulau Malan dan Tewang Sangalang Garing.

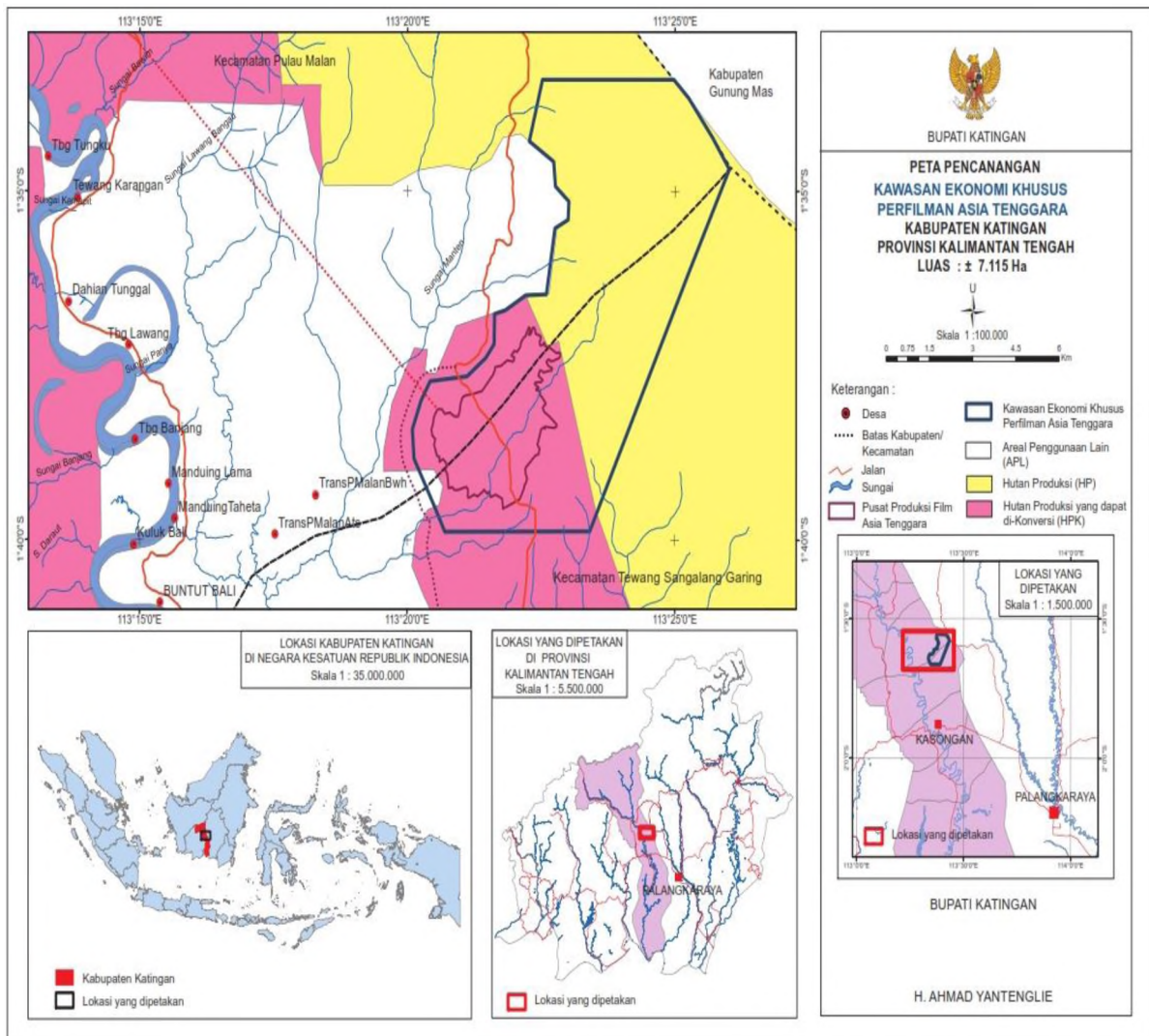


Keuntungan yang didapat oleh Kabupaten Katingan dengan adanya Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara secara sosial ekonomi adalah peningkatan status sosial ekonomi Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah secara umum di Asia Tenggara karena lokasi ini akan menjadi pusat perfilman, wisata sekaligus konservasi alam yang terbesar di Asia Tenggara.

Warga Kalimantan Tengah bisa menikmati aneka rumah tradisional Indonesia yang akan dibangun sebagai sarana shooting film. Selain itu Rumah Betang dan Rumah adat berbagai suku khas Kalteng akan menjadi terkenal seiring banyaknya wisatawan yang berkunjung. Bahkan bangunan-bangunan bercirikan mancanegara serta bangunan modern sesuai kebutuhan akan dibangun menjadi fasilitas utama.

Lebih jauh bila Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura ataupun negara lain memproduksi film mereka di sini maka bangunan tradisional khas negara mereka tidak akan dibongkar, sehingga bisa menjadi obyek wisata bagi Kalteng dan wisatawan yang berkunjung. Kawasan ini diharapkan akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Berikut ini disajikan peta lokasi perfilman Asia Tenggara di Kabupaten Katingan:

Gambar 6.8
Peta Lokasi Rencana Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah





BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah selama 3 (tiga) tahun, mulai 2024 sampai dengan tahun 2026. Kerangka pendanaan pembangunan akan memberikan gambaran besaran alokasi Belanja Daerah. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Program-program tersebut merupakan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta unsur lainnya dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah sesuai kewenangan kabupaten.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan demikian, program perangkat daerah dalam pembangunan daerah Kabupaten Katingan merupakan program yang akan dilaksanakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perwujudan tujuan dan sasaran daerah pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 dan 2026

	URAIAN	APBD TA. 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026	Rata2 Pertumbuhan
4	PENDAPATAN DAERAH	1.358.834.240.584	1.415.743.600.491	1.474.162.472.501	1.538.945.721.951	4,24%
1.4.1	Pendapatan Asli Daerah	112.200.485.800	114.444.495.516	116.733.365.426	119.068.053.135	2,00%
4.1.01	Pajak Daerah	51.674.929.702	52.708.428.296	53.762.596.862	54.837.848.799	2,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	7.123.068.218	7.265.529.582	7.410.840.174	7.559.056.977	2,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.192.215.980	20.596.060.300	21.007.981.506	21.428.141.136	2,00%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.210.271.900	33.874.477.338	34.551.966.865	35.243.006.222	2,00%
2.4.2	Pendapatan Transfer	1.246.633.754.784	1.301.299.104.975	1.357.429.087.075	1.419.877.668.816	4,43%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.217.969.250.000	1.272.534.600.191	1.328.664.582.291	1.391.113.164.032	4,53%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.087.093.106.000	1.100.086.007.280	1.154.491.503.450	1.215.198.354.403	3,80%
4.2.01.01.01	- Dana Transfer Umum (DBH+DAU)	810.766.102.000	823.759.003.280	878.164.499.450	938.871.350.403	5,04%
4.2.01.01.03	- Dana Transfer Khusus (DAK F+DAK NF)	276.327.004.000	276.327.004.000	276.327.004.000	276.327.004.000	0,00%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	#DIV/0!
4.2.01.05	Dana Desa	130.776.144.000	172.448.592.911	174.173.078.840	175.914.809.629	11,29%
4.2.02	Transfer Antar Daerah	28.764.504.784	28.764.504.784	28.764.504.784	28.764.504.784	0,00%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	28.764.504.784	28.764.504.784	28.764.504.784	28.764.504.784	0,00%
	Bantuan Keuangan.	0	0	0	0	#DIV/0!
3.4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	0	#DIV/0!
4.3.01	Hibah	0	0	0	0	#DIV/0!
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	0	#DIV/0!
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	#DIV/0!



	URAIAN	APBD TA. 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
5	BELANJA DAERAH	1,535,575,584,258	1,508,354,891,387	1,557,326,540,441	1,617,506,314,378
1. 5.1	Belanja Operasi	966,537,973,240	933,488,759,665	905,919,953,895	922,710,232,732
5.1.01	Belanja Pegawai	506,725,634,652	519,393,775,518	532,378,619,906	545,688,085,404
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385,619,910,667	344,634,984,147	348,081,333,988	351,562,147,328
5.1.04	Belanja Subsidi	1,460,000,000	1,460,000,000	1,460,000,000	1,460,000,000
5.1.05	Belanja Hibah	71,740,762,762	65,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	991,665,159	3,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
2. 5.2	Belanja Modal	342,441,164,094	246,961,923,358	321,581,539,128	363,030,986,782
3. 5.3	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000
4. 5.4	Belanja Transfer	216,596,446,924	277,904,208,364	279,825,047,418	281,765,094,863
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4,498,692,724	4,498,692,724	4,498,692,724	4,498,692,724
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	212,097,754,200	273,405,515,640	275,326,354,694	277,266,402,139

	URAIAN	APBD TA. 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026	Rata2 Pertumbuhan
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
1. 6.1	Penerimaan Pembiayaan	191.620.343.674	107.490.290.896	98.043.067.940	93.439.592.426	-19,13%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	191.620.343.674	107.490.290.896	98.043.067.940	93.439.592.426	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	
2. 6.2	Pengeluaran Pembiayaan	14.879.000.000	14.879.000.000	14.879.000.000	14.879.000.000	0,00%
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.879.000.000	14.879.000.000	14.879.000.000	14.879.000.000	0,00%
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	
	PEMBIAYAAN NETTO	176.741.343.674	92.611.290.896	83.164.067.940	78.560.592.426	-21,11%
3. 6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0	

Selanjutnya, pada **Lampiran Bab VII Tabel 7.2** disajikan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan. Rencana Program Perangkat Daerah dan Pagu Indikatifnya yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 3 (tiga) tahunan mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun dan sub kegiatan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.



TABEL 7.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
TAHUN 2024-2026

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Tahun Periode 2024 s/d 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			91.477.989.995		95.807.389.079		106.956.792.583		294.242.171.657		
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	91.39 Persen	65.50 Persen	37.475.253.892	65.75 Persen	41.275.253.890	65.90 Persen	43.825.253.890	65.90 Persen	122.575.761.672	Dinas Pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100.39 Persen	73 Persen	9.938.837.438	75 Persen	9.938.837.438	77 Persen	9.938.837.438	77 Persen	29.816.512.314	Dinas Pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	102.44 Persen	91.12 Persen	40.819.543.665	91.82 Persen	41.348.942.751	92 Persen	49.948.346.255	92 Persen	132.116.832.671	Dinas Pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	N/A Persen	7 Persen	2.332.600.000	9 Persen	2.332.600.000	11 Persen	2.332.600.000	11 Persen	6.997.800.000	Dinas Pendidikan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pengembangan kurikulum yang dilakukan di Satuan Pendidikan	N/A Persen	83.80 Persen	463.040.000	83.88 Persen	463.040.000	84.05 Persen	463.040.000	84.05 Persen	1.389.120.000	Dinas Pendidikan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan	N/A Persen	75.03 Persen	121.500.000	75.05 Persen	121.500.000	75.07 Persen	121.500.000	75.07 Persen	364.500.000	Dinas Pendidikan
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase kualitas pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra	N/A Persen	33.33 Persen	327.215.000	33.50 Persen	327.215.000	33.66 Persen	327.215.000	33.66 Persen	981.645.000	Dinas Pendidikan
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			137.066.427.823		161.765.203.048		170.767.236.456		469.598.867.327		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Puskesmas	N/A Persen	90 Persen	113.859.995.273	95 Persen	138.090.183.248	100 Persen	146.436.278.956	100 Persen	398.386.457.477	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita	N/A Persen	100 Persen	100.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	350.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan	N/A Persen	100 Persen	825.161.000	100 Persen	866.400.000	100 Persen	909.740.000	100 Persen	2.601.301.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	N/A Persen	100 Persen	100.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	350.000.000	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pelayanan	N/A Persen	100 Persen	995.725.550	100 Persen	1.045.511.800	100 Persen	1.097.787.000	100 Persen	3.139.024.350	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	N/A Persen	100 Persen	2.538.000.000	100 Persen	2.398.000.000	100 Persen	2.443.500.000	100 Persen	7.379.500.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan	N/A Persen	90 Persen	0	95 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	N/A Persen	100 Persen	316.400.000	100 Persen	332.220.000	100 Persen	348.831.000	100 Persen	997.451.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	N/A Persen	100 Persen	328.976.000	100 Persen	328.976.000	100 Persen	365.874.000	100 Persen	1.023.826.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	N/A Persen	100 Persen	440.150.000	100 Persen	440.150.000	100 Persen	485.264.500	100 Persen	1.365.564.500	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	N/A Persen	100 Persen	100.000.000	100 Persen	82.687.500	100 Persen	100.000.000	100 Persen	282.687.500	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	N/A Persen	100 Persen	100.000.000	100 Persen	82.687.500	100 Persen	100.000.000	100 Persen	282.687.500	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/A Persen	100 Persen	202.000.000	100 Persen	212.100.000	100 Persen	222.705.000	100 Persen	636.805.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan	N/A Persen	100 Persen	293.750.000	100 Persen	308.437.500	100 Persen	323.858.000	100 Persen	926.045.500	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	N/A Persen	16 Persen	3.970.000.000	14 Persen	3.970.000.000	12 Persen	4.069.425.000	12 Persen	12.009.425.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	N/A Persen	7,3 Persen	0	7 Persen	0	6,5 Persen	0	6,5 Persen	0	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	99 Persen	95 Persen	10.669.680.000	95 Persen	10.669.680.000	97 Persen	10.712.441.000	97 Persen	32.051.801.000	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian Yang memenuhi Standar	69 Persen	90 Persen	968.000.000	95 Persen	1.416.650.000	98 Persen	1.487.487.500	98 Persen	3.872.137.500	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proposi Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	34 Persen	93 Persen	1.258.590.000	97 Persen	1.321.519.500	97 Persen	1.364.044.500	97 Persen	3.944.154.000	Dinas Kesehatan
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			120.790.491.254		127.678.529.586		128.078.649.359		376.547.670.199		
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase lahan yang terlayani jaringan irigasi (%)	77,15 Persen	78 Persen	12.033.257.400	79 Persen	12.634.920.270	80 Persen	13.266.666.283	80 Persen	37.934.843.953	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Air Minum yang aman	72,60 Persen	72,60 Persen	350.040.000	72,80 Persen	367.500.000	73 Persen	385.875.000	73 Persen	1.103.415.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/	N/A Rumah Tangga	1000 Rumah Tangga	1.000.000.000	1000 Rumah Tangga	1.534.094.500	1000 Rumah Tangga	1.634.999.225	1000 Rumah Tangga	4.169.093.725	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	N/A Persen	2,78 Persen	210.040.000	2,90 Persen	242.042.000	3,02 Persen	266.244.100	3,02 Persen	718.326.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	N/A Persen	50 Persen	1.920.870.000	75 Persen	2.016.913.500	100 Persen	2.117.759.175	100 Persen	6.055.542.675	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase jalan desa yang dibangun	N/A Persen	60 Persen	1.900.010.000	70 Persen	1.995.010.500	80 Persen	2.094.761.025	80 Persen	5.989.781.525	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang terbangun	N/A Unit	5 Unit	5.588.312.000	5 Unit	4.333.633.100	5 Unit	4.526.114.755	5 Unit	14.448.059.855	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jalan Lingkungan Perumahan dalam kondisi baik	N/A Persen	80 Persen	265.608.000	80 Persen	278.888.400	80 Persen	292.832.820	80 Persen	837.329.220	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	36,60 Persen	43,03 Persen	92.377.355.205	45,54 Persen	98.873.278.735	48,03 Persen	97.821.035.967	48,03 Persen	289.071.669.907	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Mantap	N/A Persen	75,31 Persen	0	77,78 Persen	0	80,25 Persen	0	80,25 Persen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100 Persen	100 Persen	692.610.149	100 Persen	727.240.656	100 Persen	763.602.688	100 Persen	2.183.453.493	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Pola pola ruang	N/A Dokumen	80 Dokumen	4.452.388.500	80 Dokumen	4.675.007.925	80 Dokumen	4.908.758.321	80 Dokumen	14.036.154.746	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			12.672.763.646		15.473.600.664		15.901.819.166		44.048.183.476		
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Mendapat Bantuan SPM Perumahan Rakyat	12,83 Persen	12,83 Persen	500.000.000	43,73 Persen	500.000.000	68,30 Persen	500.000.000	68,30 Persen	1.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha yang ditangani	36 Persen	36 Persen	500.000.000	37 Persen	500.000.000	38 Persen	500.000.000	38 Persen	1.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Mendapat Bantuan (RTLH)	4,68 Persen	4,68 Persen	500.000.000	9,36 Persen	500.000.000	14,04 Persen	500.000.000	14,04 Persen	1.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase / Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	65 Persen	65 Persen	11.172.763.646	70 Persen	13.973.600.664	75 Persen	14.401.819.166	75 Persen	39.548.183.476	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			7.813.180.127		6.603.981.578		6.387.031.134		20.804.192.839		
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	85 Persen	100 Persen	1.627.248.127	100 Persen	1.857.210.000	100 Persen	2.339.175.599	100 Persen	5.823.633.726	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penanggulangan bencana daerah	100 Persen	100 Persen	3.785.932.000	100 Persen	2.596.771.578	100 Persen	2.747.855.535	100 Persen	9.130.559.113	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	15 Menit	15 Menit	2.400.000.000	15 Menit	2.150.000.000	15 Menit	1.300.000.000	15 Menit	5.850.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			2.216.910.000		2.510.630.200		2.667.172.664		7.394.712.864		
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang diberdayakan dalam peningkatan kesejahteraan sosial	65 Persen	70 Persen	246.700.000	75 Persen	300.974.000	80 Persen	346.120.100	80 Persen	893.794.100	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat penanganan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	75 Persen	80 Persen	1.200.000.000	85 Persen	1.270.000.000	90 Persen	1.302.000.000	90 Persen	3.772.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial	80 Persen	82 Persen	275.000.000	84 Persen	335.500.000	86 Persen	385.825.000	86 Persen	996.325.000	Dinas Sosial
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen	100 Persen	450.210.000	100 Persen	549.256.200	100 Persen	570.092.564	100 Persen	1.569.558.764	Dinas Sosial
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan TMP yang terpelihara	65 Persen	70 Persen	45.000.000	75 Persen	54.900.000	80 Persen	63.135.000	80 Persen	163.035.000	Dinas Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			1.218.046.281		1.622.483.972		1.763.898.241		4.604.428.494		
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga	65 Persen	65 Persen	83.097.294	70 Persen	90.022.069	75 Persen	146.946.844	75 Persen	320.066.207	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	60 Persen	60 Persen	242.952.645	64 Persen	302.296.978	67 Persen	311.641.310	67 Persen	856.890.933	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	15 Persen	15 Persen	566.000.000	20 Persen	865.357.871	25 Persen	904.692.321	25 Persen	2.336.050.192	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan di luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	55 Persen	55 325.996.342	60 Persen	60 364.807.054	65 Persen	65 400.617.766	65 Persen	65 1.091.421.162	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN										
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga yang melakukan PPRG (penyusunan anggaran responsif gender)	85 Persen	98 399.098.516	98 Persen	98 450.981.323	97 Persen	97 460.000.949	98 Persen	98 1.310.080.788	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan kualitas terhadap perlindungan perempuan	85 Persen	99 55.000.000	100 Persen	100 104.888.948	100 Persen	100 106.986.727	100 Persen	100 266.875.675	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan kualitas terhadap keluarga	85 Persen	99 110.000.000	100 Persen	100 124.300.000	100 Persen	100 126.789.000	100 Persen	100 361.089.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	85 Persen	99 106.928.800	100 Persen	100 120.829.544	100 Persen	100 123.246.135	100 Persen	100 351.004.479	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan Kabupaten Layak Anak	85 Persen	99 300.000.000	100 Persen	100 339.000.000	100 Persen	100 345.780.000	100 Persen	100 984.780.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	85 Persen	99 550.646.837	99 Persen	99 622.230.926	99 Persen	99 634.675.545	99 Persen	99 1.807.553.308	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	61 Persen	75 323.500.000	85 Persen	85 466.937.000	100 Persen	100 553.809.000	100 Persen	100 1.344.246.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan ragam pangan dan pangan olahan	30 Persen	40 Persen	450.000.000	44 Persen	500.000.000	48 Persen	600.000.000	50 Persen	1.550.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase pemenuhan data ketersediaan dan kerawanan pangan	50 Persen	50 Persen	94.500.000	55 Persen	97.500.000	65 Persen	107.500.000	65 Persen	299.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	60 Persen	70 Persen	85.000.000	80 Persen	125.000.000	90 Persen	125.000.000	100 Persen	335.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			1.388.960.423		1.387.780.232		1.421.460.191		4.198.200.846		
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Mediasi yang dilakukan Sengketa Tanah Garapan	100 Persen	100 Persen	205.562.000	100 Persen	205.387.364	100 Persen	210.371.899	100 Persen	621.321.263	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanian
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah	100 Persen	100 Persen	500.848.541	100 Persen	500.423.046	100 Persen	512.567.784	100 Persen	1.513.839.371	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanian
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100 Persen	100 Persen	207.549.882	100 Persen	207.373.358	100 Persen	212.406.090	100 Persen	627.329.330	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanian
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	60 Persen	60 Persen	475.000.000	80 Persen	474.596.464	100 Persen	486.114.418	100 Persen	1.435.710.882	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanian
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			10.430.000.000		7.871.840.000		7.971.640.000		26.273.480.000		
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	20 Persen	20 Persen	100.000.000	20 Persen	200.000.000	20 Persen	200.000.000	20 Persen	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan	100 Persen	100 Persen	4.010.000.000	100 Persen	1.010.000.000	100 Persen	1.010.000.000	100 Persen	6.030.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	2 Persen	2 Persen	1.380.000.000	2 Persen	1.348.000.000	2 Persen	1.388.000.000	2 Persen	4.116.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah	15 Persen	20 Persen	20.000.000	25 Persen	20.000.000	30 Persen	20.000.000	30 Persen	60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	48 Persen	75 Persen	90.000.000	80 Persen	110.000.000	85 Persen	120.000.000	85 Persen	320.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang telah diakui	10 Persen	10 Persen	20.000.000	10 Persen	50.000.000	10 Persen	50.000.000	10 Persen	120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan	10 Persen	10 Persen	950.000.000	10 Persen	500.000.000	10 Persen	500.000.000	10 Persen	1.950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diterima masyarakat	10 Persen	10 Persen	300.000.000	10 Persen	108.000.000	10 Persen	150.000.000	10 Persen	558.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	50 Persen	60 Persen	40.000.000	70 Persen	60.000.000	80 Persen	60.000.000	80 Persen	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	30 Persen	30 Persen	3.520.000.000	40 Persen	4.465.840.000	50 Persen	4.473.640.000	50 Persen	12.459.480.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN			600.000.000		600.000.000		600.000.000		1.800.000.000		
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	38,47 Persen	40 Persen	0	60 Persen	0	80 Persen	0	80 Persen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen	98,07 Persen	98,50 Persen	200.000.000	99,00 Persen	200.000.000	99,50 Persen	200.000.000	99,50 Persen	600.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	93,67 Persen	95 Persen	0	97 Persen	0	99 Persen	0	99 Persen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen catatan	70,25 Persen	75 Persen	200.000.000	80 Persen	200.000.000	85 Persen	200.000.000	85 Persen	600.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Perekaman KTP Elektronik	99,40 Persen	99,50 Persen	200.000.000	99,70 Persen	200.000.000	99,90 Persen	200.000.000	99,90 Persen	600.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perianjian kerja	12,50 Persen	16 Persen	0	24 Persen	0	32 Persen	0	32 Persen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			2.105.000.000		3.149.536.656		3.149.536.656		8.404.073.312		
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Kantor Desa Dalam Kondisi Baik	60 Persen	70 Persen	450.000.000	80 Persen	1.494.536.656	90 Persen	1.494.536.656	90 Persen	3.439.073.312	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa Sesuai Ketentuan	60 Persen	70 Persen	50.000.000	80 Persen	50.000.000	90 Persen	50.000.000	90 Persen	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Lengkap Dan Baik	97 Persen	98 Persen	325.000.000	99 Persen	325.000.000	100 Persen	325.000.000	100 Persen	975.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa Yang Mendapat Akses Teknologi Tepat Guna	8 Persen	19 Persen	1.280.000.000	49 Persen	1.280.000.000	78 Persen	1.280.000.000	78 Persen	3.840.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			4.858.068.836		5.532.356.732		5.643.003.867		16.033.429.435		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	85 Persen	98 Persen	474.800.000	98 Persen	579.262.947	98 Persen	590.848.206	98 Persen	1.644.911.153	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	85 Persen	98 Persen	1.124.726.500	98 Persen	1.270.940.945	98 Persen	1.296.359.764	98 Persen	3.692.027.209	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence /mCPR)	85 Persen	97 Persen	1.144.242.336	98 Persen	1.292.993.840	100 Persen	1.318.853.717	100 Persen	3.756.089.893	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Keluarga Sejahtera yang difasilitasi	85 Persen	98 Persen	2.114.300.000	98 Persen	2.389.159.000	100 Persen	2.436.942.180	100 Persen	6.940.401.180	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			350.000.000		2.350.000.000		2.350.000.000		5.050.000.000		
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang dibangun dan	100 Persen	100 Persen	150.000.000	100 Persen	1.150.000.000	100 Persen	1.150.000.000	100 Persen	2.450.000.000	Dinas Perhubungan dan Perikanan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan yang terpasang	64 Persen	64 Persen	200.000.000	66 Persen	1.200.000.000	67 Persen	1.200.000.000	67 Persen	2.600.000.000	Dinas Perhubungan dan Perikanan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang dibangun dan	100 Persen	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	Dinas Perhubungan dan Perikanan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			4.255.182.598		4.759.600.857		4.983.097.372		13.997.880.827		
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas	50 Persen	50 Persen	659.000.000	50 Persen	803.800.000	60 Persen	812.414.000	70 Persen	2.275.214.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	81.82 Persen	83 Persen	3.596.182.598	83 Persen	3.955.800.857	85 Persen	4.170.683.372	85 Persen	11.722.666.827	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			735.370.000		956.800.000		1.100.320.000		2.792.490.000		
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	0 Persen	100 Persen	190.000.000	100 Persen	231.800.000	100 Persen	266.570.000	100 Persen	688.370.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	0 Persen	100 Persen	26.000.000	100 Persen	40.000.000	100 Persen	46.000.000	100 Persen	112.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM Mengikuti Pendidikan dan	0 Orang	90 Orang	444.370.000	90 Orang	600.000.000	90 Orang	690.000.000	270 Orang	1.734.370.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	0 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	57.500.000	100 Persen	157.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang berkembang	0 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	25.000.000	50 Pelaku Usaha	35.000.000	50 Pelaku Usaha	40.250.000	150 Pelaku Usaha	100.250.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				946.148.100		946.148.100		946.148.100		2.838.444.300	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor	61 Perusahaan	61 Perusahaan	50.000.000	67 Perusahaan	50.000.000	69 Perusahaan	50.000.000	70 Perusahaan	150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor	2 Persen	2 Persen	50.000.000	2 Persen	50.000.000	2 Persen	50.000.000	2 Persen	150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	63.93 Persen	76 Persen	469.500.000	80 Persen	469.500.000	85 Persen	469.500.000	75 Persen	1.408.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi Penanaman Modal yang lengkap, akurat	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanganan Pengaduan yang ditindak lanjuti	100 Persen	100 Persen	326.648.100	100 Persen	326.648.100	100 Persen	326.648.100	100 Persen	979.944.300	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7.650.000.000		7.804.013.909		7.921.163.452		23.375.177.361	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 Persen	100 Persen	1.350.000.000	100 Persen	1.530.000.000	100 Persen	1.647.149.543	100 Persen	4.527.149.543	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah dibina dan	100 Persen	100 Persen	6.000.000.000	100 Persen	5.974.013.909	100 Persen	5.974.013.909	100 Persen	17.948.027.818	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	100 Persen	100 Persen	300.000.000	100 Persen	300.000.000	100 Persen	300.000.000	100 Persen	900.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			100.000.000		110.000.000		113.300.000		323.300.000			
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	100.000.000	100 Persen	110.000.000	100 Persen	113.300.000	100 Persen	323.300.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			100.000.000		110.000.000		113.300.000		323.300.000			
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI	Cukup Baik Predikat	Baik Predikat	100.000.000	Baik Predikat	110.000.000	Baik Predikat	113.300.000	Baik Predikat	323.300.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.360.000.000		2.250.000.000		2.300.000.000		5.910.000.000			
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang lestari	70 Persen	80 Persen	1.160.000.000	90 Persen	1.900.000.000	100 Persen	1.950.000.000	100 Persen	5.010.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan	100 Persen	100 Persen	200.000.000	100 Persen	350.000.000	100 Persen	350.000.000	100 Persen	900.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			1.050.000.000		1.102.500.000		1.159.325.000		3.311.825.000			
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Keperpustakaan (Orang)	1691 Orang	1776 Orang	1.050.000.000	2000 Orang	1.102.500.000	2200 Orang	1.159.325.000	5976 Orang	3.311.825.000	Sekretariat Daerah
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			444.000.000		488.400.000		537.240.000		1.469.640.000			
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	17 Persen	50 Persen	225.000.000	60 Persen	247.500.000	70 Persen	272.250.000	70 Persen	744.750.000	Sekretariat Daerah
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip daerah yang dilindungi dan diselamatkan	90 Persen	50 Persen	219.000.000	90 Persen	240.900.000	90 Persen	264.990.000	90 Persen	724.890.000	Sekretariat Daerah
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			625.000.000		1.650.000.000		1.675.000.000		3.950.000.000			
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap)	6511,7 Ton	6511,7 Ton	300.000.000	6781 Ton	800.000.000	6602,48 Ton	800.000.000	6602,48 Ton	1.900.000.000	Dinas Perhubungan dan Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan (budidaya)	5.988,64 Ton	5.988,64 Ton	300.000.000	6.288,07 Ton	800.000.000	6.602,48 Ton	800.000.000	6.602,48 Ton	1.900.000.000	Dinas Perhubungan dan Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Ragam Produk Hasil Perikanan (jenis)	3 Jenis	3 Jenis	25.000.000	3 Jenis	50.000.000	3 Jenis	75.000.000	3 Jenis	150.000.000	Dinas Perhubungan dan Perikanan
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.909.302.906		2.450.000.000		2.550.000.000		6.909.302.906			
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata Yang Memenuhi	100 Persen	100 Persen	1.450.000.000	100 Persen	1.850.000.000	100 Persen	1.950.000.000	100 Persen	5.250.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase hasil pemasaran pariwisata	100 Persen	100 Persen	300.000.000	100 Persen	380.000.000	100 Persen	380.000.000	100 Persen	1.060.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi	100 Persen	100 Persen	159.302.906	100 Persen	220.000.000	100 Persen	220.000.000	100 Persen	599.302.906	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			3.284.500.000		5.517.250.000		5.727.075.000		14.528.825.000			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Capaian produktivitas pertanian perhektar	70 Persen	80 Persen	986.500.000	85 Persen	1.986.500.000	90 Persen	1.980.600.000	90 Persen	4.953.600.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang memadai	35,86 Persen	35,89 Persen	960.500.000	35,92 Persen	1.964.500.000	35,95 Persen	1.968.600.000	35,95 Persen	4.893.600.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	100 Persen	250.000.000	100 Persen	350.000.000	100 Persen	450.000.000	100 Persen	1.050.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang ditindaklanjuti	40 Persen	40 Persen	687.500.000	46 Persen	716.250.000	48 Persen	767.875.000	48 Persen	2.171.625.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah Usaha dan Kelembagaan Kelompok Tani yang Berkembang	85.24 Persen	86.44 Persen	400.000.000	88.58 Persen	500.000.000	90.78 Persen	560.000.000	90.78 Persen	1.460.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1.365.000.000		1.770.000.000		1.875.000.000		5.010.000.000		
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan	0 Persen	100 Persen	15.000.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	23.000.000	100 Persen	58.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	0 Persen	100 Persen	20.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	230.000.000	100 Persen	450.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	0 Persen	100 Persen	770.000.000	100 Persen	870.000.000	100 Persen	880.000.000	100 Persen	2.520.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	0 Persen	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda	0 Persen	100 Persen	500.000.000	100 Persen	600.000.000	100 Persen	650.000.000	100 Persen	1.750.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	2 Komoditas	2 Komoditas	60.000.000	2 Komoditas	80.000.000	3 Komoditas	92.000.000	5 Komoditas	232.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.880.218.253		2.205.206.370		2.235.428.189		6.320.852.812		
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	6.4 Persen	6.4 Persen	1.533.433.408	6.6 Persen	1.851.586.214	6.8 Persen	1.869.739.020	6.8 Persen	5.254.758.642	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	2 Persen	2 Persen	82.482.900	3 Persen	84.084.509	4 Persen	85.686.118	4 Persen	252.253.527	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jenis Informasi Industri yang tersedia	80 Persen	80 Persen	264.301.945	90 Persen	269.535.647	100 Persen	280.003.051	100 Persen	813.840.643	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			234.593.139		236.915.844		239.238.548		710.747.531		
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0 Kawasan	1 Kawasan	234.593.139	0 Kawasan	0	0 Kawasan	0	1 Kawasan	234.593.139	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0 Kawasan	1 Kawasan	0	1 Kawasan	236.915.844	1 Kawasan	239.238.548	1 Kawasan	476.154.392	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			12.592.909.763		14.223.578.382		9.303.705.414		36.120.193.559		
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	100 Persen	10.238.461.484	100 Persen	11.751.407.600	100 Persen	6.733.977.983	100 Persen	28.723.847.067	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	2.354.448.279	100 Persen	2.472.170.782	100 Persen	2.569.727.431	100 Persen	7.396.346.492	Sekretariat Daerah
4	02		SEKRETARIAT DPRD			7.715.740.598		14.812.522.171		14.832.522.171		37.360.784.940		
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Tindakan/juati Hasil Rapat-rapat DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD	100 Persen	100 Persen	7.715.740.598	100 Persen	14.812.522.171	100 Persen	14.832.522.171	100 Persen	37.360.784.940	Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	01		PERENCANAAN			2.375.783.972		4.274.201.467		4.686.087.716		11.336.073.155		
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu penyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai tata cara peraturan-perundang	100 Persen	100 Persen	983.034.602	100 Persen	2.011.903.267	100 Persen	2.215.553.715	100 Persen	5.210.491.584	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen Renstra dan Renja yang	100 Persen	100 Persen	1.392.749.370	100 Persen	2.262.298.200	100 Persen	2.470.534.001	100 Persen	6.125.581.571	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	02		KEUANGAN			332.996.841.013		341.364.846.120		349.949.752.586		1.024.311.439.719		
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan pengelolaan	100 Persen	100 Persen	327.694.825.827	100 Persen	335.072.427.640	100 Persen	343.410.314.136	100 Persen	1.006.177.567.603	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan aset	100 Persen	100 Persen	1.132.557.849	100 Persen	1.197.852.980	100 Persen	1.317.638.278	100 Persen	3.648.049.107	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pertumbuhan realisasi PAD (%)	7 Persen	7 Persen	4.169.457.337	8 Persen	5.094.565.500	9 Persen	5.221.800.172	9 Persen	14.485.823.009	Badan Pendapatan Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN			1.728.124.220		2.041.949.899		2.246.144.889		6.016.219.008		
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kepegawaian daerah yang dikeluarkan tepat waktu	80 Persen	80 Persen	1.728.124.220	80 Persen	2.041.949.899	80 Persen	2.246.144.889	80 Persen	6.016.219.008	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi teknis, manajerial dan	80 Persen	80 Persen	815.715.634	80 Persen	1.625.000.000	80 Persen	1.671.370.263	80 Persen	4.112.085.897	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil Penelitian Pengembangan dan Inovasi daerah yang ditindaklanjuti/diterapkan	85 Persen	85 Persen	2.400.000.000	85 Persen	2.500.000.000	85 Persen	2.500.000.000	85 Persen	7.400.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	01	INSPEKTORAT DAERAH												
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2 Level	3 Level	2.225.019.000	4 Level	3.257.269.190	4 Level	3.289.841.882	4 Level	8.772.130.072	Inspektorat
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang tidak mendapat temuan hasil pengawasan yang material	85 Persen	85 Persen	0	85 Persen	0	85 Persen	0	85 Persen	0	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat kapabilitas APIP	3 Level	3 Level	378.940.625	4 Level	483.730.031	4 Level	488.567.331	4 Level	1.351.237.987	Inspektorat
7		UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01	KECAMATAN												
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	90 Persen	100 Persen	115.000.000	100 Persen	115.000.000	100 Persen	115.000.000	100 Persen	345.000.000	Kecamatan Katingan Kuala
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 Persen	90 Persen	38.225.746	90 Persen	38.225.746	90 Persen	45.000.000	90 Persen	121.451.492	Kecamatan Kumpang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	90 Persen	100 Persen	220.000.000	100 Persen	220.000.000	100 Persen	230.000.000	100 Persen	670.000.000	Kecamatan Katingan Tengah
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 Persen	100 Persen	37.279.520	100 Persen	39.143.496	100 Persen	41.100.671	100 Persen	117.523.687	Kecamatan Bukit Raya
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 Persen	100 Persen	55.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	170.000.000	Kecamatan Katingan Hilir
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	85 Persen	100 Persen	55.000.000	100 Persen	56.000.000	100 Persen	58.800.000	100 Persen	169.800.000	Kecamatan Tasik Payawan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	90 Persen	100 Persen	77.000.000	100 Persen	77.000.000	100 Persen	77.000.000	100 Persen	231.000.000	Kecamatan Katingan Hulu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	95 Persen	95 Persen	78.000.000	95 Persen	83.500.000	95 Persen	87.500.000	95 Persen	249.000.000	Kecamatan Petak Malai
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	95 Persen	95 Persen	31.791.100	95 Persen	32.600.000	95 Persen	35.000.000	95 Persen	99.391.100	Kecamatan Mendawai
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	85 Persen	100 Persen	66.240.900	100 Persen	69.552.945	100 Persen	73.030.591	100 Persen	208.824.436	Kecamatan Marikit
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 Persen	90 Persen	26.900.000	90 Persen	28.400.000	90 Persen	29.000.000	90 Persen	84.300.000	Kecamatan Pulau Malan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 Persen	100 Persen	51.359.256	100 Persen	54.359.256	100 Persen	54.359.256	100 Persen	160.077.768	Kecamatan Sanaman Mantikei
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	90 Persen	100 Persen	45.335.293	100 Persen	45.335.293	100 Persen	45.335.293	100 Persen	136.005.879	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100 Persen	100 Persen	9.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	12.000.000	100 Persen	31.000.000	Kecamatan Sanaman Mantikei
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	90 Persen	90 Persen	321.302.370	90 Persen	321.302.370	90 Persen	321.302.370	90 Persen	963.907.110	Kecamatan Katingan Hulu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100 Persen	100 Persen	28.685.000	100 Persen	29.850.000	100 Persen	35.000.000	100 Persen	93.535.000	Kecamatan Petak Malai
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100 Persen	90 Persen	10.000.000	90 Persen	10.000.000	90 Persen	15.000.000	90 Persen	35.000.000	Kecamatan Pulau Malan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	85 Persen	90 Persen	2.000.000	90 Persen	4.000.000	90 Persen	4.400.000	90 Persen	10.400.000	Kecamatan Marikit
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	90 Persen	90 Persen	642.604.741	90 Persen	642.604.741	90 Persen	642.604.741	100 Persen	1.927.814.223	Kecamatan Katingan Kuala
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	N/A Persen	100 Persen	15.000.000	100 Persen	15.750.000	100 Persen	16.537.500	100 Persen	47.287.500	Kecamatan Bukit Raya

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100 Persen	100 Persen	687.602.370	100 Persen	687.602.370	100 Persen	697.602.370	100 Persen	2.072.807.110	Kecamatan Katingan Hilir
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100 Persen	100 Persen	321.302.370	100 Persen	321.302.370	100 Persen	321.302.370	100 Persen	963.907.110	Kecamatan Katingan Tengah
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	90 Persen	90 Persen	30.000.000	90 Persen	30.000.000	90 Persen	35.000.000	90 Persen	95.000.000	Kecamatan Mendawai
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	85 Persen	90 Persen	2.000.000	90 Persen	4.000.000	90 Persen	4.400.000	90 Persen	10.400.000	Kecamatan Tasik Payawan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	90 Persen	90 Persen	321.302.370	90 Persen	321.302.370	90 Persen	321.302.370	100 Persen	963.907.110	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100 Persen	90 Persen	10.000.000	90 Persen	10.000.000	90 Persen	15.000.000	90 Persen	35.000.000	Kecamatan Kamipang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	85 Persen	100 Persen	197.064.718	100 Persen	221.500.000	100 Persen	226.925.000	100 Persen	645.489.718	Kecamatan Tasik Payawan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	228.100.000	100 Persen	228.100.000	100 Persen	256.000.000	100 Persen	712.200.000	Kecamatan Petak Malai
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	241.214.900	100 Persen	242.000.000	100 Persen	255.000.000	100 Persen	738.214.900	Kecamatan Mendawai
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90 Persen	100 Persen	162.300.190	100 Persen	162.300.190	100 Persen	233.300.000	100 Persen	557.900.380	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90 Persen	100 Persen	338.000.000	100 Persen	338.000.000	100 Persen	338.000.000	100 Persen	1.014.000.000	Kecamatan Katingan Hulu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	85 Persen	85 Persen	274.076.234	85 Persen	283.032.925	85 Persen	310.649.950	85 Persen	867.759.109	Kecamatan Marikit
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	294.504.000	100 Persen	296.072.518	100 Persen	294.504.000	100 Persen	885.080.518	Kecamatan Katingan Tengah
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	97.80 Persen	90 Persen	299.590.000	90 Persen	300.500.000	90 Persen	310.500.000	90 Persen	910.590.000	Kecamatan Pulau Malan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	97.80 Persen	90 Persen	219.578.716	90 Persen	219.578.716	90 Persen	250.000.000	90 Persen	689.157.432	Kecamatan Kamipang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90 Persen	100 Persen	208.000.000	100 Persen	208.000.000	100 Persen	208.000.000	100 Persen	624.000.000	Kecamatan Katingan Kuala

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	85 Persen	85 Persen	578.000.000	85 Persen	583.000.000	85 Persen	638.000.000	85 Persen	1.799.000.000	Kecamatan Katingan Hilir
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	280.000.000	100 Persen	294.000.000	100 Persen	308.700.000	100 Persen	882.700.000	Kecamatan Bukit Raya
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	261.469.910	100 Persen	265.469.910	100 Persen	271.469.910	100 Persen	798.409.730	Kecamatan Sanaman Mantikei
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	85 Persen	100 Persen	65.107.000	100 Persen	68.362.350	100 Persen	77.562.500	100 Persen	211.031.850	Kecamatan Marikit
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	85 Persen	100 Persen	40.000.000	100 Persen	40.000.000	100 Persen	42.000.000	100 Persen	122.000.000	Kecamatan Tasik Payawan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	100 Persen	100 Persen	100.000.000	100 Persen	110.000.000	100 Persen	120.000.000	100 Persen	330.000.000	Kecamatan Katingan Hilir
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	100 Persen	100 Persen	10.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	30.000.000	Kecamatan Katingan Kuala
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	100 Persen	100 Persen	16.630.000	100 Persen	16.630.000	100 Persen	16.630.000	100 Persen	49.890.000	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	100 Persen	100 Persen	15.000.000	100 Persen	15.000.000	100 Persen	15.067.964	100 Persen	45.067.964	Kecamatan Sanaman Mantikei
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	90 Persen	90 Persen	30.000.000	90 Persen	30.000.000	90 Persen	35.000.000	90 Persen	95.000.000	Kecamatan Mendawai
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	100 Persen	100 Persen	8.800.000	100 Persen	8.800.000	100 Persen	8.800.000	100 Persen	26.400.000	Kecamatan Petak Malai
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
					54.937.200.000		8.599.728.000		11.981.113.045		75.518.041.045			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemangku kepentingan yang dikoordinasikan melalui penguatan ideologi pencasila dan karakter kebangsaan	80 Persen	85 Persen	830.000.000	88 Persen	1.305.588.004	90 Persen	1.043.082.636	90 Persen	3.178.670.640	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan partai politik yang sudah memahami peraturan	85 Persen	88 Persen	52.870.000.000	90 Persen	5.701.939.996	95 Persen	8.440.000.000	95 Persen	67.011.939.996	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang	80 Persen	85 Persen	450.000.000	88 Persen	580.000.000	90 Persen	580.000.000	90 Persen	1.610.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	80 Persen	85 Persen	510.000.000	88 Persen	635.000.000	90 Persen	640.000.000	90 Persen	1.785.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang tindaklanjuti	80 Persen	85 Persen	277.200.000	88 Persen	377.200.000	90 Persen	1.278.030.409	90 Persen	1.932.430.409	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X							661.621.422.324		689.219.703.048		718.620.858.891		2.069.461.984.263	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	3.409.713.349	B Predikat	4.303.841.363	B Predikat	4.202.841.363	B Predikat	11.916.396.075	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	AA Predikat	AA Predikat	7.178.805.551	AA Predikat	8.402.226.939	AA Predikat	8.911.004.998	AA Predikat	24.492.037.488	Inspektorat
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	7.154.119.517	B Predikat	7.625.271.970	B Predikat	8.309.199.595	B Predikat	23.088.591.082	Dinas Perhubungan dan Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	11.293.180.098	B Predikat	11.823.837.192	BB Predikat	12.089.045.538	BB Predikat	35.206.062.828	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	20.386.915.155	B Predikat	25.170.721.665	B Predikat	34.443.542.648	B Predikat	80.001.179.468	Badan Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	BB Predikat	BB Predikat	2.948.876.301	A Predikat	2.935.177.222	A Predikat	3.059.150.121	A Predikat	8.943.203.644	Kecamatan Tasik Payawan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	N/A Predikat	B Predikat	3.425.954.869	BB Predikat	3.435.693.820	A Predikat	3.569.427.858	A Predikat	10.431.076.547	Kecamatan Kampang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	6.281.242.723	BB Predikat	6.335.907.792	BB Predikat	6.580.710.500	BB Predikat	19.197.861.015	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	A Predikat	C Predikat	2.762.689.157	B Predikat	2.769.903.763	B Predikat	2.898.035.328	B Predikat	8.430.628.248	Kecamatan Sanaman Mantikei
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	2.539.171.107	B Predikat	2.557.628.247	BB Predikat	2.711.172.640	B Predikat	7.807.971.994	Kecamatan Bukit Raya
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	A Predikat	B Predikat	2.544.220.061	BB Predikat	2.544.220.061	BB Predikat	2.641.423.301	BB Predikat	7.729.863.423	Kecamatan Marikit
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	11.770.521.974	B Predikat	13.916.087.619	B Predikat	14.987.374.304	BB Predikat	40.673.983.897	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	BB Predikat	BB Predikat	4.715.804.662	A Predikat	4.718.610.198	A Predikat	4.889.425.165	A Predikat	14.323.840.025	Kecamatan Katingan Tengah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	5.215.115.124	BB Predikat	5.216.105.244	BB Predikat	5.329.336.041	BB Predikat	15.760.556.409	Kecamatan Katingan Hilir
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	2.500.080.616	B Predikat	2.507.992.394	B Predikat	2.622.917.464	B Predikat	7.630.990.474	Kecamatan Petak Malai
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	8.000.000.000	B Predikat	8.040.423.862	B Predikat	8.235.556.448	B Predikat	24.275.980.310	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	4.609.935.674	B Predikat	5.479.101.650	B Predikat	5.979.101.651	B Predikat	16.068.138.975	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	5.527.593.285	B Predikat	6.361.880.809	B Predikat	6.555.437.738	BB Predikat	18.444.911.832	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	BB Predikat	BB Predikat	6.592.292.109	A Predikat	8.160.058.480	A Predikat	8.521.901.984	A Predikat	23.274.252.573	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	N/A Predikat	CC Predikat	292.203.422.190	B Predikat	293.034.402.190	BB Predikat	294.409.902.190	B Predikat	879.647.726.570	Dinas Pendidikan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	5.870.979.873	BB Predikat	5.880.319.555	A Predikat	6.118.631.244	A Predikat	17.869.930.672	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	N/A Predikat	B Predikat	3.497.016.047	BB Predikat	3.508.443.097	A Predikat	3.623.095.124	A Predikat	10.628.554.268	Kecamatan Pulau Malan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	BB Predikat	14.097.011.873	BB Predikat	12.843.056.165	BB Predikat	13.812.607.200	BB Predikat	40.752.675.238	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	AA Predikat	B Predikat	3.618.615.442	BB Predikat	3.620.279.220	BB Predikat	3.728.606.430	BB Predikat	10.967.501.092	Kecamatan Katingan Kuala
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	AA Predikat	A Predikat	104.554.788.319	A Predikat	104.497.038.320	A Predikat	105.895.120.245	A Predikat	314.946.946.884	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	2.536.078.655	B Predikat	2.547.309.925	B Predikat	2.643.984.335	B Predikat	7.727.372.915	Kecamatan Mendawai
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	100 Angka	99 Angka	5.933.108.392	100 Angka	6.789.890.378	100 Angka	6.902.139.979	100 Angka	19.625.138.749	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	26.616.453.517	B Predikat	27.976.342.541	B Predikat	29.292.624.585	B Predikat	83.885.420.643	Sekretariat DPRD
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	AA Predikat	AA Predikat	4.756.594.281	AA Predikat	5.444.244.840	AA Predikat	5.625.850.338	AA Predikat	15.826.689.459	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	5.011.050.000	B Predikat	6.130.155.000	B Predikat	6.341.670.500	B Predikat	17.482.875.500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	AA Predikat	AA Predikat	4.460.596.642	AA Predikat	6.002.664.424	AA Predikat	6.281.567.847	AA Predikat	16.744.828.913	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	A Predikat	B Predikat	5.038.821.835	B Predikat	5.050.870.500	B Predikat	5.186.190.298	A Predikat	15.275.882.633	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	8.519.274.597	BB Predikat	9.069.274.597	A Predikat	9.675.274.597	A Predikat	27.263.823.791	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	0 Predikat	BB Predikat	6.537.961.219	BB Predikat	7.733.855.204	A Predikat	7.856.708.982	A Predikat	22.128.525.405	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	3.858.101.356	BB Predikat	4.558.101.356	A Predikat	4.834.785.003	A Predikat	13.250.987.715	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	5.943.258.907	B Predikat	6.187.889.556	B Predikat	6.561.263.106	B Predikat	18.692.411.569	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	AA Predikat	B Predikat	3.567.551.323	BB Predikat	3.575.936.705	A Predikat	3.720.976.267	A Predikat	10.864.464.295	Kecamatan Katingan Hulu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	AA Predikat	B Predikat	32.006.308.033	BB Predikat	37.168.571.584	BB Predikat	44.193.085.297	BB Predikat	113.367.964.914	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat	B Predikat	4.138.198.491	B Predikat	5.296.367.601	BB Predikat	5.380.170.639	BB Predikat	14.814.736.731	Dinas Sosial
							1.508.354.891.387		1.557.326.540.442		1.617.506.314.378		4.683.187.746.207	



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Katingan yang menjadi instrumen pengukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator kinerja merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan adalah indikator kinerja sasaran sebagaimana dimuat dalam Bab V dokumen ini dan disajikan dalam Tabel 8.1. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sementara itu, IKK yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disajikan pada Tabel 8.3 berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional disajikan pada Tabel 8.2

Penentuan target kinerja daerah tahun 2024 sampai dengan 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan capaian pembangunan tahun - tahun sebelumnya, dan secara khusus tahun 2020 setelah adanya pandemi Covid-19. Dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap kondisi dalam negeri menyebabkan pemerintah pusat dan hampir seluruh pemerintah daerah melakukan penyesuaian target-target pembangunan sejak tahun 2020 lalu. Hal ini dilakukan menyusul adanya penerapan kebijakan untuk refocusing dan realokasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai tahun 2020 sampai dengan 2021 yang diarahkan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan diikuti dengan pemulihan dampak pandemi melalui pemulihan dan penguatan ekonomi daerah serta penguatan jaring pengaman sosial.



Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL		RKPD 2023	TARGET			KONDISI AKHIR
				2021	2022		2024	2025	2026	
1	Memperkuat struktur ekonomi daerah yang maju dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	2,90	5,58	5,82	5,84	5,90	6,00	6,00
		PDRB per Kapita	Juta Rp.	55,7	60,07	56,95	57,2	58,5	59,2	59,2
1.1	Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,35	1,47	NA*	2,36	2,37	2,50	2,50
		Persentase Kecamatan Rawan Pangan	%	7,7	7,7	NA*	7,7	7,7	7,7	7,7
		LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Resparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	1,17	6,85	NA*	1,20	1,25	1,30	1,30
		LPE Kategori Industri Pengolahan	%	3,07	7,93	NA*	3,12	3,15	3,18	3,18
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	NA	NA	NA*	2,28	2,43	2,77	2,77
		Persentase pertumbuhan nilai investasi	%	0,5	0,5	NA*	0,6	0,8	1	1
2	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	68,89	69,74	70,09	69,80	69,85	70,00	70,00
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	85,72	85,38	86,03	85,80	86,00	86,20	86,20
2.1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,68	8,78	8,97	8,80	8,82	8,84	8,84
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,81	12,97	13,38	12,99	13,01	13,02	13,02
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	65,87	66,16	67,52	67,16	67,51	68,02	68,02
		Prevalensi Stunting	%	21,22	20	16	14	12	10	10
		Persentase penduduk miskin	%	5,25	5,50	4,90	4,95	4,90	4,85	4,85
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,50	5,33	4,60	4,90	4,70	4,50	4,50
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	85,56	85,72	86,03	85,80	86,00	86,20	86,20



NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL		RKPD 2023	TARGET			KONDISI AKHIR
				2021	2022		2024	2025	2026	
3	Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata	Indeks Infrastruktur	angka	NA	NA	NA*	29,54	30,23	30,92	30,92
		Persentase kecamatan yang terhubung dengan poros kabupaten	%	76,07	76,07	85	81,00	81,00	81,00	81,00
3.1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	35,75	36,60	41,47	40,33	45,54	48,03	48,03
		Persentase jembatan dalam kondisi mantap	%	45,68	80,25	72,82	75,31	77,78	80,25	80,25
		Persentase desa yang terlayani sektor transportasi	%	NA	NA	NA*	20	25	30	30
		Persentase RT yang memiliki akses air minum layak	%	NA	NA	58,4	34,57	34,69	34,82	34,82
		Persentase RT yang memiliki akses sanitasi layak	%	NA	NA	NA*	34,78	36,02	37,26	37,26
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap	%	37,81	39,34	NA*	43,17	46,05	49,37	49,37
		Persentase permukiman kumuh yang ditangani	%	53	60	NA*	70	78	85	85
4	Terwujudnya kondisifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan).	Indeks Kerukunan Umat Beragama	angka	NA	NA	NA*	77,07	77,12	77,17	77,17
		Persentase penyelesaian kasus SARA	%	100	100	100	100	100	100	100
4.1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal.	Persentase penurunan kasus kriminal	%	50	50	NA*	50	50	50	50
		Persentase penanganan kasus K3	%	100	100	NA*	100	100	100	100
		Persentase konflik sosial yang ditangani	%	100	100	NA*	100	100	100	100
		Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	9	47	100	60	73	100	100
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	73.45	74.66	76,85	74.62	74,97	75.38	75.38
5.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	50.67	50.67	60,97	52.50	52.75	53.00	52.90
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	87.32	90.21	90,00	89.00	89.50	90.00	90.00



NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL		RKPD	TARGET			KONDISI AKHIR
				2021	2022		2023	2024	2025	
		Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	86.92	87.10	79,00	86.00	86.25	86.75	87.55
5.2	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	angka	163,20	157,71	NA*	144,40	143,40	142,40	142,40
6	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks RB	predikat huruf	C	C	B	CC	CC	B	B
6.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	predikat huruf	C	CC	BB	CC	B	BB	BB
		Nilai LPPD	kriteria	Sedang	NA	NA*	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Opini BPK	predikat huruf	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai MCP	poin	81	83	NA*	84	85	86	86
6.2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	skor	80,56	84,81	A	85,00	85,50	86,00	86,00
		Indeks SPBE	predikat	Cukup	Cukup	NA*	Cukup	Baik	Baik	Baik
		Persentase desa berkembang	%	42	50	NA*	63	69	70	70

NA* : tidak tersedia , merupakan indikator baru



Penetapan indikator kinerja makro dilakukan untuk memberikan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang akan menjadi bahan evaluasi kinerja pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Realisasi dan proyeksi inidkator kinerja makro Kabupaten Katingan untuk periode 5 (lima) tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2026 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 8.2
Realisasi Kinerja Makro Tahun 2021-2022 dan Target Kinerja Makro
Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Makro	Realisasi		RKPD	Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	68,89	69,74	70,90	69,80	69,85	70,00
2	Angka kemiskinan (%)	5,25	5,50	4,90	4,95	4,90	4,85
3	Angka Pengangguran (%)	5,50	5,33	4,60	4,90	4,70	4,50
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,90	5,58	5,82	5,84	5,90	6,00
5	Pendapatan per kapita/PDRB per kapita (juta Rp):						
	– ADHB	55,7	60,07	56,95	57,2	58,5	59,2
	– ADHK	31,2	32,7	31,44	32,2	33,5	34,2
6	Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio (poin)	0,230	0.250	0.250	0,228	0,226	0,224

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kabupaten Katingan tahun 2024 sampai dengan 2026 sebagaimana dimuat pada Tabel 8.3 IKK didistribusikan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu : Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah memuat indikator kinerja *impact*, sedangkan Aspek Pelayanan Umum memuat indikator kinerja kunci *outcome*. Hal ini dimaksudkan agar terwujud arsitektur kinerja secara *cascade* dari kinerja yang paling tinggi ke yang rendah pada RPD Tahun 2024-2026.



Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET			KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB	%	2,90	5,58	5,84	5,90	6,00	6,00
2	PDRB per kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	juta Rp.	55,7	60,7	57,2	58,5	59,2	59,2
3	Indeks Gini	poin	0,230	0,250	0,228	0,226	0,224	0,224
4	Persentase penduduk miskin	%	5,25	5,50	4,95	4,90	4,85	4,85
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	68,89	69,74	69,80	69,85	70,00	70,00
6	Angka Melek Huruf	%	99,78	98,34	99,41	99,43	99,45	99,45
7	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,68	8,78	8,80	8,82	8,84	8,84
8	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,81	12,97	12,99	13,01	13,02	13,02
9	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	65,87	66,16	67,16	67,51	68,02	68,02
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,38	65,9	64,97	65,17	65,37	65,37
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,50	5,33	4,90	4,70	4,50	4,50
12	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	%	27,46	26,51	27,65	28,05	28,45	28,45
13	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB	%	7,30	7,62	7,84	8,11	8,39	8,39
14	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	16,59	17,02	17,19	17,22	17,24	17,24
II.	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Bukan Makanan)	%	42,37	41,16	42,5	42,93	43,35	43,35



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET			KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Indeks Kemahalan Konstruksi	poin			93,00	92,50	92,00	92,00
3	Persentase desa berstatus "mandiri" terhadap total desa	%	2	2	3	4	4	4.00
4	Batas jumlah kasus kriminalitas	kasus	60	50	50	50	50	50.00
5	Rasio Ketergantungan	%	44,50	42,82	42	41	40	40.00
6	Nilai LPPD	predikat	sedang	n.a	sedang	tinggi	tinggi	tinggi
III. ASPEK PELAYANAN UMUM								
A. Fokus Layanan Urusan Wajib								
a). Pendidikan								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	22.74	64.75	73.00	75.00	77.00	77.00
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	%	96.19	97.52	91.12	91.82	92.12	92.12
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama	%	84.50	66.90	65.50	65.75	65.90	65.90
4	Persentase Satuan PAUD yang mendapatkan Akreditasi B	%	53.92	0.44	5.00	6.00	7.00	7.00
5	Rata-rata kompetensi literasi SD berdasarkan asesmen nasional	nilai	n.a	1.63	2.00	2.10	2.15	2.15
6	Rata-rata kompetensi numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	nilai	n.a	1.49	2.00	2.10	2.15	2.15
7	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	nilai	n.a	1.68	1.70	1.72	1.75	1.75
8	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	nilai	n.a	1.59	1.60	1.65	1.68	1.68



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET			KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b).	Kesehatan							
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	rasio	151.69	170.76	75	70	65	65.00
2	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	rasio	20.1	8.53	4.50	4.00	3.50	3.50
3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	54.1	61.31	85	87	88	88.00
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	21.22	20	14	12	10	10.00
5	Prevalensi <i>Wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	6.81	6.6	6.1	6	5	5.00
6	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	52.21	61.32	100	100	100	100.00
7	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	85.00	78.54	100	100	100	100.00
8	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	53.48	62.9	100	100	100	100.00
9	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	52.24	90.47	100	100	100	100.00
10	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	48.97	85.7	100	100	100	100.00
11	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	28.16	63.17	100	100	100	100.00
12	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	70.7	83.22	100	100	100	100.00
13	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	78.92	92.02	100	100	100	100.00
14	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	81.3	90.6	100	100	100	100.00
15	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	78.67	80.72	100	100	100	100.00



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET			KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	57.39	83.12	100	100	100	100.00
17	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi "minimal madya"	%	0	50	50	100	100	100.00
18	Rata-rata lama waktu tunggu pasien di pelayanan rujukan terutama pelayanan ICU, ruang operasi, dan pelayanan spesifik lainnya	hari	1	1	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
19	Rata-rata Bed Occupancy Rate/BOR RSUD	%	23.42	30.63	60	60	60	60.00
20	Persentase ketersediaan obat di Puskesmas	%	83	85	86	87	89	89.00
21	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	40	45	50	55	60	60.00
22	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan pelayanan perizinan	%	80	80	80	80	80	80.00
c). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	32.32	34.26	36.26	38.26	40.26	40.26
2	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	35,75	36,60	40,33	45,54	48,03	48,03
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	21.55	24.75	37.15	39.65	46.28	46.28
4	Persentase infrastruktur pengairan yang baik	%	26.15	28.36	41.35	45.19	48.69	48.69
5	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	37.81	39.34	43.17	46.05	49.37	49.37
6	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	%	8.16	8.26	9.18	9.24	9.37	9.37
7	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	%	1,8	2,53	2,78	2,90	3,02	3,02



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET			KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (jasa kontruksi)	%	100	100	100	100	100	100.00
9	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	80	74.5	80	80	80	80.00
10	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	%	80	74.5	80.00	80.00	80.00	80.00
11	Penyelesaian Materi Teknis RTRW dan/atau RDTR	materi teknis	2	3	5	5	5	5.00
d). Perumahan dan Kawasan Pemukiman								
1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100	100	12,83	43,73	43,44	43,44
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	0,013	0,063	70	78	85	85.00
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	76,8	76,91	28	25	23,91	23,91
4	Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	31,79	31,81	35	38	40	40.00
5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	16,29	11,60	4,68	4,68	4,68	4,68
e). Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100.00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100.00
3	Persentase SOP yang dilaksanakan dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusakan)	%	100	100	100	100	100	100.00



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET			KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	massa) yang telah ditetapkan							
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100.00
5	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15	15	15	15	15	15.00
6	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	38	38	76	84	92	92.00
7	Persentase WN yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	0.44	-	100	100	100	100.00
8	Persentase WN yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	31	-	100	100	100	100.00
9	Persentase WN yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	-	100	100	100	100.00
f).	Sosial							
1	Cakupan pemutahiran/pemenuhan data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	60	70	82	84	86	86.00
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	%	62	65	70	75	80	80.00
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	80	90	80	100	100	100.00
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	90	100	100	100	100	100.00
g).	Tenaga Kerja							
1	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya yang ditempatkan	%	12.5	14.58	15	16	17	17.00



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET			KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	82.92	93	94	95	95	95.00
3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	%	0	0	30	35	40	40.00
h). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Rasio KDRT	%	0.04	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	85	85	85	85.00
3	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	80	85	85	85	85	85.00
4	Poin pemenuhan Kabupaten Layak Anak	poin	704.23	195.75	610	630	650	650.00
i). Pangan								
1	Skor PPH	%	82.5	79.5	80	81	82	82.00
2	Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	0	0	4.0	4.5	5.0	5.00
3	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	%	19.45	61	75	85	100	100.00
4	Jumlah ragam pangan dan pangan olahan	poin	48	48	75	85	100	100.00
j). Pertanian								
1	Persentase Tanah untuk fasilitas umum yang disediakan	%	n.a	n.a	80	80	80	80.00
2	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	n.a	n.a	100	100	100	100.00
3	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	n.a	n.a	60	80	100	100.00



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET			KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
k). Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	50.67	50.67	52.50	52.75	53.00	53.00
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	87.32	90.21	89.00	89.50	90.00	90.00
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	86.92	87.10	86.00	86.25	86.75	86.75
4	Persentase terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	%	64	70	75	80	85	85.00
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	56	48.57	75	80	85	85.00
l). Kependudukan dan Catatan Sipil								
1	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100.00
2	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100.00
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	%	93.28	93.67	95	97	99	99.00
4	Persentase penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	100	100.00
m). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang dibina	%	n.a	n.a	85	90	100	100.00
2	Persentase PKK yang dibina	%	n.a	n.a	85	90	100	100.00
3	Persentase BUMDes yang dibina	%	n.a	n.a	85	90	100	100.00



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET			KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n).	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Angka kelahiran total (Total Fertilyry Rate=TFR) : rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur selama masa reproduksinya	Anak Lahir Hidup	1.44	1.56	1.6	1.7	1.75	1.75
2	Angka pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate=mCPRI : persentase pemakaian kontrasepsi modern di kalangan Pasangan Usia Subur (PUS)	%	94.08	67.68	75.2	75.2	76	76.00
3	Angka Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) : persentase PUS yang tidak ber KB tetapi tidak ingin punya anak atau ingin anak ditunda	%	8.07	35.01	25.2	23.1	20.1	20.10
4	Rata-rata usia kawin pertama pada wanita	tahun	21	22	23	23	23	23.00
o).	Perhubungan							
1	Rasio konektivitas Kabupaten	rasio	n.a	80	85	87	100	100.00
2	V/C ratio di jalan kabupaten	rasio	n.a	67	80	85	90	90.00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Darat	nilai	n.a	67	87	90	90	90.00
p).	Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan Pemda	%	80	80	80	100	100	100.00
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	81.57	82.92	83	84	85	85.00
3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	72.727	81.82	83	83	91	91.00
4	Indeks Keterbukaan Publik	Nilai	73	74,89	75	80,99	90,05	90,05



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET			KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
q).	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
1	Persentase meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	n.a	n.a	100	100	100	100.00
2	Persentase meningkatnya Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%	n.a	n.a	100	100	100	100.00
r).	Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	n.a	2.13	2.25	2.37	2.49	2.49
2	Realisasi Investasi LKPM PMDN/PMA	Milyar Rp.	n.a	224,71	224,71	226,51	228,32	228,32
3	Persentase peningkatan ketaatan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	%	n.a	59.5	65	70	75	75.00
s).	Kepemudaan dan Olahraga							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	na	9.74	10.14	10.28	10.46	10.46
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	na	0.45	0.47	0.48	0.49	0.49
3	Peningkatan Prestasi Olahraga (Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional)	medali	8	18	22	24	26	26.00
t).	Statistik							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	12.5	100	100	100	100	100.00
2	Persentase OPD yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	%	0	45	56	100	100	100.00



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET			KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
u).	Persandian							
1	Indeks KAMI	predikat	n.a	n.a	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik
x).	Kebudayaan							
1	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	50	70	80	90	100	100.00
2	Persentase peningkatan Sanggar Seni Budaya yang aktif	%	10	18.18	25	30	34.62	34.62
y).	Perpustakaan							
1	Jumlah pengunjung ke perpustakaan	orang	n.a	1691	1700	2000	2200	2,200.00
2	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	n.a	6760	7020	7420	7820	7,820.00
3	Jumlah koleksi buku perpustakaan	buku	n.a	33490	34540	35740	36940	36,940.00
z).	Kearsipan							
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	n.a	20	50	60	70	70.00
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	59.84	65	70	75	75	75.00
B.	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
aa).	Kelautan dan Perikanan							
1	Persentase pertumbuhan produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	n.a	2,25	2,25	2.5	2.75	2.75
2	Cakupan bina kelompok usaha perikanan	%	n.a	n.a	100	100	100	100.00



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET			KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bb).	Pariwisata							
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	%	106.07	93.8	2.24	2.37	2.68	2.68
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	-60	4150	20	25	33.33	33.33
3	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	1	1	1	1	1	1.00
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0.1	0.46	0.48	0.49	0.5	0.50
cc).	Pertanian							
1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	3.1	2.7	3.4	4.2	5.3	5.30
2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	3.1	2.7	3.4	4.2	5.3	5.30
3	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	%	3	2.0	2.0	2.75	3.5	3.50
4	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	%	7.2	2.4	3.5	5.6	6.0	6.00
5	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	98	100	100	100	100	100.00
dd).	Perdagangan							
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	n.a	n.a	100	100	100	100.00
2	Tingkat ketersediaan barang kebutuhan pokok di kabupaten	%	n.a	n.a	100	100	100	100.00
ee).	Perindustrian							
1	Cakupan penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	%	45	45	45	45	45	45.00
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	1.01	1.07	1.09	1.11	1.13	1.13



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET			KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ff).	Transmigrasi							
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi	kawasan	0	0	1	1	1	1.00
C.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah							
gg).	Sekretariat Daerah							
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal 71,00	%	n.a	10.5	15	18	25	25.00
2	Nilai LPPD	kriteria	Sedang	n.a	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	n.a	26.71	25	25	25	25.00
4	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	n.a	48.26	45	45	45	45.00
hh).	Sekretariat Dewan							
1	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	92	92	100	100	100	100.00
2	Persentase Legislasi Daerah	%	n.a	n.a	90	90	90	90.00
D.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
ii).	Perencanaan							
1	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	-	-	95	95	95	95.00
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	95	95	95	95	95	95.00
jj).	Penelitian dan Pengembangan							
1	Indeks Inovasi	nilai	82	82	85	85	85	85.00
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	n.a	85	85	85	85	85.00



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET			KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
kk).	Keuangan (Pendapatan)							
1	Pertumbuhan PAD	%	40.25	0	2	2	2	2.00
2	Persentase realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	83.80	42.93	80	83	85	85.00
ll).	Keuangan							
1	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	90.05	80.07	92.87	93.70	94.22	94.22
3	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	14.16	13.7	7.00	6.50	6.00	6.00
mm).	Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan							
1	Rasio jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	90	90	90	90	90	90.00
2	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	%	90	90	90	90	90	90.00
E.	Fungsi Pengawasan							
nn).	Inspektorat Daerah							
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	2	2	3	3	3	3.00
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	4	4	4	4.00
F.	Fungsi Kewilayahan							
oo).	Kecamatan							
1	Cakupan fasilitasi kegiatan Pemerintahan Daerah di wilayah kecamatan	%	100	100	100	100	100	100.00



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET			KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
H. Unsur Pemerintahan Umum								
pp). Kesatuan Bangsa dan Politik								
1	Cakupan pemangku kepentingan yang memahami nilai nilai Pancasila	%	100	100	100	100	100	100.00
2	Cakupan penanganan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100.00



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan, mengingat Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2018- 2023 yang segera berakhir di tahun 2023. Selanjutnya RPD ini akan menjadi pedoman dan arah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Katingan.

Implementasi RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 diperlukan komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten berdasarkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, yang selanjutnya sebagai acuan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
2. Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan agar mengacu pada RPD Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya;
3. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPD yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2024, 2025 dan 2026;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026, sebagai berikut :
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan perangkat daerah periode sebelumnya;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);



- e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
5. RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang termuat didalam tujuan, sasaran, dan program pembangunan;

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS